



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri atas Buku I dan Buku II.

Pasal 3

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA;
 - f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat Rincian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



MULYONO

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021	i
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-65
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-86
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-113
2.2.1 Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	II-113
2.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	II-118
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-212
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021	II-6
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian	

	Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022	II-21
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-25
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	II-26
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-26
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-10
4.3	Strategi dan Arah Kebijakan	IV-13
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	V-1
5.2	Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	V-1
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2022

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.

Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah; *serta*
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan Tahun transisi dalam penyusunan dokumen RKPD karena kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Tengah salah satu Provinsi yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah untuk periode 2021-2026 sehingga Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 pada pasal 147 yaitu “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional”

Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat 2005-2025 Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang maju, damai, sejahtera dan mandiri melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. beberapa isu yang masih menjadi perhatian di masa yang akan datang diantaranya infrastruktur lingkungan permukiman dan perkotaan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan derajat kesehatan

masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Oleh karena itulah tahun 2022 upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan memaksimalkan peran sektor ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa yang melibatkan banyak tenaga kerja serta menjangkau hampir sebagian masyarakat provinsi Sulawesi Tengah.

Pada saat ini tahapan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 telah sampai pada tahap penyusunan Ranwal RKPD Selanjutnya, sesuai dengan pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Ranwal RKPD dimaksud dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan

RKPD Tahun 2022 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Selanjutnya RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun anggaran 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

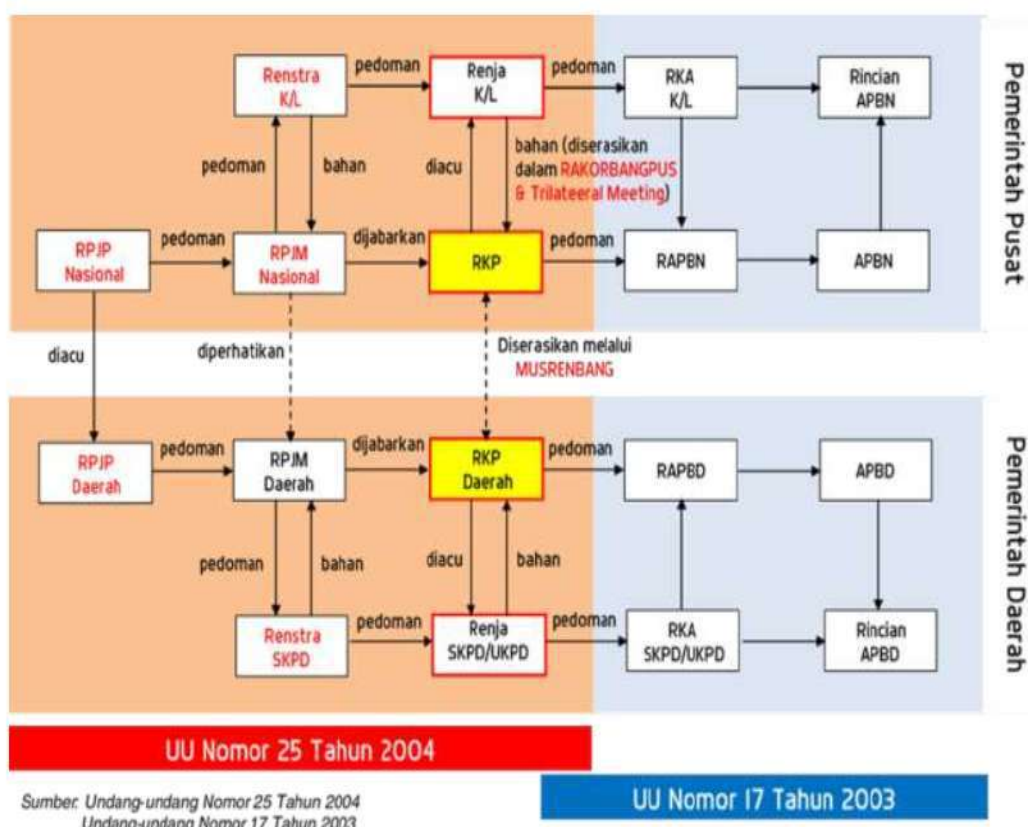
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4438)
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan tahun berjalan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah daratan yang tertuang pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, dengan luas wilayah daratan mencapai 65.526,72 Km² atau 6.552.672 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

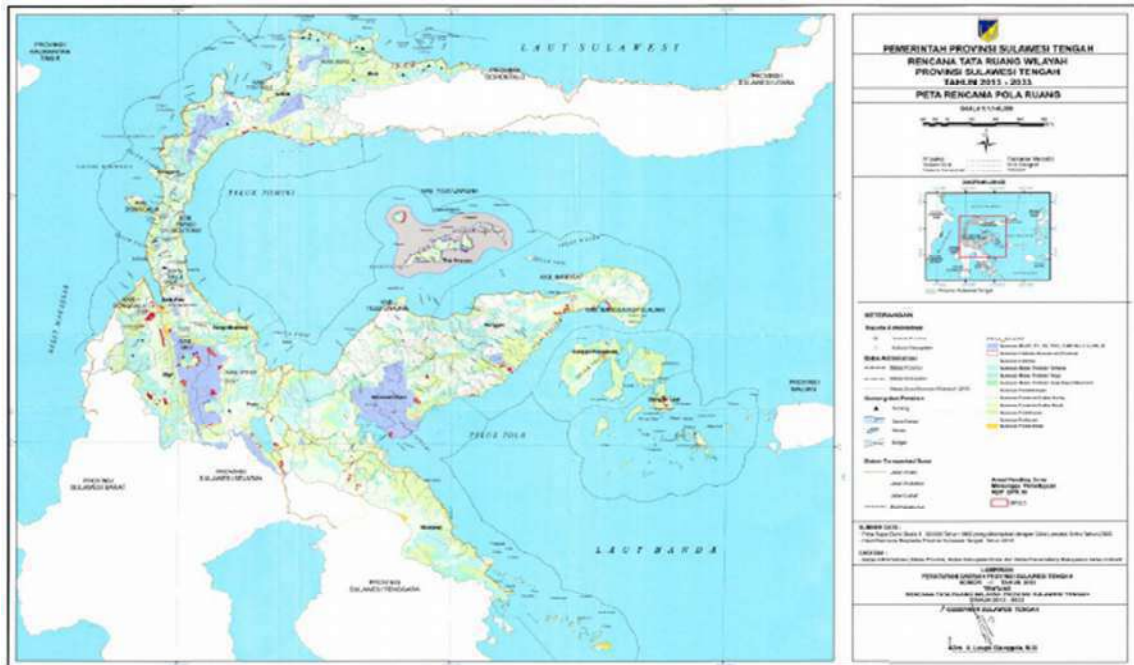
Tabel 2.1
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS		KETERANGAN
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10,00	* Termasuk DPCLS seluas 5.510Ha. Dalam Proses Persetujuan DPRRI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21,00	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
II	Kawasan Budi daya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.74	6,30	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain(APL)	2.083.765	32,00	
	APL	2.083.765	32,00	
IV.	Perairan (Danau dan Sungai)	60.30	0,92	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)	6.552.672	100,00	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1
Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Secara administrasi, hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 175 Kecamatan, 175 Kelurahan dan 1.855 Desa.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Banggai Kepulauan	12	144	3
2	Banggai	23	291	46
3	Morowali	9	126	7
4	Poso	19	142	28
5	Donggala	16	158	9
6	Tolitoli	10	104	6
7	Buol	11	115	7
8	Parigi Moutong	23	278	5
9	Tojo Una-Una	12	134	12
10	Sigi	15	177	-
11	Banggai Laut	7	63	3
12	Morowali Utara	10	123	3
13	Palu	8	-	46
Sulawesi Tengah		175	1.855	175

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2021.

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2⁰22' Lintang Utara dan 3⁰48' Lintang Selatan serta 119⁰22' dan 124⁰22' Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

2.1.1.1.3. Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m = 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m = 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m = 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas = 25,9 persen.

2.1.1.1.4. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

2.1.1.1.5. Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah kabupaten/kota. Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung. Selanjutnya Wilayah Sungai yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Wilayah Sungai Yang Terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Uraian	Nama WS	Keterangan
I.	Wilayah Sungai Lintas Provinsi	1. Palu-Lariang 2. Pompengan-Lorena 3. Lasolo-Sampara 4. Randangan-Paguyuman 5. Kaluku-Karama	48 DAS 1 DAS 5 DAS 1 DAS 1 DAS
II.	Wilayah Sungai Strategis Nasional	1. Parigi-Poso	50 DAS
III.	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	1. Lambunu-Buol 2. Bongka-Mentawa 3. Laa - Tambalako	98 DAS 113 DAS 36 DAS

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Selanjutnya, Wilayah Danau Kawasan Lindung yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada table berikut:

Tabel 2.4
Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah

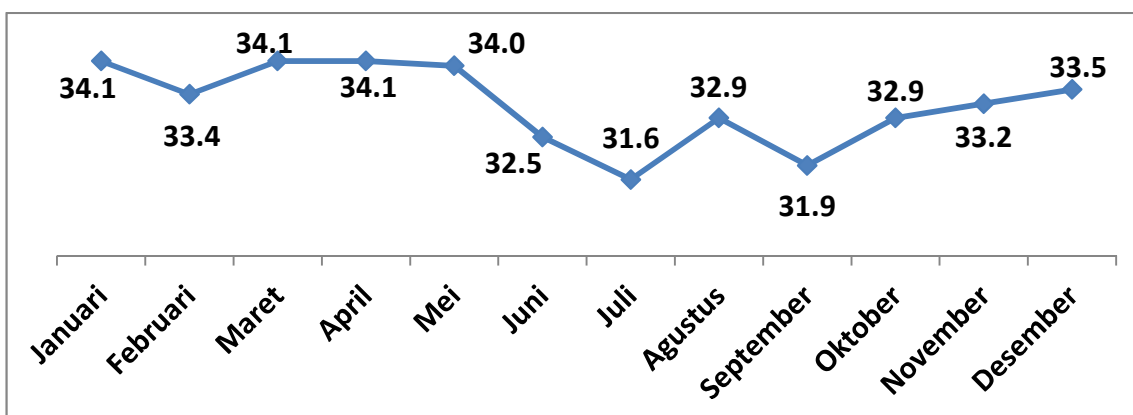
NO.	NAMA DANAU	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (KM ²)
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Donggala	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23

Sumber: RTRW Provinsi Sulteng, Tahun 2013-2033.

2.1.1.1.6. Klimatologi

Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Tahun 2020 terjadi musim hujan di Kota Palu, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan September yaitu 304 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu 15 mm.

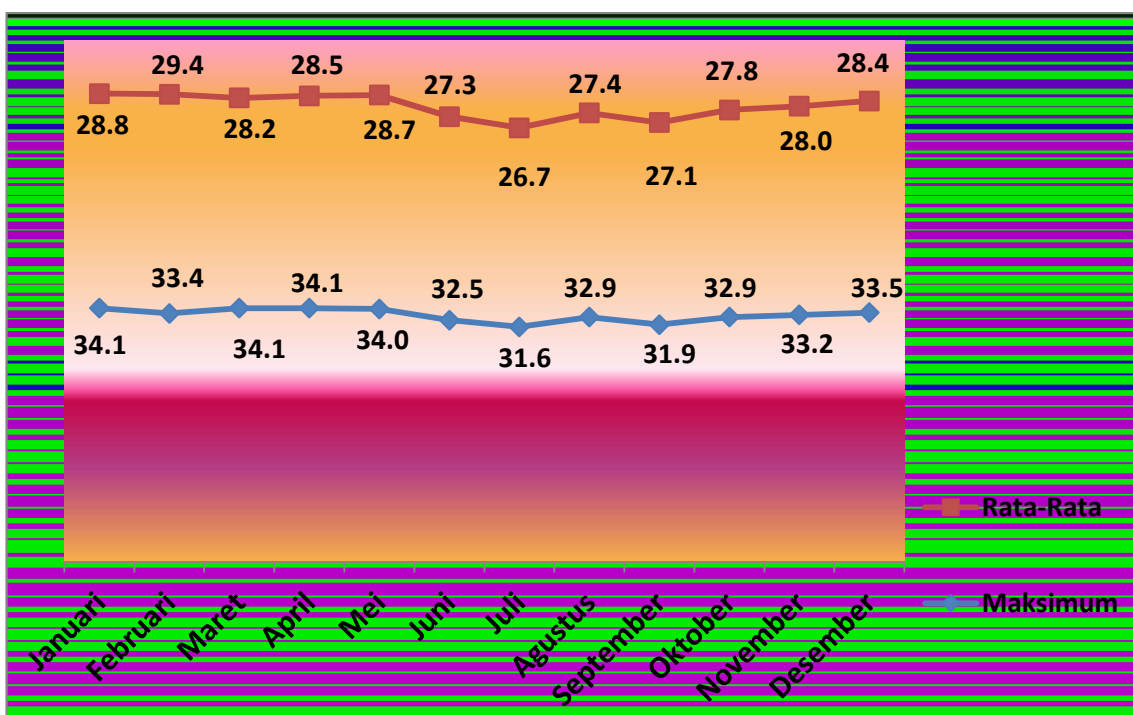
Gambar 2.2
Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021.

Pada Tahun 2020, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Bulan Juli yaitu $26,7^{\circ}\text{C}$, sementara tertinggi yaitu $29,4^{\circ}\text{C}$ terjadi pada Bulan Februari, sedangkan suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu $33,5^{\circ}\text{C}$, dan yang terendah pada Bulan Juli yaitu $31,6^{\circ}\text{C}$.

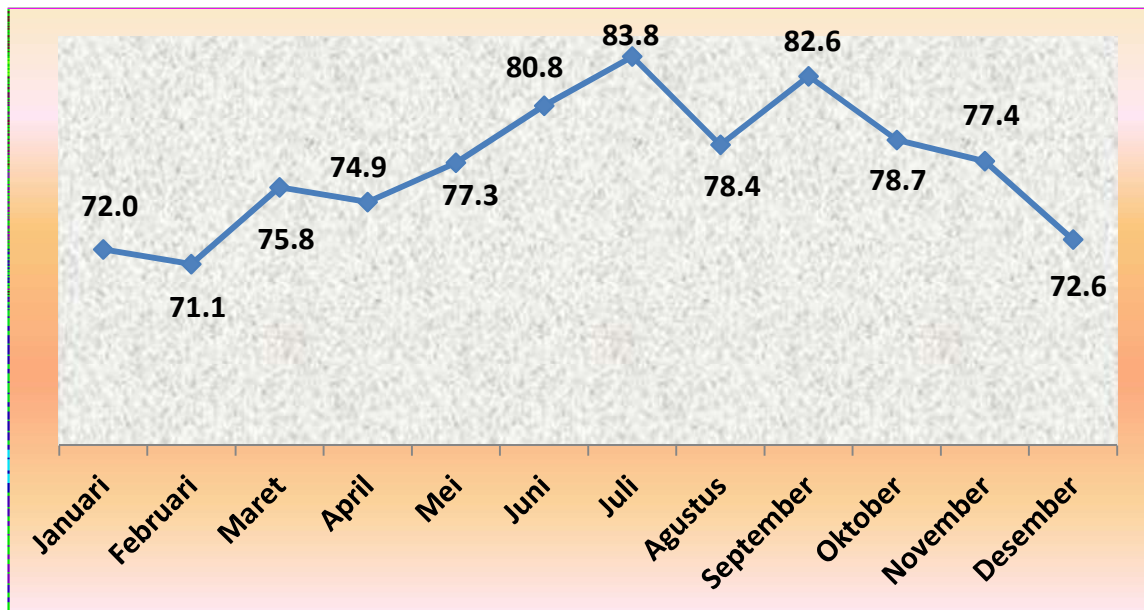
Gambar 2.3
Suhu Udara Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021.

Kelembaban udara rata-rata di Kota Palu selama Tahun 2020 terjadi pada Bulan Juli dengan kelembaban udara tertinggi yaitu 83,8 persen dan terendah terjadi pada Bulan Februari yaitu 71,1 persen.

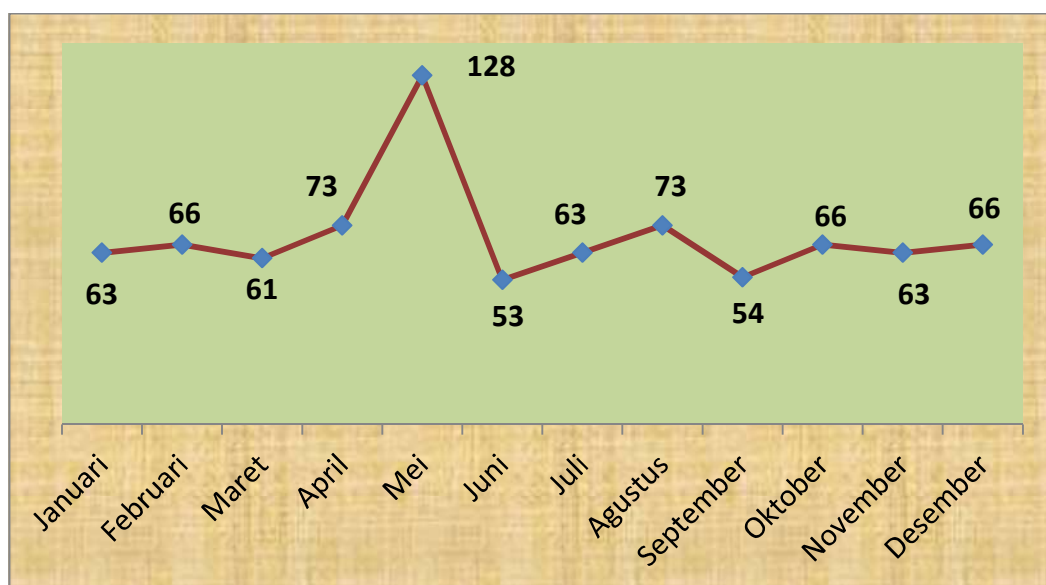
Gambar 2.4
Kelembaban Udara Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS, 2021.

Intensitas sinar matahari pada Tahun 2020 rata-rata mencapai 69,08 persen. Rata-rata penyinaran tertinggi terjadi pada Bulan Mei yaitu mencapai 128 persen, sedangkan terendah terjadi pada Bulan Juni yaitu 53 persen.

Gambar 2.5
Rata-Rata Intensitas Sinar Matahari di Kota Palu Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.2.1. Pertanian

Berdasarkan data RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah

1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

a. Tanaman Pangan

Jenis pertanian tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 memiliki luas panen 180.509,55 ha, menurun dibandingkan pada tahun 2019 dengan luas panen 186.100,44 Ha, sedangkan jumlah produktivitas pada tahun 2019 seluas 45,40 ku/ha, tahun 2020 menurun menjadi 44,88 ku/ha, sementara pada tahun 2019 produksi padi 844.904,30 ku, menurun dibandingkan pada tahun 2020 produksi padi sebesar 810.108,26 ku, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUAS PANEN (Ha)		PRODUKTIVITAS (ku/ha)		PRODUKSI (ku)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BANGGAI KEPULAUAN	702,58	665,64	43,58	45,23	3.061,64	3.010,66
2.	BANGGAI	38.290,82	35.825,73	42,76	42,12	163.726,27	150.885,18
3.	MOROWALI	9.068,94	9.224,84	49,26	45,60	44.671,91	42.068,22
4.	POSO	29.099,03	25.284,09	40,82	39,30	118.785,13	99.359,51
5.	DONGGALA	13.225,44	13.720,97	44,98	48,29	59.488,83	66.260,44
6.	TOLITOLI	14.469,47	14.910,76	53,85	56,04	77.913,21	83.556,72
7.	BUOL	4.508,16	5.019,45	40,90	41,57	18.436,84	20.866,59
8.	PARIGI MOUTONG	52.984,32	47.991,21	47,92	45,81	253.922,36	219.829,78
9.	TOJO UNA-UNA	1.655,59	1.506,68	43,71	44,20	7.237,19	6.660,20
10.	SIGI	14.427,68	18.556,55	45,02	44,81	64.949,47	83.143,90
11.	BANGGAI LAUT	-	-	-	-	-	-
12.	MOROWALI UTARA	7.563,75	7.727,65	42,64	44,17	32.253,90	34.133,56
13.	KOTA PALU	104,66	75,98	43,72	43,89	457,55	333,50
	SULAWESI TENGAH	186.100,44	180.509,55	45,40	44,88	844.904,30	810.108,26

Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya pada tahun 2020 produksi beras mengalami penurunan yaitu 475.726,51 ton, jika dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2019 yaitu 496.160,06 ton, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah
Tahun 2019 dan 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI BERAS (TON)	
		2019	2020
1	2	3	4
1.	BANGGAI KEPULAUAN	1.797,89	1.767,97
2.	BANGGAI	96.146,32	88.605,55
3.	MOROWALI	26.233,06	24.704,05
4.	POSO	69.755,16	58.347,70
5.	DONGGALA	34.934,11	38.910,66
6.	TOLITOLI	45.753,62	49.067,70
7.	BUOL	10.826,82	12.253,67
8.	PARIGI MOUTONG	149.112,90	129.092,44
9.	TOJO UNA-UNA	4.249,97	3.911,12
10.	SIGI	38.140,81	48.825,27
11.	BANGGAI LAUT	-	-
12.	MOROWALI UTARA	18.940,70	20.044,53
13.	KOTA PALU	268,70	195,85
	SULAWESI TENGAH	496.160,06	475.726,51

Sumber : BPS, 2021

Pada tabel tersebut, bahwa produksi beras yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong, pada tahun 2019 sebesar 149.112,90 ton, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 129.092,44,- atau 13,43 persen.

Sementara itu daerah irigasi, luas areal sawah potensial dan fungsional sangat menentukan keberhasilan produksi beras. Pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah daerah irigasi sebanyak 30 lokasi, luas areal sawah potensial 47.640 Ha, sedangkan luas areal sawah fungsional 34.230 Ha, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Menurut Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Tahun 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DAERAH IRIGASI	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
1	2	3	4	5
1.	BANGGAI KEPULAUAN	-	-	-
2.	BANGGAI	8	13.316	8.926
3.	MOROWALI	2	3.893	3.977
4.	POSO	4	5.628	4.016
5.	DONGGALA	1	1.625	923
6.	TOLITOLI	3	4.348	2.947
7.	BUOL	1	1.028	534
8.	PARIGI MOUTONG	8	14.923	11.664
9.	TOJO UNA-UNA	-	-	-
10.	SIGI	2	1.669	493
11.	BANGGAI LAUT	-	-	-
12.	MOROWALI UTARA	1	1.210	750
13.	KOTA PALU	-	-	-
	SULAWESI TENGAH	30	47.640	34.230

Sumber : BPS, 2021

Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang memiliki irigasi yang terbanyak yaitu dengan jumlah 8 irigasi, dan memiliki areal perasawahan potensial sebanyak 14.923 Ha, sedangkan areal perasawahan fungsional sebanyak 11.664 Ha.

b. Hortikultura

Pencapaian produksi pertanian hortikultura bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabe rawit, dan tomat masih dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	BAWANG MERAH (Ha)		BAWANG PUTIH (Ha)		CABAI BESAR (Ha)		CABE RAWIT (Ha)		TOMAT (Ha)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8
1.	BANGGAI KEPULAUAN	32	19	-	-	26	40	95	101	65	62
2.	BANGGAI	47	14	4	-	48	15	299	177	141	64
3.	MOROWALI	4	6	-	-	29	66	119	216	55	95
4.	POSO	170	143	46	47	94	140	309	348	296	280
5.	DONGGALA	30	122	-	13	87	112	491	450	107	153
6.	TOLITOLI	13	13	-	-	90	148	116	200	30	36
7.	BUJOL	2	1	-	-	48	44	234	413	15	28
8.	PARIGI MOUTONG	253	205	4	85	242	214	984	763	232	277
9.	TOJO UNA-UNA	28	23	-	-	45	8	165	412	28	37
10.	SIGI	627	419	15	88	106	103	624	757	332	437
11.	BANGGAI LAUT	-	-	-	-	-	6	-	-	11	21
12.	MOROWALI UTARA	4	4	-	-	15	18	21	33	22	26
13.	KOTA PALU	151	63	-	-	24	31	116	122	28	69
	SULAWESI TENGAH	1.361	1.032	69	233	854	944	3.664	4.079	1.362	1.584

Sumber : BPS, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa areal yang tersedia untuk penanaman kelima jenis komoditi tersebut Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 memiliki areal seluas 7.872 Ha, dan yang terluas yaitu 4.079 Ha, untuk areal penanaman cabe rawit.

2.1.1.2.2. Perkebunan

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik/lingkungan dengan ketinggian di bawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 289.805 Ha, dengan potensi komoditi kelapa seluas 61.999 Ha, kakao 120.085 Ha, cengkeh 33.361 Ha, karet 6.250 Ha, jambu mente 9.815 Ha, pala 11.434 Ha dan sawit rakyat 23.115 Ha.

2.1.1.2.3. Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Adapun jenis ternak yang diusahakan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

2.1.1.2.4. Perikanan

Potensi perairan laut Sulawesi Tengah seluas 193.923,75 km² yang banyak mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun,

Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun.

2.1.1.2.5. Industri

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai.

2.1.1.2.6. Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah:

- a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun,

Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;

- c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- d. **Kabupaten Morowali – Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;
- e. **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- f. **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalith Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku

Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;

- g. **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompeale, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- h. **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakko, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;
- i. **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- j. **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.

- k. **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah.

2.1.1.2.7 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
I.	Batuan Ornamen/poles		
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
II.	Batuan Bahan Konstruksi		
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri daribatuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro,Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit,juga dari Breksi dan KonglomeratDi Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulauan keKalimantan Timur.
III.	Mineral Non Logam lainnya		
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, BanggaiKepulauan mempunyai potensiBahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan danAMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata,Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO ₃ kurang dari 75 %
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar Mg O ₃
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng.

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

- Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik
- Panas Bumi : 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:
 - ❑ Air : 1.001,980 MW
 - ❑ Matahari : 5.512 kWh/m²
 - ❑ Angin : 2 – 5 m/s
 - ❑ Biogas : 19.026 kW
- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2 telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan *Solar Home System*

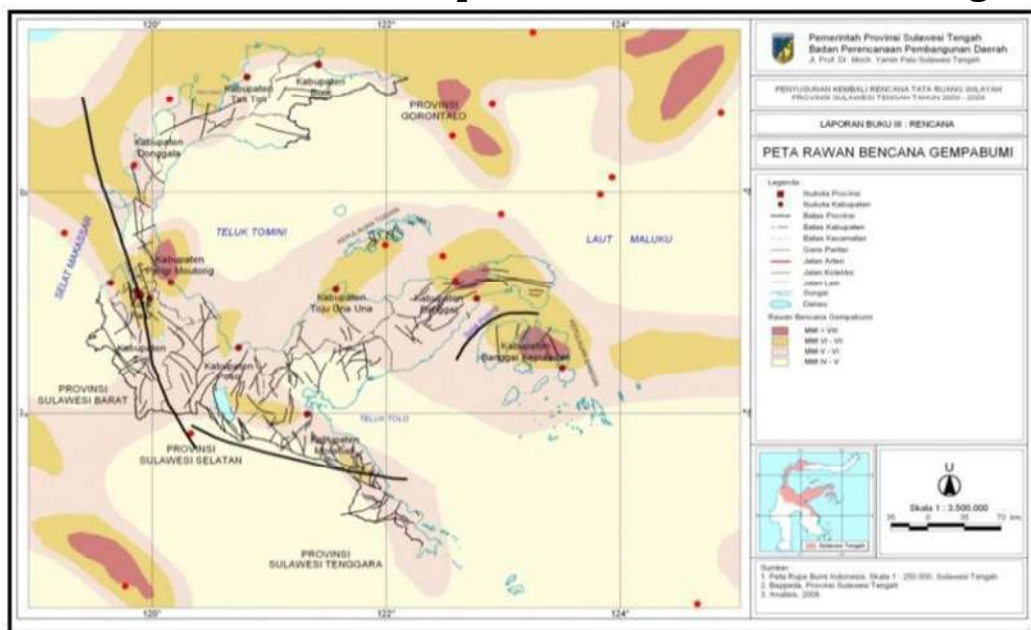
(SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu Gunung Colo yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI

2.1.1.3.1. Tatanan Tektonik dan Sejarah Kegempaan Palu Sulawesi Tengah

Menurut Daryono (2011) Daerah Palu merupakan salah satu kawasan seismik aktif di Indonesia. Tingginya tingkat aktivitas

kegempaan di kawasan ini tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif mengakibatkan Daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Menurut Hamilton (1979), ada beberapa segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempa bumi kuat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sesar-sesar tersebut adalah: (a) Sesar Palu-Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara melalui Sulawesi Selatan bagian Utara menuju ke selatan Bone sampai di laut Banda, dengan panjang patahan sekitar 500 Kilometer (b) Sesar Saddang yang memanjang dari pesisir Pantai Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke Pulau Selayar bagian Timur, dan (c) Sesar Parit-Parit di Laut Makassar Selatan dan Laut Bone, dan beberapa anak patahan baik yang berada di darat maupun di laut.

Untuk mengetahui tingkat aktivitas kegempaan di Palu, perlu dilakukan kajian sejarah gempabumi dan seismisitas. Berdasarkan distribusi seismisitas, tampak klaster aktivitas gempabumi yang cukup tinggi di sepanjang sesar aktif Palu-Koro hingga memotong Kota Palu. Ditinjau dari kedalaman gempabuminya, aktivitas gempabumi di zona ini tampak didominasi oleh gempabumi kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer, yang merupakan cerminan pelepasan tegangan kerak bumi yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Klaster seismisitas gempabumi dangkal ini terkonsentrasi hampir merata baik di lepas pantai maupun di daratan. Klaster seismisitas ini merupakan gambaran dari sangat aktifnya kondisi tektonik di kawasan ini. Kondisi seismisitas ini menunjukkan bahwa daerah Palu dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan terhadap gempabumi dan tsunami. Apalagi kondisi seismisitas dan tektonik yang ada mendukung untuk terjadinya gempabumi kuat dengan kedalaman dangkal yang dapat membangkitkan tsunami.

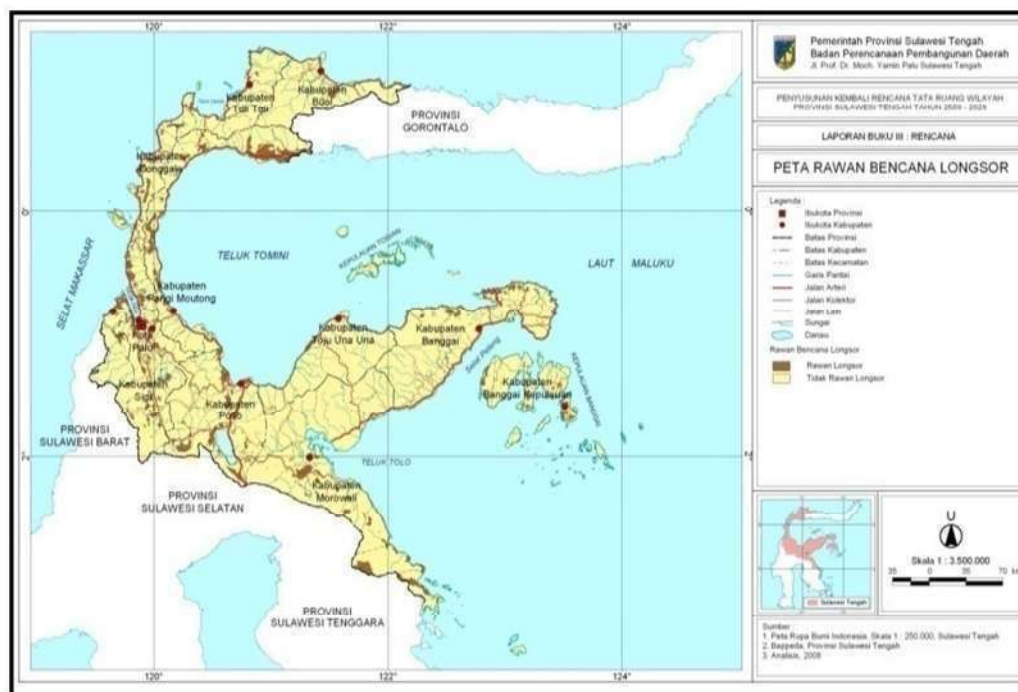
Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, tercatat sebagai daerah rawan gempa karena salah satu wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena di kota Palu terdapat patahan kerak bumi (sesar) berdimensi cukup besar, dikenal dengan sesar Palu-Koro. Sesar itu memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sesar yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik di bawah perut bumi itu jenis sesar aktif. Sesar itu terus bergerak satu sama lain dan memiliki sifat pergeseran sinistral (pergeseran ke arah kanan) dengan kecepatan geser sekitar 14-17 mm/tahun. Pergeseran pada lempeng-lempeng tektonik yang cukup aktif di sesar Palu Koro membuat tingkat kegempaan di wilayah ini juga dikategorikan cukup tinggi. Catatan seismograf pada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palu menyebutkan, hampir setiap menit Palu dan Donggala diguncang gempa. Hanya saja getarannya kecil-kecil, dan hanya bisa dicatat seismograf. Mengutip ungkapan Kepala BMKG Palu, Mudjiyanto, dalam sebuah situs internet sekitar September 2010, bahwa kota Palu diguncang gempa 600 kali dalam sebulan dengan kekuatan 3 sampai 6 SR memperlihatkan betapa tingginya aktifitas tektonik di kawasan ini.

Potensi gempa juga bertambah dengan fakta bahwa pulau Sulawesi dilewati oleh apa yang dikenal dengan formasi Pasific ring of fire yang membentang dari Jepang, Filipina, Maluku dan Sulawesi. Formasi ini berupa sederetan gunung api yang menjadi tempat kurang lebih 450 gunung api aktif maupun tidak aktif atau sekitar 75% dari jumlah gunung api di seluruh dunia. Sekitar 90% gempa dan 80% gempa terbesar terjadi di sepanjang formasi ini.

2.1.1.3.2. Kawasan Tanah Longsor dan Likufaksi

Kawasan tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

2.1.1.4. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2010-2020 cenderung meningkat, yakni dari 2.635,01 jiwa pada Tahun 2010 menjadi 2.985.734 jiwa pada Tahun 2020. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020 sebesar 1,22 persen dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2020 sebesar 48 jiwa/km².

Tabel 2.10
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk
dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020

NO.	INDIKATOR	2020
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.985.734
	- Laki-Laki	1.534.706
	- Perempuan	1.451.028
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	48

Sumber: BPS, 2021.

Dilihat dari struktur kelompok umur, penduduk Sulawesi Tengah di dominasi oleh kelompok usia produktif. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	83 869	78.331	162.200
5-9	134 039	125.935	259.974
10-14	146.338	137.530	283.868
15-19	156.460	147.245	303.705
20-24	146.566	133.401	279.967
25-29	124.698	118.795	243.493
30-34	119.071	113.855	232.926
35-39	120.955	116 707	237.662
40-44	114.970	110.080	225.050
45-49	101.547	97.578	199.125
50-54	84.199	79.413	163.612
55-59	64.287	60.140	124.427
60-64	48.546	46.195	94.741
65-69	32.564	29.929	62.493
70-74	19.849	19.832	39.321
75+	22.144	21.848	43.962
Unknow	14.944	14.214	29.208
Jumlah	1 534 706	1.451.028	2 985 734

Sumber: BPS, 2021.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

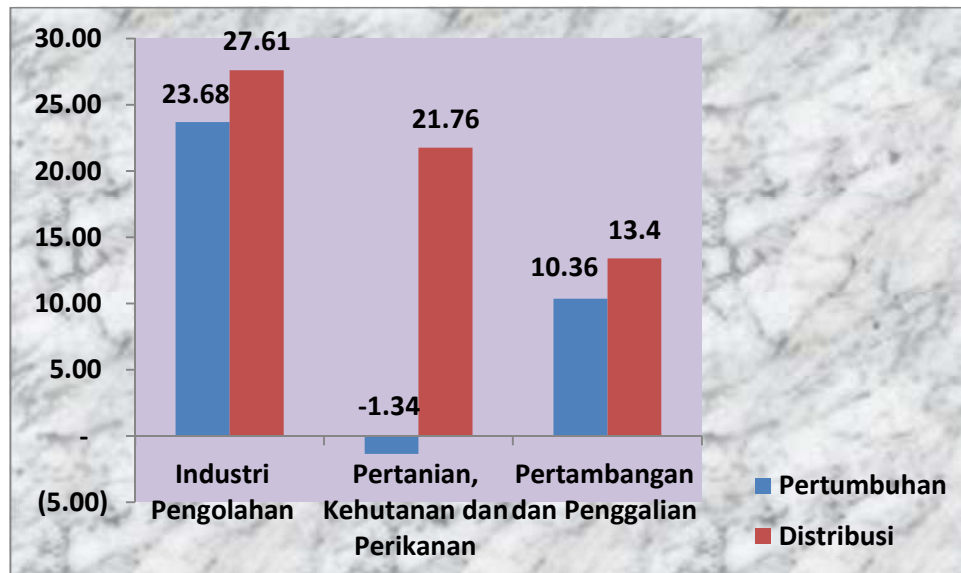
Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp197,44 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp134,15 triliun.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 (c-to-c) tumbuh 4,86 persen, melambat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,83 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor sebesar 27,78 persen.

a. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 4,86 persen. Pertumbuhan terjadi pada 9 dari 17 lapangan usaha. Lima lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 10,36 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11 persen. Sedangkan 8 lapangan usaha mengalami kontraksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,12 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,05 persen; serta Konstruksi sebesar 8,47 persen.

Gambar 2.8
Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2020 (c-to-c)



Sumber: BPS 2021.

Gambar 2.9
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 (c-to-c)



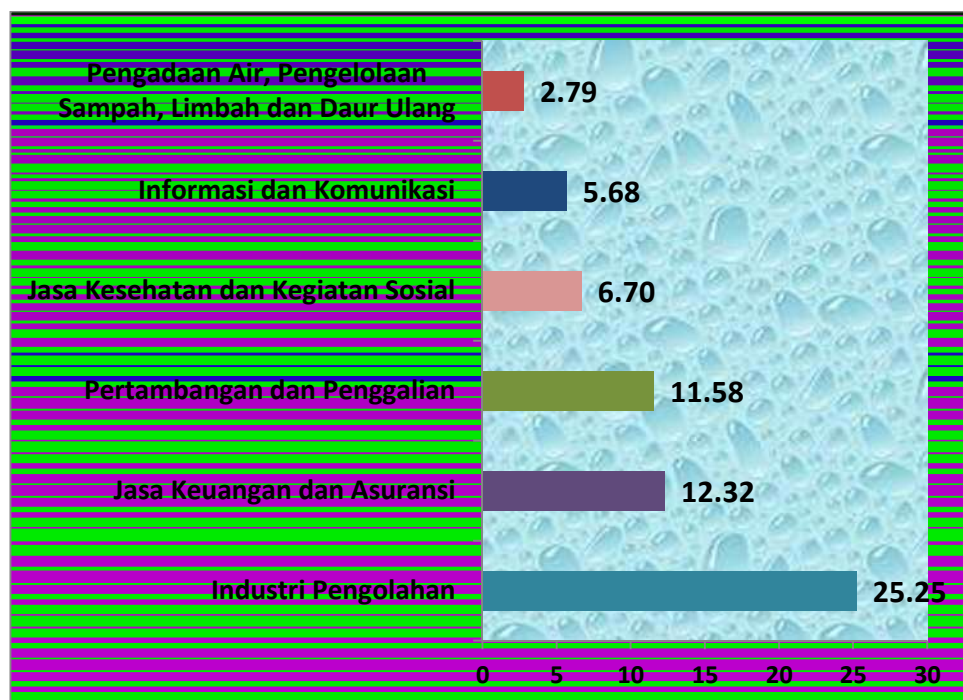
Sumber: BPS 2021.

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,86 persen (c-to-c) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,46 persen, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi

sebesar 0,17 persen. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (27,61 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,76 persen); Pertambangan dan Penggalian (13,40 persen); serta Konstruksi (10,14 persen).

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2020 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,45 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan produksi pada 6 lapangan usaha. Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 25,25 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,32 persen serta pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,58 persen. Pada triwulan IV tahun 2020 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019 (y-on-y) sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret masih berdampak terhadap perekonomian hingga triwulan IV tahun 2020.

Gambar 2.10
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2020 (y-on-y)



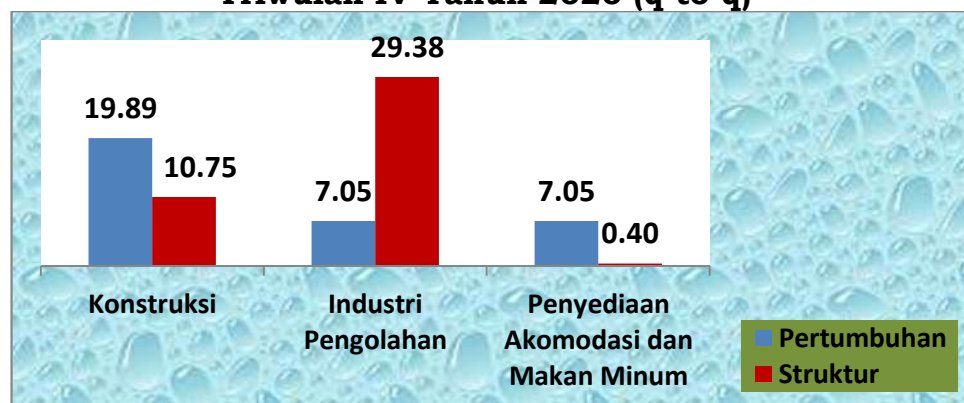
Sumber: BPS 2021.

Menurut sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2020 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 4,45 persen tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki sumber pertumbuhan tertinggi 5,96 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,79 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,21 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,20 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan IV tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (28,31 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,86 persen); Pertambangan dan Penggalian (16,53 persen); serta Konstruksi (9,40 persen).

Sedangkan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV tahun 2020 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Dari tujuh belas lapangan usaha, hanya tiga lapangan usaha mengalami kontraksi, yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,48 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,16 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,11 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi sebesar 19,89 persen, diikuti peningkatan pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,05 persen, serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,05 persen.

Gambar 2.11
Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV Tahun 2020 (q-to-q)



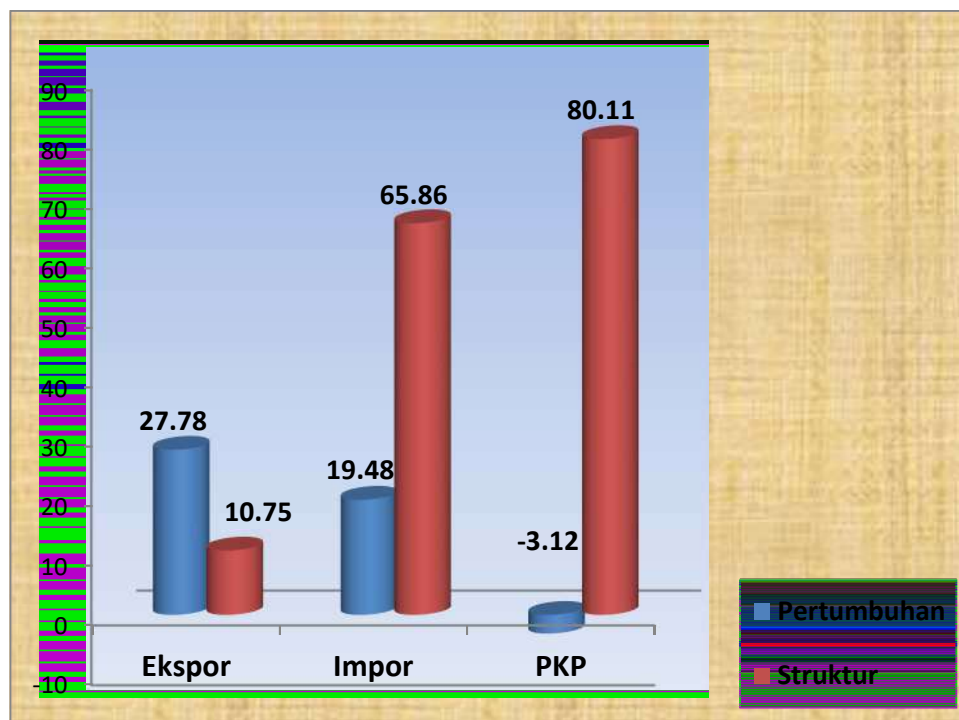
Sumber: BPS 2021.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2020 (q-to-q) yang tumbuh sebesar 4,12 persen, tertinggi disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,67 persen; Konstruksi sebesar 0,69 persen, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,26 persen dan lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,15 persen.

b. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya (c-to-c) mencapai 4,86 persen. Di tengah pandemi Covid-19, kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 27,78 persen mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tetap bergerak positif. Pertumbuhan juga terjadi pada komponen Impor Barang dan Jasa, namun komponen ini merupakan faktor pengurang. Sedangkan komponen yang lain mengalami kontraksi.

Gambar 2.12
Pertumbuhan dan Struktur Beberapa Komponen
Tahun 2020 (persen)



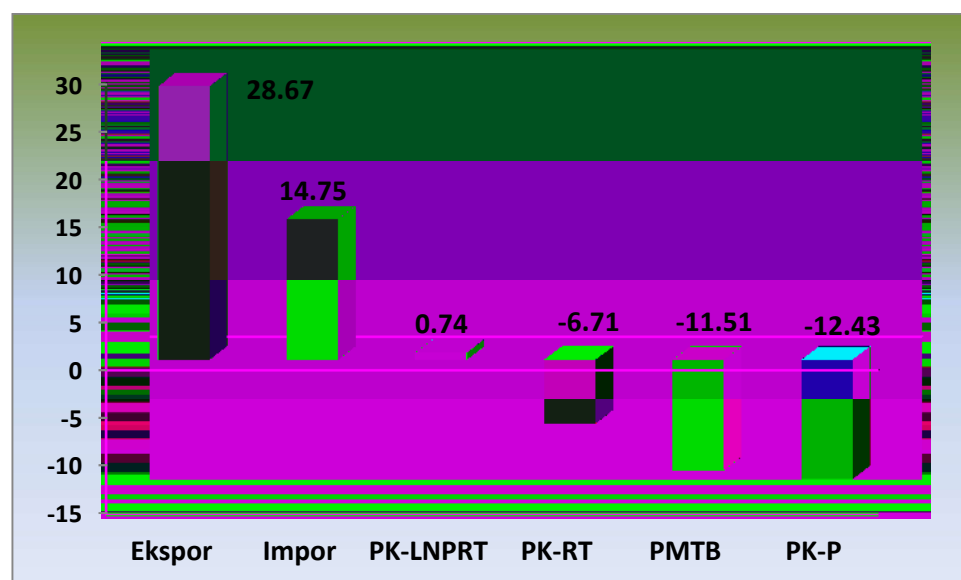
Sumber: BPS, 2021

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 80,11 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 24,40 persen, sedangkan komponen lain seperti PK-RT, PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi.

Sementara ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,45 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 28,67 persen. Pertumbuhan Ekspor yang signifikan tertahan oleh komponen Impor yang tumbuh sebesar 14,75 persen dan komponen lainnya mengalami kontraksi kecuali komponen PK-LNPRT yang tumbuh melambat sebesar 0,74 persen.

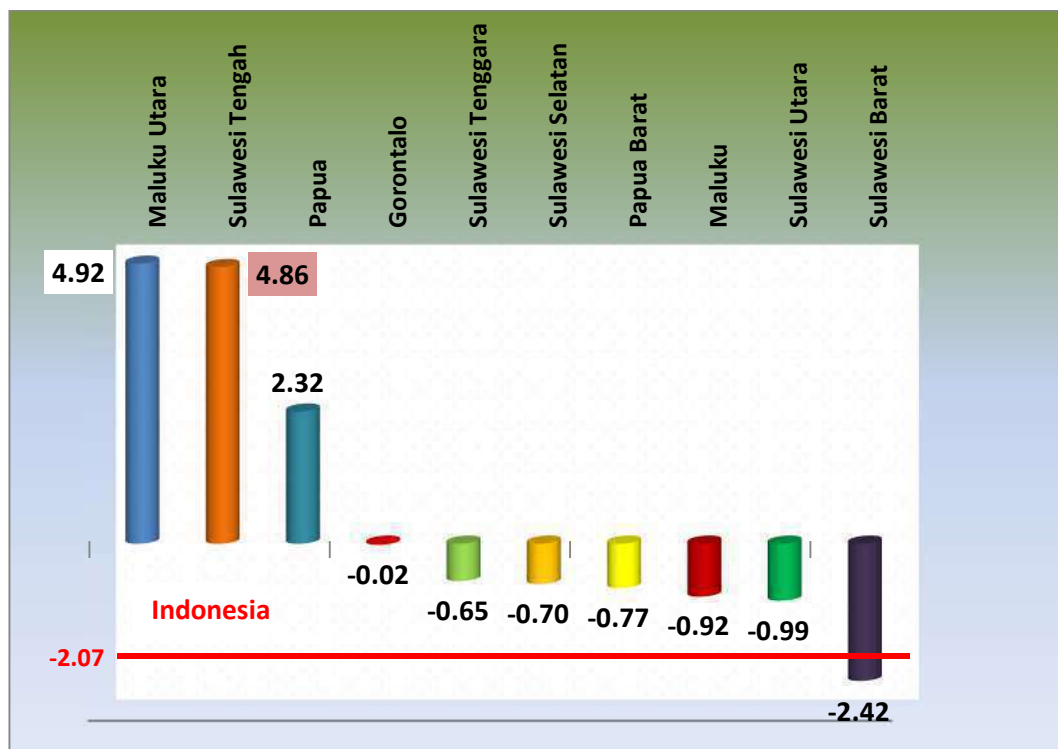
Gambar 2.13
Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2020 (persen)



Sumber: BPS, 2021

Selain itu secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 (c-to-c) mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Kontraksi tersebut terjadi di seluruh pulau di Indonesia, kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua. Kontraksi tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01 persen, diikuti oleh pulau Jawa sebesar 2,51 persen. Struktur perekonomian tahun 2020 secara spasial didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 58,75 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen dan pulau-pulau lainnya masing masing kurang dari 10 persen.

Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi se-Sulampua
tahun 2020 (c-to-c)



Sumber: BPS, 2021.

Jika PDRB se-Sulampua tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 4,92 persen dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,42 persen.

Perspektif pertumbuhan sektoral, pada Tahun 2019 pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 16,27 persen, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-

masing adalah Sektor Konstruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 14,34 persen dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan laju pertumbuhan 8,37 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan kontraksi sebesar -1,98 persen.

Dilihat dari andil pertumbuhan, pada Tahun 2019 Sektor Pertambangan dan Penggalian memberi andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yakni sebesar 2,41 persen disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing yaitu Sektor Konstruksi sebesar 1,55 persen dan Sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 1,26 persen

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan yakni dari Rp150.032 Milyar pada Tahun 2018 menjadi Rp166.403 Milyar pada Tahun 2019, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari Rp103.583 Milyar pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp111.003 Milyar pada Tahun 2019.

Tabel 2.12
Nilai PDRB, Distribusi, Laju dan Andil Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Sektor Ekonomi,
Tahun 2019-2020

LAPANGAN USAHA	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyard Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan (Milyard Rupiah)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43.205	10.711	29.992	7.307
B. Pertambangan dan Penggalian	25.183	7.126	17.843	5.792
C. Industri Pengolahan	21.650	15.441	14.685	9.918
D. Pengadaan Listrik, Gas	52	14	51	14
E. Pengadaan Air	198	51	135	35
F. Konstruksi	21.022	5.653	12.833	3.292
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.830	3.430	9.257	2.126
H. Transportasi dan Pergudangan	6.558	1.118	4.119	679
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832	209	521	127
J. Informasi dan Komunikasi	5.663	1.530	4.461	1.235
K. Jasa Keuangan	3.371	986	2.240	654
L. Real Estate	2.798	725	1.895	484
M,N Jasa Perusahaan	395	102	262	66
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.750	2.862	6.453	1.687
P Jasa Pendidikan	6.146	1.587	3.892	989
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.398	676	1.539	423
R,S,T,U Jasa lainnya	1.353	341	826	207
PDRB	166.403	52.564	111.003	35.035

Sumber: BPS, 2021

Dilihat dari pola distribusi PDRB menurut sektor ekonomi, Tahun 2019 sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi sebesar 25,96 persen, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 15,13 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 13,01 persen.

Tabel 2.13
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

LAPANGAN USAHA		Laju Pertumbuhan (Persen)	Sumber Pertumbuhan (Persen)
		2020 (c - to - c)	2020 (c - to - c)
(1)		(2)	(3)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,34	-0,31
B.	Pertambangan dan Penggalian	10,36	1,62
C.	Industri Pengolahan	23,68	5,46
D.	Pengadaan Listrik, Gas	3,12	0,00
E.	Pengadaan Air	0,80	0,00
F.	Konstruksi	-8,47	-0,85
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,15	-0,44
H.	Transportasi dan Pergudangan	33,12	-1,07
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,05	-0,04
J.	Informasi dan Komunikasi	8,56	0,30
K.	Jasa Keuangan	9,80	0,17
L.	Real Estate	0,38	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	-2,57	-0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,21	-0,01
P	Jasa Pendidikan	-1,63	-0,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	0,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,04	0,00
PDRB		4,86	4,86

Sumber: BPS, Tahun 2021.

Perspektif PDRB dari sisi komponen pengeluaran, pada Tahun 2020 andil pada laju pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Komponen Transportasi dan Pergudangan yakni sebesar 33,12 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 23,68 persen dan Komponen Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan andil pertumbuhan sebesar 11,05 persen.

2.1.2.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah biasa menggunakan pengeluaran per kapita, tetapi bisa juga menggunakan pendekatan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, PDRB per kapita kabupaten/kota di Sulawesi Tengah cukup beragam. Kabupaten dengan PDRB per kapita ADHB yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali yaitu sebesar 502,41 juta rupiah per tahun, kemudian diikuti Kabupaten Morowali Utara sebesar 85,51 juta rupiah per tahun, dan Kabupaten Banggai sebesar 71,80 juta rupiah per tahun

PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan *trend* peningkatan yakni dari Rp37,39 juta pada Tahun 2015 menjadi Rp54,49 juta pada Tahun 2019, dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,87 persen pertahun. Capaian PDRB perkapita tersebut masih rendah dibandingkan dengan PDB perkapita nasional.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tengah (persen), 2016–2020

NO.	WILAYAH	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN 2010
1.	Banggai Kepulauan	32.053,26	21.699,12
2.	Banggai	71.799,29	48.601,57
3.	Morowali	502.408,33	356.205,00
4.	Poso	35.242,13	23.791,86
5.	Donggala	38.251,22	26.458,30
6.	Tolitoli	34.977,23	23.267,07
7.	Buol	34.120,25	23.257,75
8.	Parigi Moutong	34.428,28	22.269,28
9.	Tojo Una-Una	35.899,95	23.930,08
10.	Sigi	37.198,05	25.189,42
11.	Banggai Laut	30.569,34	20.991,69
12.	Morowali Utara	85.513,15	61.616,30
13.	Kota Palu	60.892,00	38.958,05
14.	Jumlah Kab/Kota	63.814,52	43.557,34
15.	Sulawesi Tengah	63.752,76	43.317,32

Sumber: BPS, 2021.

2.1.2.1.3. Potensi Daerah

2.1.2.1.3.1. Pertanian

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Sub Sektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

NO.	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi (Sawah+Ladang)					
	- Luas Panen (Ha)	228.571	243.070	204.158	186.100,4 4	180.510
	- Produksi (Ton)	1.103.16 9	1.144.398	954.794	844.904,3 0	810.108
	- Produktivitas (Kw/Ha)	48,26	47,08	46,77	45,40	44,88
2	Jagung					
	- Luas Panen (Ha)	62.165,4	78.993,3	93.551,80	129.765	130.012
	- Produksi (Ton)	317.669	374.322	386.606	564.404	568.473
	- Produktivitas (Kw/Ha)	51,10	47,39	41,33	43,49	43,72
3	Kedelai					
	- Luas Panen (Ha)	8.867,8	3.450,8	21.107,20	5.594	2.835
	- Produksi (Ton)	15.358	4.962	26.573	5.336	3.654
	- Produktivitas (Kw/Ha)	17,32	14,38	12,59	9,54	12,89
4	Kacang Tanah					
	- Luas Panen (Ha)	3.246,8	2.549,9	2.803,40	2.085	1.960
	- Produksi (Ton)	4.410	2.766	3.432	2.196	2.099
	- Produktivitas (Kw/Ha)	13,58	10,85	12,24	10,53	10,71
5	Kacang Hijau					
	- Luas Panen (Ha)	944,7	586,2	698,30	469	460
	- Produksi (Ton)	780	780	573	68	373
	- Produktivitas (Kw/Ha)	8,25	8,25	8,20	1,46	8,11
6	Ubi Kayu					
	- Luas Panen (Ha)	1.808,5	1.991,5	1.993,10	1.687	1.626
	- Produksi (Ton)	34.970	54.225	58.426	46.667	40.046
	- Produktivitas (Kw/Ha)	193,37	272,28	293,13	276,69	246,29
7	Ubi Jalar					
	- Luas Panen (Ha)	1.102,7	1.215,2	1.314,50	1.087	1.311
	- Produksi (Ton)	15.684	15.464	19.791	19.072	14.857
	- Produktivitas (Kw/Ha)	142,23	127,25	150,60	175,47	113,33

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

Perkembangan produksi tanaman padi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2018 cenderung meningkat, sedangkan pada Tahun 2019-2020 produksinya mengalami penurunan yaitu Pada Tahun 2019 sebesar 844.904 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 810.108 ton pada tahun 2020 produksi tertinggi yaitu komoditi padi dengan produksi mencapai 810.108 ton dan luas panen 180.510 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 44,88 kw/ha, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi

jagung dengan produksi mencapai 568.473 ton dan luas panen 130.012 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 43,72 kw/ha, dan komoditi ubi kayu dengan produksi mencapai 40.046 ton dan luas panen 1.626 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 246,29 kw/ha. Sedangkan produksi terendah yakni komoditi kacang hijau dengan produksi hanya 373 ton dan luas panen 460 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 8,11 kw/ha, sehingga kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB tahun 2020 mencapai 4,05 persen, kalau dibandingkan periode 2018-2019 cenderung meningkat, namun jika dibandingkan pada tahun 2016-2017 kontribusinya menurun.

Pada Sub Sektor Tanaman Hortikultura kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2020 mencapai 2,64 persen cenderung meningkat dibandingkan pada periode 2018-2019, namun jika dibandingkan periode tahun 2016-2017 cenderung menurun, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Sub Sektor Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

NO.	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah					
	- Produktivitas (Ku/ha)	46,46	49,89	57,49	47,82	54,30
	- Luas Panen (Ha)	1,506	1,718	1,333	1,361	1,055
	- Produksi (Ton)	6.997	8.572	7.663	6.508	5.725
2	Cabai Besar					
	- Produktivitas (Ku/ha)	54,54	54,31	67,93	62,55	74,34
	- Luas Panen (Ha)	872	1.230	1.105	854	974
	- Produksi (Ton)	4.756	6.680	7.507	5.342	7.238
3	Cabai Rawit					
	- Produktivitas (Ku/ha)	57,77	72,32	68,34	61,77	60,88
	- Luas Panen (Ha)	2.014	2.935	3.809	3.664	4.113
	- Produksi (Ton)	11.635	21.226	26.032	22.632	25.042
4	Kentang					
	- Produktivitas (Ku/ha)	86,02	179,88	129,43	122,03	119,66
	- Luas Panen (Ha)	66	108	112	106	67
	- Produksi (Ton)	568	1.943	1.450	1.294	802
5	Jahe					
	- Produktivitas (Kg/M ²)	2,72	3,89	3,85	2,66	3,39
	- Luas Panen (M ²)	179.202	209.861	212.027	112.399	100.563
	- Produksi (Kg)	486.666	817.221	815.911	299.388	340.830
6	Jeruk					
	- Produktivitas (Ku/Phn)	0,97	1,23	1,32	1,17	0,44
	- Tanaman Menghasilkan (Phn)	22.808	10.779	29.369	33.589	115.160
	- Produksi (Ku)	22.047	13.284	38.910	39.242	50.328
7	Pisang					
	- Produktivitas (Ku/Rumpung)	0,98	0,57	0,48	0,54	0,78
	- Tanaman Menghasilkan (Rumpung)	310.656	252.539	235.576	456.614	313.596
	- Produksi (Ku)	305.946	144.792	111.919	244.881	244.221
8	Durian					
	- Produktivitas (Ku/Phn)	1,92	1,72	1,29	1,01	1,01
	- Tanaman Menghasilkan (Phn)	91.791	78.420	102.423	249.441	191.876
	- Produksi (Ku)	176.662	134.933	131.879	252.881	193.819
9	Krisan					
	- Produktivitas (Tangkai/M ²)	29,10	2,87	2,90	3,94	2,76
	- Luas Panen (M ²)	3.618	17.004	11.299	2.655	1.527
	- Produksi (Tangkai)	105.296	48.841	32.789	10.469	4.219
10	Anggrek					
	- Produktivitas (Tangkai/M ²)	55,61	8,01	4,29	8,05	3,59
	- Luas Panen (M ²)	1.338	7.471	6.311	6.988	6.699
	- Produksi (Tangkai)	74.400	59.813	27.077	56.237	24.064

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

Dilihat pada tabel diatas bahwa Cabai Rawit merupakan produksi komoditi di Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi, pada periode 2019-2020 cenderung meningkat, namun jika dibandingkan pada Tahun 2018 produksinya mengalami penurunan yaitu dengan jumlah sebesar 26.032 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 25.042 ton, sedangkan luas panen pada tahun 2020 seluas 4.113 ha, sementara tingkat produktivitas mencapai 60,88 Ku/Ha.

2.1.2.1.3.2. Perkebunan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti : kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti: kemiri, pala dan panili.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Sub Sektor Perkebunan telah memberikan andil yang cukup baik dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2020 Sub Sektor Perkebunan berkontribusi sebesar 11 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020

NO.	KOMODITI	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kakao					
	- Luas Panen (Ha)	289.194	285.783	283.625	279.297	279.217
	- Produksi (Ton)	168.733,90	134.322,50	125.473,40	128.153,72	127.206,86
2.	Kelapa					
	- Luas Panen (Ha)	215.450	218.144	214.994	214.477	214.591
	- Produksi (Ton)	184.486,51	187.404,30	189.780	155.341,39	191.541,91
3.	Kopi					
	- Luas Panen (Ha)	8.644	8.630	8.642	9.667	9.951
	- Produksi (Ton)	2.927,38	2.647,60	2.761,40	2.587,76	2.593,57
4.	Cengkeh					
	- Luas Panen (Ha)	68.162	71.454	74.740	76.049	76.347
	- Produksi (Ton)	17.171,36	5.314,10	15.575,10	18.108,4	19.430,9
5.	Lada					
	- Luas Panen (Ha)	2.160	2.848	2.808	2.830	3.098
	- Produksi (Ton)	162,41	203,9	223,1	256,3	257,4
6.	Pala					
	- Luas Panen (Ha)	16.551	18.167	20.335	20.585	21.752
	- Produksi (Ton)	406,68	389	337,1	378,4	602,6
7.	Jambu Mete					
	- Luas Panen (Ha)	13.811	14.309	13.744	13.706	13.709
	- Produksi (Ton)	2.150,45	2.276,90	2.179,00	2.208,8	2.213,2
8.	Karet					
	- Luas Panen (Ha)	6.242	6.086	6.068	5.769	7.763
	- Produksi (Kw/Ha)	2.392,40	2.301,60	2.610,00	4.306,33	4.306,33
9.	Vanila					
	- Luas Panen (Ha)	478	442	467	468	654
	- Produksi (Ton)	21,11	20,6	15,9	17,4	22,00
10.	Kelapa Sawit					
	- Luas Panen (Ha)	83.191	83.214	51.601	143.489	144.793
	- Produksi (Ton)	174.837,81	243.340,00	141.341,30	239.285,26	272.275,15

Sumber: BPS 2021.

Selama periode Tahun 2016-2020 perkembangan produksi komoditi tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah rata-rata mengalami peningkatan. Komoditi perkebunan yang memiliki produksi terbesar pada Tahun 2020 yaitu kelapa, kelapa sawit, kakao, dan cengkeh.

Produksi tanaman Kelapa pada Tahun 2020 mencapai 191.541,91 ton dengan luas panen 214.591 ha, sementara produksi tanaman kelapa sawit mencapai 272.275,15 ton dengan luas panen 149.793 ha, produksi kakao sebanyak 128.153,72 ton dengan luas

panen 279.217 ha, dan produksi cengkeh sebesar 19.430,9 ton dengan luas panen 76.347 ha.

2.1.2.1.3.3. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Sulawesi Tengah terdiri dari: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

Tabel 2.18
Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Tengah,
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ternak Besar					
	a. Kerbau	3.842	3.884	3.409	2.421	2.876
	b. Sapi	320.537	353.486	267.483	358.496	402.191
	c. Kuda	1.911	1.661	1.410	1.340	1.094
2.	Ternak Kecil					
	a. Kambing	402.124	445.337	433.335	531.533	555.399
	b. Domba	6.735	7.351	7.429	7.922	10.942
	c. Babi	200.524	230.356	261.820	265.719	229.154
3.	Ternak Unggas					
	a. Ayam Ras	10.340.668	13.852.266	11.798.788	12.959.955	8.562.221
	- Petelur	730.938	2.081.518	557.159	645.025	1.299.790
	- Pedaging	9.609.730	11.770.748	11.241.629	12.314.930	7.262.431
	b. Ayam Kampung	3.326.433	4.477.451	4.400.735	5.250.361	4.711.438
	c. Itik	637.603	792.469	873.446	912.818	1.230.712

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Sulteng, 2021.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, selama periode tahun 2016-2020, jenis ternak besar mengalami peningkatan populasi walaupun pada jenis sub ternak kuda yang cenderung menurun, namun pada jenis ternak kecil dan ternak unggas pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2019

Pada Tahun 2020, populasi terbanyak untuk kategori jenis ternak besar yaitu sapi dengan jumlah populasi sebanyak 402.191 ekor, mengalami peningkatan disbanding pada tahun 2019 berjumlah

358.496 ekor, Sementara untuk kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak yaitu kambing dengan jumlah 555.399 ekor, mengalami peningkatan dari tahun 2019 berjumlah 531.533 ekor. Untuk kategori jenis ternak unggas populasi terbanyak yaitu ayam ras pedaging dengan jumlah populasi mencapai 7.262.431 ekor, namun jika dibandingkan dengan populasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah 12.959.955 ekor.

2.1.2.1.3.4. Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dari 5 sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2020 Sektor Perikanan memberi kontribusi sebesar 6 persen terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2020 jumlah produksi perikanan budidaya sesuai data sementara mencapai 960.460,28 ton, menurun dibanding Tahun 2019 yang produksinya hanya sebesar 964.509,04 ton. Sementara produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2020 mencapai 201.101,80 ton meningkat dari Tahun 2019 yang sebesar 196.519,30 ton.

Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020* (Ton)

NO.	JENIS USAHA PERIKANAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Perikanan Budidaya	1.339.013,78	1.059.008,70	918.186,40	964.509,04	960.460,28
	a. Jaring Apung Laut	61,62	736,90	1.885,82	728,47	727,17
	b. Jaring Apung Tawar		63,00	63,58	61,02	61,43
	c. Jaring Tancap Tawar	475,70	482,80	480,53	473,42	475,83
	d. Karamba	26,29	27,00	24,71	25,09	25,50
	e. Kolam	7.727,94	4.542,64	18.014,59	2.976,29	3.490,26
	f. Laut Lainnya		1,90	5.519,02	22,95	-
	g. Minapadi Sawah	26,69	51,00	12,00	25,00	86,45
	h. Rumpun Laut	1.208.044,74	948.163,60	763.704,45	922.897,05	918.788,40
	i. Tambak	122.650,80	104.939,86	128.481,71	37.299,76	36.805,24
2.	Perikanan Tangkap	212.330,60	174.964,00	171.115,00	196.519,30	201.101,80
	a. Laut	210.140,20	174.049,30	168.550,50	193.605,20	198.240,60
	b. Perairan Umum	2.190,40	914,70	2.564,50	2.914,10	2.861,20

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021.

Kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang cukup besar juga dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, karena adanya ekosistem pesisir dan pulau kecil seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang sangat luas dan beragam. Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah cukup beragam seperti ekosistem terumbu karang seluas 186.766,71 Ha, padang lamun seluas 27.406,48 Ha dan mangrove seluas 33.876,29 Ha yang merupakan sumberdaya hayati potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wilayah perairan Sulawesi Tengah memiliki letak strategis yang berada di garis khatulistiwa dengan posisi di tengah Pulau Sulawesi.

Aspek keaneragaman sumberdaya hayati, kawasan perairan sangat subur dengan keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup lengkap, dimana kawasan Sulawesi Tengah letaknya di sekitar Khatulistiwa dan merupakan jantung dari segitiga karang dunia (World Coral Triangle) yang merupakan pusat keberadaan sumberdaya terumbu karang dunia. Posisi yang dianggap sangat menguntungkan, karena memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi wilayah ke depan.

2.1.2.1.3.5. Kehutanan

Perkembangan produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif. Jenis hasil hutan Kayu Bulat pada Tahun 2020 mencapai 65.019,12 m³ menurun di banding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 111.091,90 m³. Sementara produksi Kayu Gergajian pada Tahun 2020 mencapai 24.465,17 m³ menurun dibanding Tahun 2019 sebesar 25.728,64 m³. Hasil jenis hutan lainnya yaitu rotan dengan jumlah produksi pada Tahun 2020 mencapai 1.864,20 ton meningkat dibanding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 1.040,00 ton. Untuk jenis hasil hutan Damar produksinya pada Tahun 2020 sebanyak 335,0 ton menurun dibanding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 440,0 ton.

Tabel 2.20
Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

No.	Jenis Hasil Hutan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kayu Bulat (m ³)	11.109,92	46.681,61	76.255,49	111.091,90	65.019,12
2	Kayu Gergajian (m ³)	24.288,49	17.434,06	37.658,75	25.728,64	24.465,17
3	Rotan (ton)	2.689,00	4.620,00	1.380,00	1.040,00	1.864,20
4	Damar (ton)	510	440	600	440	335

Sumber : BPS, 2021.

2.1.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Pada Bulan Desember 2020, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen dari 106,72 pada November 2020 menjadi 107,21 pada Desember 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,15 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (0,90 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,50 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,03 persen), kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,01 persen), serta kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara penurunan indeks harga satu-satunya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Pada saat yang sama, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain tarif angkutan udara (0,12 persen), ikan selar (0,12 persen), ikan cakalang (0,10 persen), daging ayam ras (0,05 persen), telur ayam ras (0,03 persen), popok bayi/diapers (0,02 persen), kol putih (0,02 persen),

ikan teri (0,02 persen), terong (0,01 persen), dan cumi-cumi (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain emas perhiasan (0,03 persen), kangkung (0,02 persen), blus wanita (0,02 persen), cabai merah (0,02 persen), bayam (0,02 persen), beras (0,02 persen), jeruk nipis (0,01 persen), ikan bandeng (0,01 persen), ikan layang (0,01 persen), dan ikan mujair (0,01 persen).

Pantauan IHK nasional di 90 Kota menunjukkan bahwa sebanyak 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 persen dan terendah di Kota Tanjung Selor sebesar 0,05 persen. Kota Luwuk mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,26 persen, sementara Kota Ambon mengalami deflasi terendah sebesar 0,07 persen. Kota Palu menempati urutan ke-34 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-8 di kawasan Sulampua, sementara Kota Luwuk menempati urutan pertama deflasi di tingkat nasional maupun di kawasan Sulampua.

Dari 87 kota di tingkat nasional yang mengalami inflasi selama Desember 2020, inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 persen, diikuti oleh Tanjung Pandan (1,49 persen), Pematang Siantar (1,47 persen), Sibolga (1,32 persen), Manokwari (1,30 persen), Lhokseumawe (1,27 persen), Bau-Bau (1,15 persen), Singaraja (1,08 persen), Batam (1,05 persen), Meulaboh (1,02 persen), Jayapura (1,02 persen), Padangsidempuan (1,00 persen), Tanjung Pinang (0,98 persen), Sintang (0,98 persen), Sorong (0,90 persen), serta kota lainnya dengan inflasi di bawah 0,90 persen. Sementara dari 3 kota yang mengalami deflasi, yang tertinggi terjadi di Kota Luwuk sebesar 0,26 persen, diikuti oleh Kota Tual dan Ambon dengan deflasi masing-masing sebesar 0,16 persen dan 0,07 persen

Dari 21 kota di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), selama Desember 2020 tercatat 18 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Manokwari sebesar 1,30 persen, diikuti oleh Bau-Bau (1,15 persen), Jayapura (1,02 persen), Sorong (0,90 persen), Kotamobagu (0,71 persen), Ternate (0,70 persen), Merauke (0,66 persen), Palu (0,63 persen), dan kota lainnya di bawah 0,60 persen. Sedangkan kota-kota yang mengalami deflasi yakni

Kota Luwuk sebesar 0,26 persen, Kota Tual sebesar 0,16 persen, dan Kota Ambon sebesar 0,07 persen.

2.1.2.1.5. Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui distribusi pendapatan masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks gini atau koefisien gini. Nilai indeks gini berada diantara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

a. Perkembangan Gini Ratio Maret 2016 - September 2020

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,334 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, pada September 2020 Gini Ratio sebesar 0,295 naik 0,003 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,292 namun stagnan dibanding Maret 2020 di angka yang sama.

b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran September 2019 - September 2020

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen,

ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 20,48 persen, maupun dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,62 persen.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 19,63 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 22,38 persen.

Tabel 2.21
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah September 2019, Maret 2020, dan September 2020 (Persen)

DAERAH/TAHUN	PENDUDUK 40 PERSEN TERBAWAH	PENDUDUK 40 PERSEN MENENGAH	PENDUDUK 20 PERSEN ATAS	GINI RATIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
September 2019	18,10	42,05	39,85	0,339
Maret 2020	19,15	40,68	40,17	0,334
September 2020	19,63	39,10	41,27	0,334
Perdesaan				
September 2019	22,66	38,92	38,41	0,292
Maret 2020	22,37	38,88	38,74	0,295
September 2020	22,38	38,50	39,12	0,295
Perkotaan+Perdesaan				
September 2019	20,48	37,82	41,71	0,330
Maret 2020	20,62	38,00	41,38	0,326
September 2020	20,92	37,92	41,16	0,321

Sumber: BPS, Tahun 2021

c. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan

Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2020 adalah perubahan pengeluaran per kapita penduduk. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan yang lebih besar dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah. Pada kelompok penduduk 20 persen teratas penurunan tersebut mencapai 3,24 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya menurun sebesar 1,16 persen. Secara distribusi juga tercatat bahwa porsi pengeluaran penduduk kelompok 20 persen teratas secara total mengalami penurunan sebesar 0,22 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah justru meningkat 0,30 persen.

d. Gini Ratio Menurut Provinsi di Sulawesi pada September 2019 - September 2020

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020.

Dibanding dengan Gini Ratio nasional pada September 2020 sebesar 0,385, hanya Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang memiliki nilai Gini Ratio lebih tinggi. Kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan September 2019 maupun Maret 2020, dimana selain kedua provinsi tersebut, juga terdapat Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.22
Gini Ratio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2019, Maret 2020, dan September 2020

KODE	PROVINSI	SEPTEMBER 2019			MARET 2020			SEPTEMBER 2020		
		KOTA	DESA	K + D	KOTA	DESA	K + D	KOTA	DESA	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71	SULAWESI UTARA	0,375	0,346	0,376	0,371	0,344	0,370	0,367	0,346	0,368
72	SULAWESI TENGAH	0,339	0,292	0,330	0,334	0,295	0,326	0,334	0,295	0,321
73	SULAWESI SELATAN	0,393	0,354	0,391	0,384	0,356	0,389	0,384	0,352	0,382
74	SULAWESI TENGGARA	0,402	0,353	0,393	0,404	0,347	0,389	0,403	0,348	0,388
75	GORONTALO	0,399	0,393	0,410	0,393	0,392	0,408	0,390	0,391	0,406
76	SULAWESI BARAT	0,438	0,32	0,365	0,436	0,321	0,364	0,437	0,321	0,356
	INDONESIA	0,391	0,315	0,380	0,393	0,317	0,381	0,399	0,319	0,385

Sumber: BPS, Tahun 2021.

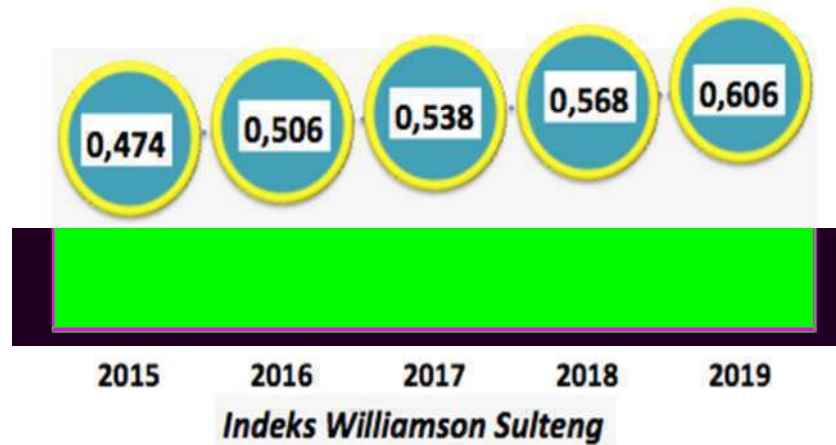
2.1.2.1.6. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung meningkat yang direfleksikan dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,474 poin pada Tahun 2015 menjadi 0,606 poin pada Tahun 2019. Untuk itu langkah yang penting ke depan dilakukan adalah *manage pengeluaran fiscal* dengan baik, menata dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan,

dengan demikian maka kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.

Gambar 2.15
Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah
Tahun 2015 - 2019



Sumber: BPS 2020 (Data Diolah Kembali).

2.1.2.1.7. Perkembangan Penduduk Miskin

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Secara umum, pada periode Maret 2013 - September 2019 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2020

TAHUN/BULAN	GARIS KEMIKINAN (Rupiah/Kapita/Bulan)		JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribu)		PERKOTAAN + PERDESAAAAN
	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN	PERDESAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013 Maret	298.646	265.582	59,79	345,63	405,42
2013 September	324.072	293.567	64,32	335,78	400,09
2014 Maret	336.900	303.975	67,08	325,57	392,65
2014 September	349.978	321.009	71,65	315,41	387,06
2015 Maret	358.399	331.855	77,97	343,66	421,62
2015 September	376.496	353.080	79,25	327,09	406,34
2016 Maret	391.070	370.392	75,45	345,07	420,52
2016 September	399.413	376.658	75,90	337,25	423,15
2017 Maret	416.453	383.097	77,98	339,88	417,87
2017 September	430.728	400.639	81,56	341,72	423,27
2018 Maret	434.414	405.707	85,03	335,18	420,21
2018 September	437.697	418.035	83,84	329,65	413,49
2019 Maret	457.193	433.870	84,74	325,62	410,36
2019 September	481.436	460.187	81,46	322,57	404,03
2020 Maret	489.881	467.770	80,73	318,00	398,73
2020 September	492.758	478.687	87,43	316,31	403,74

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.24
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2013-2020

TAHUN/BULAN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		
	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2013 Maret	8,90	16,53	14,67
2013 September	9,45	15,89	14,32
2014 Maret	9,77	15,27	13,93
2014 September	10,35	14,66	13,61
2015 Maret	10,93	15,90	14,66
2015 September	11,06	15,07	14,07
2016 Maret	10,18	15,91	14,45
2016 September	10,07	15,48	14,09
2017 Maret	10,16	15,54	14,14
2017 September	10,39	15,59	14,22
2018 Maret	10,15	15,51	14,01
2018 September	9,50	15,41	13,69
2019 Maret	9,32	15,26	13,48
2019 September	8,90	15,01	13,18
2020 Maret	8,76	14,69	12,92
2020 September	9,21	14,76	13,06

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,76 persen naik menjadi 9,21 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 14,69 persen naik menjadi 14,76 persen pada September 2020.

Sementara jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa jumlah penduduk miskin yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong baik pada tahun 2019 sebesar 81,36 ribu jiwa atau 16,64 persen maupun pada tahun 2020 sebesar 78,76 ribu jiwa atau 15,85 persen, dan yang paling rendah adalah di Kota Palu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,62 ribu jiwa atau 6,83 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 26,89 ribu jiwa atau 6,80 persen, selanjutnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			
		2019		2020	
		(Ribu)	(%)	(Ribu)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Banggai Kepulauan	17,54	14,84	16,70	14,04
2.	Banggai	29,3	7,80	28,16	7,39
3.	Morowali	16,61	13,75	16,50	13,43
4.	Poso	39,92	15,65	40,20	15,45
5.	Donggala	55,83	18,40	53,17	17,39
6.	Tolitoli	30,79	13,09	30,51	12,85
7.	Buol	24,51	15,19	22,93	13,93
8.	Parigi Moutong	81,36	16,64	78,76	15,85
9.	Tojo Una-Una	26,36	17,16	25,43	16,39
10.	Sigi	30,82	12,91	30,00	12,45
11.	Banggai Laut	11,46	15,34	11,09	14,60
12.	Morowali Utara	19,25	15,08	18,38	14,10
13.	Kota Palu	16,62	6,83	26,89	6,80
Sulawesi Tengah		410,36	13,48	398,73	12,92

Sumber: BPS, 2021

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Meski demikian kita tidak berhenti sampai disini, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih diatas tingkat kemiskinan nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2019 – September 2020

Tahun		Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)		(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
2019	September	1,98	3,71	3,19
2020	Maret	1,68	2,96	2,58
2020	September	1,83	3,20	2,78
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
2019	September	0,54	1,41	1,15
2020	Maret	0,43	0,92	0,77
2020	September	0,43	1,07	0,87

Sumber: BPS, 2021

Pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 2,58 dan pada September 2020 naik menjadi 2,78. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,77 menjadi 0,87 pada periode yang sama. Begitu juga apabila dilihat pada periode

sebelumnya yaitu September 2019-September 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2019 adalah 3,19 dan pada september 2020 adalah 2,78, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 1,15 menjadi 0,87 persen.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,68 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,96. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,43 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,92.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*)
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*)
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Salah satu sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu

meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Adapun beberapa arah kebijakan di antaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah. Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KELUARAHAN				
		SD	SMP	SMA	SMK	PT
1	2	3	4	5	6	7
1.	BANGGAI KEPULAUAN	137	65	21	17	1
2.	BANGGAI	297	131	54	23	2
3.	MOROWALI	127	48	17	10	2
4.	POSO	168	78	21	13	5
5.	DONGGALA	167	108	35	13	-
6.	TOLITOLI	110	72	25	13	5
7.	BUOL	113	67	15	9	2
8.	PARIGI MOUTONG	268	127	48	22	3
9.	TOJO UNA-UNA	141	59	21	7	-
10.	SIGI	174	83	33	9	4
11.	BANGGAI LAUT	65	39	14	7	-
12.	MOROWALI UTARA	121	49	12	7	-
13.	KOTA PALU	46	35	21	17	13
SULAWESI TENGAH		1.934	961	337	167	37

Sumber: BPS, Tahun 2021

Sampai dengan Tahun 2020 fasilitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi sudah hampir merata disemua Kabupaten/Kota, walaupun masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum memiliki Perguruan Tinggi yaitu Kabupaten Donggala, Tojo Una – Una, Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara, dan Perguruan Tinggi yang terbanyak selain Kota Palu yang memang merupakan Ibu Kota Provinsi yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tolitoli masing – masing memiliki 5 Perguruan Tinggi.

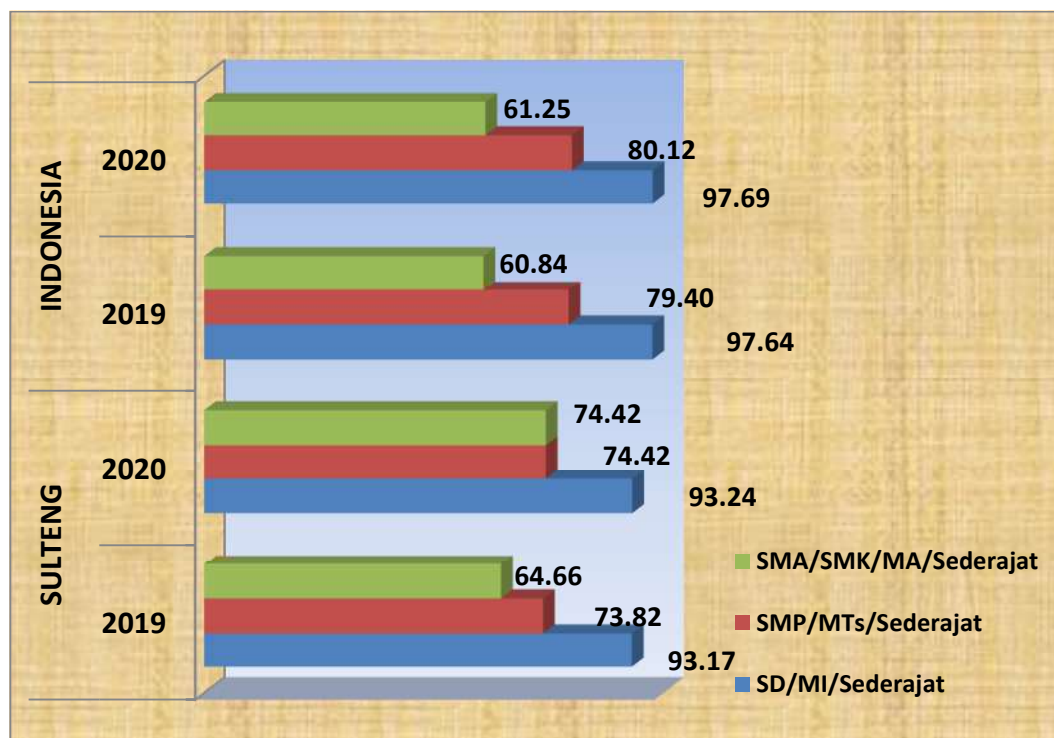
2.1.2.2.1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitandengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Capaian APK SD di Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 sebesar 103,95 persen, sementara capaian APK SMP sebesar 91,98 persen dan capaian APK SMA sebesar 88,42 persen, dapat ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020



Sumber: BPS, 2021.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2020 capaian APK SD tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 112,05 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 99,36 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Sigi, dapat dilihat pada gambar berikut :

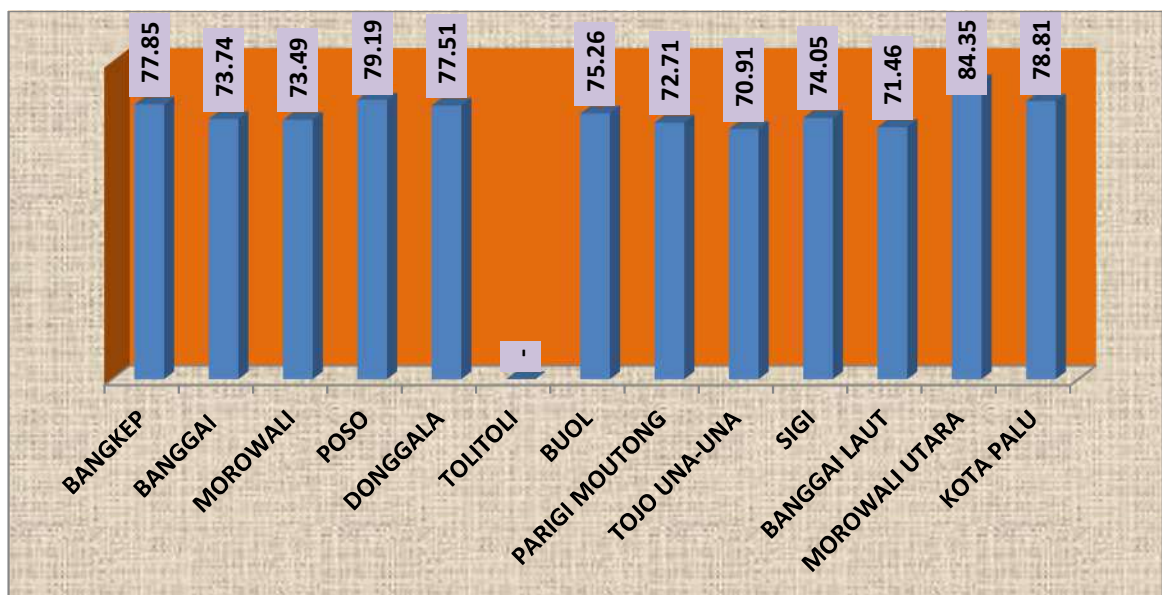
Gambar 2.17
Capaian APK SD/MI Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2021.

Capaian APK SMP pada Tahun 2020 tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali sebesar 103,84 persen dan terendah di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 78,02 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Sigi, dapat dilihat pada gambar berikut :

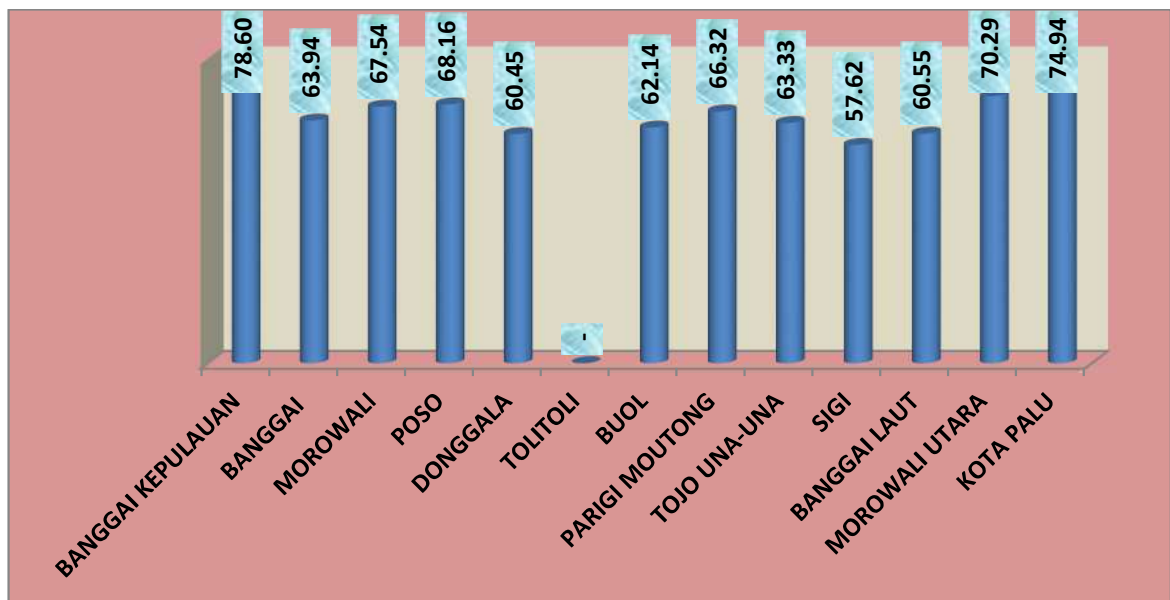
Gambar 2.18
Capaian APK SMP Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2021.

Pada jenjang SMA Tahun 2020, capaian APK tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 111,55 persen dan terendah di Kabupaten Buol sebesar 75,80 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terupdate yaitu Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Sigi, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.19
Capaian APK SMA Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2021.

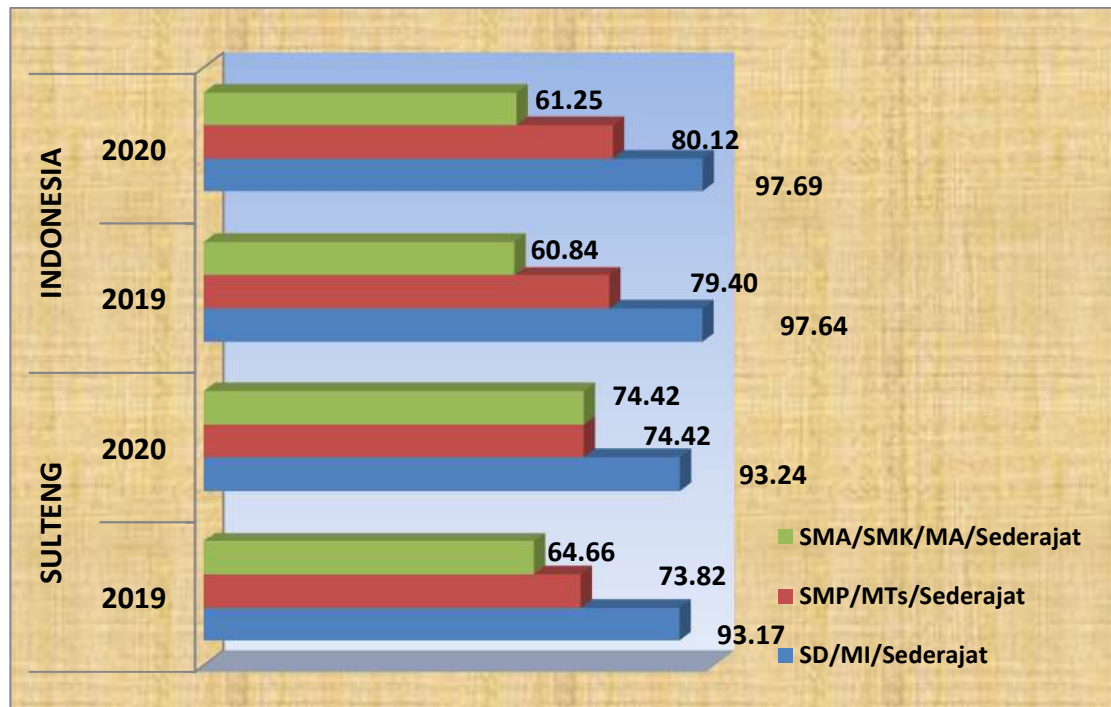
2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Sama halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, atau dengan perkataan lain APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Capaian APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 capaian APM SD/MI sebesar 97,64 persen meningkat

97,69 persen pada Tahun 2020. Sementara capaian APM SMP/MTs pada Tahun 2019 sebesar 79,40 persen meningkat menjadi 80,12 persen pada Tahun 2020. Sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK pada Tahun 2019 sebesar 60,84 persen meningkat menjadi 61,25 persen pada Tahun 2020, dapat ditunjukkan pada gambar berikut :

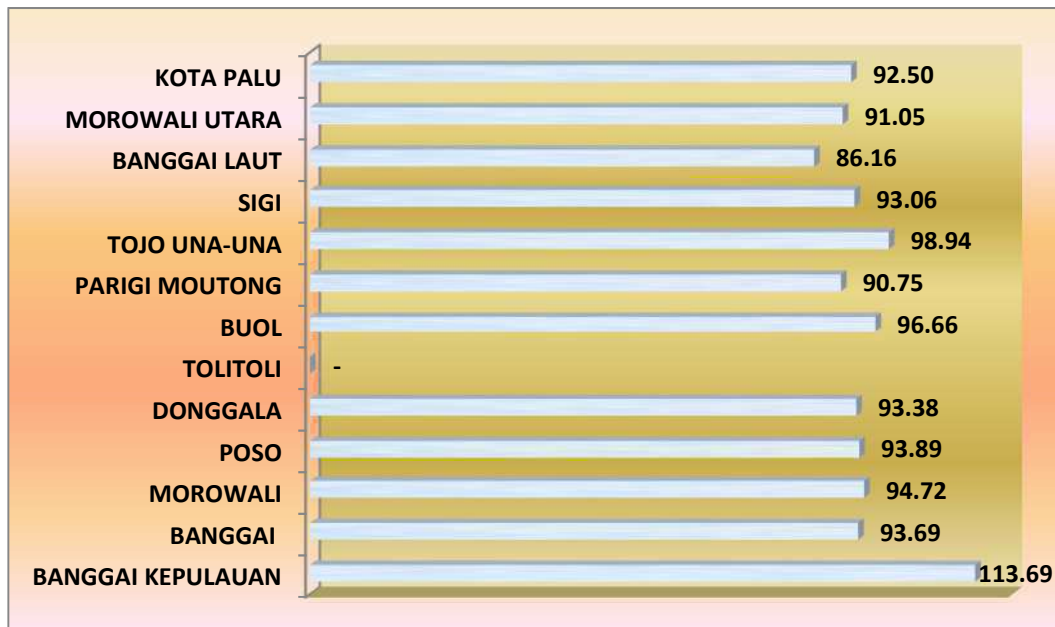
Gambar 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2020



Sumber: BPS, 2021.

Perspektif spasial kabupaten/kota, pada Tahun 2020 capaian APM SD tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 113,69 persen dan terendah di Kabupaten Banggai Laut sebesar 86,16 persen, namun untuk Kabupaten Tolitoli data APM belum terupdate, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

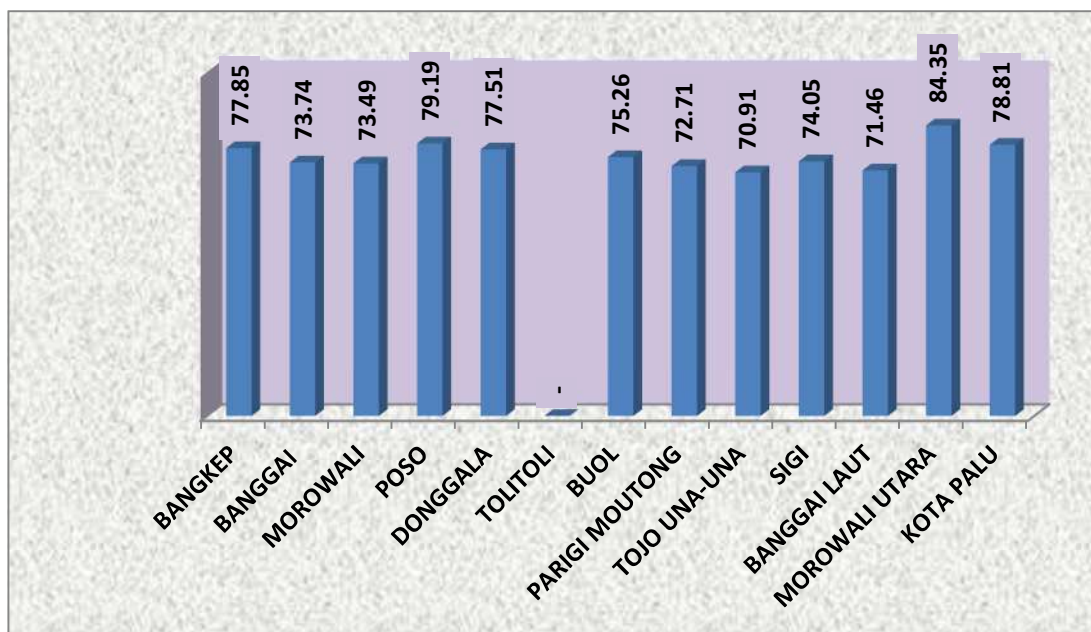
Gambar 2.21
Capaian APM SD Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021.

Pada jenjang SMP, pada Tahun 2020 capaian APM SMP tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 84,35 persen dan terendah di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu 70,91 persen, namun untuk Kabupaten Tolitoli data APM belum terupdate, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

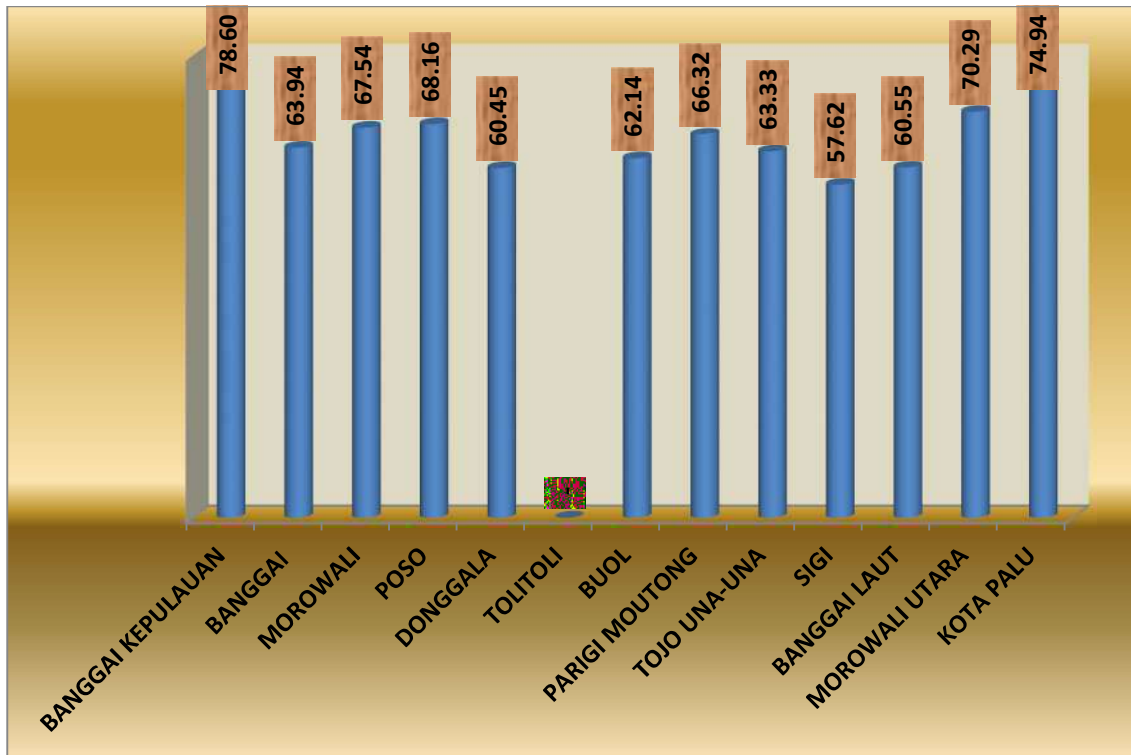
Gambar 2.22
Capaian APM SMP Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021.

Pada jenjang SMA, pada Tahun 2019, capaian APM SMA tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 74,42 persen dan terendah di Kabupaten Tolitoli sebesar 56,48 persen.

Gambar 2.23
Capaian APM SMA Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021.

2.1.2.2.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Secara substansi, pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa perkembangan indikator kesehatan, antara lain: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka

Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Persentase Balita Gizi Buruk.

Selama periode Tahun 2016-2020, perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat yakni dari 67,31 tahun pada Tahun 2016 menjadi 68,75 tahun pada Tahun 2020. Sementara perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada periode 2016-2017 cenderung menurun, yakni dari 83,59 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2016 meningkat menjadi 213,44 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 153,88 Per 100.000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 213,41 Per 100.000 Kelahiran Hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 131,24 Per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode Tahun 2016-2020 berfluktuasi yakni dari 12,79 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 menurun menjadi 11,85 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, pada tahun 2018 menurun menjadi 8,77 per 100.000 Kelahiran Hidup, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,94 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 8,21 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sementara Angka Kematian Balita (AKABA) pada periode yang sama pergerakannya berfluktuasi yakni pada Tahun 2016 sebesar 13,52 per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2017 sebesar 0,49 per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2018 sebesar 0,63 per 1000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2019 menjadi 1,10 per 1000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 0,62 per 1000 Kelahiran Hidup.

Perkembangan persentase balita gizi buruk selama periode 2016-2020, menunjukkan *trend* yang membaik, yakni dari 0,16 persen pada Tahun 2016 berkurang sedikit menjadi 0,15 persen pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 14,16 persen, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 10,83 persen, namun pada tahun 2020 kembali sedikit meningkat menjadi 11,54 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019

No.	Indikator Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,31	67,32	67,78	68,23	68,75
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	83,59	213,44	153,88	213,41	131,24
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12,79	11,85	8,77	9,94	8,21
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	13,52	0,49	0,63	1,10	0,62
5	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,16	0,15	14,16	10,83	11,54

Sumber: BPS dan Dinkesda Provinsi Sulteng, 2021.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kekayaan seni dan kebudayaan Sulawesi Tengah yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota merupakan asset yang sangat penting nilainya bagi pengembangan dan pembangunan di Sektor Pariwisata. Seni dan budaya ini antara lain berupa tarian tradisional, berbagai macam seni rupa dan seni musik tradisional.

Perkembangan jumlah grup kesenian di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2015-2018 mengalami peningkatan yakni dari 259 sanggar seni pada Tahun 2015 menjadi 265 sanggar seni pada Tahun 2018, sementara jumlah gedung kesenian dari 4 unit pada Tahun 2015 meningkat menjadi 5 unit pada Tahun 2018.

Di bidang pemuda dan olah raga, jumlah gedung olahraga yang terdapat di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2015-2018 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,06 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya,
Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014 - 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2015	2016	2017	2018
1	Kebudayaan				
	- Jumlah grup kesenian (sanggar)	259	261	265	265
	- Jumlah gedung	4	5	5	5
2	Pemuda dan Olahraga				
	Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber: Disbudpar dan Dispora Daerah Provinsi Sulteng, 2019.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan atau investasi dibidang pendidikan dan kesehatan menempati posisi urgen dalam skala prioritas pembangunan daerah harus terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia lebih diutamakan dengan memberi kesempatan kepada penduduk usia sekolah, dimana luasnya wilayah yang harus dijangkau merupakan faktor yang cukup berpengaruh disamping faktor-faktor lainnya dalam menjalankan program-program pendidikan yang berimplikasi terciptanya SDM yang handal dan siap bersaing di era globalisasi.

2.1.3.1.1. Pendidikan

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator Kinerja Bidang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :					
	- APS SD/MI	98,02	98,14	98,14	98,24	98,40
	- APS SMP/MTs	91,80	92,32	92,32	92,74	93,01
	- APS SMA/MA/SMK	73,80	74,82	74,82	75,05	75,73
2.	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (per 1000 penduduk)					
	- SD/MI	11,19	11,05	8,42	10,67	10,51
	- SMP/MTs	4,47	4,01	6,68	4,25	4,26
	- SMA/MA/SMK	1,85	1,91	1,5	1,55	1,58
3.	Rasio Guru Terhadap Murid (per 1000)					
	- SD/MI	68,39	67,71	73,23	75,59	83,18
	- SMP/MTs	78,16	66,15	79,57	84,49	89,31
	- SMA/MA/SMK	79,55	64,84	84,29	71,38	71,41

Sumber: BPS, 2020.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015-2019 sebagai berikut.

- Pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), APS cenderung meningkat, yakni dari 98,02 persen pada Tahun 2015 menjadi 98,40 persen pada Tahun 2019.
- Pada jenjang SMP/MTs, APS cenderung meningkat, yakni dari 91,80 persen pada Tahun 2015 menjadi 93,01 persen pada Tahun 2019.
- Pada tingkat SMA/MA/SMK, APS cenderung meningkat, yakni dari 73,80 persen pada Tahun 2015 menjadi 75,73 persen pada Tahun 2019.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Sulawesi Tengah selama periode 2015-2019 sebagai berikut.

- Pada jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD/MI cenderung menurun, yakni dari 11,05 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2015 menjadi 10,51 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2019.
- Pada jenjang SMP/MTs, rasionya cenderung meningkat, yakni dari 4,47 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2015 menjadi 4,26 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2019.
- Pada jenjang SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK cenderung menurun, yakni dari 79,55 per 1000 penduduk usia sekolah pada tahun 2015 menjadi 71,41 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2019.

c. Rasio Guru Terhadap Murid

Perkembangan rasio guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode 2015-2019 sebagai berikut.

- Pada jenjang pendidikan SD/MI, rasio guru terhadap murid cenderung meningkat, yakni dari 68,39 per 1000 murid pada Tahun 2015 menjadi 83,18 per 1000 murid pada Tahun 2019.

- Pada tingkat SMP/MTs, rasio guru terhadap murid cenderung meningkat, yakni dari 78,16 per 1000 murid pada Tahun 2015 menjadi 89,31 per 1000 murid pada Tahun 2019.
- Pada tingkat SMA/SMK/MA, rasio guru terhadap murid cenderung menurun, yakni dari 79,55 per 1000 murid pada Tahun 2015 menjadi 71,41 per 1000 murid pada Tahun 2019.

d. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015-2019 sebagai berikut.

- Pada jenjang SD/MI, Angka Putus Sekolah cenderung meningkat, yakni dari 1,22 persen pada Tahun 2015 menjadi 1,35 persen pada Tahun 2019.
- Pada tingkat SMP/MTs, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan, yakni dari 9,45 persen pada Tahun 2015 menjadi 9,0 persen pada Tahun 2019.
- Pada tingkat SMA/MA/SMK angka putus sekolah cenderung meningkat, yakni dari 2,65 persen pada Tahun 2015 menjadi 3 persen pada Tahun 2019.

e. Angka Kelulusan

Perkembangan Angka Kelulusan di Sulawesi Tengah selama periode 2015-2019 sebagai berikut.

- Pada jenjang SD/MI, angka kelulusan cenderung meningkat yakni dari 98,99 persen pada Tahun 2015 menjadi 97,10 persen pada Tahun 2019.
- Pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan cenderung menurun, yakni dari 97,52 persen pada Tahun 2015 menjadi 96,00 persen pada Tahun 2019.
- Pada jenjang SMA/SMK, Angka Kelulusan cenderung menurun, yakni dari 96,06 persen pada Tahun 2015 menjadi 95,90 persen pada Tahun 2019.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator Kinerja Bidang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah (%):					
	Angka Putus Sekolah SD/MI	1,22	1,0	1,60	1,30	1,35
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	9,45	9,0	11,0	9,0	9
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	2,65	2,0	3,20	3,10	3
2	Angka Kelulusan (AL) (%):					
	Angka Kelulusan SD/MI	98,99	98,98	96,80	97,99	97,10
	Angka Kelulusan SMP/MTs	97,52	97,52	95,00	96,90	96,00
	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	98,08	98,08	95,50	97,75	95,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulteng, 2020.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan indikator kesehatan pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 - 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000)	13,8	14,00	11,22	14,2	14,2
2.	Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 1000)	0,06	0,06	0,09	0,03	0,03
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000)	0,0099	0,0107	0,0116	0,0124	0,0126
4.	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 1000)	0,027	0,026	0,028	0,035	0,041
5.	Rasio tenaga medis (bidan/perawat) persatuan penduduk (per 1000)	3,27	3,85	4,21	3,62	3,61

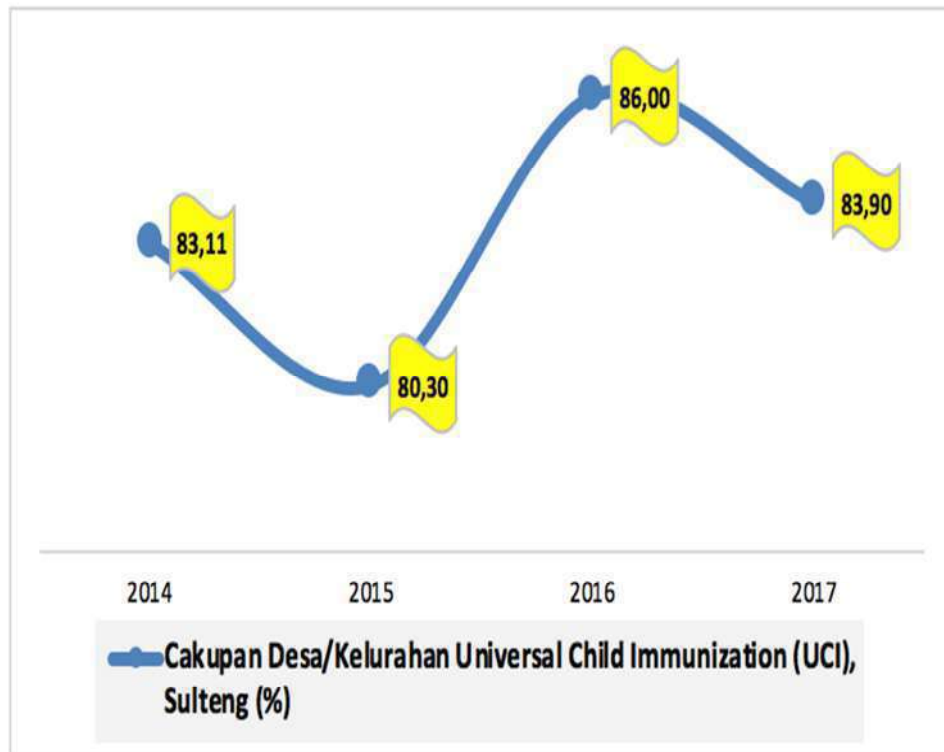
Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 (Data diolah kembali).

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan indikator kinerja kesehatan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut.

- Perkembangan rasio posyandu per satuan balita cenderung menurun, yakni dari 13,8 per 1000 balita pada Tahun 2016 menjadi 14,2 per 1000 balita pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio puskesmas per satuan penduduk mengalami penurunan yakni dari 0,06 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,03 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 0,0099 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,0126 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio dokter per satuan penduduk cenderung meningkat yakni dari 0,027 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,041 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio tenaga medis (perawat/bidan) per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 3,27 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 3,61 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.

Selanjutnya, perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2014-2017 cenderung fluktuatif, yakni pada Tahun 2014 sebesar 83,11 persen menurun menjadi 80,30 persen pada Tahun 2015, pada Tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI meningkat menjadi 86,0 persen, selanjutnya menurun menjadi 83,90 persen pada tahun 2017.

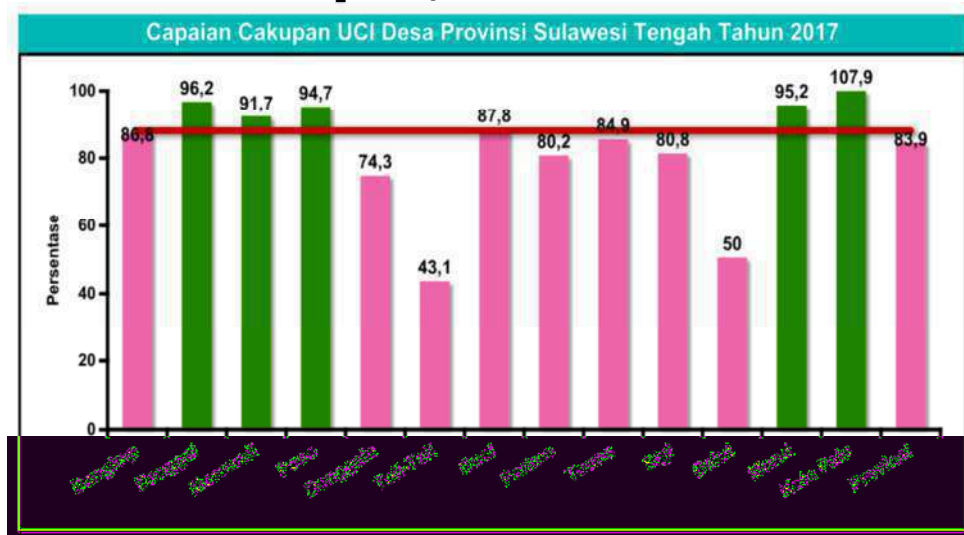
Gambar 2.24
Perkembangan Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2017 capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 107,9 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Tolitoli sebesar 43,1 persen. Dari 13 Kabupaten/Kota, terdapat 5 kabupaten/Kota yang mencapai target yaitu Kabupaten Banggai (96,2%), Kabupaten Morowali (91,7%), Kabupaten Poso (94,7%), Kabupaten Morowali Utara (95,2%) dan Kota Palu (107,9%).

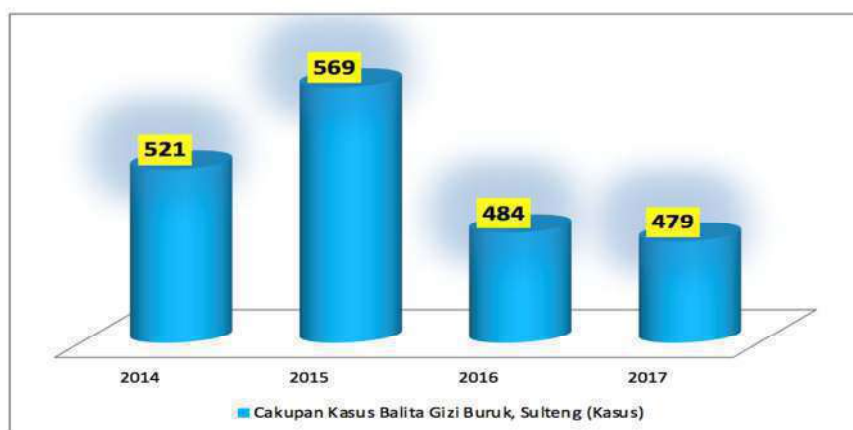
Gambar 2.25
Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Sedangkan jumlah kasus balita gizi buruk di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 479 kasus, menurun dibanding dengan Tahun 2016 yang sebesar 484 kasus.

Gambar 2.26
Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

2.1.3.1.2.1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam

rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Disamping itu melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga (kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat.

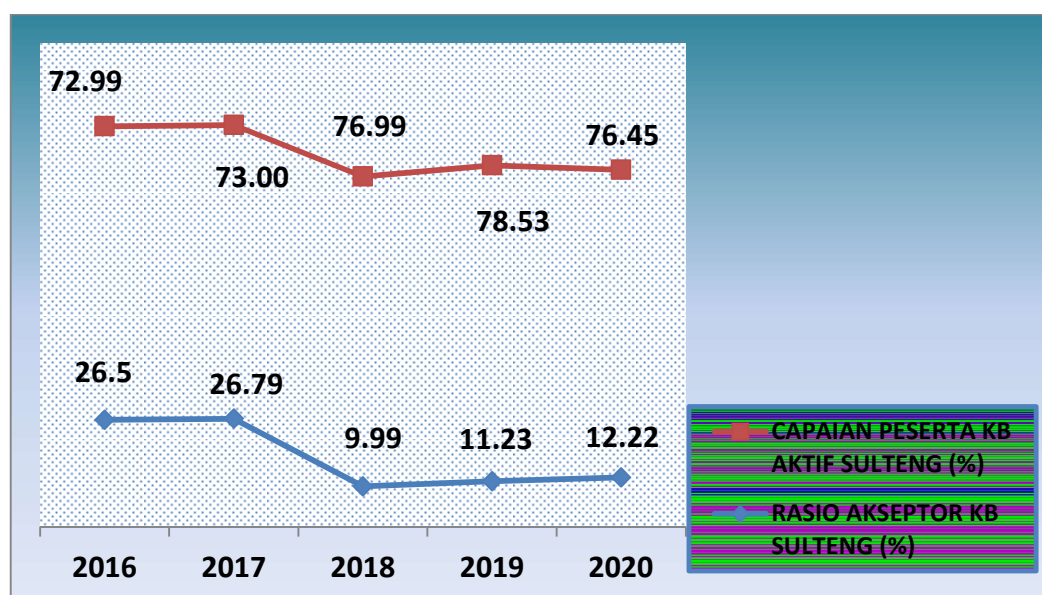
Perkembangan pelaksanaan program KB di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.33
Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	RASIO AKSEPTOR KB SULTENG (%)	26,5	26,79	9,99	11,23	12,22
2.	CAPAIAN PESERTA KB AKTIF SULTENG (%)	72,99	73,00	76,99	78,53	76,45
3.	RATA-RATA JUMLAH ANAK PER KELUARGA SULTENG (ORANG)	3	3	2,56	2,61	2,61

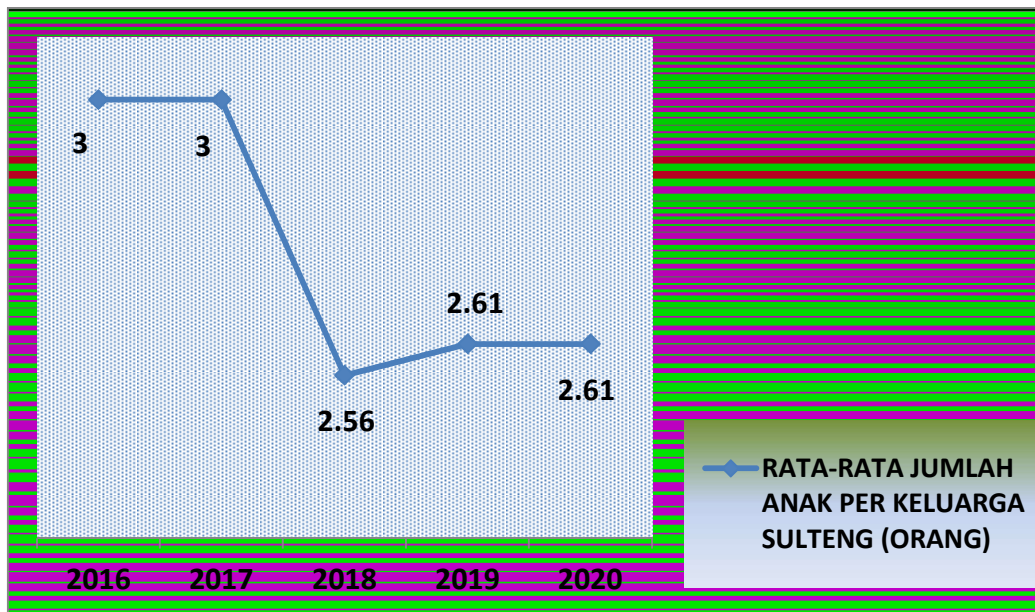
Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2021.

Gambar 2.27
Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2021.

Gambar 2.28
Perkembangan Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga di Provinsi
Sulawesi Tengah (Orang)
Tahun 2016 – 2020



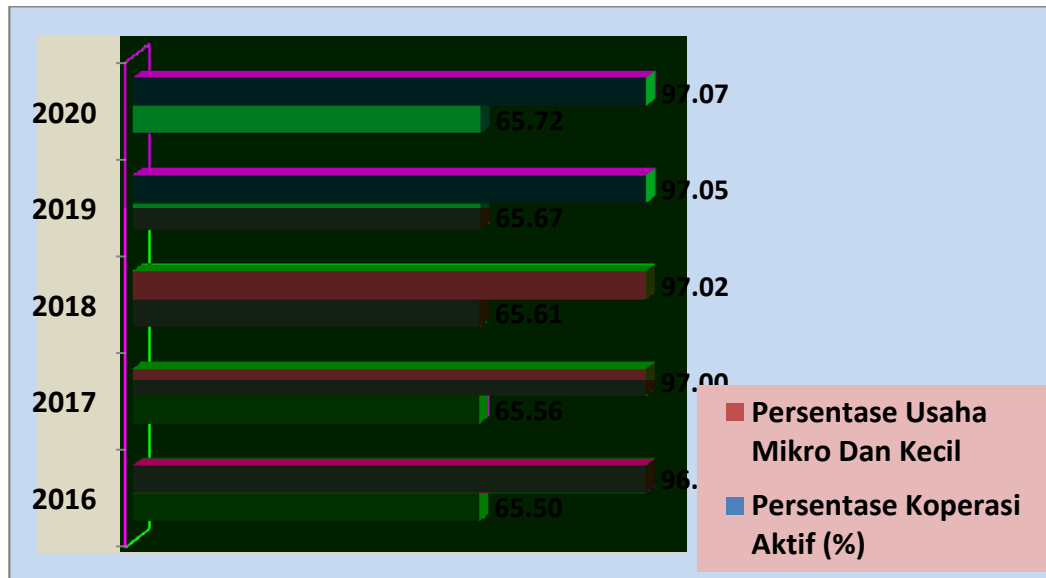
Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2021.

Terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sepanjang periode Tahun 2016-2020, sebanyak 3 anak per keluarga. Sementara rasio akseptor KB diantara pasangan usia subur pada Tahun 2016 sebesar 26,5 persen, angka ini lebih rendah sedikit dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 26,79 persen, pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 9,99 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 11,23 persen, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 12,22 persen, Sedangkan pada cakupan peserta KB aktif pada Tahun periode tahun 2016-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 76,45.

2.1.3.1.3. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan saat ini UKM menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.29
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif, Usaha Mikro Kecil
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2021

Persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 mencapai 65,72 persen, capaian ini lebih tinggi dibanding Tahun 2019 yang hanya sebesar 65,67 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil pada Tahun 2020 sebesar 97,07 persen, jika dibandingkan tahun 2019 hanya sedikit meningkat sebesar 97,05 persen.

Selanjutnya terlihat bahwa jumlah persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada tahun 2017 sebesar 65,56 persen, capaian ini relatif sedikit tinggi dibanding Tahun 2016 sebesar 65,50 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan kecil pada Tahun 2017 sebesar 97,00 persen meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 96,97 persen, sedangkan jumlah Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 721.643 unit usaha jika dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 718.143 unit, sementara Jumlah BPR/LKM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 71 unit, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) dan
BPR/LKM (Unit) di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	707.643	711.143	714.643	718.143	721.643
Jumlah BPR/LKM (Unit)	71	71	71	71	71

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2021

Untuk melihat gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2020 dapat dilihat antara lain pada capaian indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dari target 10 persen dan terealisasi 10 persen dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen, indikator Peningkatan Usaha Kecil dari target 1.550 Usaha Kecil dan terealisasi sebanyak 477 Usaha Kecil dengan tingkat capaian sebesar 30,77 persen, indicator selanjutnya yaitu Meningkatnya Kemampuan dan Kualitas SDM Pelaku Usaha Koperasi dan UKM dari target 27 angkatan dapat terealisasi sebanyak 33 angkatan atau melampaui target RKPD dengan persentase capaian sebesar 122,22 persen. Gambaran capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.35
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bidang Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian EKPDP 2020	
1	Koperasi berkualitas 80%, dari 36 Koperasi Primer/Sekunder Aktif	10,00%	10,00%	100,00%	
2	Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas	35,00%	24,80	70,86%	Tidak ada data
3	Jumlah usaha kecil yang naik kelas	3,00%	3,00%	100,00%	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian EKPD 2020	
	(unit/Usaha Kecil)				
4	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	27 Angkatan	33 angkatan	122.22%	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali).

Tabel. 2.36
Capaian Indikator Kinerja Keluaran (IKK)
Bidang Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020

Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian EKPD 2020	Ket
Koperasi Aktif(%)	60%	66%	110,00%	
Koperasi sehat (unit/kop)	10 unit	14 unit	140,00%	
Koperasi tumbuh (%)	10%	10%	100,00%	
Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya (unit/kop)	9 unit	9 unit	100,00%	
Jumlah tenaga kerja terserap (%)	40%	0,00%	-	Tidak ada data capaian
Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas (%)	35%	24,8%	70,86%	
Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas (unit/usaha kecil)	1.000	238	23,80	
Jumlah usaha kecil yang mendapatkan pendampingan (unit/usaha kecil)	500	151	30,20	
Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya(unit/usaha kecil)	50	88	176,00%	
Meningkatnya Kemampuan dan Kualitas SDM Pelaku Usaha Koperasi dan UKM	27 Angkatan	33 angkatan	122,22%	

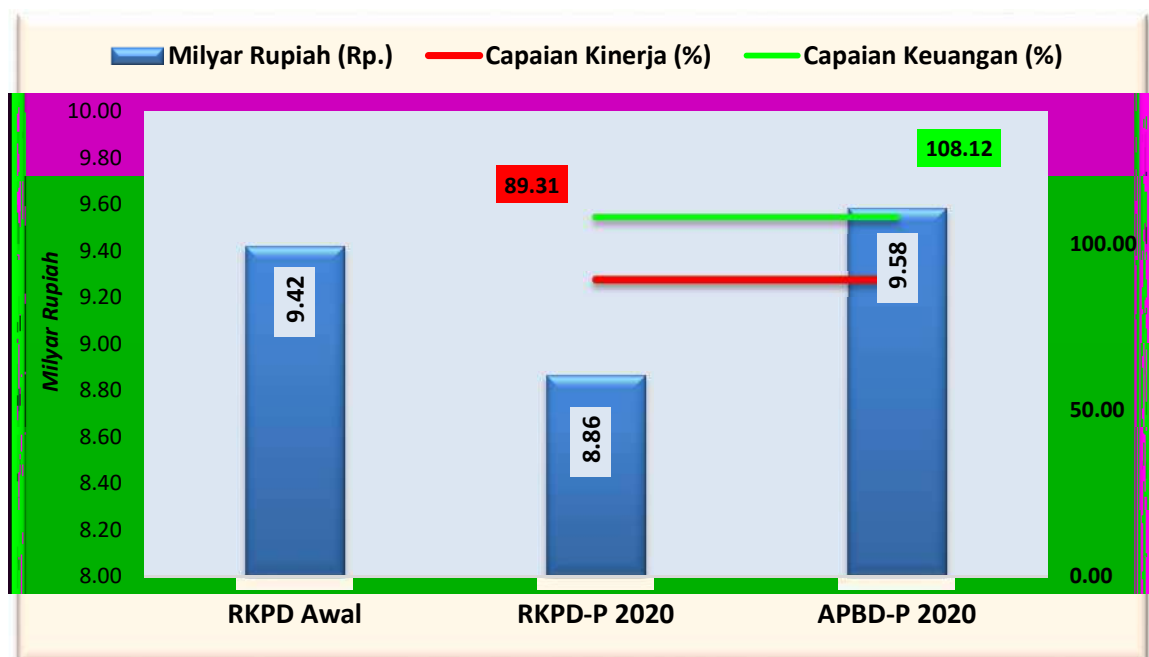
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali).

Dari hasil persandingan/konsistensi penganggaran pada Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPD Awal Tahun 2020 sebesar Rp. 9.417.971.697, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar

Rp. 8.861.770.697 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9.581.770.697 yang berarti terjadi deviasi sebesar 81,2 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 720.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Koperasi dan UMKM dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **108,12** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **89,31** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Tinggi**',

Gambar. 2.30
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Koperasi dan UMKM Hidup Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

2.1.3.1.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mensukseskan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat baik program nasional maupun program yang dibangun melalui pemerintah daerah sangat dibutuhkan kesiapan institusi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah.

Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kelompok binaan LPM di Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan sebanyak 1.842 lembaga. Dari jumlah binaan LPM tersebut, yang menjadi LPM berprestasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan sebanyak 12 LPM, namun jumlah LPM berprestasi tidak terdapat pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Perkembangan Kelompok Binaan LPM dan LPM Berprestasi
di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KELOMPOK LPM	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
2	LPM BERPRESTASI	12	12	12	12	0

Sumber: BPPMD Provinsi Sulteng, Tahun 2021.

2.1.3.1.5. Kebudayaan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dan sekaligus sebagai pendorong perekonomian daerah. Untuk itu potensi pariwisata, seni dan budaya perlu terus untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui kegiatan promosi, baik dalam negeri maupun manca negara.

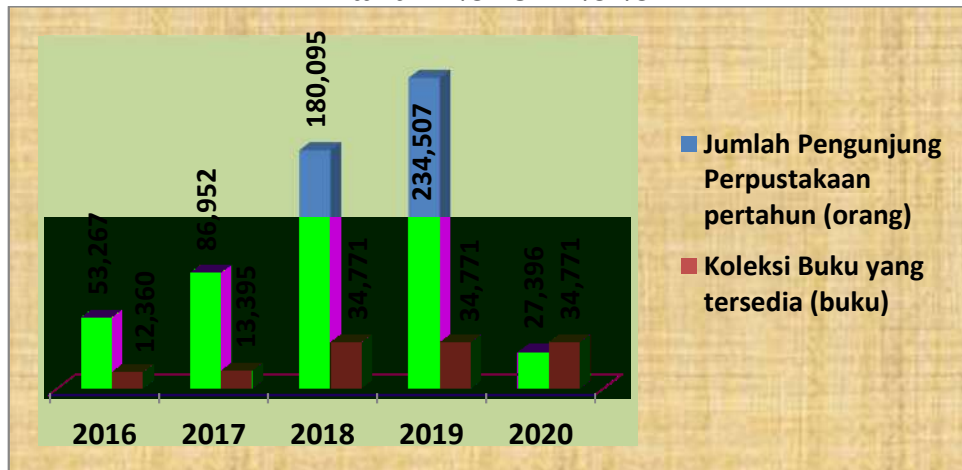
Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 17 kali, dengan jumlah sarana fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya yaitu 20 buah. Selanjutnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Sulawesi Tengah sejak Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yakni dari 16 situs/BCB pada Tahun 2014 menjadi 18 situs/BCB pada Tahun 2017.

2.1.3.1.6. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah. Sejak empat tahun

terakhir, jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia.

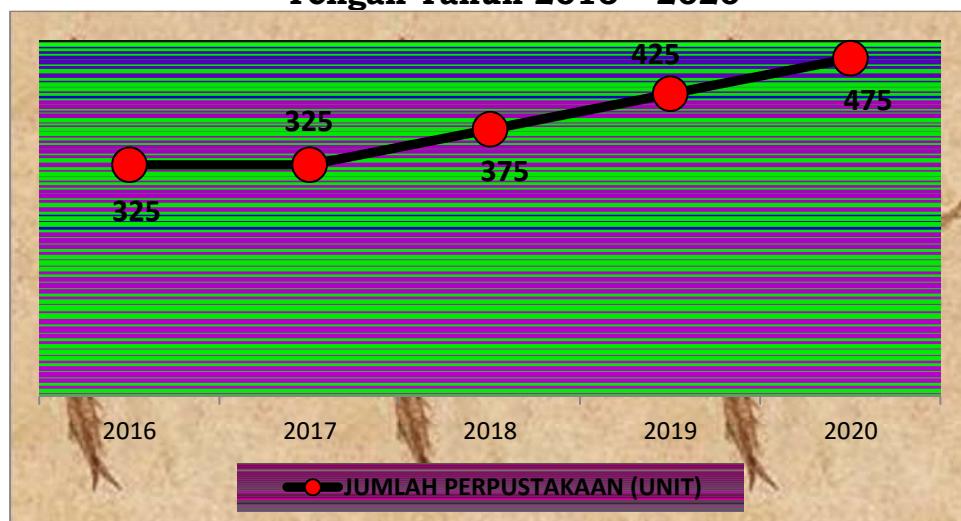
Gambar 2.31
Perkembangan Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2021

Jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 53.267 orang pada Tahun 2016 menjadi 234.507 orang, namun pada Tahun 2020 menurun drastis dengan itu jumlah pengunjung perpustakaan hanya sebanyak 27.396 orang atau sekitar 11,68 persen, namun pada sisi lain jumlah perpustakaan dari tahun 2017 dengan jumlah 325 unit mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 475 unit, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.32
Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2021.

2.1.3.1.7. Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Pada Tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1.575,73 orang meningkat dibanding Tahun 2019 sebanyak 1.486.561 orang, angka orang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 1.516,35 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 1.439.759 orang, selanjutnya tingkat pengangguran pada tahun 2020 sebesar 59,38 orang lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2019 berjumlah 46.802 orang, sementara tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2020 sebesar 69,44 persen, angka ini lebih tinggi dibanding Tahun 2019 sebesar 67,59 persen, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 69,52 lebih tinggi dari pada tahun 2019 dan tahun 2020, Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 sebesar 3,77 persen lebih baik dibanding Tahun 2019 sebesar 3,11 persen, sementara pada tahun 2018 sebesar 3,37 persen, persentase ini lebih tinggi dari tahun 2019, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2016-2020

Indikator Ketenagakerjaan	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (orang)	1.509.505	1.428.583	1.502.972	1.486.561	1.575,73
Bekerja (orang)	1.459.803	1.374.214	1.451.491	1.439.759	1.516,35
Pengangguran (orang)	49.702	54.369	51.481	46.802	59,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,28	67,14	69,52	67,59	69,44
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,29	3,81	3,43	3,15	3,77

Sumber: BPS, 2021.

2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi; serta 2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Tengah pada 2019 dokumen RPPLH proses penyusunan, yang antara lain memuat daya dukung dan daya 8lamping lingkungan hidup.

2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah RPJMD.

2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat diantaranya pemberian izin lokasi. Izin lokasi diwajibkan bagi setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang akan menanamkan modal dengan memanfaatkan lahan/tanah lintas daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan daerah.

Perkembangan Nilai Investasi PMDN di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 nilai PMDN mencapai Rp5.261.315.800.000,- meningkat dibanding realisasi Tahun 2019 sebesar Rp4.438.798.800.000,-. Sementara nilai investasi PMA di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2016-2020 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 Nilai PMA mencapai Rp25.617.411.568.119,- lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp27.075.580.350.000,-. Perkembangan realisasi Investasi PMA dan PMDN di Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020

Tahun	PMA		PMDN	
	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
2014	58	16.105.670.000.000	8	95.800.000.000
2015	82	13.564.545.900.000	23	968.450.500.000
2016	13	21.910.839.900.000	42	1.081.241.000.000
2017	43	20.635.458.000.000	75	1.929.657.000.000
2018	23	9.010.437.440.000	103	12.689.562.560.000
2019	68	27.075.580.350.000	162	4.438.798.800.000
2020	68	25.617.411.568.119	162	5.261.315.800.000

Sumber: BPM-P2TSPD Provinsi Sulteng, 2021.

2.1.3.2.2. Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/mancanegara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah.

Selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri di Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi, yakni dari 3.075.984 orang pada Tahun 2016 menjadi 3.025.417 orang Tahun 2017, Tahun 2018 menurun menjadi 3.000.166 orang, pada Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 3.296.354 orang,

sebaliknya pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni berjumlah 1.812.995 orang, Sementara jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2016 sampai dengan 2020 juga terjadi jumlah yang fluktuasi yaitu dari 55.795 orang pada Tahun 2016 menurun menjadi 24.709 orang pada Tahun 2017, pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan menjadi 23.942 orang, namun pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 26.491 orang, selanjutnya pada Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 11.921 orang.

Tabel 2.40
Perkembangan Kunjungan Wisatawan
Di Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
WISATAWAN MANCANEGERA	55,795	24,709	23,942	26,491	11,921
WISATAWAN NUSANTARA (DOMESTIK)	3,075,984	3,025,417	3,000,166	3,296,354	1,812,995
	3,131,779	3,050,126	3,024,108	3,322,845	1,824,916

Sumber: BPS dan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulteng, 2021.

2.1.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 mencapai 960.460.28 ton, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya mencapai 964.509,04 ton. Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebanyak 201.101,80 ton meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya sebesar 196.519,30 ton. Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

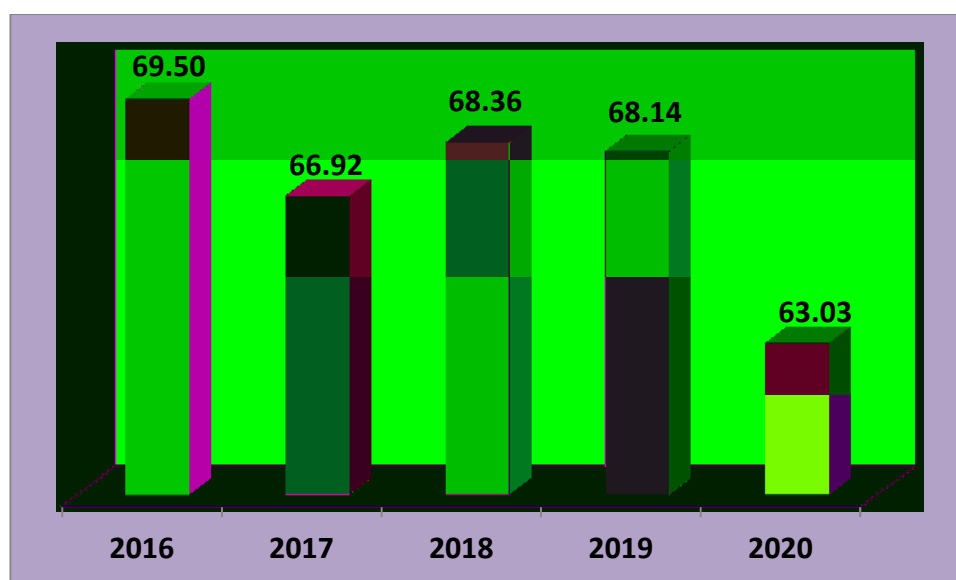
Tabel 2.41
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

PRODUKSI PERIKANAN (TON)		
TAHUN	PERIKANAN BUDIDAYA	PERIKANAN TANGKAP
2016	1.339.013,78	212.330,60
2017	1.059.050,30	174.964,00
2018	918.186,40	171.115,00
2019	964.509,04	196.519,30
2020	960.460,28	201.101,80

Sumber: BPS, 2020; dan Diskanlat Provinsi Sulteng, 2021.

Perkembangan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2016 rata-rata konsumsi ikan mencapai 69,50 kalori/kapita/hari menurun menjadi 66,92 kalori/kapita/hari pada Tahun 2017, selanjutnya pada Tahun 2018 konsumsi ikan meningkat menjadi 68,36 kalori/kapita/hari, dan pada Tahun 2019 konsumsi ikan sedikit menurun menjadi 68,14 kalori/kapita/hari, dan terjadi penurunan drastis sebanyak 63.03 kalori/kapita/hari pada tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.33
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Ikan
Di Sulawesi Tengah (Kalori/perkapita/tahun)
Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Selanjutnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 ha melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tersebut terdiri atas:

1. Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan
4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

2.1.3.2.4 Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tengah cenderung stagnan. Untuk sektor industri skala kecil dan menengah cukup berkembang tetapi untuk industri skala besar (industri manufaktur) tidak begitu berkembang. Industri skala kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta, seperti industri kerajinan tangan (rotan dan bambu), meubel, food (kuliner), dan penginapan (homestay). Adapun sektor perdagangan lebih bergerak pada perdagangan antar pulau dan antar provinsi untuk komoditas hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038, Industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

- a. Industri Pangan terdiri dari :
 - Industri pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan
 - Industri Pengolahan Minyak Nabati

- Industri berbahan baku ikan dan hasil kelautan
 - Industri olahan coklat
 - Industri bawang
 - Industri olahan kopi
- b. Industri Hulu Agro
- Industri pengolahan kelapa terpadu
 - Industri pengolahan minyak atsiri (cengkeh, pala dan nilam)
 - Industri pengolahan kelapa sawit
 - Industri karet
 - Industri Pakan
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)
- Industri Tekstil
 - Industri Furniture
 - Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
 - Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan
- d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
- Industri Minyak dan Gas
- e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- Industri Besi
 - Industri Nikel
 - Industri Bahan Galian Bukan Logam

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

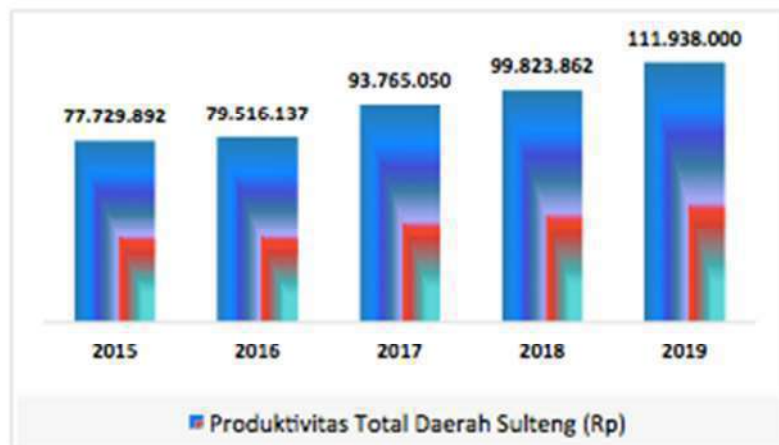
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Produktivitas Total Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang telah dicapai tidak lepas dari peran semua sektor lapangan usaha. Produktivitas Total daerah menunjukkan seberapa besar bilah tambah bruto yang diciptakan oleh suatu daerah. Nilai produktivitas sektor ekonomi daerah yang tangguh diharapkan dapat mendukung daya saing daerah di era otonomi.

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat, yakni dari Rp77.729.892,- pada Tahun 2015 menjadi Rp111.938.000,- pada Tahun 2019, dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,70 persen pertahun.

Gambar 2.34
Perkembangan Produksi Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015–2019



Sumber: BPS, Tahun 2020 (Data Diolah kembali).

2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp983.641,- perkapita perbulan pada Tahun 2019 mencapai Rp1.035.777,- perkapita perbulan pada Tahun 2020, ditunjukkan pada gambar berikut :

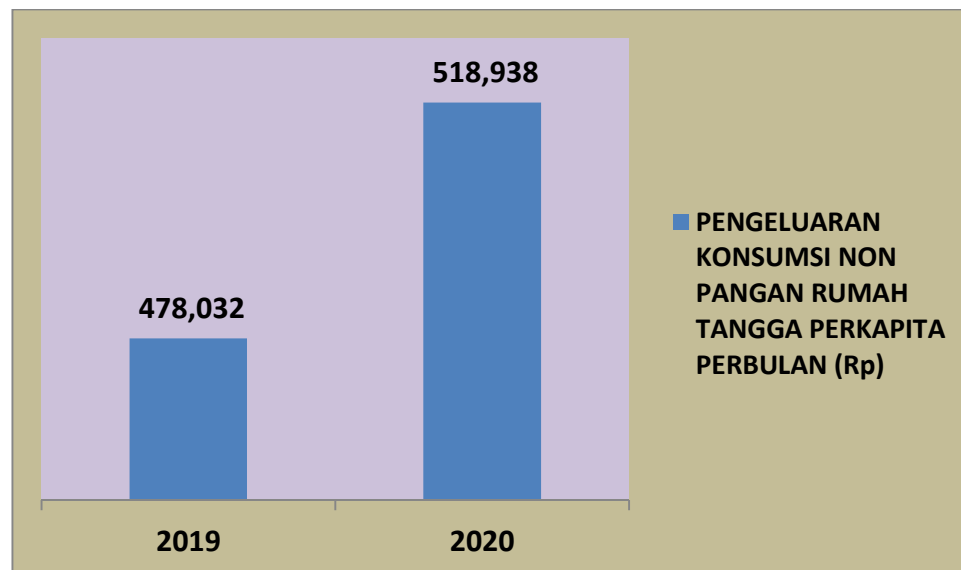
Gambar 2.35
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2020



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 juga menunjukkan *trend* peningkatan, yakni dari Rp478.032,- perkapita perbulan pada Tahun 2019 menjadi Rp518.938,- perkapita perbulan pada Tahun 2020.

Gambar 2.36
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2020



Sumber: BPS, Tahun 2021.

2.1.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu, dan diharapkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan melebihi pengeluaran= $NTP > 100$). NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan nilai NTP dinyatakan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan data BPS, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi lebih dari 21,8 persen (ADHB) dan 22,1 persen (ADHK) terhadap seluruh PDRB Sulteng menurut lapangan usaha. Hal ini menjadikan sektor tersebut masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di wilayah Sulteng. Kondisi tersebut baik langsung maupun tidak langsung menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelanjutan pelaksanaan

pembangunan dan sinergi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pelaku usaha di sektor tersebut, maka digunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Mulai Januari 2020, kalau menggunakan Tahun Dasar 2018 (2018=100) dalam menghitung NTP dari sebelumnya Tahun Dasar 2012.

Terakait dengan perhitungan tersebut bahwa selama periode Januari 2019 – Desember 2020, NTP Sulteng berfluktuasi di rentang angka 95-97. Angka NTP tersebut berada di bawah NTP nasional dengan rentang angka 99-103. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum daya tukar petani di Sulteng relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang/jasa di pasaran. Nilai NTP selama periode tersebut masih berada di bawah 100, artinya perkembangan harga barang yang dihasilkan petani lebih rendah dari perkembangan harga barang yang digunakan petani untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada periode Desember 2020, NTP di Sulteng mencapai 95,91 persen, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,53 persen dibandingkan dengan November 2020. Peningkatan terbesar disumbang oleh kenaikan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3 persen, Perikanan sebesar 1,87 persen, Peternakan 0,46 persen, Tanaman Pangan 0,26 persen, dan subsektor Holtikultura sebesar negatif 1,7 persen.

Sementara itu, Indeks yang Dibayar Petani (Lb) mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh komponen pengeluaran baik untuk konsumsi rumah tangga maupun fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Kemudian Indeks yang Diterima Petani (Lt) pada Desember 2020 tercatat 103,33 atau naik sebesar 1,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 101,56. Masih kurang optimalnya NTP di Sulteng diakibatkan oleh jalur distribusi dan tata niaga hasil-hasil pertanian yang belum sepenuhnya terintegrasi, degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan, belum terjangkaunya harga pupuk, dan manajemen penguasaan

teknologi dan inovasi pertanian. Untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Petani Maju atas pupuk dan obat-obatan bersubsidi. Selain itu Pemerintah juga menyusun roadmap kebijakan yang mengarah pada aspek competitiveness produk unggulan melalui peningkatan skala usaha pertanian, produktivitas, penambahan atau perluasan areal tanam, perbaikan dukungan infrastruktur pertanian, dan melakukan kontrol harga yang berdampak pada peningkatan daya saing produk di pasaran.

a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (L_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (L_b), dan dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.

NTN di Sulteng mengalami fluktuasi pada periode Januari 2019 – Desember 2020. Pada periode tersebut NTN tertinggi terjadi pada bulan Maret 2020 dengan nilai NTN sebesar 99,49 sedangkan terendah terjadi di bulan Mei 2019 dengan nilai NTN sebesar 94,41. Secara umum, NTN Sulteng masih berada di bawah nilai rata-rata nasional. Selama Desember 2020, subsektor perikanan mengalami peningkatan indeks nilai tukar sebesar 1,87 persen atau berubah dari 97,40 pada November 2020 menjadi 99,47 pada Desember 2020. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan L_t sebesar 2,45 persen lebih besar dari L_b sebesar 0,23 persen. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, salah satunya dengan pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 h.a. melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Keputusan ini dibuat untuk melindungi kawasan tersebut dari maraknya kegiatan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing di perairan Sulteng. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) dengan melakukan penambahan jumlah pos pengawasan dan penambahan jumlah UPT

pelabuhan dari 4 buah menjadi 11 buah yang mewakili setiap perairan di kabupaten dan kota di Sulteng. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi perikanan untuk meningkatkan produktivitas dengan pemberian pelatihan serta peralatan tangkap perikanan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta menjamin stabilitas harga komoditas perikanan di pasar. Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut kesejahteraan nelayan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah yang dimaksud dalam Keputusan Gubernur tersebut tersebut terdiri atas:

- a. Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
- b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
- c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan
- d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pada tahun 2017 Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan penataan ruang telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, tahapannya salah satunya yaitu tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap indikasi program dalam rencana tata ruang terhadap data pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan target capaian dalam indikasi program. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Dalam pemanfaatan ruang, simpangan- simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian

antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel. 2.42
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Struktur Ruang)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi	50%		√	√		Rendah Tinggi	
	2. Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah Tinggi	
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	0,5		√	√		Rendah Tinggi	
B	Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah	0,33		√		√	Rendah Tinggi	
C	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan							
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi	33%		√	√		Rendah Tinggi	
	2. Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah Tinggi	
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	33%		√	√		Rendah Tinggi	
D	Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana							
	1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam	0,5		√		√	Rendah Tinggi	
	2. Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana	0,25	√		√		Tinggi Tinggi	
E	Perwujudan Sistem Transportasi							
	1. Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan Lintas Trans Sulawesi Tengah, Jaringan lintas Barat	50%	√		√		Tinggi Tinggi	
	2. Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan	50%	√		√		Tinggi Tinggi	
	3. Pembangunan Terusan Khatulistiwa	33%		√		√	Rendah Rendah	
	4. Pemantapan Pelabuhan Propinsi	100%	√		√		Tinggi Tinggi	

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
	5. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	6. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	7. Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya							
	1. Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	2. Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas (Energi) Bumi	100%		√		√	Rendah	Tinggi
	3. Rehabilitasi Jaringan Terestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah
	4. Pengembangan Jaringan Terestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

Tabel. 2.43

Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Pola Ruang)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
A	Perwujudan Kawasan Lindung							
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%		√		√	Rendah	Rendah
	2. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	3. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	4. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi	33%	√		√		Tinggi	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%	Sesuai	Sesuai		
5.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Rava	33%	√		√		Tinggi	Rendah
6.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
7.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka	33%	√		√		Tinggi	Rendah
8.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa	33%	√		√		Tinggi	Rendah
9.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Cagar Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
10.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman	33%	√		√		Tinggi	Rendah
11.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	√		√		Tinggi	Rendah
12.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
13.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung	50%	√		√		Tinggi	Rendah
14.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung	50%	√		√		Tinggi	Rendah
15.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru	50%	√		√		Tinggi	Rendah
16.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru	50%	√		√		Tinggi	Rendah
B	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya							
2.	Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian	50%		√		√	Rendah	Rendah
3.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian	25%	√		√		Tinggi	Rendah
4.	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk	50%	√		√		Tinggi	Rendah
5.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk	25%	√		√		Tinggi	Rendah
6.	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk	50%		√		√	Rendah	Rendah
7.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk	25%	√		√		Tinggi	Rendah
8.	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk industry	50%		√		√	Rendah	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
9. Pengembangan Kawasan Andalan untuk industry	25%		√		√	Rendah	Rendah	
10. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata	50%	√		√		Tinggi	Rendah	
11.2. Pengembangan Kawasan Andalan untuk	25%	√		√		Tinggi	Rendah	
12. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan	50%	√		√		Tinggi	Rendah	
13. Pengembangan Kawasan	25%	√		√		Tinggi	Rendah	
14. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan	50%	√		√		Tinggi	Rendah	
15. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan	25%	√		√		Tinggi	Rendah	
16. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan	50%	√		√		Tinggi	Rendah	
17. Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan	25%	√		√		Tinggi	Rendah	

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019.

Tabel. 2.44
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Strategis)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/ Panjang/ Jumlah/ Volume/ dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%		Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
A	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
B	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	50%		√	√		Rendah	Tinggi
C	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	50%		√	√		Rendah	Tinggi

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran					Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/Rendah)	
		Unit (Luas/Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/Rendah)
			Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak		
			>50%	<50%	Sesuai	Sesuai		
D	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
E	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	50%		√	√		Rendah	Tinggi
F	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan	50%		√	√		Rendah	Tinggi
	1. Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
	2. Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
	3. Pengembangan Kilang LNG	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
G	Pengembangan Kawasan Andalan Bahan Bakar Nabati	33%		√		√	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

2.1.4.2.1. Luas Wilayah Ekonomi Produktif

Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, maka kawasan pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas lima Kawasan Strategis Nasional yang diakomodir dalam RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yakni: (1) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE); (2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri; (3) Kawasan Cepat Tumbuh; (4) Kawasan Agrotourism; dan (5) Kawasan Perbatasan.

Tabel 2.45
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Palu Utara	Kota Palu
2.	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang, KTM Bungku, KTM Padauloyo, KTM Bahari Bolano Lambunu dan KTM Talabosa	Buol, Morowali, Tojo Unauna, Parigi Moutong dan Poso

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
3.	Kawasan Cepat Tumbuh Kaw. Parigi – Ampibabo dsk., Kaw. Danau Poso dsk., Kaw. Ampana dsk., Kaw. Moutong – Tomini dsk., Kaw. Damsol – Damsel dsk., Kaw. Lalundu dsk.	Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Tojo Una - Una Kab. Parigi MoutongKab. Donggala Kab. Donggala
4.	Kawasan Agrotourism Sausu – Manggalapi - Palolo dsk.	Kab. Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi
5.	Kawasan Perbatasan;	
	Kawasan Tindantana	perbatasan kabupaten Poso dengan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
	Kawasan Teluk Matarape	perbatasan kabupaten Morowali dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;
	Kawasan Surumana	perbatasan kabupaten Donggala dengan Provinsi Sulawesi Barat;
	Kawasan Umu	perbatasan kabupaten Buol dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Kepulauan Togian	perbatasan kabupaten Tojo Unauna dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Molosipat	perbatasan kabupaten Parigi-Moutong dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Pulau Sonit	perbatasan kabupaten Banggai Kepulauan dengan Provinsi Maluku Utara.

Sumber: RTRWProvinsiSulawesi Tengah Tahun 2013-2033

2.1.4.2.2. Perkembangan Infrastruktur

2.1.4.2.2.1. Infrastruktur Jalan

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Panjang jalan provinsi mencapai 1.643,74 km, dengan kondisi jalan mantap provinsi pada Tahun 2015 sebesar 57,70 persen meningkat menjadi 60,57 persen pada Tahun 2019.

Gambar 2.37
Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020.

Selanjutnya, perkembangan kondisi jalan nasional (2.373,40 km) di Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan yakni dari 93,83 persen pada Tahun 2015 menjadi 97,53 persen pada Tahun 2019.

Gambar 2.38
Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Nasional
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019



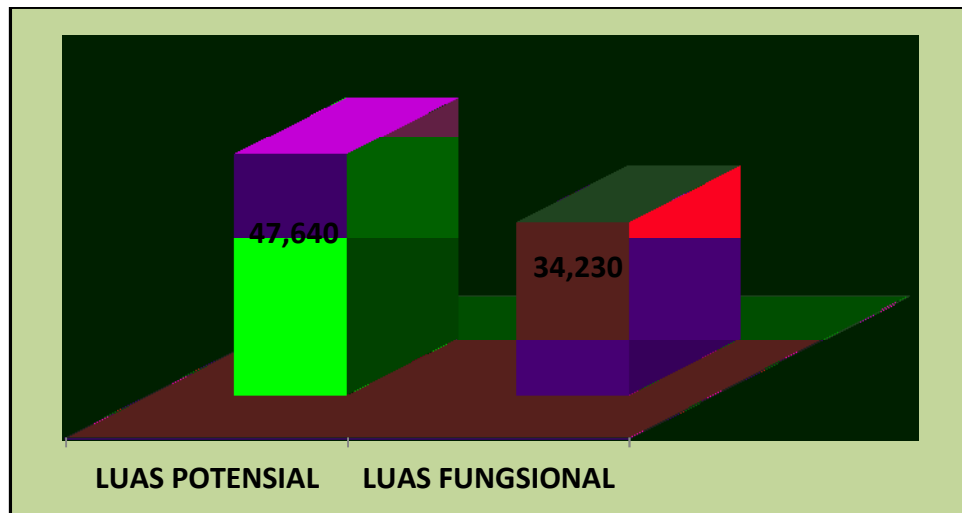
Sumber: BPS, Tahun 2020.

2.1.4.2.2.2. Infrastruktur Daerah Irigasi

Kondisi dan perkembangan daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain adalah :

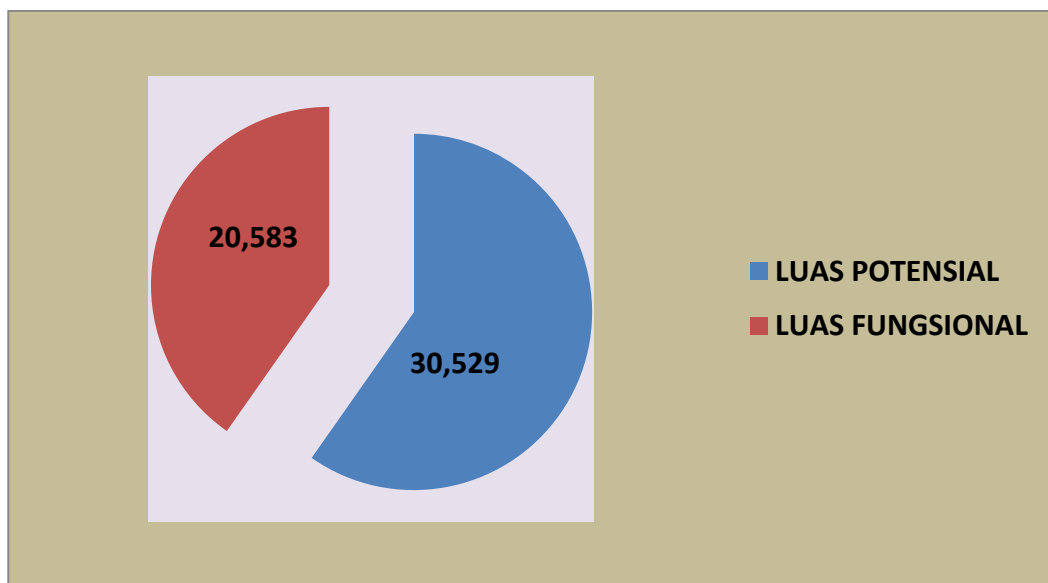
- 1) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 6 (enam) daerah irigasi dengan luas potensial 30.529 Ha dan luas fungsional 20.583 Ha,
- 2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) daerah irigasi dengan luas potensial 47.640 Ha dan luas fungsional 34.230 Ha.

Gambar 2.39
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang
Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab
Provinsi Sulawesi Tengah (ha), 2020



Sumber: BPS, 2021.

Gambar 2.40
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional
yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Pusat (ha),
Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021

2.1.4.2.2.3. Infrastruktur Kelistrikan

Kota Palu adalah titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan merupakan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, yang

ditargetkan akan tercapai pada tahun 2020 melalui kegiatan 31 proyek pembangkit listrik.

Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data berikut, dimana daya terpasang sebesar 203.077 MW, daya mampu 143.893 MW, beban puncak 118.120 MW, sedangkan daya tersambung sebesar 193.297 MVA dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen. Jika kita melihat data rasio elektrifikasi desa, maka dapat disimpulkan masih cukup banyak desa yang belum dialiri listrik, salah satu kabupaten yang rasio elektrifikasinya sangat rendah adalah Kabupaten Banggai laut, dimana dari 66 desa baru 25 desa yang dialiri listrik.

2.1.4.2.2.4. Infrastruktur Perhubungan

a. Angkutan Darat

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Jumlah pelayanan angkutan darat yang beroperasi di Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2017 mencapai 1.175 unit, terdiri dari armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 440 unit, Armada Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 110 unit, Armada Antar Jemput Dalam Provinsi sebanyak 82 Unit, Armada Antar Jemput Antar Provinsi sebanyak 8 unit, Angkutan Kota sebanyak 454 unit, dan taksi (argo meter) sebanyak 81 unit.

Tabel 2.46
Jumlah Pelayanan Angkutan Darat
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017

NO	JENIS ANGKUTAN DARAT	JUMLAH
1	ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP)	440 UNIT
2	ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)	110 UNIT
3	ANTAR JEMPUT DALAM PROPINSI	82 UNIT
4	ANTAR JEMPUT ANTAR PROPINSI	8 UNIT
5	ANGKUTAN KOTA	454 UNIT
6	TAKSI (ARGO METER)	81 UNIT
TOTAL		1.175 UNIT

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng, 2018.

Berikut disajikan kondisi jaringan jalan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 2.47
Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG)	PANJANG (KM)	KEPUTUSAN PENETAPAN
1.	018 19 K	Jl. Hasanuddin II (Palu)	0,850	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.567/KPTS/M/2001, Tanggal 10 November 2010 Perihal Penetapan Ruas-Jalan Strategis Nasional.
2.	019 16 K	Jl. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu.	5,640	
3.	019 17 K	Jl. Sungai Gumbasa (Palu)	0,230	
4.	019 18 K	Jl. Danau Poso (Palu)	0,400	
5.	019 19 K	Jl. Sungai Dolago (Palu)	0,200	
6.	019 1A K	Jl. Sis Aljufri I (Palu)	0,350	
7.	019 14 K	Jl. Yos Sudarso (Poso)	0,650	
8.	043	Ruas Luwuk-Batui (Banggai)	42,114	
9.	043 11 K	Jl. Samratulangi (Luwuk/Banggai)	0,321	
10.	043 12 K	Jl. A. Yani (Luwuk/Banggai)	1,492	
11.	043 13 K	Jl. Urif Sumoharjo (Luwuk/Banggai)	0,886	
12.	043 14 K	Jl. Sidirman (Luwuk/Banggai)	0,976	
13.	043 15 K	Jl. M. Hatta (Luwuk/Banggai)	10,553	
14.	044	Ruas Batui-Toili (Banggai)	40,955	
15.	045	Ruas Toili-Rata (Banggai)	53,346	
16.	046	Ruas Rata-Baturube (Morowali)	57	
17.	063	Ruas Mepanga-Pasir Putih (Parigi Moutong)	23	
18.	064	Ruas Pasir Putih-Basi (Tolitoli)	32,50	
19.	065	Ruas Tomata-Pape (Morwali)	64	
20.	066	Ruas Salakan-Sambiut (Banggai Kepulauan)	24	

Sumber : RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033

Selanjutnya Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang)
di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama Terminal Penumpang	Nama Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Terminal Penumpang Tipe A			
1.	Mamboro (Eksisting)	Palu	19.174
2.	Sintuwu (Eksisting)	Poso	3.115
3.	Toboli (Eksisting)	Parigi Moutong	33.800
Terminal Penumpang Tipe B			
1.	Tentena (Eksisting)	Poso	
2.	Pasar Sentral (Eksisting)	Poso	
3.	Biak (Eksisting)	Banggai	
4.	Lelean Nono (Baru)	Tolitoli	
5.	Mensung	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Jembatan Timbang	Nama Kabupaten/Kota	Luas (m)
1.	Toboli	Parigi Moutong	60 m x 40 m
2.	Kayu Malue	Palu	64 m x 56 m
3.	Mayoa	Poso	60 m x 60 m
4.	Moutong	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Di Sulawesi Tengah

No.	Lokasi Pengujian	Nama Kabupaten/ Kota	Merk / Tahun Operasi	Kapasitas	Kondisi
1.	Lolu	Kota Palu	Kubota/1979	10 Ton	Rusak
2.	Poso	Poso	Kubota/2008	10 Ton	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengantisipasi pergerakan barang dan manusia dikembangkan jaringan moda transportasi angkutan penyeberangan melalui program angkutan sungai, danau, dan perairan (ASDP) seperti tabel berikut.

Tabel 2.51
Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Pagimana	Banggai	Pagimana-Gorontalo (Prov. Sulteng-Gorontalo)
2.	Luwuk	Banggai	Luwuk-Salakan
3.	Taipa	Palu	Taipa-Balikpapan
4.	Ampana	Tojo Unauna	(Prov. Sulteng - Kaltim) Ampana-Wakai-Gorontalo
5.	Tolitoli	Tolitoli	(Prov. Sulteng-Gorontalo) Tolitoli-Tarakan (Prov. Sulteng - Kaltim)
6.	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai-Luwuk-Banggai- Boniton-Banggai-Bobong Dolong-Uwebone-Marissa-
7.	Toboli	Parigi Moutong	Parigi-Marissa-Dolong (Prov. Sulteng-Gorontalo)

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng

b. Perkembangan Perhubungan Laut

Di bidang perhubungan laut, perkembangan pelayanan transportasi laut yang mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra, secara kontinu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayaran angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 1 (satu) pelabuhan utama (internasional) yakni Pelabuhan Pantoloan, 14 (empat belas) pelabuhan pengumpul (nasional), yakni Luwuk, Pagimana, Bunta, Tangkiang, Banggai, Kolonodale, Leok, Tolitoli, Donggala, Wani, Ogoamas, Parigi, Poso, Ampana; dan 12 (dua belas) pelabuhan pengumpan (regional), yakni Sabang, Ogotua, Kumaligon, Paleleh, Wakai, Salakan, Menui, Sambalagi, Malala, Bungku, Dolong/Popolii, Moutong; serta 14 (empat belas) pelabuhan terminal khusus (tarsus).

Tabel 2.52
Sarana Pelabuhan Laut Utama/Nasional di Sulawesi Tengah

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Kapasitas Dermaga	Luas Dermaga
1.	Pelabuhan Utama (international) Pantoloan	Palu	4.000 DWT	250 m x 13 m
1	Pelabuhan Pengumpul (nasional) Banggai	Banggai	1.000 DWT	150mx12m
2	Luwuk	Banggai	1.000 DWT	70 mx8 m
3	Pagimana	Banggai	1.000 DWT	70 m x8 m
4	Bunta	Banggai	1.000 DWT	88mx12m
5	Tangkiang	Banggai Kepulauan	10.000 DWT	150mx8m
6	Banggai	Morowali		
7	Kolonodale	Buol	1.000 DWT	50mx8m
8	Leok	Tolitoli	1.000 DWT	81 mx8 m
9	Tolitoli	Donggala	1.000 DWT	70 mx8 m
10	Donggala	Donggala	500 DWT	46mx8m
11	Wani	Donggala	1.000 DWT	70mx8m
12	Ogoamas	Parigi Moutong	400 DWT	35 m x 8 m
13	Parigi	Poso	1.000 DWT	100mx 9m
14	Poso	Tojo Una-Una	1.000 DWT	70mx 8m
	Ampana			

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033

d. Perkembangan Perhubungan Udara

Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan status Bandar Udara pengumpul sekunder sebagaipintu gerbang utama melalui udara semakin dituntut dalam peningkatan aktifitas pelayanan penerbangan guna mengantisipasi kesiapan daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan era globalisasi. Pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu agar dapat didarati pesawat yang berbadan besar, tidak terbatas hanya mampu melayani pesawat jenis Boeing 737-900 ER dan Boeing 737-800 NG. Selain itu, di beberapa kabupaten terdapat pula Bandar Udarapengumpul tersier yakni Bandar Udara Bubung Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang dapat melayani jenis pesawat Boeing 737/200, Cassa 212, ATR 500/600, Dornier 32, Bandar Udara Lalos Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli. Untuk melayani penerbangan pengumpan Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol yang baru mampu didarati jenis pesawat Cassa 212 dan Dornier 32 serta Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang sudah mampu didarati oleh jenis pesawat N 219 dan ATR 500/600. Selain itu di Sulawesi Tengah sedang dilakukan pembangunan 2 (dua) Bandar Udara yaitu Bandar

Udara Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una , Sedangkan Bandar Udara Bungku di Kabupaten Morowali saat ini terkendala dengan penyelesaian lahan untuk pembangunannya. Sehingga fasilitas transportasi udara yang ada di Sulawesi Tengah hingga Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) bandar udara, selain itu juga diupayakan studi kelayakan untuk perencanaan pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut.

Tabel 2.53
Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten/ Kota	Dimensi Landasan Pacu	Maksimal Pesawat
1.	Pengumpul Sekunder Mutiara Sis Aljufri	Palu	2.250 m x 45 m	B – 737
1. 2.	Pengumpul Tersier Bubung Syukuran Aminuddin Amir Lalos Sultan Bantilan	Banggai Tolitoli	1.850 m x 30 m 1.400 m x 30 m	B – 737.200 C - 212
1. 2.	Pengumpan Pogogul Kasiguncu	Buol Poso	1.373 m x 30 m	C – 212 D - 900
1. 2.	Sedang dibangun Ampana Umbele	Tojo Unauna Morowali	1.620 m x 30 m	
1. 2.	Missioner Gintu (operasional) Tentena (operasional)	Poso Poso		Cesna Cesna
1.	Bandara yang direncanakan Banggai	Banggai Laut		

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

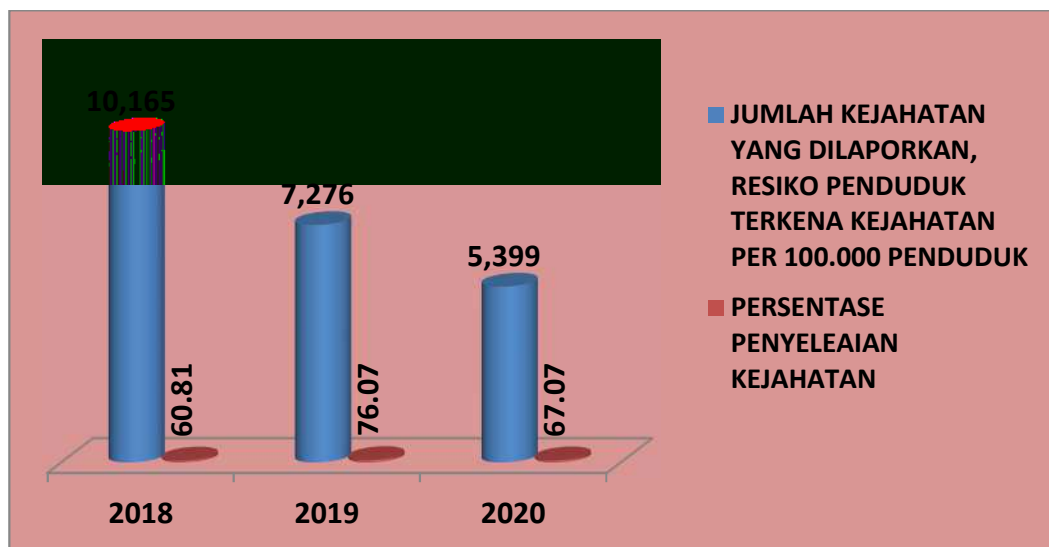
2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan memerlukan dukungan investasi khususnya dari kalangan sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan dan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan.

Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2013 pemerintah memfokuskan perhatian pada penanganan keamanan dan ketertiban terutama masalah yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat yakni tawuran antar kampung.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 10.165 kasus pada tahun 2018 menjadi 5.399 kasus pada tahun 2020, sementara persentase penyelesaiannya dari tahun 2018 sebesar 60,81 persen meningkat menjadi 76,07 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 67,07 persen, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.41
Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Kejahatan, Tahun 2018-2020



Sumber: BPS, 2021.

Sementara jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 1.768 kasus yang masih tersisa sejumlah 322 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 2.090 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.54
Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2020			
	SISA LAPORAN TAHUN LALU	MASUK TAHUN LAPORAN	DISELESAIKAN	SISA AKHIR TAHUN
KEJAKSAAN TINGGI	16	183	197	2
KEJAKSAAN NEGERI 9 KABUPATEN DAN 1 KOTA	293	1.598	1.571	320
JUMLAH	309	1781	1768	322

Sumber: BPS, 2021.

Sedangkan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 36 kasus yang masih tersisa sejumlah 45 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 81 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2020				
	SISA LAPORAN TAHUN LALU	MASUK TAHUN LAPORAN	JUMLAH	DISELESAIKAN	SISA AKHIR TAHUN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	12	5	17	5	12
KEJAKSAAN NEGERI 9 KABUPATEN DAN 1 KOTA	31	33	64	31	33
JUMLAH	43	38	81	36	45

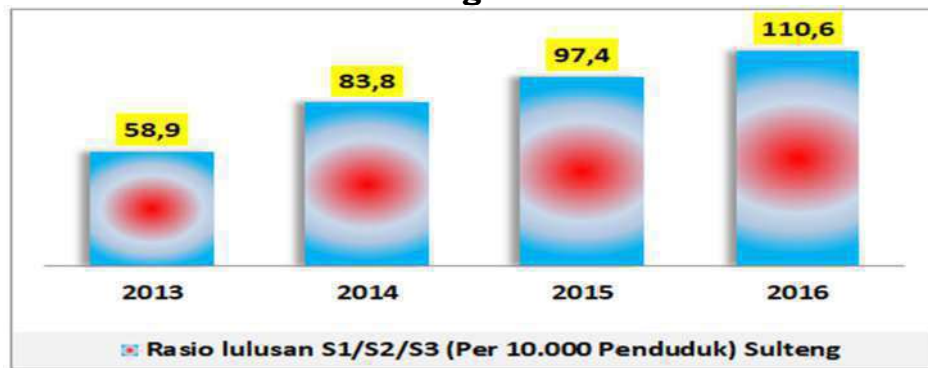
Sumber: BPS, 2021.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2013 rasionya sebesar 59,9 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 83,8 per 10.000 penduduk pada Tahun 2014, selanjutnya setiap tahun rasionya mengalami peningkatan hingga mencapai 110,6 per 10.000 penduduk.

Gambar 2.42
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 - 2016



Sumber: BPS, Tahun 2017 (Data Diolah Kembali)

2.1.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator *dependency ratio* atau rasio ketergantungan. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami penurunan (semakin rendah) yakni dari 51,02 persen pada Tahun 2015 menjadi 49,78 persen pada Tahun 2019.

Gambar 2.43
Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif
Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015 - 2019



Sumber: BPS, 2020 (Data Diolah Kembali)

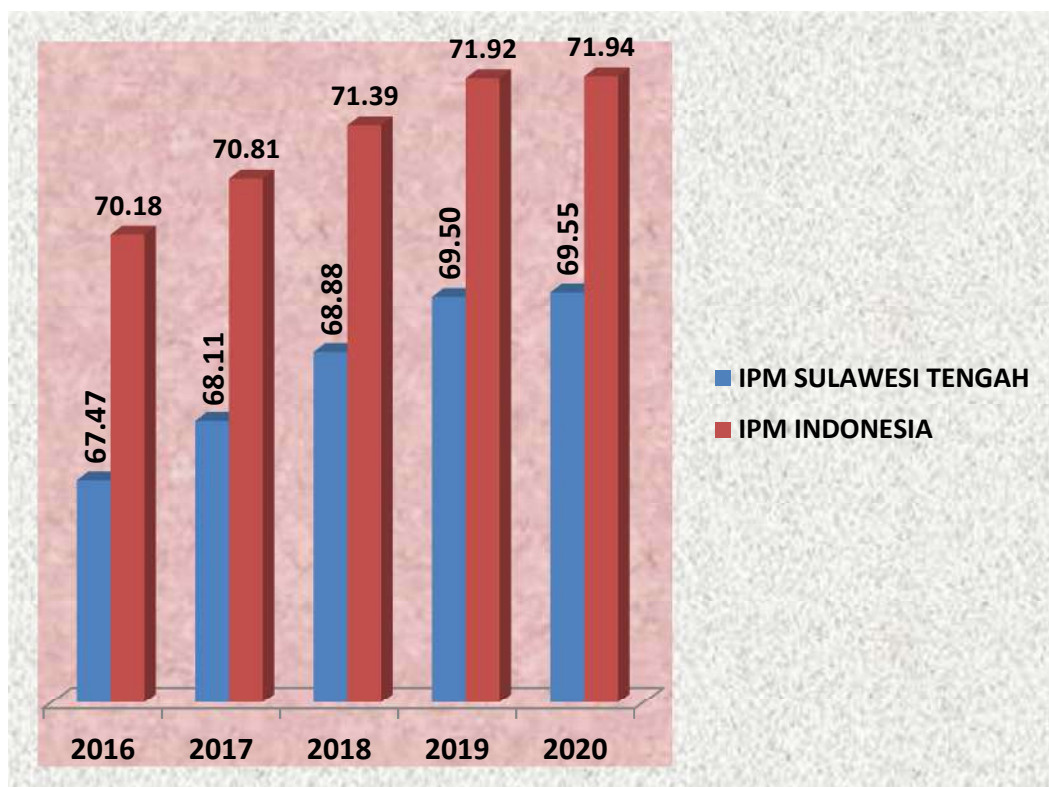
2.1.4.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu

modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil perkapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, dengan status kategori tingkat pembangunan manusia sedang. Pada Tahun 2016 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 67,47 poin meningkat menjadi 69,55 poin pada Tahun 2020. Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut relatif rendah dibanding dengan capaian IPM Nasional.

Gambar 2.44
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Perspektif pencapaian IPM kabupaten/kota Tahun 2020, capaian IPM tertinggi masih berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 81,47 poin, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,59 poin, dapat dilihat pada tabel berikut :

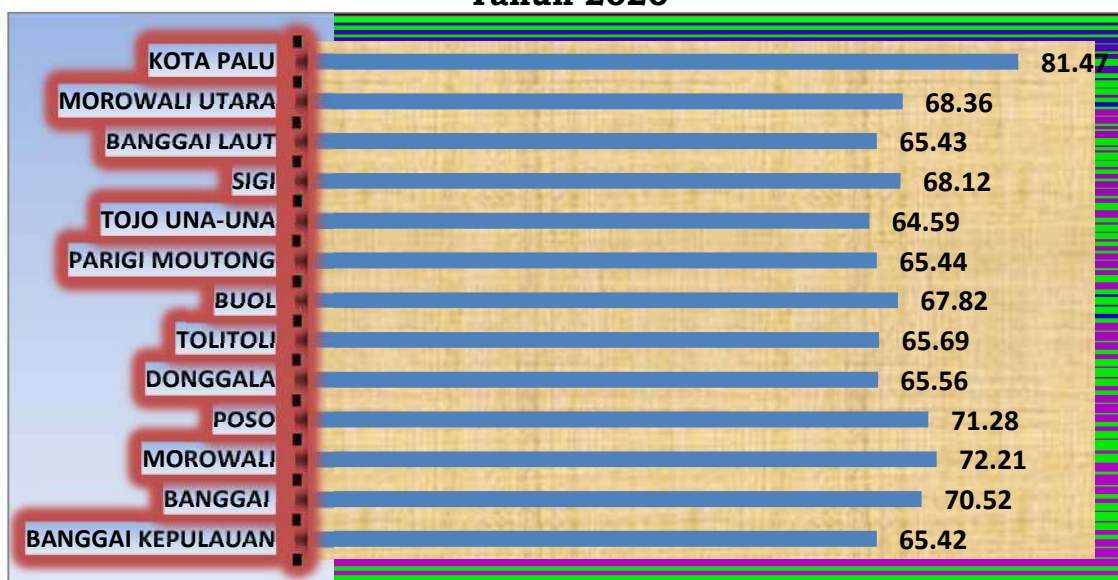
Tabel 2.56
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	BANGGAI KEPULAUAN	63,45	64,07	64,68	65,13	65,42
2.	BANGGAI	68,17	69,00	69,85	70,36	70,52
3.	MOROWALI	69,69	70,41	71,14	72,02	72,21
4.	POSO	68,83	69,78	70,68	71,40	71,28
5.	DONGGALA	64,42	64,66	65,14	65,49	65,56
6.	TOLITOLI	63,27	64,05	64,60	65,42	65,69
7.	BUOL	66,37	66,69	67,30	67,69	67,82
8.	PARIGI MOUTONG	63,60	64,09	64,85	65,47	65,44
9.	TOJO UNA-UNA	62,27	62,61	63,38	64,52	64,59
10.	SIGI	65,95	66,72	67,66	68,16	68,12
11.	BANGGAI LAUT	63,49	64,08	64,80	65,27	65,43
12.	MOROWALI UTARA	66,57	67,35	67,95	68,45	68,36
13.	KOTA PALU	79,73	80,24	80,91	81,50	81,47
	SULAWESI TENGAH	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55

Sumber: BPS, Tahun 2021

Selanjutnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota Tahun 2020, disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.45
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2020

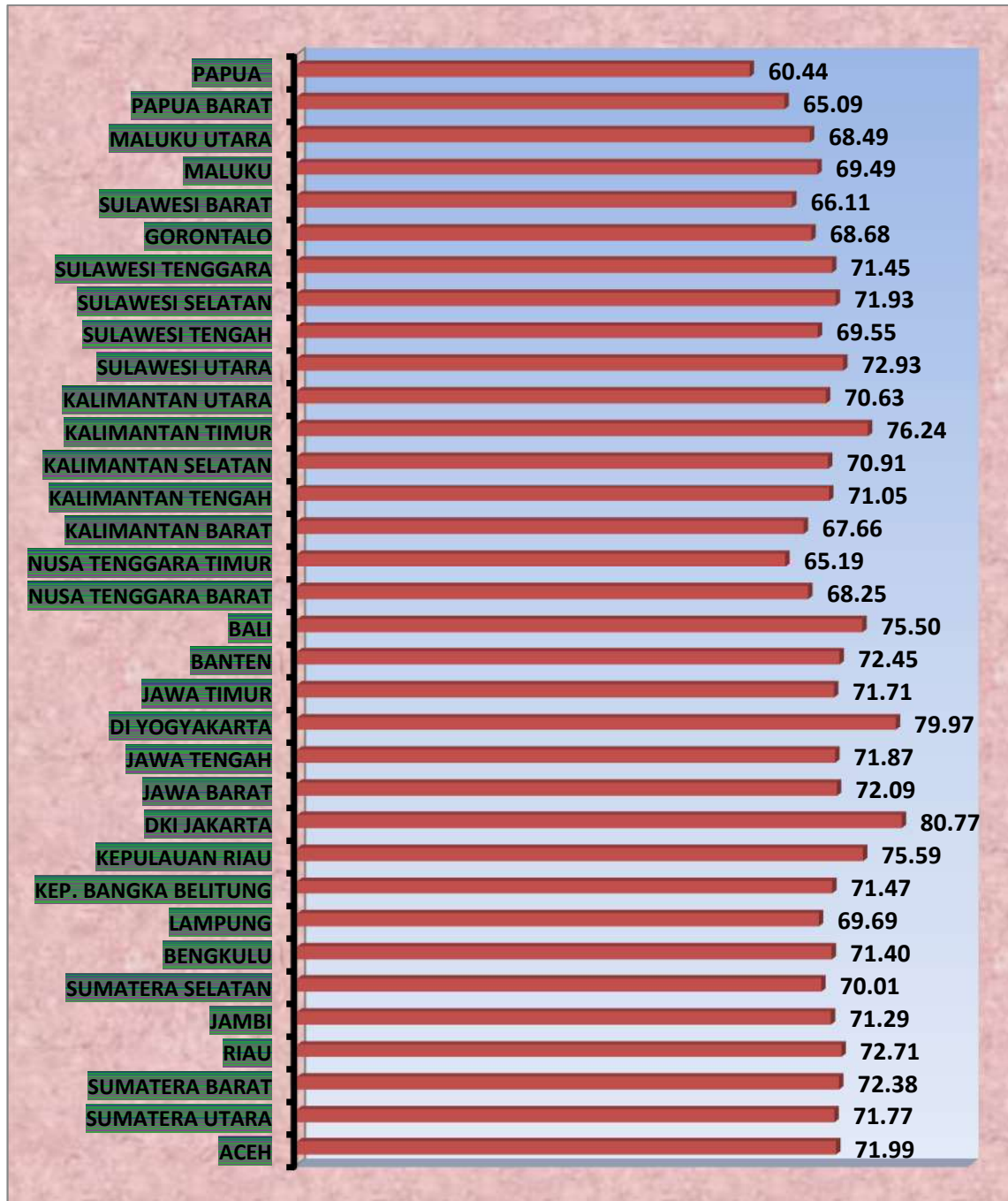


Sumber: BPS, Tahun 2021.

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Sebaran IPM di Sulawesi Tengah berkisar antara 64,59 poin terdapat pada Kabupaten Tojo Una-Una, jika dibandingkan dengan IPM tahun 2019 cenderung sedikit meningkat, hingga 81,47 poin terdapat pada Kota Palu, sedikit menurun jika dibandingkan pada tahun 2019.

Sementara kalau dilihat pada perspektif nasional, Pada Tahun 2020 IPM Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi ke 26 dari 34 Provinsi, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2.46
Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Persepektif
Nasional, Tahun 2020



Sumber: BPS, Tahun 2021.

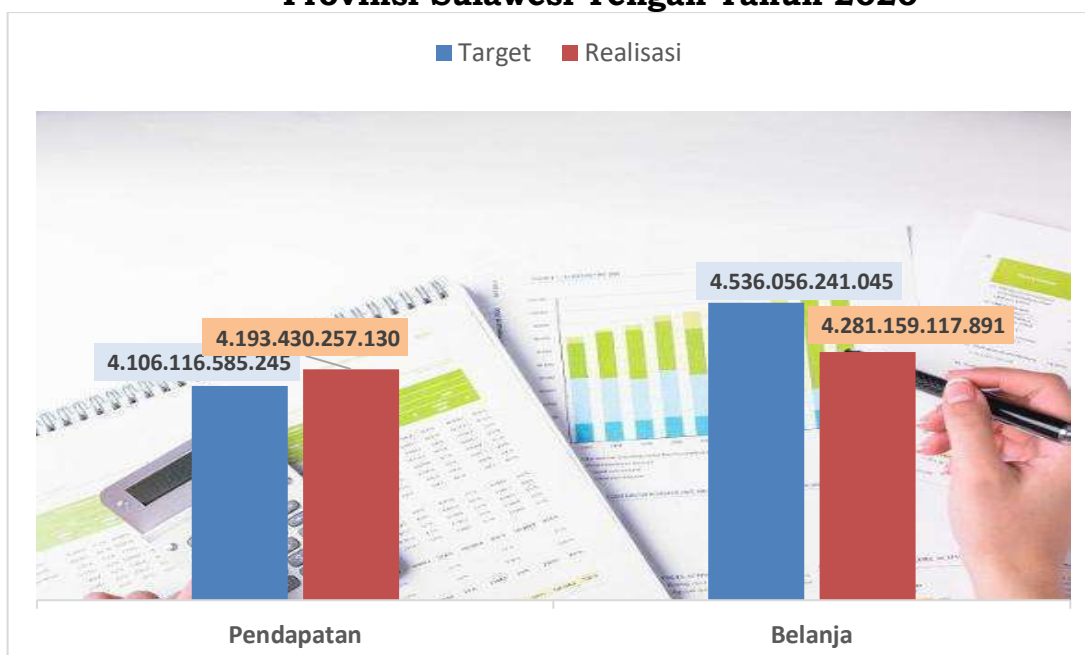
Pada gambar diatas terlihat bahwa capaian IPM tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 80,77 poin, sebaliknya capaian IPM terendah terdapat pada Provinsi Papua sebesar 60,44 poin.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan APBD serta capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

2.2.1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan daerah dari target sebesar Rp. 4.106.116.585.224,95,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.193.430.257.130,07, yang berarti pendapatan pada tahun 2020 telah melampaui target atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 87.3131.671.885,12, sehingga persentase capaian Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 adalah sebesar 102,13 persen. Sedangkan Belanja Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.536.056.241.044,59 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.281.159.117.890,90 atau sebesar 94,38 persen.

Tabel 2.2.1
Target Pendapatan dan Belanja APBD-P
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020



Sumber: Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2020

Struktur Belanja Daerah APBD-P Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.737.675.267.394,51 dengan realisasi sebesar Rp.2.567.527.358.275,00 atau sebesar 93,78 persen dan Belanja Langsung Rp.1.798.380.973.650,08,

dengan realiasi sebesar Rp.1.713.631.759.615,90 atau sebesar 95,29 persen, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

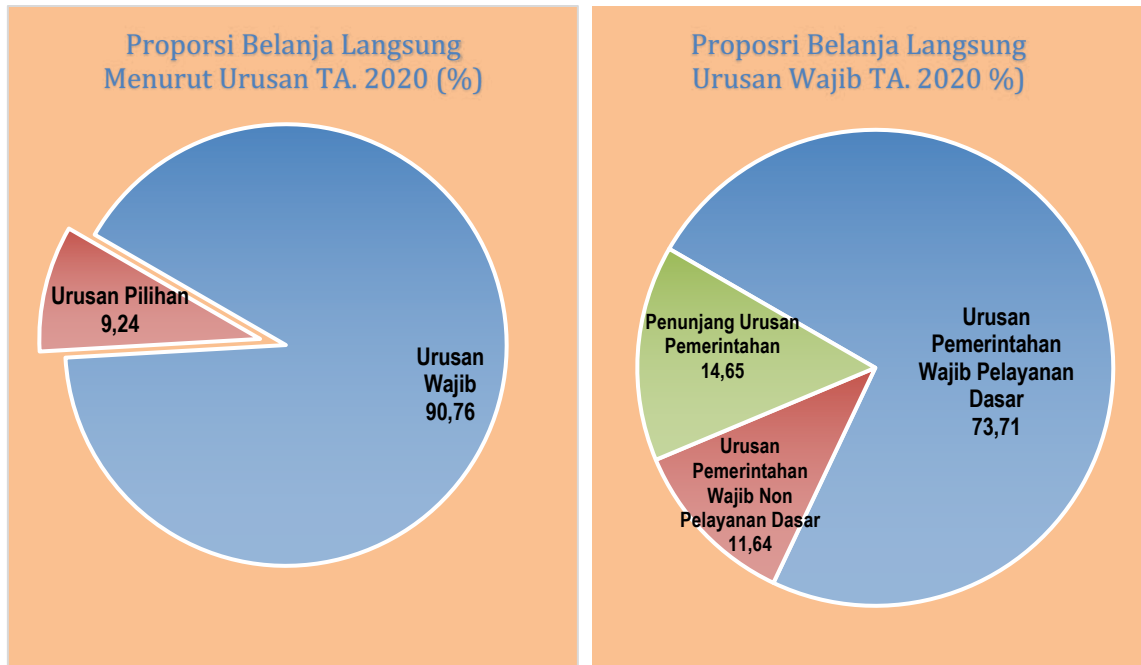
Tabel 2.1.
Realisasi Belanja APBD-P
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2020		%
		SESDAH REVISI	REALISASI	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.737.675.267.394,51	2.567.527.358.275,00	93,78
	- Belanja Pegawai	1.314.077.128.291,30	1.207.722.955.628,00	91,91
	- Belanja Hibah	918.079.152.823,40	885.470.850.000,00	96,45
	- Belanja Bantuan Sosial	1.479.500.000,00	1.191.500.000,00	80,53
	- Belanja bagi hasil Kepada Provisis Kab/Kota	443.270.948.483,00	427.382.228.304,00	96,42
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	43.275.206.500,00	43.259.243.030,00	99,96
	- Belanja Tidak Terduga	17.493.331.296,81	2.500.581.313,00	14,29
2	BELANJA LANGSUNG	1.798.380.973.650,08	1.713.631.759.615,90	95,29
	- Belanja Pegawai	118.517.780.786,04	140.772.607.601,00	118,78
	- Belanja Barang dan Jasa	971.561.127.504,06	907.419.260.623,95	93,40
	- Belanja Modal	708.302.065.359,98	665.439.891.390,95	93,95
	BELANJA	4.536.056.241.044,59	4.281.159.117.890,90	94,38

Sumber: Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2021

Jumlah alokasi anggaran berdasarkan Urusan yaitu urusan Wajib sebesar **Rp 1.632.145.193.943,-** atau sebesar **90,76** persen terhadap total belanja langsung yang terdiri dari; 1) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp. 1.202.982.825.144 atau sebesar 73,71 persen, 2) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar Rp. 190.024.208.028 atau sebesar 11,64 Persen dan 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebesar Rp. 239.138.160.771 atau sebesar 14,65 Persen. Sedangkan untuk Urusan Pilihan sebesar **Rp 166.235.779.707 -**, atau sebesar 9,24 persen terhadap total alokasi belanja langsung.

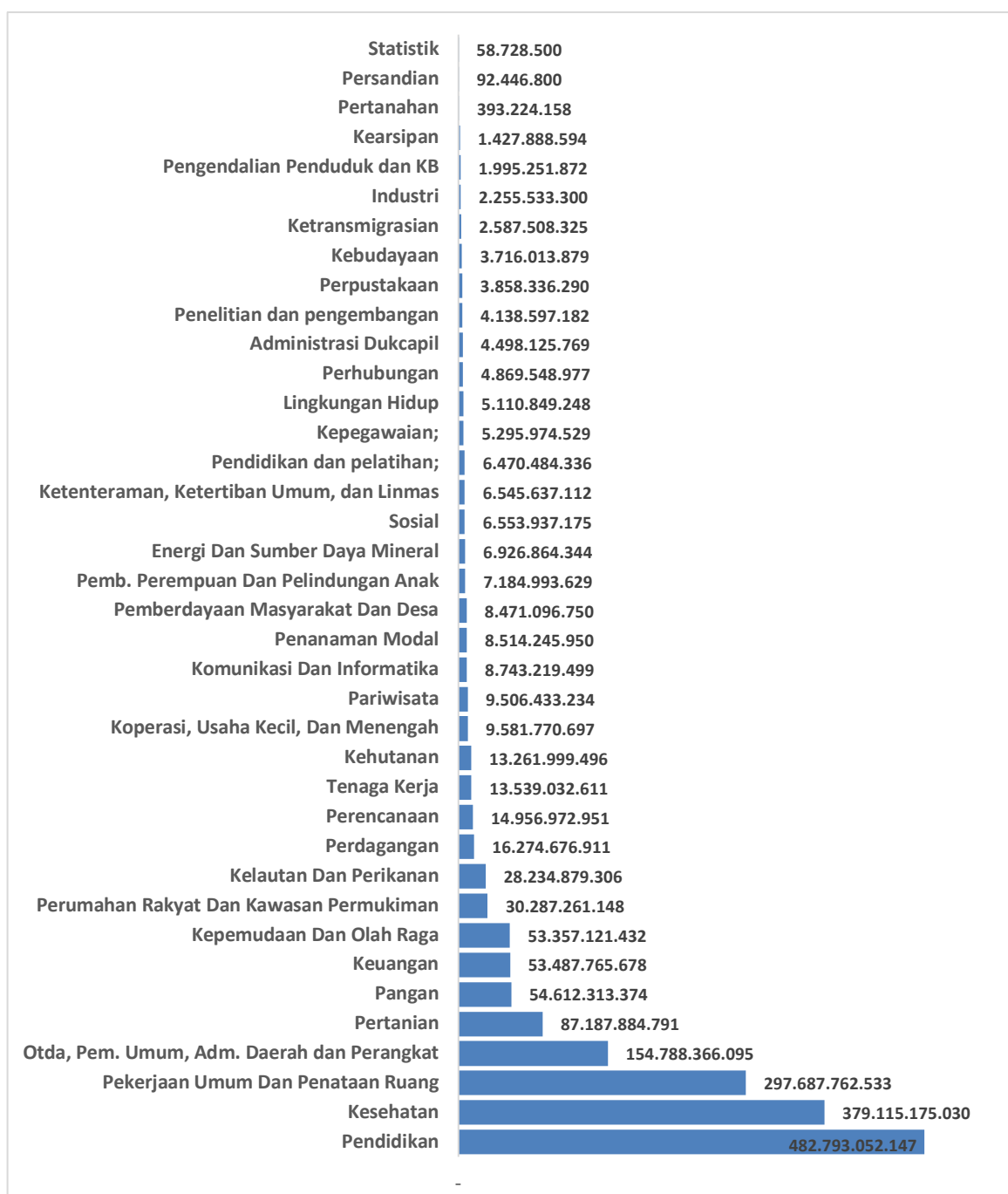
Gambar 2....
Proporsi Belanja Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Urusan Tahun Anggaran 2020



Sumber: Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 2021

Dari sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bidang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2020 dapat diketahui proporsi anggaran yang tertinggi terdapat pada bidang urusan pendidikan sebesar Rp. 482.793.052.147 (26,85%) diikuti bidang urusan kesehatan sebesar Rp. 379.115.175.030 (21,08%) dan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 297.687.762.533 (16,55%). Sedangkan proporsi anggaran terkecil yaitu pada bidang urusan statistik sebesar Rp. 58.728.500 (0,003%), sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Alokasi Belanja Langsung Menurut Bidang Urusan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020



Sumber: Bappeda Sulteng, 2021 (Data diolah kembali)

Selanjutnya untuk alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2020 dapat diketahui alokasi dana terbesar berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi dana sebesar Rp.486.509.066.026 (27,05%) diikuti oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 379.115.175.030

(21,08%). Sedangkan untuk proporsi anggaran yang terkecil yaitu berada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan alokasi dana sebesar Rp.1.995.251.872 (0,11%), sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Belanja Langsung Menurut OPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.995.251.872
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah	2.757.276.730
Satuan Polisi Pamong Praja	3.788.360.382
Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi	4.138.597.182
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.498.125.769
Dinas Perhubungan	4.869.548.977
Inspektorat Daerah	4.961.882.479
Dinas Lingkungan Hidup	5.110.849.248
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.286.224.884
Badan Kepegawaian Daerah	5.295.974.529
BPSDM	6.470.484.336
Dinas Sosial	6.553.937.175
Badan Penghubung	6.654.597.813
Dinas ESDM	6.926.864.344
Dinas P3A	7.184.993.629
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.471.096.750
Dinas PM&PSPT	8.514.245.950
Dinas Kominfo, Persandian dan Statisttik	8.894.394.799
Dinas Pariwisata	9.506.433.234
Dinas Koperasi dan UMKM	9.581.770.697
Dinas Kehutanan	13.261.999.496
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.956.972.951
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.126.540.936
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.530.210.211
Badan Penanggulangan Bencana	20.159.440.339
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	24.511.668.343
Dinas Kelautan dan Perikanan	28.234.879.306
Badan Pendapatan Daerah	28.976.097.335
Dinas Perkimtan	30.680.485.306
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	41.643.649.665
Dinas Perkebunan dan Peternakan	45.544.235.126
Dinas Pemuda dan Olahraga	53.357.121.432
Dinas Pangan	54.612.313.374
Sekretariat DPRD	55.030.900.000
Sekretariat Daerah Prov. Sulteng	67.981.545.464
Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	137.322.466.488
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	160.365.296.045
Dinas Kesehatan	379.115.175.030
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	486.509.066.026

Sumber : Bappeda Sulteng (Data diolah kembali), 20201

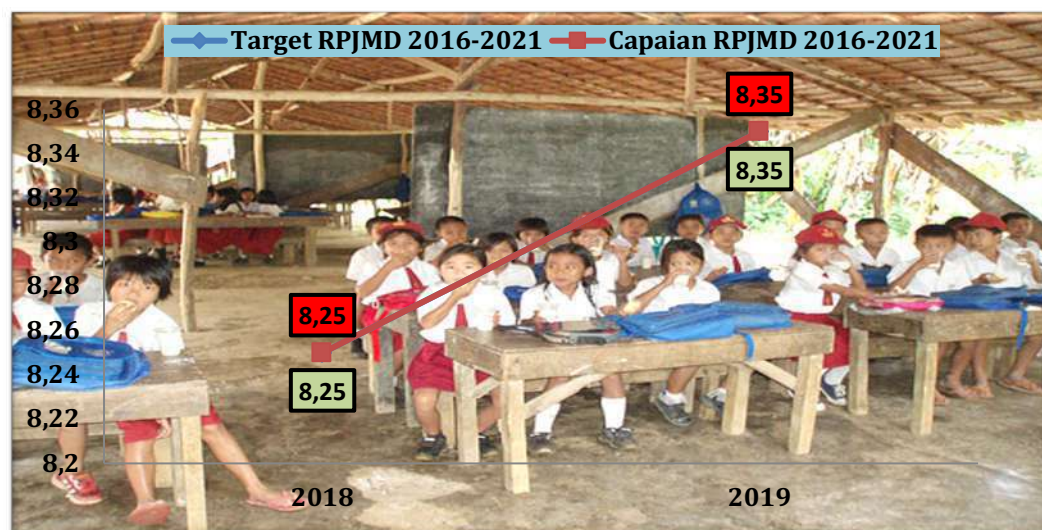
2.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Pendidikan

Kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan secara kontinyu mengalami perbaikan yang cukup nyata, hal ini terlihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, hingga akhir Tahun 2019 telah mencapai 8,35 persen dengan target RPJMD sebesar 8,35 persen atau sesuai target RPJMD 2016-2021 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.4
Perbandingan Target RPJMD terhadap Capaian Indikator
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Program Pendidikan Dasar 9 Tahun)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2019



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Kinerja di bidang pendidikan juga bisa terlihat dari capaian indikator **Angka Melek Huruf (AMH)** penduduk usia 15 tahun keatas, hingga akhir Tahun 2019 telah mencapai 96,50 persen atau telah melampaui target RPJMD yaitu sebesar 96,10 persen, hal ini menggambarkan bahwa semakin tingginya minat dan perhatian masyarakat dalam pendidikan formal maupun informal.

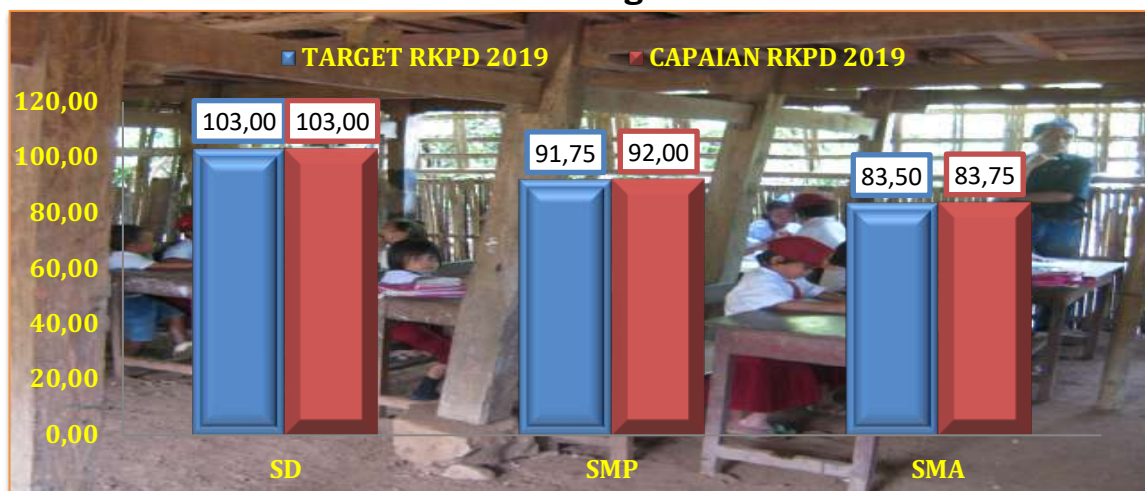
Gambar 2.5
Perbandingan Target RPJMD terhadap Capaian Indikator
Penduduk Usia 15 Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2019



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020

Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan dimana capaian rata-rata berada diatas target RPJMD. Untuk target Angka Partisipasi Sekolah SD/MI tahun 2019 yaitu sebesar 103,00 persen dengan realisasi capaian sebesar 103,00 persen, untuk SMP/MTs dari target 91,75 persen telah tercapai sebesar 92,00 persen dan untuk tingkat SMA/MA/SMK capaian sebesar 83,50 persen dengan target RPJMD sebesar 83,75 persen seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6
Realisasi Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019



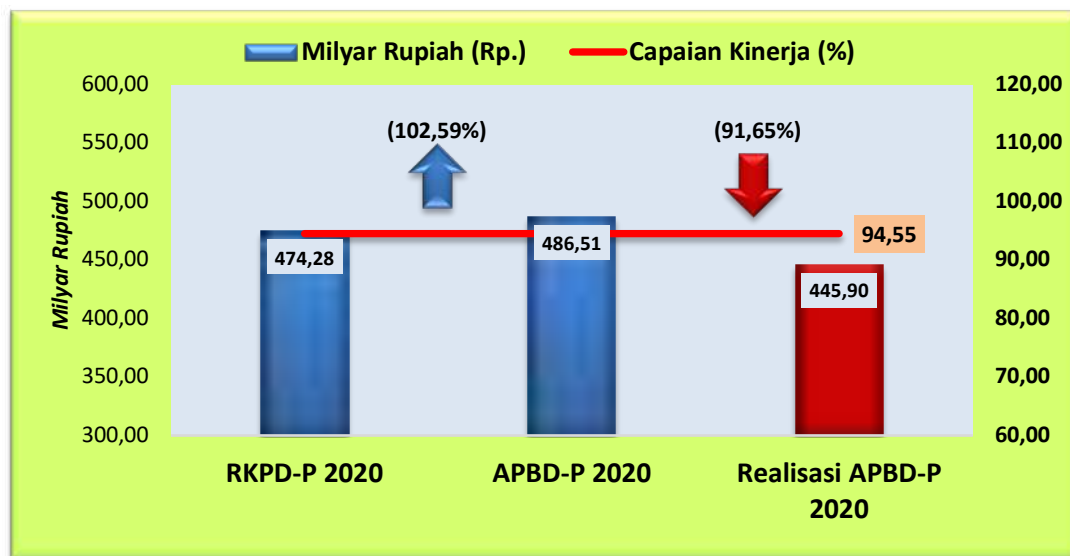
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

Namun dari beberapa capaian kinerja yang cukup menggembarakan tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah masih merupakan salah satu daerah yang Angka Putus Sekolahnya masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya dan berada di atas rata-rata nasional. Capaian Angka Putus Sekolah pada Tahun 2019 untuk tingkat SD/MI masih sebesar 1,30 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 9,00 persen dan tingkat SMA/MA/SMK sebesar 3,10 persen. Bila dikaitkan dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2019, Angka Putus Sekolah di tingkat SD/MI sebesar 1,57 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 10,00 persen dan ditingkat SMA/MA/ SMK sebesar 3,15 persen, maka kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Angka Putus Sekolah mulai dari Tingkat SD/MI hingga tingkat SMA/MA relatif masih rendah dan belum mencapai target RPJMD 2016-2021.

Untuk itu diperlukan upaya akselerasi perbaikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana agar angka putus sekolah semakin menurun tiap tahunnya dan memenuhi target RPJMD.

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa realisasi capaian Keuangan Urusan Pendidikan secara umum mencapai 102,59 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi capain berkategori '**Sangat Tinggi**'. Hal ini dapat dilihat dari target perbandingan antara Pagu Anggaran RKPD Urusan Pendidikan Tahun 2020 sebesar Rp. 474.247.781.430, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 486.509.066.026, yang berarti terjadi deviasi sebesar 2,59 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.12.261.284.596-, dan untuk realisasi capaian Kinerja RKPD Urusan Pendidikan pada Tahun 2020 secara umum mencapai **94,55 persen** dengan Kriteria Penilaian Realisasi capain masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran
Serta Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020



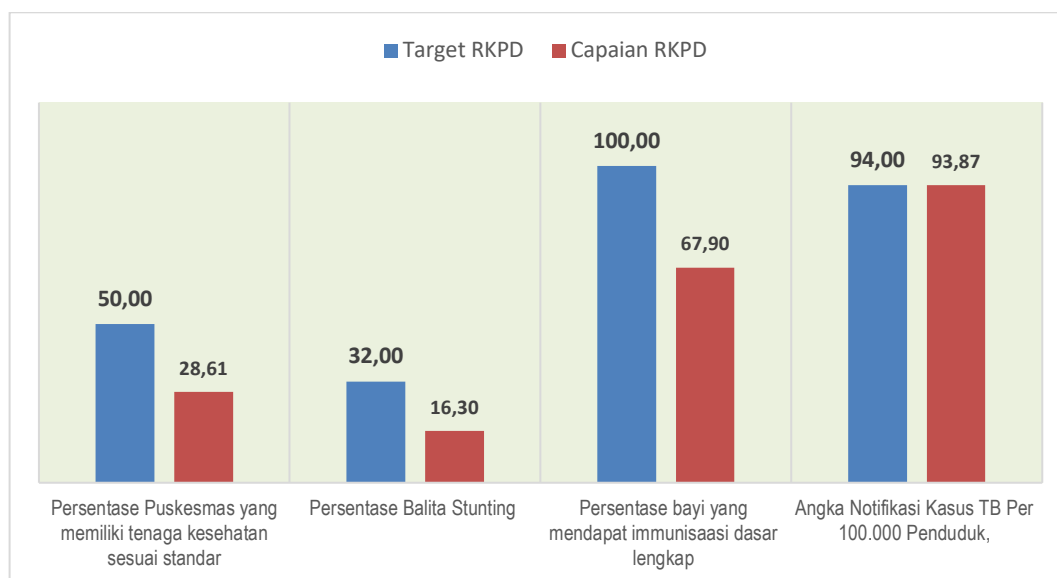
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

2. Bidang Urusan Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan di Bidang Urusan Kesehatan di Sulawesi Tengah didukung melalui peningkatan akses bagi pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan dan pemenuhan sumber daya kesehatan di daerah terpencil kepulauan. Selain itu, didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, penyediaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan tidak mampu, penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, pengembangan manajemen dan informasi kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk melalui revitalisasi Program KB, serta penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.

Gambaran kinerja pembangunan dalam bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

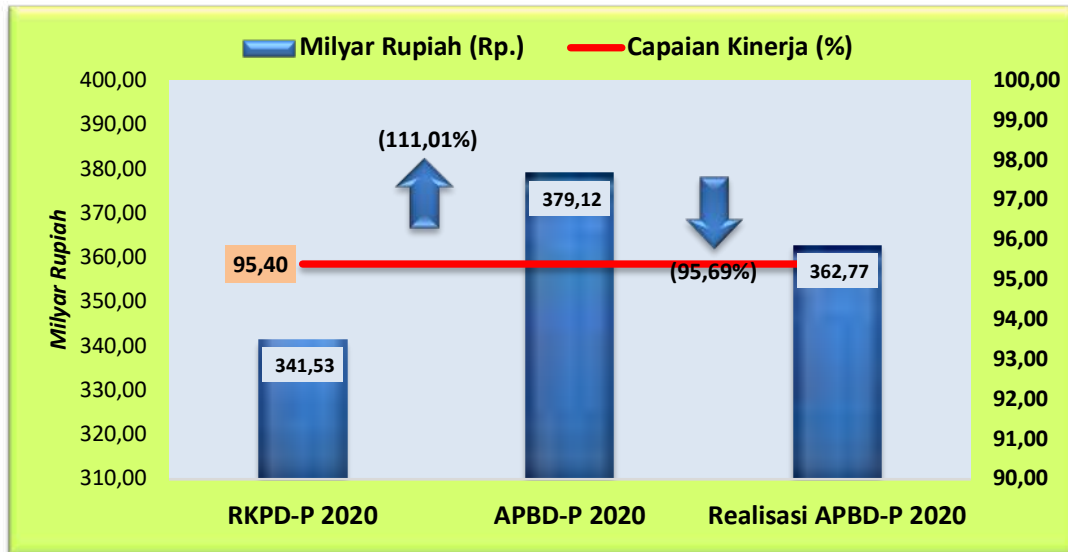
Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa realisasi capaian Keuangan Urusan Kesehatan secara umum mencapai 111,01 persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian berkategori **'Sangat Tinggi'**. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target Pagu Anggaran RKP Urusan Kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp. 341.525.527.576, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 379.115.175.030 yang berarti mengalami deviasi sebesar 11,01 persen atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 37.589.647.454-, dan untuk Realisasi Capaian Kinerja RKP Urusan Kesehatan pada Tahun 2020 secara umum mencapai **95,40 persen** dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran (Miliar Rp.)
Serta Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020



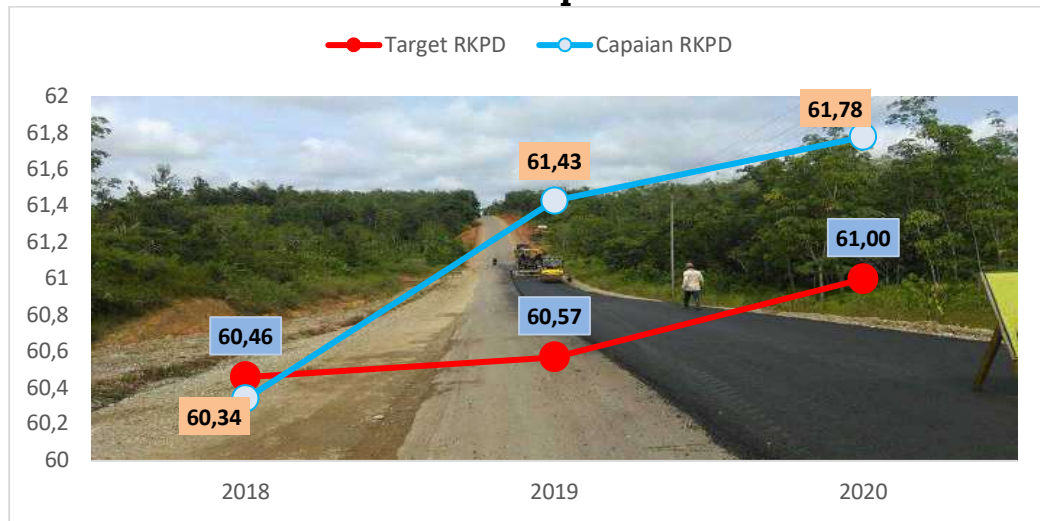
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Bidang Urusan Bina Marga dan Penataan Ruang

Salah satu indikator kinerja dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya bidang Bina Marga adalah indikator proporsi jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap, yang dihitung dengan formula panjang jalan mantap provinsi dibagi total jalan provinsi, dimana pada tahun 2018 telah mencapai 60,34 persen (1.250,70 km) mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 61,43 persen (1.266,15 km) dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 61,78%. Angka tersebut masih jauh berada dibawah target RPJMD 2016-2021 dimana untuk proporsi panjang jalan provinsi mantap sebesar 62,31 persen (1.277,25 km) sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

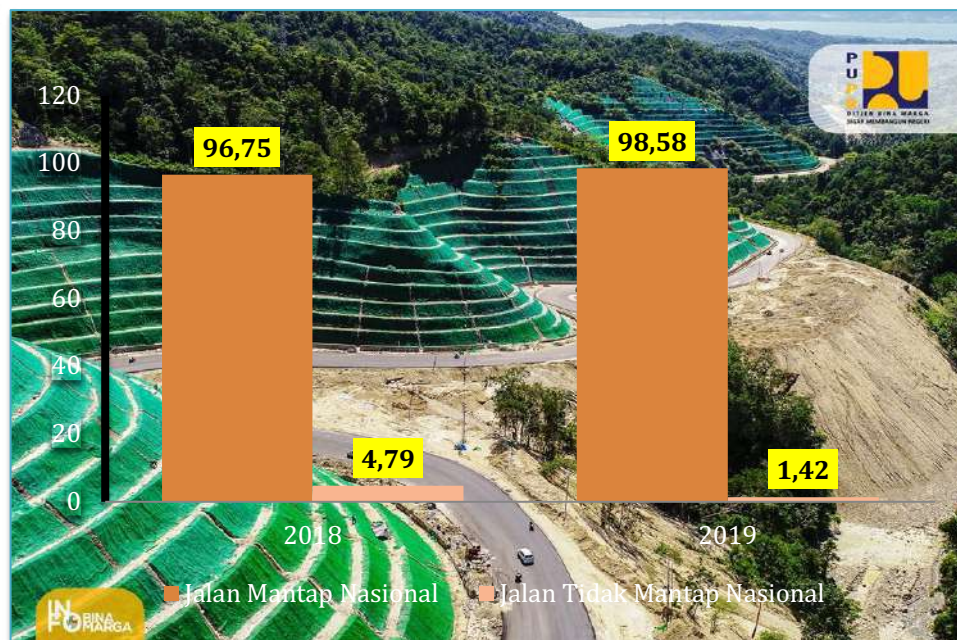
Gambar 2.7
Capaian Indikator Proporsi Jaringan Jalan Provinsi
dalam Kondisi Mantap Tahun 2018-2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Selain itu perkembangan Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan diawal periode kedua RPJMD 2016-2021, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kondisi jalan mantap nasional yaitu dari 96,75 persen pada tahun 2018 menjadi **98,58** persen pada tahun 2019, seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.8
Kondisi Jalan Mantap Nasional di Sulawesi Tengah (%)
Tahun 2018-2019



Sumber :Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng, 2020

Mengenai capaian indikator kinerja lainnya dari Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan target RKPD 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Target RKPD 2019

No	Indikator Kineja Program (outcome)	Satuan	Target RKPD-P 2020	Realisasi RKPD-P 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Meningkatnya Persentase kondisi mantap jaringan jalan provinsi	%	61,00	61,78	101,28	
2	Meningkatnya Persentase konektivitas jaringan jalan provinsi	%	82,97	83,54	100,69	
3	Indeks Pengelolaan Jalan Kab/Kota Sesuai Standar yang Berlaku	%	0,88	0,64	72,73	
4	Terpenuhinya data IUJK Kab/Kota yang terbaharui	Kab/Kota	10	10	100,00	
5	Terpublikasinya profil tim pembina jasa konstruksi provinsi dan kab/kota	Prov/Kab/ Kota	13	13	100,00	
6	Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi berkompentensi	%	93,78	160,5	160,50	
7	Persentase paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu	%	100	99,97	99,97	
8	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	50	75	150,00	
9	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi / NSPK Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	1	100,00	
10	Meningkatnya Kinerja Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan	5	1	20,00	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

b. Bidang Sumber Daya Air

Capaian kinerja bidang sumber daya air yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dapat dilihat beberapa indicator diantaranya yaitu indikator Meningkatkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%) dari

target sebesar 63,00 persen hingga akhir tahun 2020 dapat realisasi mencapai 63,00 persen. Sedangkan untuk indikator lainnya seperti luas daerah genangan yang tertangani (Ha) dari yang ditargetkan dalam RKPD 2020 Seluas 135 hektar telah terealisasi mencapai 135 hektar (100,00 persen), indikator selanjutnya yaitu Luas kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha) dari target dalam RKPD 2020 Seluas 12,89 hektar telah terealisasi mencapai 12,89 hektar (100,00 persen), dan untuk capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.7
Capaian IKU Urusan Dinas Cipta Karya
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020

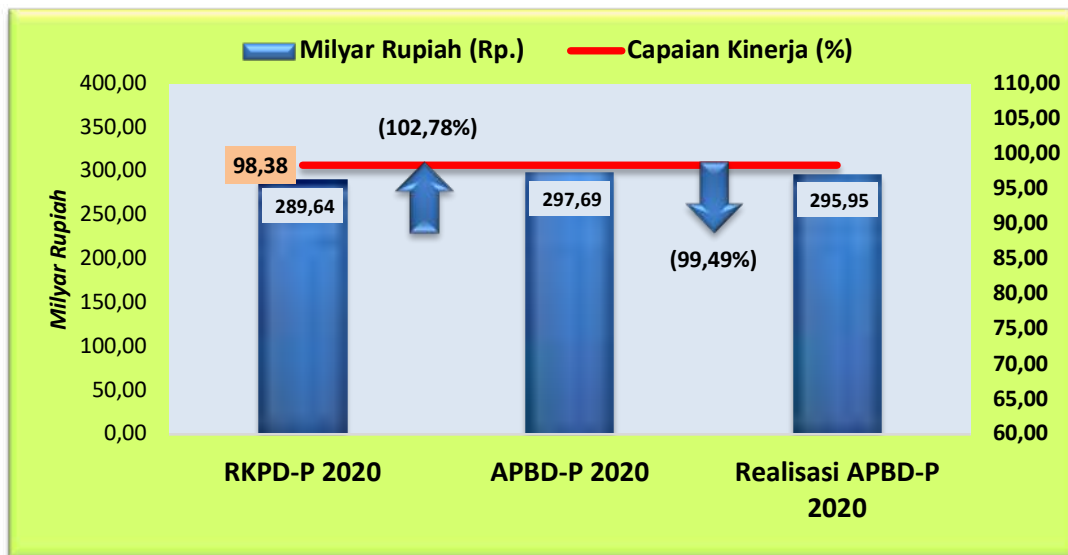
No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RKPD-P 2020	Realisasi RKPD-P 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	luas daerah genangan yang tertangani (Ha)	Ha	135	135	100,00	
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	RT	21	21	100,00	
3	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	%	50,00	50,00	100,00	
4	Terpeliharanya infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi (kawasan)	Kawasan	8	8	100,00	
5	Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	%	63,00	63,00	100,00	
6	Meningkatnya Luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (Ha)	Ha	23,48	23,48	100,00	
7	Luas kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)	Ha	12,89	12,89	100,00	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa realisasi Capaian untuk Keuangan pada Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang secara umum mencapai **102,78** persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian berkategori **'Sangat Tinggi'**. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target Pagu Anggaran RKPD Tahun 2020 sebesar Rp. 289.639.600.449, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun

Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 297.687.762.533 yang berarti mengalami deviasi sebesar 2,78 persen atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 8.048.162.084, dan untuk Realisasi Capaian Untuk Kinerja RKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2020 secara umum mencapai **98,38 persen** dengan kriteria penilaian realisasi capain kinerja masuk dalam kategori **‘Sangat Tinggi’**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya alam dan potensi lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya agar tujuan dan arah pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien, demi meningkatnya kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator antara lain yaitu; 1) indikator Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dari target RKPD 2020 sebesar 18,91 Ha dapat terealisasi sebesar 18,42 Ha

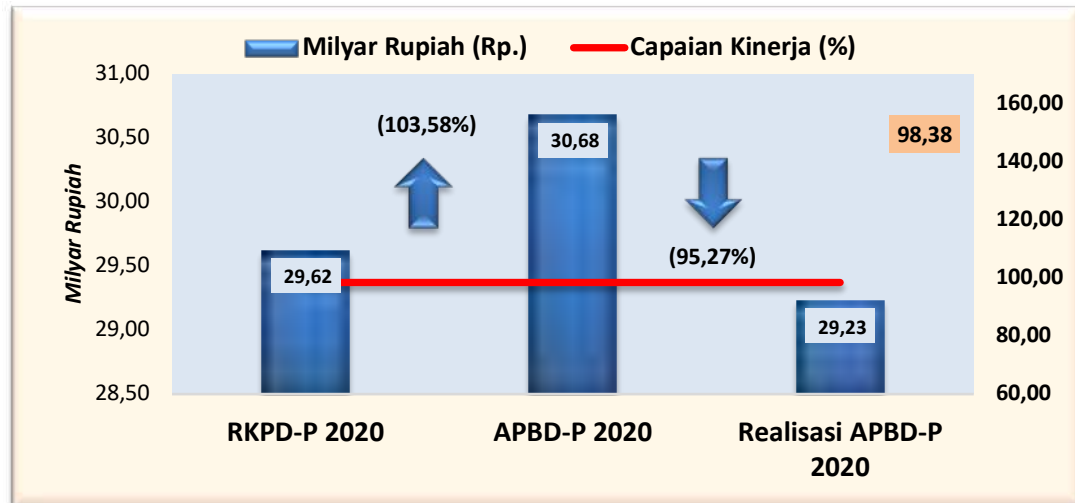
dengan persentase capaian sebesar 97,41 persen, 2) indikator Penanganan rumah yang terkena relokasi akibat bencana alam dari target RKPD 2020 sebesar 5,00 Ha dapat terealisasi sebesar 4,41 persen dengan persentase capaian sebesar 88,18 persen, sedangkan untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RKPD-P 2020	Realisasi RKPD-P 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Ha	18,91	18,42	97,41	
2	Sertifikat dan Registrasi bagi Perencana Perumahan dan Permukiman	Sertifikat	20,00	0,00	0,00	
3	Meningkatnya lingkungan sehat perumahan	%	9,00	8,90	98,92	
4	Penanganan rumah yang terkena relokasi akibat bencana alam	%	5,00	4,41	88,18	
5	Persentase bangunan yang dibina sesuai dengan peruntukannya	%	100,00	98,10	98,10	
6	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	%	100,00	97,86	97,86	

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa realisasi Capaian untuk Keuangan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara umum mencapai **103,58** persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian berkategori **'Sangat Tinggi'**. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target Pagu Anggaran RKPD Tahun 2020 sebesar Rp. 29.620.485.306, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 30.680.485.306 yang berarti mengalami deviasi sebesar 3,58 persen atau terjadi kenaikan sebesar Rp.1.060.000.000. Sedangkan untuk Realisasi Capaian Untuk Kinerja pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020 secara umum mencapai **74,62 persen** dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 secara umum belum terlaksana sesuai dengan target RKPD Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih di bawah target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

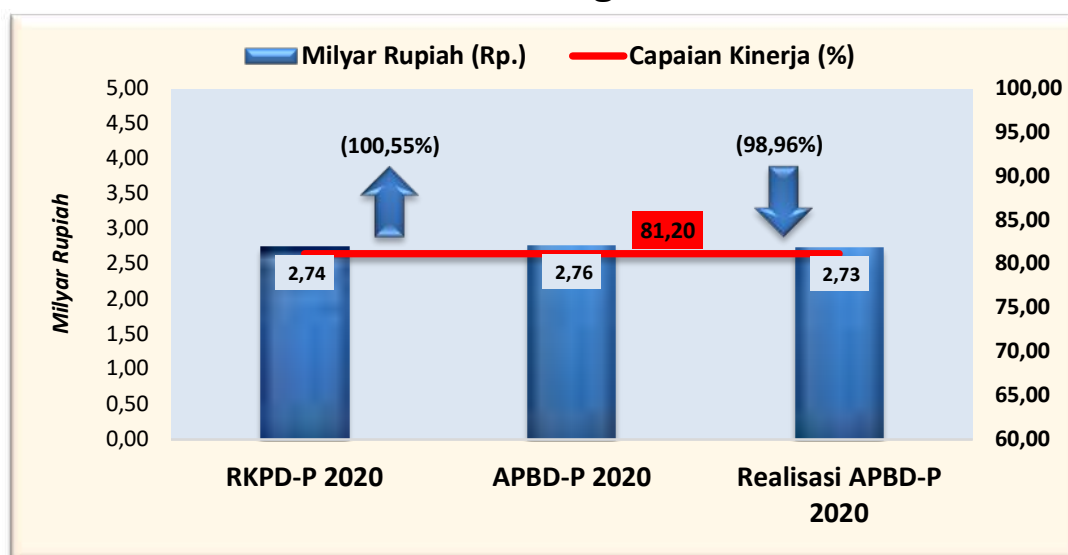
Tabel. 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RKPDP 2020	Realisasi RKPDP 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat	Org	275	75	27,27	
2	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara Anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda	Org	175	175	100,00	
3	Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat Prov. Sulteng	Konflik	2	2	100,00	
4	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	%	76	77,27	101,67	
5	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Org	200	50	25,00	
6	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan.	Org	382	150	39,27	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020. (data diolah kembali)

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKPDP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa realisasi Capaian untuk Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara umum mencapai **100,55** persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian berkategori **'Sangat Tinggi'**. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target Pagu Anggaran RKPDP Tahun 2020 sebesar Rp. 2.742.276.730, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.2.757.276.730 yang berarti mengalami deviasi sebesar 0,55 persen atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 15.000.000. Sedangkan Realisasi Capaian Untuk Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 secara umum mencapai **81,20 persen** dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 secara umum belum sesuai dengan target RKPD Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih di bawah target dan 1 (satu) kegiatan yang direncanakan tidak di anggarkan pada APBD tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

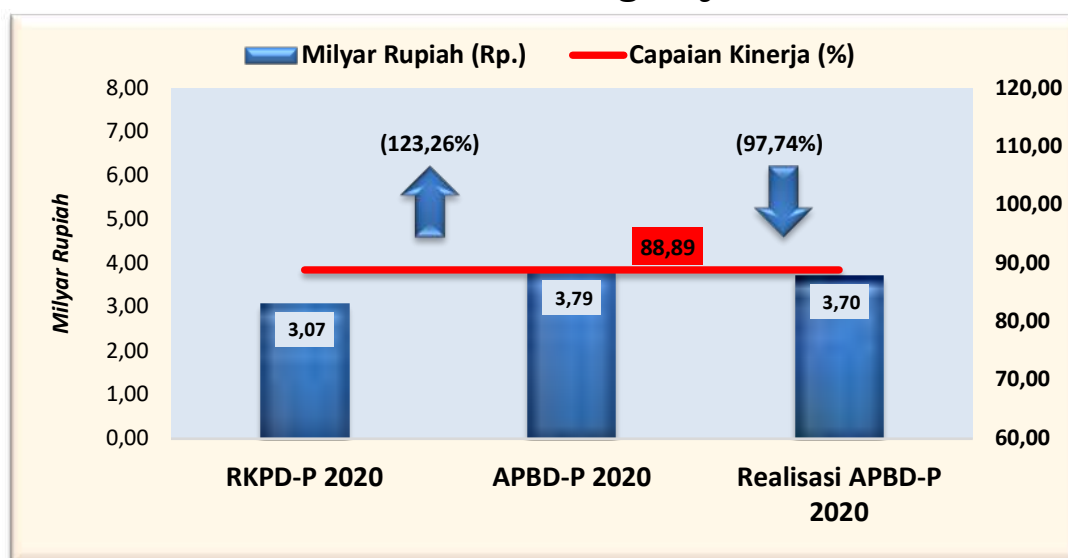
Tabel. 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RKPDP 2020	Realisasi RKPDP 2020	Tingkat Capaian (%)	Ket
1	Jumlah Patroli dan Pengamanan Wilayah Jumlah Patroli dan Pengamanan Wilayah	100 Kali	100 Kali	100,00 %	
2	Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah	100 Kali	100 Kali	100,00 %	
3	Prosentase keamanan kenyamanan lingkungan.	90,00 %	80,00 %	88,89 %	
4	Prosentase pembinaan masyarakat	100 %	0,00 %	0,00 %	
5	Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.	14 Kali	14 Kali	100,00 %	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021. (data diolah kembali)

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKPDP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa Tingkat Realisasi Capaian untuk Keuangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja secara umum mencapai **123,26** persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian berkategori **'Sangat Tinggi'**. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target Pagu Anggaran RKPDP Tahun 2020 sebesar Rp.3.073.360.382, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 3.788.360.382 yang berarti mengalami deviasi sebesar 23,26 persen atau terjadi kenaikan sebesar Rp.715.000.000. Sedangkan Tingkat Realisasi Capaian Untuk Kinerja pada urusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **88,89 persen** dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

6. Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Dasar pelayanan wajib bidang sosial difokuskan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Sampai tahun 2019, pelaksanaan PMKS di Sulawesi Tengah telah membina sejumlah 5.360 jiwa atau 1.340 kk. Selain itu telah dilakukan peningkatan produktivitas keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar sejumlah 11.800 jiwa (2.950 kk).

Capaian Indikator pada urusan sosial dapat dilihat melalui beberapa Capaian IKU diantaranya yaitu Capaian indikator meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, dari target RKPD 2020 sebanyak 180 Orang, yang telah terealisasi

hanya 22 orang yang menandakan capaian tersebut masih jauh dibawah target dengan persentase capaian sebesar 11,22 persen. Indikator lainnya yaitu tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dari target 9 kegiatan hanya dapat telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan dengan persentase capaian sebesar 33,33 persen.

Untuk melihat gambaran pencapaian capaian IKU urusan sosial lainnya pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama
Urusan Sosial Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD-P 2020	Realisasi RKPD-P 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Meningkatnya Produktivitas Keluarga Fakir Miskin Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	KK	2555	1456	56,99	
		Jiwa	10220	5824	56,99	
2	Meningkatnya derajat kesos lanjut usia, Meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan Menurunnya jumlah korban tindak kekerasan dan perdagangan orang bermasalah sosial	Orang	320	563	175,94	
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas	Orang	180	22	12,22	
4	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi	Orang	153	7	4,58	
5	Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi karang taruna dalam UKS, dan meningkatnya TKSK	PSM	27	12	44,44	
		Dokumen	1	1	100,00	
		KT	42	2	4,76	
6	Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan keperintisan	Kegiatan	9	3	33,33	
7	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial	Orang	150	30	20,00	
8	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta data PMKS	Kab/Kota	13	13	100,00	
9	Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, Meningkatnya pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, Meningkatnya pelayanan dan koordinasi	KK	10008	0	0,00	
		Jiwa	54777			
		Orang	540	1536	284,44	
		Keg	2	2	100,00	

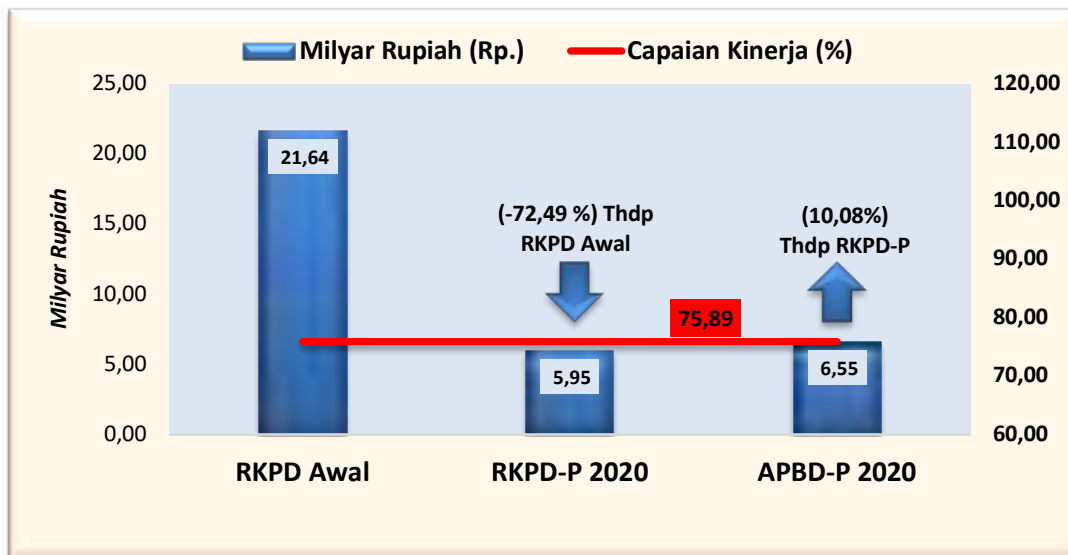
dengan instans terkait serta terlaksananya pemantauan PKH	Lap	1	1	100,00	
---	-----	---	---	--------	--

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali).

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum capaian Urusan Sosial Tahun 2020 masih jauh dibawah target RKPD 2020. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan pagu anggaran pada RKPD-Perubahan 2020 sebesar 72,49 yaitu dari Rp. 21.639.889.749 turun menjadi sebesar Rp.5.953.937.175 sedangkan untuk penetapan target kinerja yang ingin dicapai tidak ada pengurangan.

Berdasarkan Matriks hasil Evaluasi capaian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diketahui bahwa Tingkat Realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **110,08** persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian berkategori **'Sangat Tinggi'**. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 5.953.937.175, sedangkan yang teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 6.553.937.175 yang berarti mengalami deviasi sebesar 10,08 persen atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 600.000.000. Sedangkan Tingkat Realisasi Capaian pada Tahun 2020 secara umum mencapai **75,89 persen** dengan kriteria penilaian realisasi capain kinerja masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Daya serap tenaga kerja di sektor ekonomi dapat dilihat dari besarnya porsi keterlibatan angkatan kerja (yang bekerja) dalam proses kegiatan produksi yang ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perkembangan TPAK di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2019-200 terjadi peningkatan, yakni pada tahun 2019 TPAK mencapai 67,80 persen naik menjadi 69,44 persen pada tahun 2020. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode pada tahun 2015 sebesar 3,11 persen meningkat menjadi 3,77 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2015-2020

NO.	INDIKATOR	2019	2020
1.	Angkatan Kerja (orang)	1.486.561	1.583.532
2.	Bekerja (orang)	1.439.759	1.527.385
3.	Pengangguran (orang)	46.802	56,247
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,80	69,44
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	3,77

Sumber: BPS,BRS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah 2020.

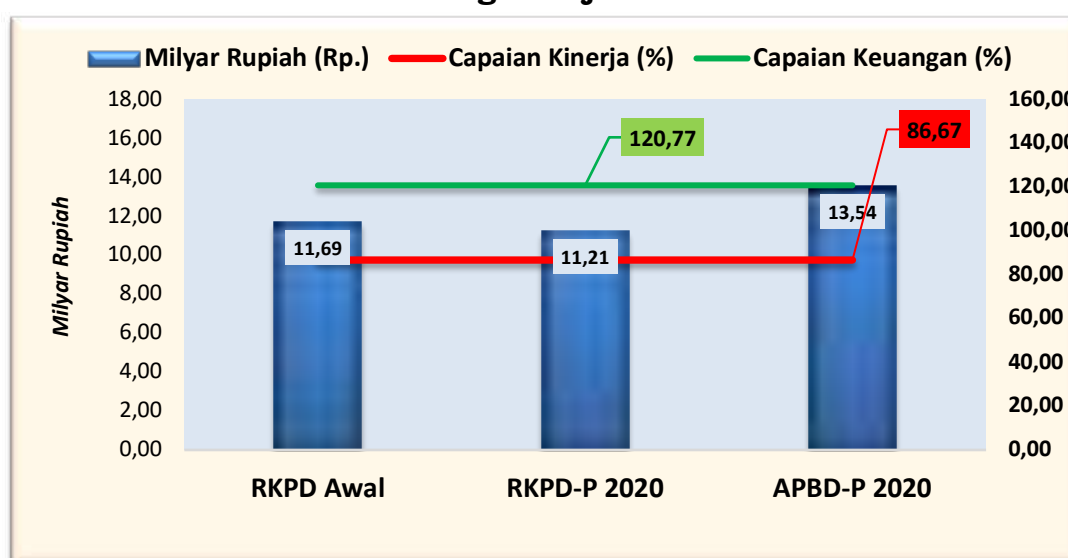
Salah satu strategi pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, profesional dan produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yaitu melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya serta menguasai jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu. Selain itu dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada urusan tenaga kerja Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKPD awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar

Rp. 11.690.504.536, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 11.210.132.611 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD tahun 2020 yaitu sebesar Rp.13.539.032.611 yang berarti terjadi deviasi sebesar 20,77 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp.2.328.900.000 terhadap RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 pada urusan tenaga kerja dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **120,77** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **86,67** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020



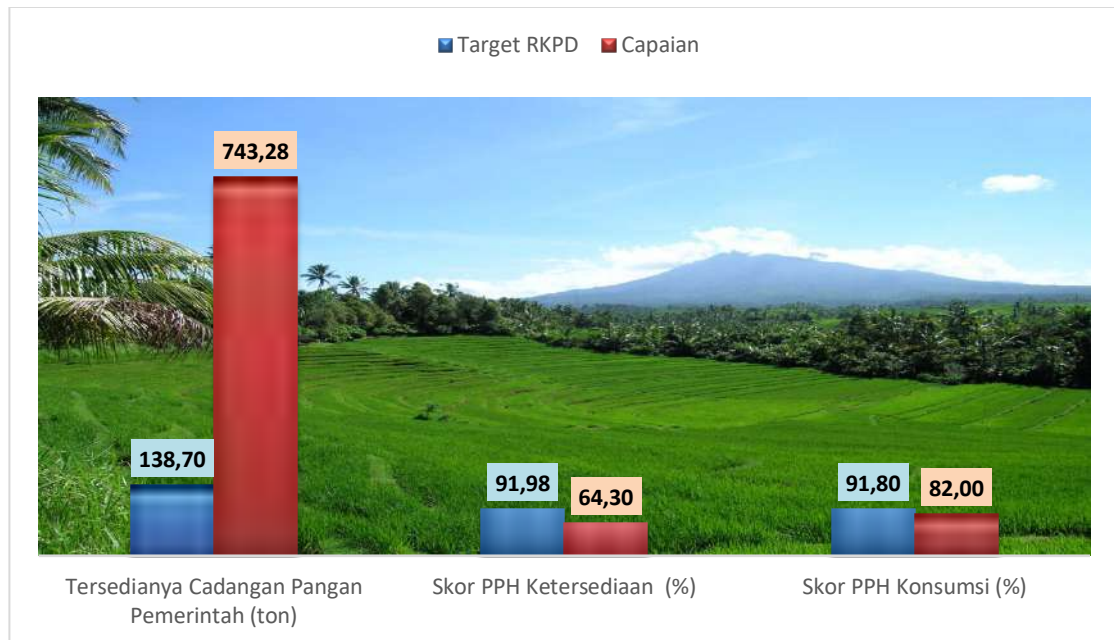
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

2. Ketahanan Pangan

Capaian kinerja pembangunan dalam bidang ketahanan pangan dapat dilihat salah satunya indikator tersedianya cadangan pangan pemerintah dari target 138,70 Ton dapat terealisasi sebesar 743,28 ton yang berarti capaian kinerja jauh diatas target dengan persentase sebesar 535,89 persen. Indikator lainnya yaitu indikator Skor PPH Ketersediaan dari target 91,98 persen yang terealisasi sebesar 64,30

persen yang berarti capaian kinerja belum mencapai target dengan persentase sebesar 69,91 persen.

Gambar 2...
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020



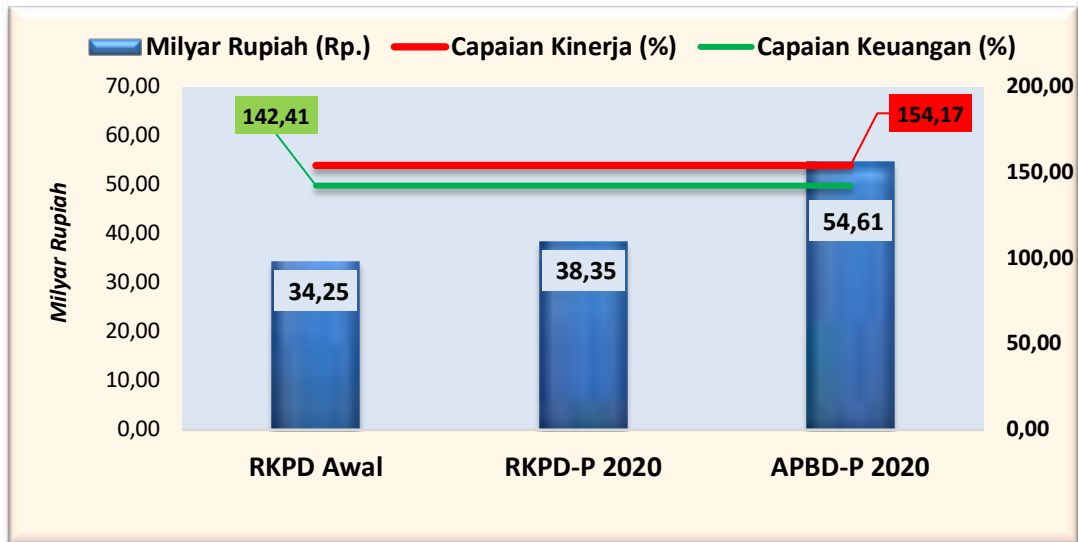
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada urusan ketahanan pangan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKP awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 34.251.337.395, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 38.348.779.874 pada pagu anggaran RKP-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 54.612.313.374 yang berarti terjadi deviasi sebesar 42,41 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp.16.263.533.500 terhadap target Pagu Anggaran RKP-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi RKP Tahun 2020 pada urusan ketahanan pangan dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **142,41** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKP-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **154,17 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori

'Tinggi',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020

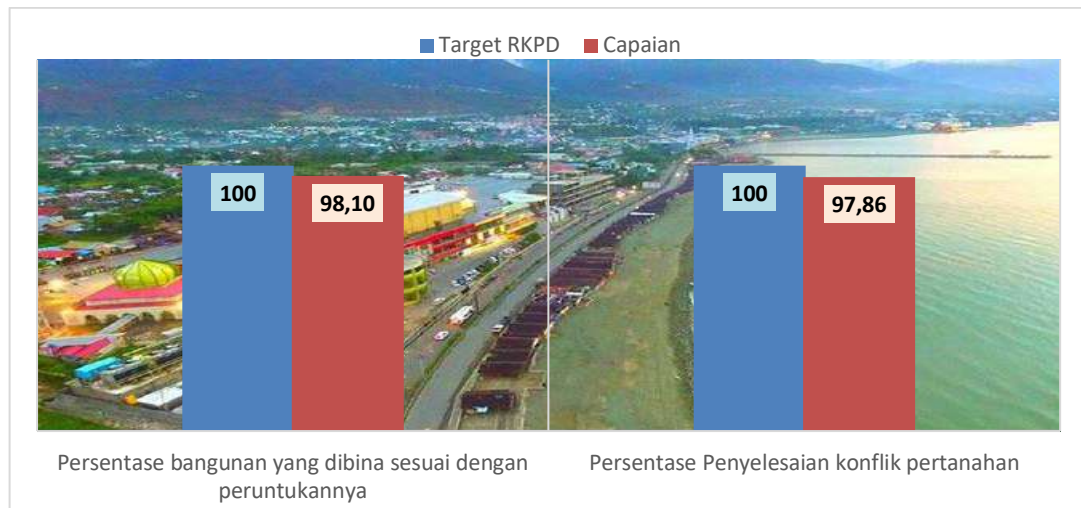


Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

3. Pertanahan

Capaian kinerja dalam urusan pertanahan dapat dilihat melalui capaian 2 (dua) indikator yaitu, 1) Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan sesuai yang termuat dalam Dokumen RKPD 2020 dari target 100 persen dengan realisasi kinerja mencapai 97,86 persen, dan 2) Indikator Persentase bangunan yang dibina sesuai dengan peruntukannya dari target 100 persen dengan realisasi kinerja mencapai 98,10 persen yang berarti masih dibawah target. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Perbandingan Target RKPD terhadap Realisasi
Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2019

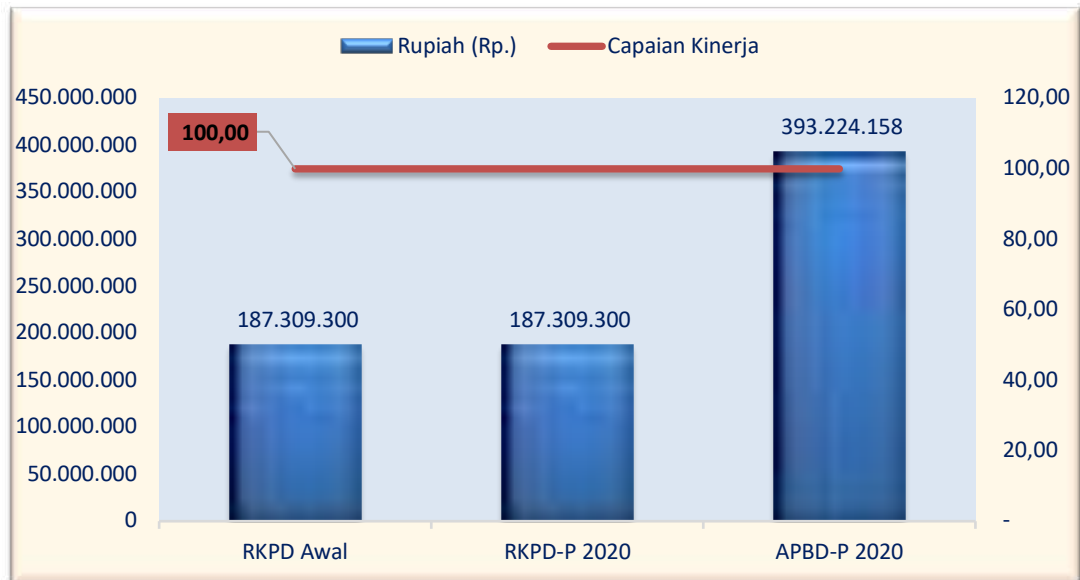


Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil evaluasi terhadap konsistensi perencanaan penganggaran pada Tahun 2020, dapat diketahui bahwa urusan Pertanahan pada RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp. 187.309.000 begitupula pada RKPD-P Tahun 2020 konsisten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.309.000. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 393.224.158. yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 205.914.858 yang berarti terjadi deviasi sebesar 109,93 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 pada urusan pertanahan dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **209,93** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pertanahan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

4. Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup menitikberatkan pada keseimbangan ekosistem dengan tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya lain yang saling berkaitan. Untuk itu pengelolaan sumber daya lingkungan tidak hanya terfokus pada pelestarian hewan dan tumbuhan melainkan menyangkut pelestarian ekosistem.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan. Capaian kinerja bidang lingkungan hidup bisa terlihat dari jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang terbina pada Tahun 2020 dari target sebesar 5 lokasi telah mencapai target RKPD sebesar 4 lokasi yang berarti belum mencapai target, kemudian indikator jumlah pengawasan reklamasi dari target 13 kali pengawasan telah mencapai target RKPD sebesar 13 kali pengawasan. Dan untuk capaian indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.16
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian (%)	KET
----	-------------------------------------	--------	----------------	-----------------	---------------------	-----

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Pemenuhan Baku Mutu Air Sungai dan Udara terhadap parameter yang dipantau (%) Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	%	2	1	50,00	
2	Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	Lokasi	5	4	80,00	
3	Jumlah Pengawasan Reklamasi	Kali	13	13	100,00	
4	Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi	Dokumen	2	2	100,00	
5	Pengawasan Pelaksanaan KLHS	Kali	10	1	10,00	
6	Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha	Usaha	65	65	100,00	
7	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola	Kab/Kota	8	4	50,00	
8	Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	Profil	1	1	100,00	
		Diklat	2	2	100,00	
		Penghargaan	1	1	100,00	
		kelompok	1	1	100,00	
9	Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH	Kali	39	39	100,00	

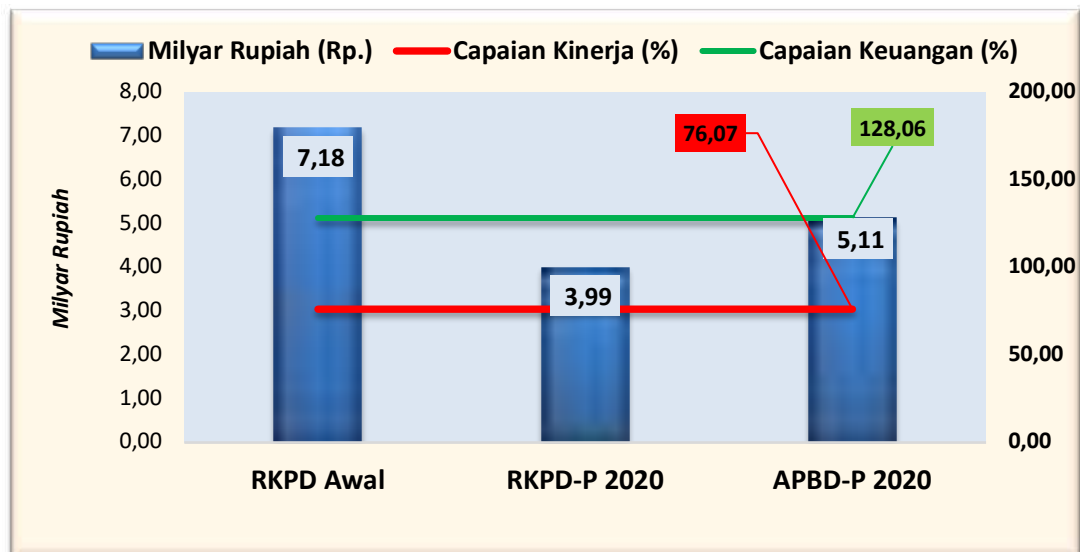
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng , 2021 (data diolah kembali).

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada urusan lingkungan hidup Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKPD awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 7.176.975.612, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 3.990.849.247 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 5.110.849.248 yang berarti terjadi deviasi sebesar 28,06 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.120.000.001 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada urusan lingkungan hidup dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **128,06** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan

tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **76,07 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **‘Tinggi’**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

5. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah pembinaan, pengawasan dan penertiban administrasi kependudukan di 13 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan aplikasi e-akta dan dokumen pencatatan sipil lainnya di 13 Kabupaten/Kota dan meningkatnya sistem administrasi kependudukan (SIAK) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Tabel. 2.16
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

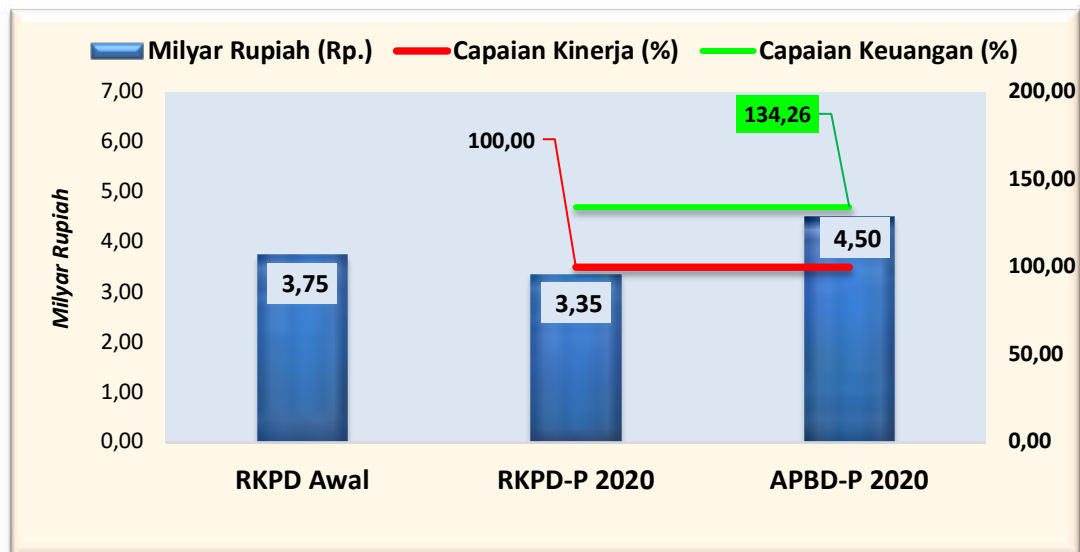
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian (%)	KET
Meningkatnya Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	Dok.	2	2	100,00	
Meningkatnya pelaksanaan pencatatan sipil	Dok.	2	2	100,00	
Meningkatnya pengelolaan sistem administrasi kependudukan (SIAK)	Dok.	2	2	100,00	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali).

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKPD awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 3.745.145.369, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 3.350.425.769 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 4.498.125.769 yang berarti terjadi deviasi sebesar 34,26 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.147.700.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **134,26** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya terlihat dari indikator terlaksananya penataan desa dari target 71 orang pada tahun 2020, telah terealisasi mencapai 71 orang dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen. Indikator selanjutnya yaitu terkelolanya sumber daya alam melalui Program PAMSIMAS dari target RKP sebesar 20 kegiatan pada tahun 2020 yang terealisasi hanya sebanyak 5 kegiatan dengan persentase capaian sebesar 25,00 persen. Begitupula dengan indikator terwujudnya pembinaan kelembagaan posyantek dari target 30 orang pada tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 8 orang dengan persentase capaian sebesar 26,67 persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel. 2.17
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sulawesi Tengah



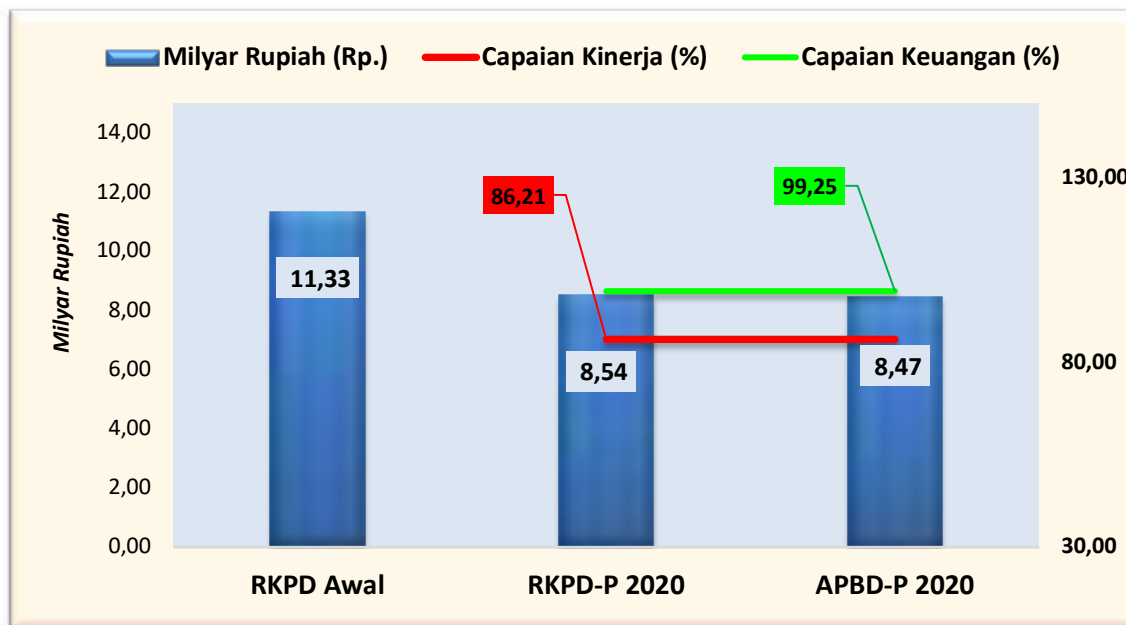
Sumber: Bappeda Prov. Sulteng 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKPDP awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 11.326.421.141, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 8.535.236.750 pada pagu anggaran RKPDP-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 8.471.096.750 yang berarti terjadi deviasi sebesar 0,75 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 64.140.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPDP-P Tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya keonsistensi yang ditunjukkan dengan kecilnya tingkat deviasi dalam perencanaan dan pengalokasi anggaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPDP Tahun 2020 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **99,25** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 di bawah target RKPDP-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja

pada Tahun 2020 secara umum mencapai **86,21 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **‘Sangat Tinggi’**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020



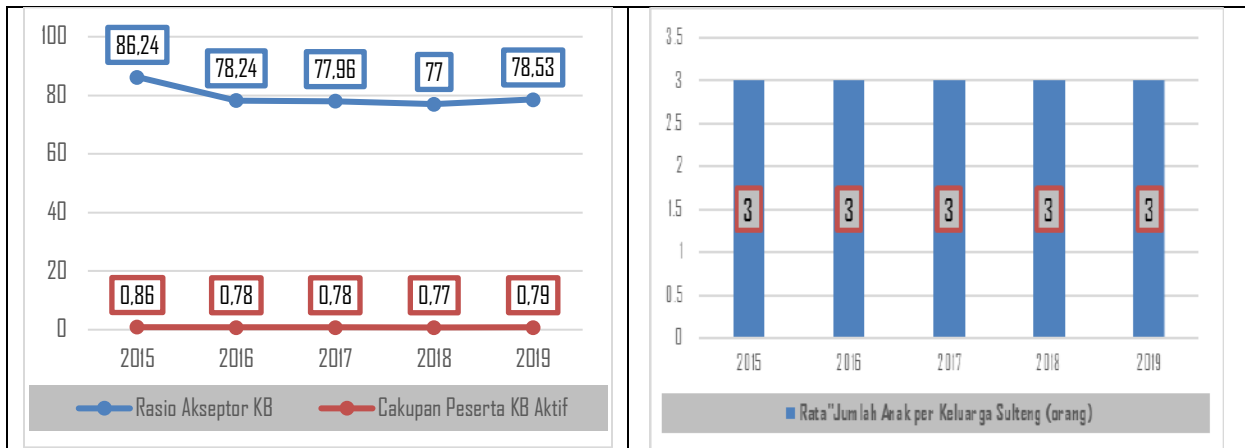
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Disamping itu melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga (kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan program KB di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator pada gambar berikut:

Gambar 2.35
Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan
Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2019



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng, 2020.

Terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sepanjang periode tahun 2015-2019 sebanyak 3 anak per keluarga. Sementara jumlah pengguna akseptor KB diantara pasangan usia subur pada tahun 2016 sebesar 86,24 persen, angka ini menurun jika dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 78,24 persen. Persentase cakupan peserta KB aktif pada Tahun 2015 sebesar 0,86 persen meningkat dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 0,78 persen.

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKPD awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 3.013.709.947, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.825.251.872 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.995.251.872 yang berarti terjadi deviasi sebesar 9,31 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 170.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **109,31** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P

Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

8. Perhubungan

a. Transportasi Darat

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Berikut disajikan kondisi jaringan jalan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 2.38
Jaringan Jalan Strategis Nasional
Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG)	PANJANG JALAN (KM)	KETERANGAN
1.	018 19 K	Jln. Hasanuddin II (Palu)	0,850	Keputusan Menteri PU RINo.567/KPTS/M/2001, Tanggal 10 November 2010 Perihal Penetapan Ruas-Jalan Strategis Nasional.
2.	019 16 K	Jln. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu	5,640	
3.	019 17 K	Jln. Sungai Gumbasa (Palu)	0,230	
4.	019 18 K	Jln. Danau Poso (Palu)	0,400	
5.	019 1A K	Jln. Danau Dolago (Palu)	0,200	
6.	019 14 K	Jln. Sis Aljufri I (Palu)	0,350	
7.	033 14 K	Jln. Yos Sudarso (Poso)	0,650	
8.	043	Ruas Luwuk-Batui (Kab. Banggai)	42,114	
9.	043 11 K	Jln. Samratulangi (Luwuk)	0,321	
10.	043 12 K	Jln. A. Yani (Luwuk)	1,492	
11.	043 13 K	Jln. Urip Sumoharjo (Luwuk)	0,886	
12.	043 14 K	Jln. Sudirman (Luwuk)	0,976	
13.	043 15 K	Jln. M. Hatta (Luwuk)	10,553	
14.	044	Ruas Batui-Toili (Kab. Banggai)	40,955	
15.	045	Ruas Toili-Rata (Kab. Banggai)	53,346	
16.	046	Ruas Rata-Baturube (Kab. Morowali)	57	
17.	063	Ruas Mepanga-Pasir Putih (Kab. Parimo)	23	
18.	064	Ruas Pasir Putih-Basi (Kab. Tolitoli)	32,50	
19.	065	Ruas Tomata-Pape (Kab. orowali)	64	
20.	066	Ruas Salakan-Sambiut (Kab. Bangkep)	24	
Total			359,463	

Sumber : RTRWProvinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Selanjutnya Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang)
Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	TERMINAL PENUMPANG	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (M ²)
Terminal Penumpang Tipe A:			
1.	Mamboro (Eksisting)	Kota Palu	19.174
2.	Sintuwu (Eksisting)	Kab. Poso	3.115
3.	Toboli (Eksisting)	Kab. Parigi Moutong	33.800
Terminal Penumpang Tipe B:			
1.	Tentena (Eksisting)	Kab. Poso	
2.	Pasar Sentral (Eksisting)	Kab. Poso	
3.	Biak (Eksisting)	Kab. Banggai	
4.	Lelean Nono	Kab. Tolitoli	
5.	Mensung	Kab. Parigi Moutong	
6.	Tipo	Kota Palu	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Lebih lanjut, mengenai jaringan prasarana jembatan timbang di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Jaringan Prasarana Jembatan Timbang
Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	JEMBATAN TIMBANG	KABUPATEN/KOTA
1.	Toboli	Parigi Moutong
2.	Kayu Malue	Palu
3.	Mayoa	Poso
4.	Moutong	Parigi Moutong

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Sementara untuk Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	LOKASI PENGUJIAN	KABUPATEN/KOTA	MERK/TAHUN OPERASI	KAPASITAS	KONDISI
1.	Lolu	Kota Palu	Kubota/1979	10 Ton	Rusak
			Kubota/2008	10 Ton	Baik
2.	Poso	Poso	Kubota/2008	10 Ton	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2020.

Dalam rangka mengantisipasi mobilitas arus barang dan manusia lintas pulau dalam mendukung perekonomian Daerah Sulawesi Tengah, maka dikembangkan jaringan moda transportasi angkutan penyeberangan melalui program Angkutan Sungai, Danau, dan Perairan (ASDP), dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah

NO.	PELABUHAN	KABUPATEN/ KOTA	LINTAS PENYEBERANGAN
1.	Pagimana	Banggai	Pagimana-Gorontalo (Prov. Sulteng-Gorontalo)
2.	Luwuk	Banggai	Luwuk-Salakan
3.	Taipa	Palu	Taipa-Balikpapan (Prov. Sulteng - Kaltim)
4.	Ampana	Tojo Unauna	Ampana-Wakai-Gorontalo (Prov. Sulteng-Gorontalo)
5.	Tolitoli	Tolitoli	Tolitoli-Tarakan (Prov. Sulteng - Kaltim)
6.	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai-Luwuk-Banggai- Boniton-Banggai-Bobong
7.	Toboli	Parigi Moutong	Dolong-Uwebone-Marissa- Parigi-Marissa-Dolong(Prov. Sulteng-Gorontalo)

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2020.

b. Transportasi Laut

Di bidang perhubungan laut, perkembangan pelayanan transportasi laut yang mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra, secara kontinu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayaran angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 1 (satu) pelabuhan utama (internasional) yakni Pelabuhan Pantoloan, 14 (empat belas) pelabuhan pengumpul (nasional), yakni Luwuk, Pagimana, Bunta, Tangkiang, Banggai, Kolonodale, Leok, Tolitoli, Donggala, Wani, Ogoamas, Parigi, Poso, Ampana; dan 12 (dua belas) pelabuhan pengumpan (regional), yakni Sabang, Ogotua, Kumaligon, Paleleh, Wakai, Salakan, Menui, Sambalagi, Malala, Bungku, Dolong/Popolii, Moutong; serta 14 (empat belas) pelabuhan terminal khusus (tarsus).

Tabel 2.43
Sarana Pelabuhan Laut Utama/Nasional
Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	PELABUHAN	KABUPATEN/ KOTA	KAPASITAS DERMAGA	LUAS DERMAGA
Pelabuhan Utama (International):				
1	Pantoloan	Palu	4.000 DWT.	250 m x 13 m
Pelabuhan Pengumpul (Nasional):				
1	Luwuk	Banggai	1.000 DWT	150 m x 12 m
2	Pagimana	Banggai	1.000 DWT	70 m x 8 m
3	Bunta	Banggai	1.000 DWT	70 m x 8 m
4	Tangkian	Banggai	1.000 DWT	88 m x 12 m
5	Banggai	Banggai	10.000 DWT	150 m x 8 m
6	Kolonodale	Morowali	1.000 DWT	50 m x 8 m
7	Leok	Buol	1.000 DWT	81 mx8 m
8	Tolitoli	Tolitoli	1.000 DWT	70 m x 8 m
9	Donggala	Donggala	500 DWT	46 m x 8 m
10	Wani	Donggala	1.000 DWT	70 m x 8 m
11	Ogoamas	Donggala	400 DWT	35 m x 8 m
12	Parigi	Parigi Moutong	1.000 DWT	100 m x 9 m
13	Poso	Poso	1.000 DWT	70 m x 8 m
14	Ampana	Tojo Una-Una		

Sumber: RTRWProvinsi Sulteng Tahun 2013-2033.

(3) Transportasi Udara

Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan status Bandar Udara pengumpul sekunder sebagaipintu gerbang utama melalui udara semakin dituntut dalam peningkatan aktifitas pelayanan penerbangan guna mengantisipasi kesiapan daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan era globalisasi. Pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu agar dapat didarati pesawat yang berbadan besar, tidak terbatas hanya mampu melayani pesawat jenis Boeing 737-900ER dan Boeing 737-800 NG. Selain itu, di beberapa kabupaten terdapat pula Bandar Udarapengumpul tersier yakni Bandar Udara Bubung Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang dapat melayani jenis pesawat Boeing 737/200, Cassa 212, ATR 500/600, Dornier 32, Bandar Udara Lalos Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli. Untuk melayani penerbangan pengumpan Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol yang baru mampu didarati jenis pesawat Cassa 212 dan ATR 500/600 serta

Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang sudah mampu didarati oleh jenis pesawat N 219 dan ATR 500/600. Selain itu di Sulawesi Tengah sedang dilakukan pembangunan 1 (satu) bandar udara baru yaitu Bandar Udara Banggai di Kabupaten Banggai yang dibangun mulai tahun 2015.

Tabel 2.44
Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya
Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	NAMA BANDARA	KABUPATEN/ KOTA	MAKSIMAL PESAWAT
Pengumpul Sekunder:			
1.	Mutiara Sis Aljufri	Palu	B - 737
Pengumpul Tersier:			
1.	Bubung Syukuran Aminuddin Amir	Banggai	B - 737.200
2.	Lalos Sultan Bantilan	Tolitoli	ATR
Pengumpan:			
1.	Pogogul	Buol	ATR
2.	Kasiguncu	Poso	ATR
3.	Ampana	Tojo Unauna	ATR
4.	Umbele	Morowali	ATR
Missioner:			
1.	Gintu (operasional)	Poso	Cesna
2.	Tentena (operasional)	Poso	Cesna
Bandara Yang Direncanakan:			
1.	Banggai	Banggai Laut	ATR

Sumber: RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2013-2033.

9. Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan aktivitas manusia sehari-hari dan telah menjadi fasilitas utama berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian.

Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui 11 program yaitu Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik, Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi E-

Government, Keamanan Informasi E-Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi dan Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik, Peningkatan Penguatan Kapasitas SD Komunikasi Publik, Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi dan Tata kelola dan Ekosistem TIK, selanjutnya digambarkan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel. 2.19
Capaian Indikator Kinerja Utama
Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Meningkatnya pemanfaatan konten dan pengelolaan media serta data informasi pendukung komunikasi publik	80%	80%	100,00	
2	Termanfaatkannya dan terwujudnya monitoring isu publik, pengelolaan pendapat umum dan pengaduan masyarakat	80%	80%	100,00	
3	Terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui penyelesaian sengketa informasi	80%	80%	100,00	
4	Tingkat pemanfaatan media pemerintah daerah sebagai sarana komunikasi publik	80%	80%	100,00	
5	Perluasan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK SKPD provinsi	80%	50%	63,00	
6	Terlaksananya pengembangan dan penyediaan aplikasi pemerintahan dan publik wilayah provinsi	4 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00	
7	Tingkat layanan penerapan keamanan informasi ISO. 27001 di SKPD provinsi	80%	60%	75,00	
8	Terwujudnya kemitraan dan hubungan media dan layanan informasi publik	12 Laporan	8 Laporan	66,67	
9	Terwujudnya pemahaman SDM TIK dan penguatan infrastruktur komunikasi publik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	
10	Terwujudnya layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan provinsi	10 Sub Domain	10 Sub Domain	100,00	
11	Terwujudnya penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan ekosistem TIK smart province	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020, dapat diketahui bahwa pada RKPD awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 7.493.219.499, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 3.002.544.136 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 8.743.219.499 yang berarti terjadi deviasi

sebesar 191,19 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.740.675.363 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum adanya kekonsistensi penganggaran yang ditunjukkan dengan besarnya tingkat deviasi dalam perencanaan dan pengalokasi anggaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Komunikasi dan Informasi dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **291,19** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 jauh di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **86,06** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020



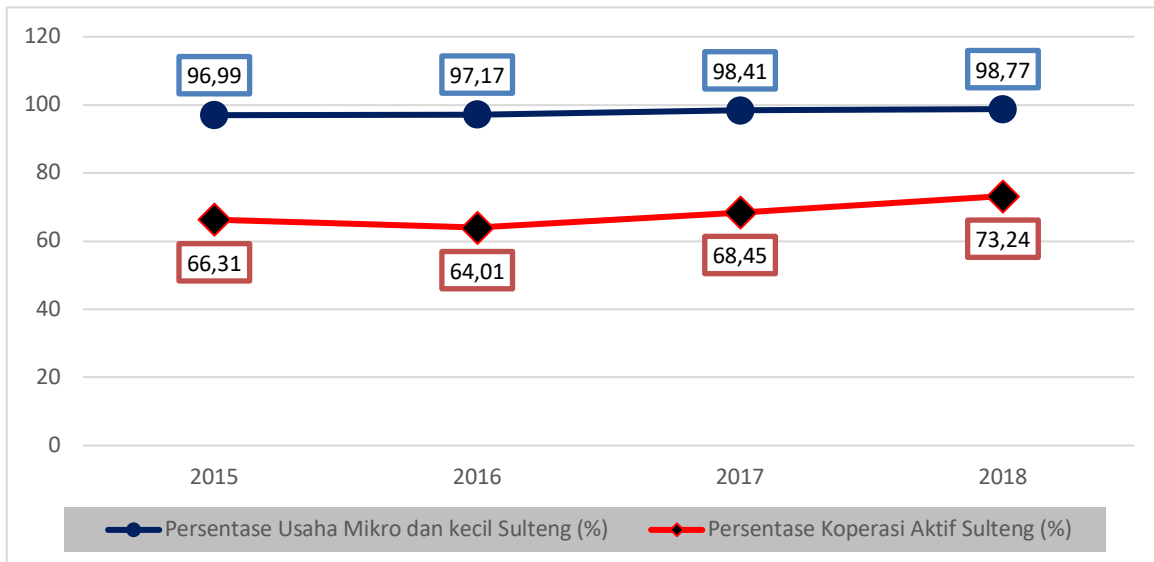
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

10. Koperasi dan UKM

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan saat ini UKM menjadi ujung

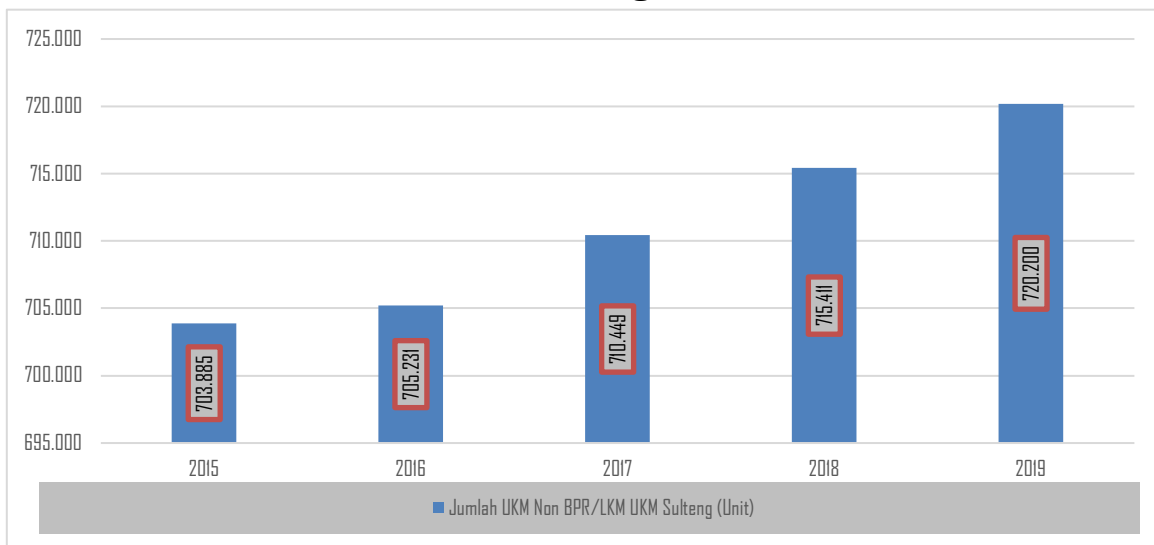
tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.36
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif, Usaha Mikro Kecil
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2020

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2020

Pada gambar diatas terlihat bahwa jumlah persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sebesar 66,01 persen, capaian ini relatif tinggi dibanding Tahun 2014 yang hanya sebesar

65,45 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan kecil pada Tahun 2014 sebesar 96,95 persen meningkat menjadi 96,99 persen pada Tahun 2015. Sedangkan jumlah UKM dan BPR/LKM mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 703.885 unit usaha.

Untuk melihat gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2020 dapat dilihat antara lain pada capaian indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dari target 10 persen dan terealisasi 10 persen dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen, indikator Peningkatan Usaha Kecil dari target 1.550 Usaha Kecil dan terealisasi sebanyak 477 Usaha Kecil dengan tingkat capaian sebesar 30,77 persen, indikator selanjutnya yaitu Meningkatnya Kemampuan dan Kualitas SDM Pelaku Usaha Koperasi dan UKM dari target 27 angkatan dapat terealisasi sebanyak 33 angkatan atau melampaui target RKPD dengan persentase capaian sebesar 122,22 persen. Gambaran capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2...
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bidang Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian EKPDP 2020	
1	Koperasi berkualitas 80%, dari 36 Koperasi Primer/Sekunder Aktif	10,00%	10,00%	100,00%	
2	Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas	35,00%	24,80	70,86%	Tidak ada data
3	Jumlah usaha kecil yang naik kelas (unit/Usaha Kecil)	3,00%	3,00%	100,00%	
4	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	27 Angkatan	33 angkatan	122,22%	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali).

Tabel. 2...
 Capaian Indikator Kinerja Keluaran (IKK)
 Bidang Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020

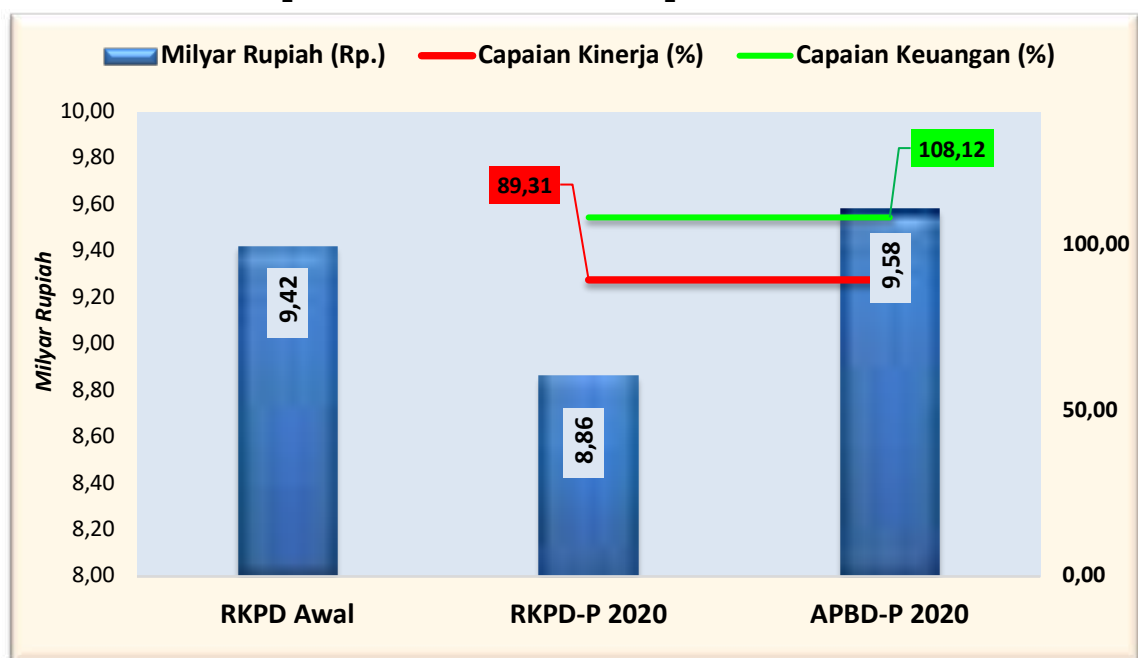
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian EKPDP 2020	Ket
Koperasi Aktif(%)	60%	66%	110,00%	
Koperasi sehat (unit/kop)	10 unit	14 unit	140,00%	
Koperasi tumbuh (%)	10%	10%	100,00%	
Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya (unit/kop)	9 unit	9 unit	100,00%	
Jumlah tenaga kerja terserap (%)	40%	0,00%	-	Tidak ada data capaian
Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas (%)	35%	24,8%	70,86%	
Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas (unit/usaha kecil)	1.000	238	23,80	
Jumlah usaha kecil yang mendapatkan pendampingan (unit/usaha kecil)	500	151	30,20	
Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya(unit/usaha kecil)	50	88	176,00%	
Meningkatnya Kemampuan dan Kualitas SDM Pelaku Usaha Koperasi dan UKM	27 Angkatan	33 angkatan	122,22%	

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali).

Dari hasil persandingan/konsistensi penganggaran pada Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPD Awal Tahun 2020 sebesar Rp. 9.417.971.697, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 8.861.770.697 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9.581.770.697 yang berarti terjadi deviasi sebesar 81,2 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 720.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Koperasi dan UMKM dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **108,12** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **89,31 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Koperasi dan UMKM Hidup Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

11. Penanaman Modal

Penanaman Modal merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan modalnya dalam melakukan kegiatan usahanya di daerah. Keikutsertaan investor asing sebagai akibat globalisasi (era tanpa batas) dalam persaingan bisnis akan membawa dampak yang positif maupun negatif bagi daerah penerima modal.

Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya penanaman modal di daerah selain meningkatkan pertumbuhan

ekonomi juga diantaranya; (1) Masuknya modal baru untuk pembangunan, (2) Menambah devisa negara,(3) Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan,(4) Penyerapan tenaga kerja,(5). Menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku (6) Permintaan terhadap Fluktuasi bunga bank dan valas dan lain sebagainya.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat melalui capaian Indikator Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN/PMA) Tahun 2020 dimana dari target RKPD 2020 sebesar Rp.16.864.100.000.000,-hingga akhir tahun 2020 telah mencapai sebesar Rp. 30.878.728.330.000,- dengan persentase sebesar **183,10** persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian PMDN di Sulawesi Tengah telah melampaui target RKPD 2020.

Indikator selanjutnya yaitu jumlah perusahaan baik untuk PMDN/PMA pada tahun 2020 dari target 45 perusahaan hingga akhir tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 1.279 dengan persentase capaian sebesar 2842,22 persen,.

Tabel. 2.21
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019
Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kineja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian (%)	KET
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	16.864.100.000.000	30.878.728.330.000	183,10	
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	45	1279	2.842,22	
3	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA)	1.020	11.096	1.087,84	
4.	Lama proses perizinan	1-20 Hari (Izin Usaha), 1-5 Hari (Izin Non Usaha)	1-20 Hari (Izin Usaha), 1-5 Hari (Izin Non Usaha)	100,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	62,51%-81,25% (Baik)	97% (Sangat Baik)	119,75	

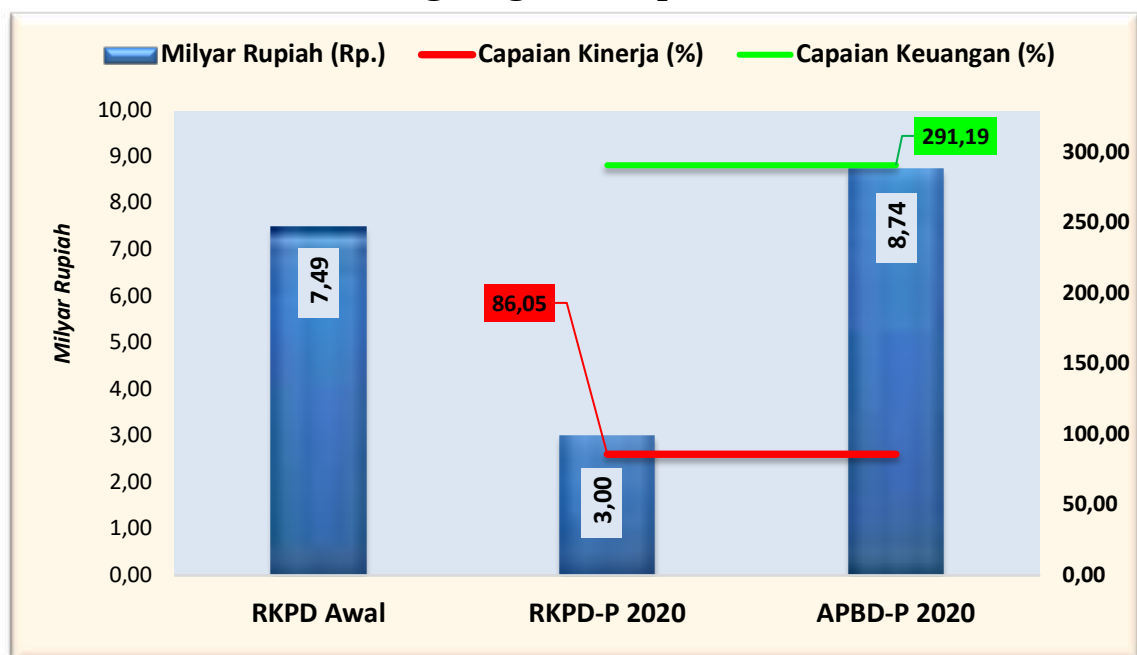
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali).

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2020, dapat diketahui bahwa

pada RKPD awal Tahun 2020 penetapan pagu anggaran berjumlah sebesar Rp. 7.493.219.499, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 3.002.544.136 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 8.743.219.499 yang berarti terjadi deviasi sebesar 191,19 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.740.675.363 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum adanya kekonsistensi penganggaran yang ditunjukkan dengan besarnya tingkat deviasi dalam perencanaan dan pengalokasi anggaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Komunikasi dan Informasi dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **291,19** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 jauh di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **86,06** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

12. Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.22
Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Persentase Capaian (%)	Kriteria Keberhasilan
- Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	100,00 %	100,00 %	100,00	Sangat Tinggi
- Adanya Pembinaan Olahraga Pelajar dan Masyarakat	100,00 %	100,00 %	100,00	Sangat Tinggi
- Peningkatan Pembinaan tenaga keolahragaan di Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00	Sangat Tinggi
- Terlaksananya Pembinaan Manajemen Organisasi Kepramukaan	100,00 %	100,00 %	100,00	Sangat Tinggi
- Peningkatan Pembinaan tenaga keolahragaan di Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2019 (data diolah kembali).

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.55.595.079.984, naik menjadi sebesar Rp. 77.897.776.277 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 53.357.121.432 yang berarti terjadi deviasi sebesar 31,50 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 24.540.654.845 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum adanya konsistensi penganggaran yang ditunjukkan dengan besarnya tingkat deviasi dalam perencanaan dan pengalokasi anggaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Pemuda dan Olahraga dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **68,50** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 jauh di bawah target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'.

Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **‘SangatTinggi’**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

14. Urusan Statistik

Masih belum optimalnya Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi dapat mempengaruhi informasi perkembangan data capaian provinsi Sulawesi Tengah, capaian kinerja pembangunan urusan statistik yaitu termanfaatkannya dokumen dan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta akses informasi publik dengan target dalam RKPD tahun 2020 sebesar 5 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 5 Dokumen dengan persentase capaian **100,00 persen**, dengan kriteria penilaian **”Sangat Tinggi”**. Sedangkan untuk alokasi dana APBD-P Tahun yaitu sebesar Rp. 20.908.500.

15. Urusan Persandian

Masih Kurangnya sarana dan prasarana persandian yang memadai, kurangnya Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang persandian serta belum tertariknya dan masih minimnya

minat masyarakat untuk tertarik menggeluti bidang Persandian menjadi tantangan di era saat ini. Capaian kinerja urusan persandian pada tahun 2020 yakni indikator optimalisasi penyelenggaraan pengawasan, evaluasi, pengembangan dan pengamanan persandian dari target RKPD Tahun 2020 adalah sebesar **80,00** persen telah mencapai target sebesar **80,00** persen, dengan capaian realisasi sebesar **100,00 persen**, dengan kriteria penilaian **"Sangat Tinggi"**. Sedangkan untuk alokasi dana APBD-P Tahun yaitu sebesar Rp. 92.446800.

16. Urusan Kebudayaan

Alokasi anggaran yang dilaksanakan untuk pembangunan Bidang Urusan Kebudayaan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.716.013.879, dari target RKPD-P sebesar Rp. 4.517.875.744 sehingga realisasi capaian keuangan sebesar 82,25 persen dengan kriteria penilaian **"Sangat Tinggi"**. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja program (outcomes) dapat dilihat dari capaian indikator Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri daerah yang memiliki ketahanan budaya dari target 100 persen dapat teralisasi sebesar 100 persen dengan kriteria penilaian **"Sangat Tinggi"**.

17. Perpustakaan

Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator Persentase/Jumlah pengunjung perpustakaan yang telah terealisasi hingga mencapai 90,00 persen dari yang ditargetkan sebanyak 90,00 persen, dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen.

Indikator selanjutnya yaitu pencapaian kinerja indikator persentase/jumlah koleksi buku yang telah terealisasi hingga mencapai 90,00 persen dari yang ditargetkan sebanyak 90,00 persen, dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen, dan indikator Persentase/Jumlah perpustakaan yang dibina telah terealisasi hingga

mencapai 90,00 persen dari yang ditargetkan sebanyak 90,00 persen, dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Tabel. 2.73
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RKPD 2019	Capaian RKPD 2019	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
Persentase/Jumlah pengunjung perpustakaan	%	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi
Persentase/Jumlah koleksi buku yang tersedia	%	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi
Persentase/Jumlah perpustakaan yang dibina	%	85,00	85,00	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Perpustakaan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.5.591.776.557, turun menjadi sebesar Rp. 3.510.336.296 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.858.336.290 yang berarti terjadi deviasi sebesar 9,91 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 347.999.994 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Perpustakaan dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **109,91** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 jauh di bawah target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'SangatTinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Perpustakaan Tahun 2020

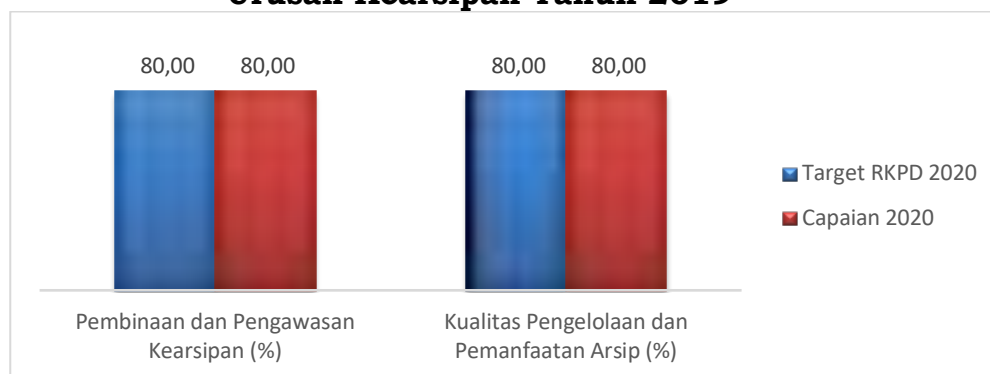


Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

18. Kearsipan

Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dapat dilihat dari capaian indikator Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kearsipan secara umum telah terlaksana berdasarkan target RKPD tahun 2020 dimana realisasi capaian kinerja sebesar 80,00 persen dari target kinerja 80,00 persen. Untuk indikator Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan arsip telah realisasi sebesar 80,00 persen dari target sebanyak 80,00 persen dengan persentase capaian sebesar **100,00** persen, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar.2.58
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Kearsipan Tahun 2019



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Kearsipan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp. 1.703.494.319, turun menjadi sebesar Rp. 1.382.888.587 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.427.888.594 yang berarti terjadi deviasi sebesar 3,25 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 45.000.007 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Kearsipan dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **103,25** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

C. Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

1. Bidang Urusan Perencanaan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya alam dan potensi lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya agar tujuan dan arah pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien, demi meningkatnya kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja dalam urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator antara lain yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Sosial budaya, Bidang Prasarana Wilayah dan SDA, Tata Ruang, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi serta Kerja Sama Daerah, sesuai yang termuat dalam Dokumen RKPD 2019 dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan secara lengkap dapat dilihat tabel gambar berikut :

Tabel. 2.62
Capaian IKU Urusan Perencanaan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

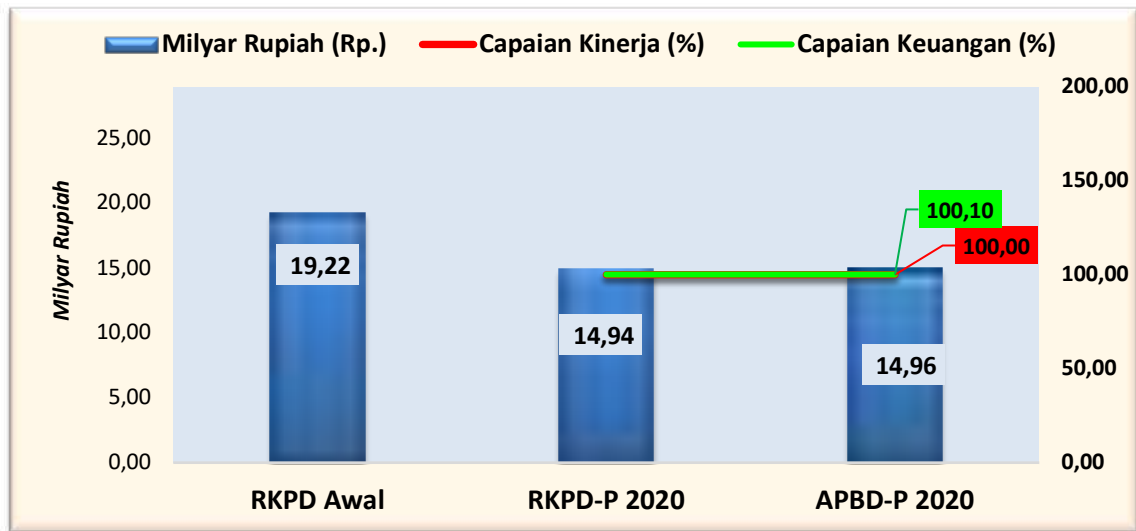
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RKPD 2020	Capaian RKPD 2020	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Kinerja
• Presentase capaian realisasi sasaran rencana tahunan dengan perencanaan jangka menengah sektoral dan kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
• Presentase capaian realisasi sasaran rencana tahunan dengan perencanaan jangka menengah sektoral dan kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
• Presentase capaian realisasi sasaran rencana tahunan dengan perencanaan jangka menengah sektoral dan kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
• Presentase capaian realisasi sasaran rencana tahunan dengan perencanaan jangka menengah sektoral dan kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
• Presentase konsistensi program kegiatan tahunan dengan ROJMD	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Perencanaan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.19.216.675.727, turun menjadi sebesar Rp. 14.941.972.951 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 14.956.972.951 dengan tingkat deviasi hanya sebesar 0,10 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 15.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Perencanaan dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **100,10** persen dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Perencanaan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

2. Bidang Urusan Keuangan

a. Badan Pendapatan Daerah

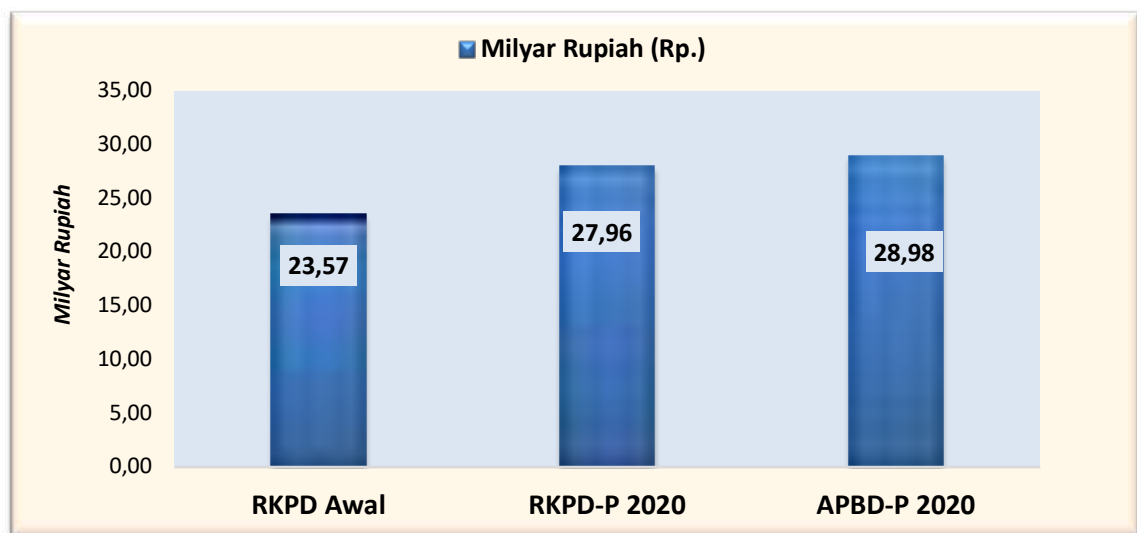
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya alam dan potensi lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya agar tujuan dan arah pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien, demi meningkatnya kesejahteraan sosial.

Kinerja Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah tidak dapat diukur dikarenakan Indikator yang ditargetkan Dalam RKPD 2020 yaitu Indikator Meningkatnya pengelolaan penerimaan pajak daerah, Meningkatnya retribusi daerah, DBH pusat dan PLL, Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan aset, keuangan dan personil, terselenggaranya pengembangan pendapatan, sistem informasi dan pengolahan data **tidak memuat target volume yang akan dicapai pada tahun 2020.**

Selanjutnya dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp. 23.568.226.635, naik menjadi sebesar Rp. 27.956.097.335, pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 28.976.097.335 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.020.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 3,65 persen

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian kinerja dalam urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dapat dilihat melalui 7 (tujuh) capaian indikator yaitu; 1) Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2) Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum, 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran daerah, 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung, 5) Meningkatnya kualitas penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah, 6) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dan 7) Laporan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.62
Capaian Idinaktor Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2020

No	Indikator Kineja Program (Outcome)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian (%)	Ket
1	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	100%	90,93%	100,00	
2	Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum (%)	100%	86,15%	86,15	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran daerah	100%	98,84%	98,84	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung	100%	99,84%	99,84	
5	Meningkatnya kualitas penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah (%)	100%	93,25%	93,25	
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	100%	98,22%	98,22	
7	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100,00%	100,00	

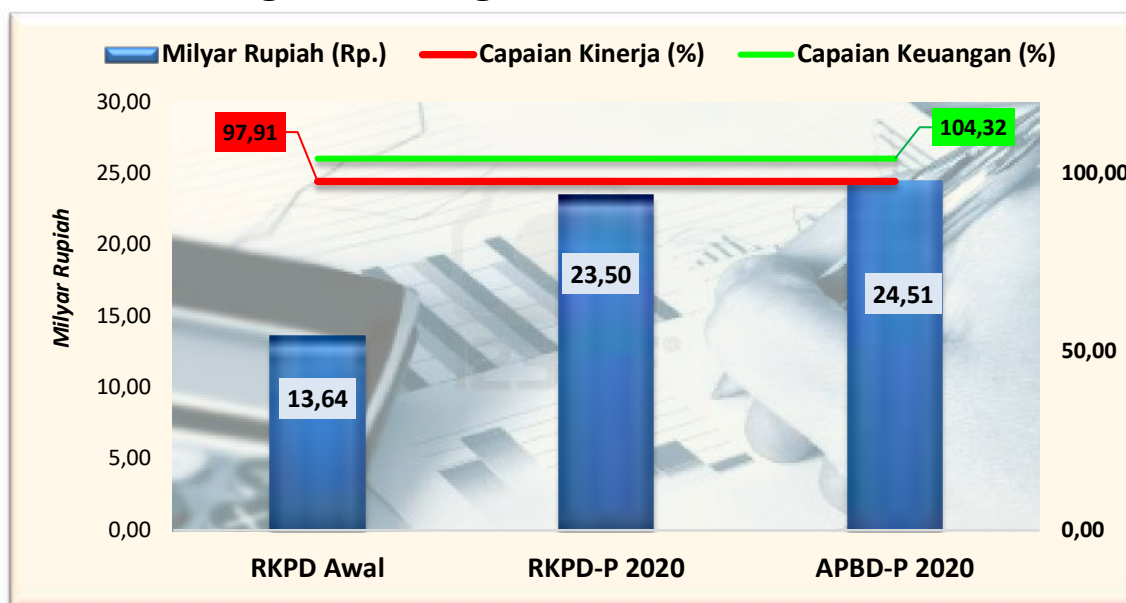
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.13.644.467.242, naik menjadi sebesar Rp. 23.496.668.343 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 24.511.668.343 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.015.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 4,32 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **104,32** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020

secara umum mencapai **97,91 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **‘SangatTinggi’**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

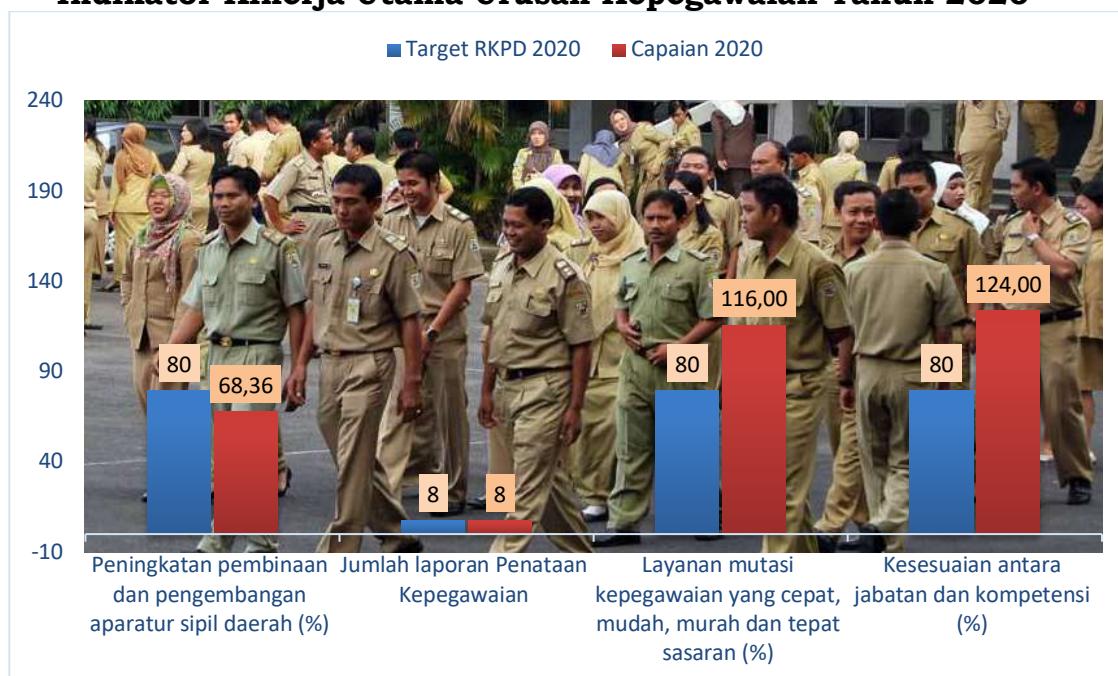
3. Bidang Urusan Kepegawaian

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya alam dan potensi lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya agar tujuan dan arah pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien, demi meningkatnya kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja dalam urusan Kepegawaian dapat dilihat melalui 4 (empat) capaian indikator utama yaitu; 1) Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur sipil daerah dari target 80 persen dengan realisasi sebesar 68,73 persen, 2) Jumlah laporan Penataan Kepegawaian dari target 8 laporan hingga akhir tahun 2020 dapat terealisasi sebanyak 8 laporan, 3) layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran dari target 80 persen realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 116,00 persen yang berarti telah

melampaui target, dan 4) kesesuaian antara jabatan dan kompetensi dari target 80 persen realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 124,00 persen yang berarti telah melampaui target secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.46
Perbandingan Target RKPD terhadap Realisasi
Indikator Kinerja Utama Urusan Kepegawaian Tahun 2020



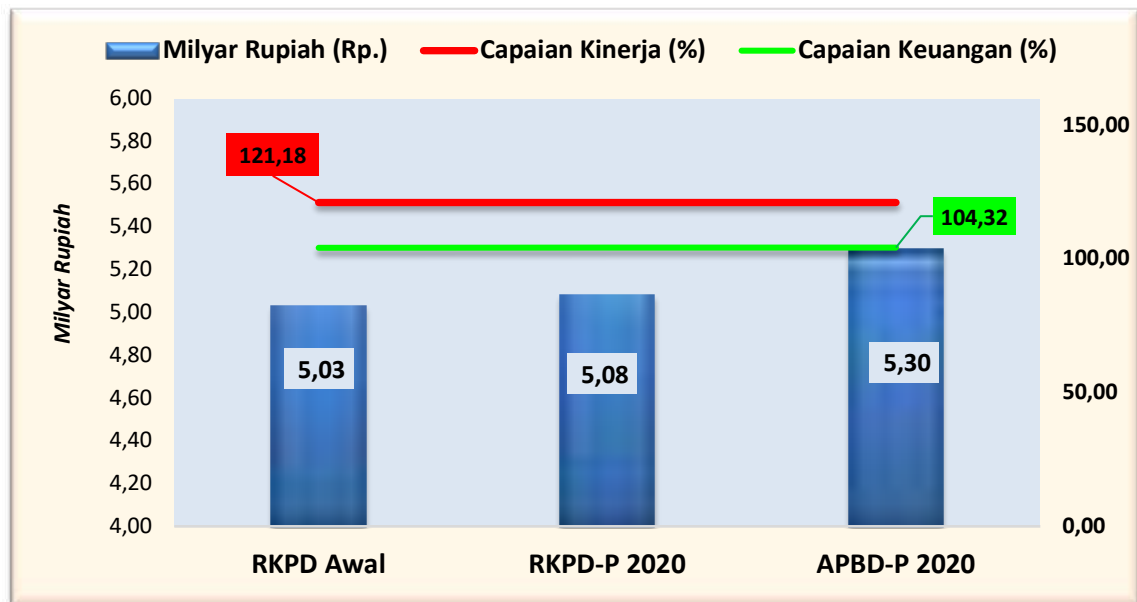
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Kepegawaian Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.5.030.974.529, naik menjadi sebesar Rp. 5.080.974.529 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 5.295.974.529 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 215.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 4,32 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Kepegawaian Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **104,32** persen

yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **121,18 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Kepegawaian Tahun 2020



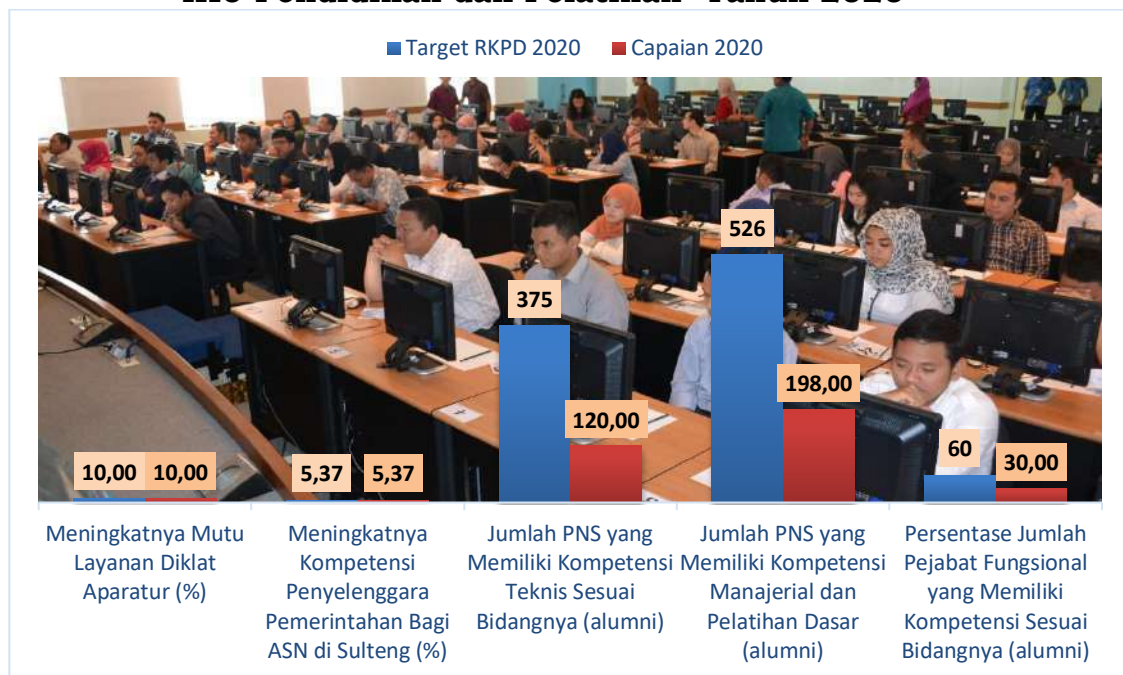
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

4. Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja dalam urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat melalui 5 (lima) capaian indikator utama yaitu; 1) Meningkatnya Mutu Layanan Diklat Aparatur dari target 10,00 persen dengan realisasi sebesar 10,00 persen, 2) Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara Pemerintahan Bagi ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dari target 5,37 persen hingga akhir tahun 2020 dapat terealisasi sebanyak 5,37 persen, 3) Jumlah PNS yang Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Bidanganya dari target 375 Alumni, realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 120 alumni yang berarti belum mencapai target, 4) Jumlah PNS yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Pelatihan Dasar dari target 526 alumni dengan realisasi hingga akhir tahun 2020

sebesar 190 alumni dan 5) Persentase Jumlah Pejabat Fungsional yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya dari target 60 alumni dengan realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 60 alumni dengan 0 alumni yang berarti belum mencapai target, yang secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.46
Perbandingan Target RKPD terhadap Realisasi
IKU Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020



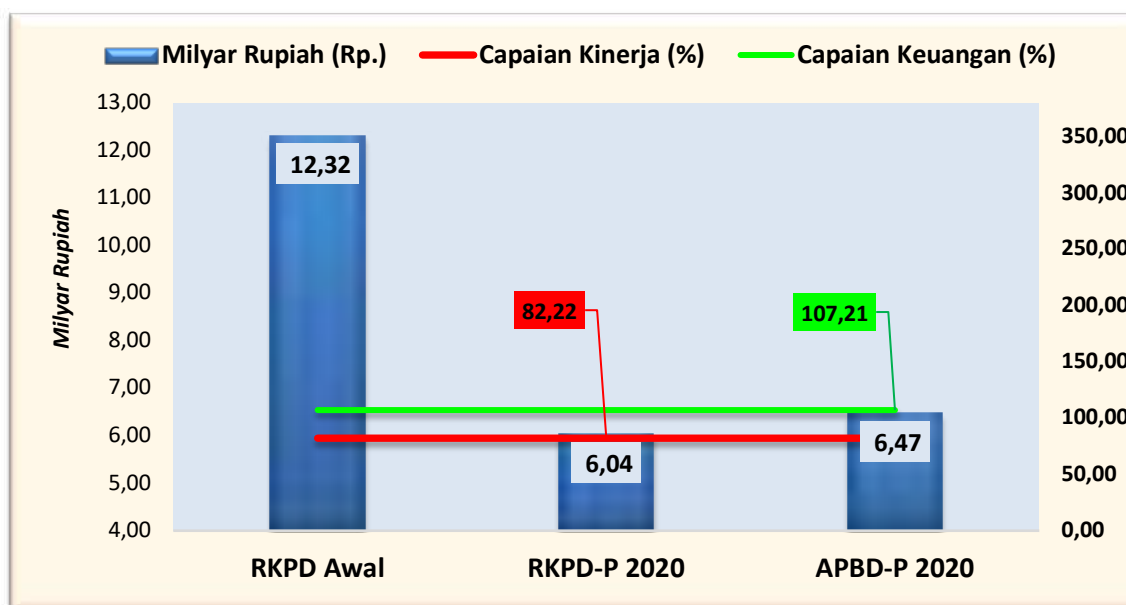
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.12.315.058.294, naik menjadi sebesar Rp. 6.035.484.336 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.470.484.336 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 435.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 7,21 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dapat

diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **107,21** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **82,22 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

5. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya alam dan potensi lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya agar tujuan dan arah pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien, demi meningkatnya kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja dalam urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat melalui 4 (empat) capaian indikator utama yaitu; 1) Jumlah Hasil Penelitian Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan

oleh OPD Provinsi dan Kabupaten Kota dari target 3 hasil Penelitian dengan realisasi 3 hasil penelitian, 2) Jumlah Hasil Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan oleh OPD Provinsi dan Kabupaten Kota dari target 3 hasil penelitian hingga akhir tahun 2020 dapat terealisasi sebanyak 3 hasil penelitian, 3) Jumlah OPD Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah dari target 3 hasil penelitian realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 3 hasil penelitian, dan 4) Jumlah Hasil Penelitian Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh OPD Provinsi dan Kabupaten Kota dari target 3 hasil penelitian dengan realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 3 hasil penelitian yang berarti bahwa seluruh target RKPD tahun 2020 telah mencapai target secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.46
Perbandingan Target RKPD terhadap Realisasi
Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020



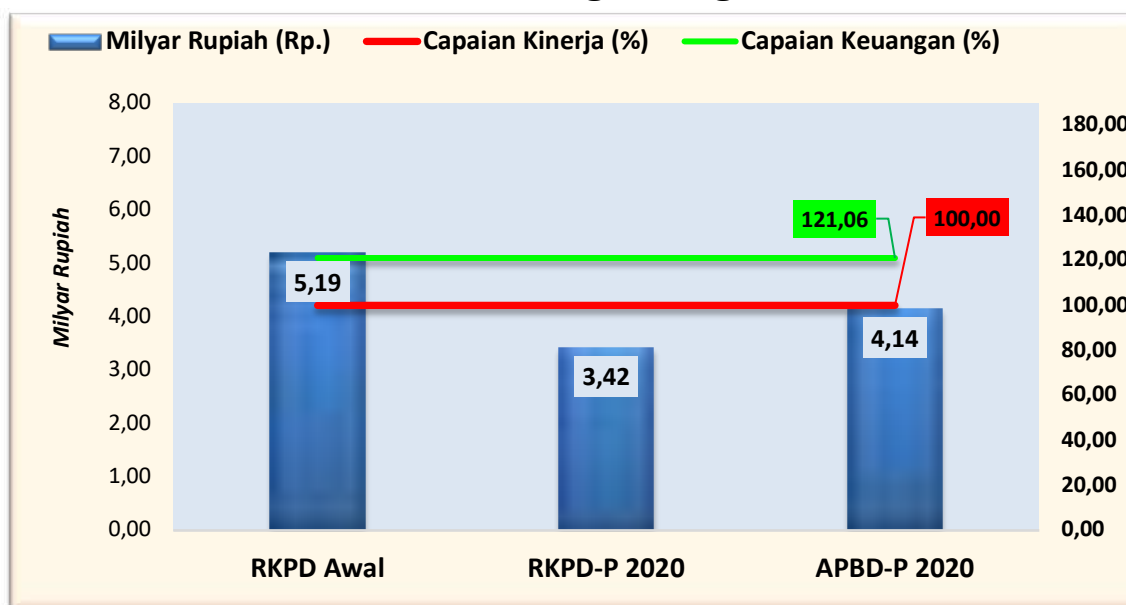
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.5.193.748.697, naik menjadi sebesar Rp. 3.418.597.182

pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 4.138.597.182 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 720.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 21,06 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **121,06** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020



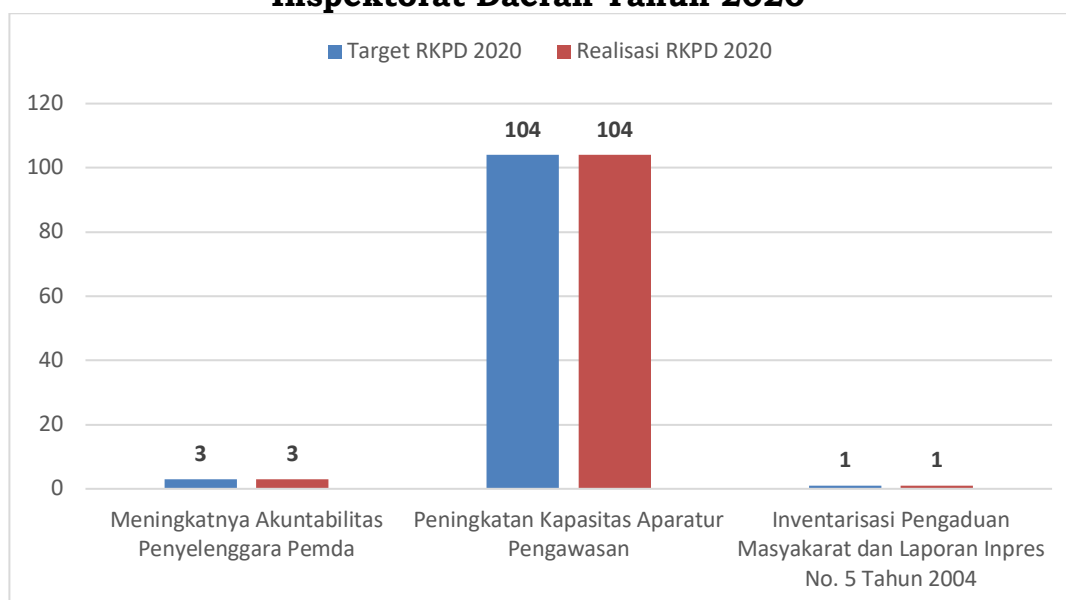
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

6. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah

a. Inspektorat Daerah

Capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2020 secara umum telah mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator utama pada inspektorat dengan capaian 100 persen yaitu; 1) indikator meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemda dari target 3 hasil akuntabilitas dengan realisasi 3 hasil akuntabilitas, 2) indicator Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan dari target 104 orang hingga akhir tahun 2020 dapat terealisasi sebanyak 104 orang, 3) indikator inventarisasi pengaduan masyarakat dan Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004 dari target 1 dokumen realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 1 dokumen, secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar 2...
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

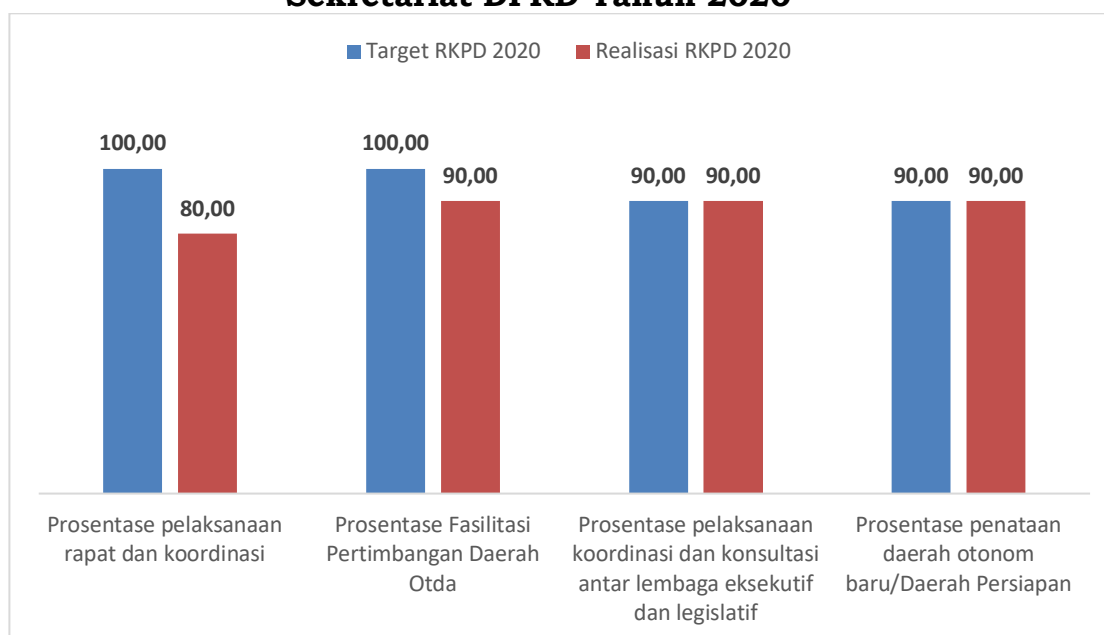
Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **125,88** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada diatas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum

mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **‘SangatTinggi’**,

b. Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020 secara umum belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) target indikator kinerja utama pada inspektorat terdapat capaian kinerja yang masih di bawah 100 persen yaitu; 1) indikator Prosentase pelaksanaan rapat dan koordinasi dari target 100 persen dengan realisasi mencapai 80 persen, 2) indikator prosentase fasilitasi pertimbangan daerah otda dari target 100 persen hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 90 persen, 3) indikator Prosentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar lembaga eksekutif dan legislatif dari target 90 persen realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 90 persen, dan 4) indikator Prosentase penataan daerah otonom baru/Daerah Persiapan dari target 90 persen realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 90 persen secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2...
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Tahun 2020



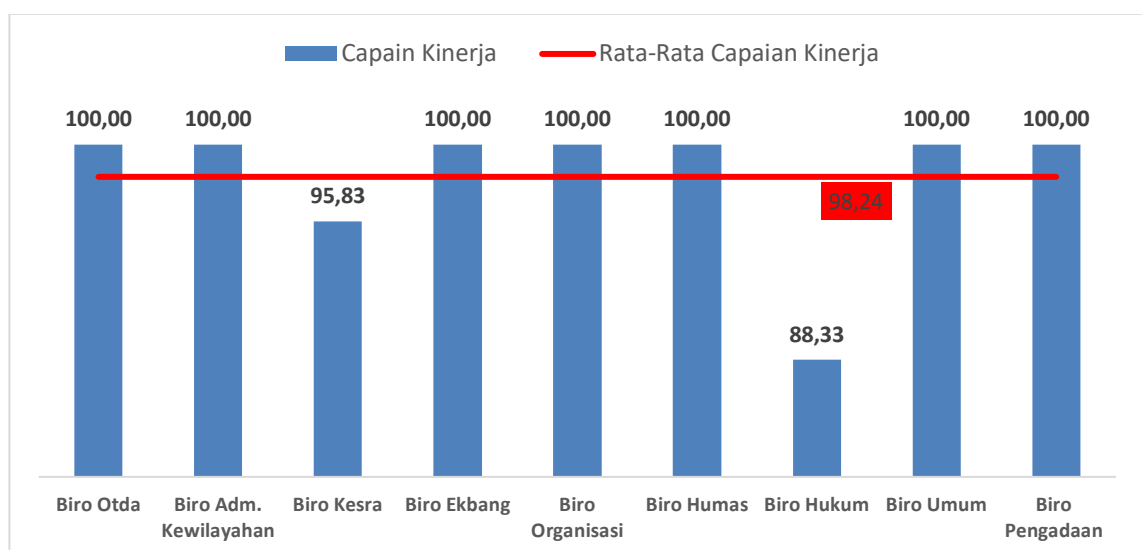
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **134,08** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada diatas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **94,29** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

c. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah pada tahun 2020 didukung dengan pengalokasi anggaran sebesar Rp. 67.981.545.464, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.299.956.298 atau sebesar 95,48 persen. Sementara untuk Capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi pada tahun 2020 secara umum belum telah mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian 9 (sembilan) OPD yang dengan capaian rata-rata sebesar 98,24 persen sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2...
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**



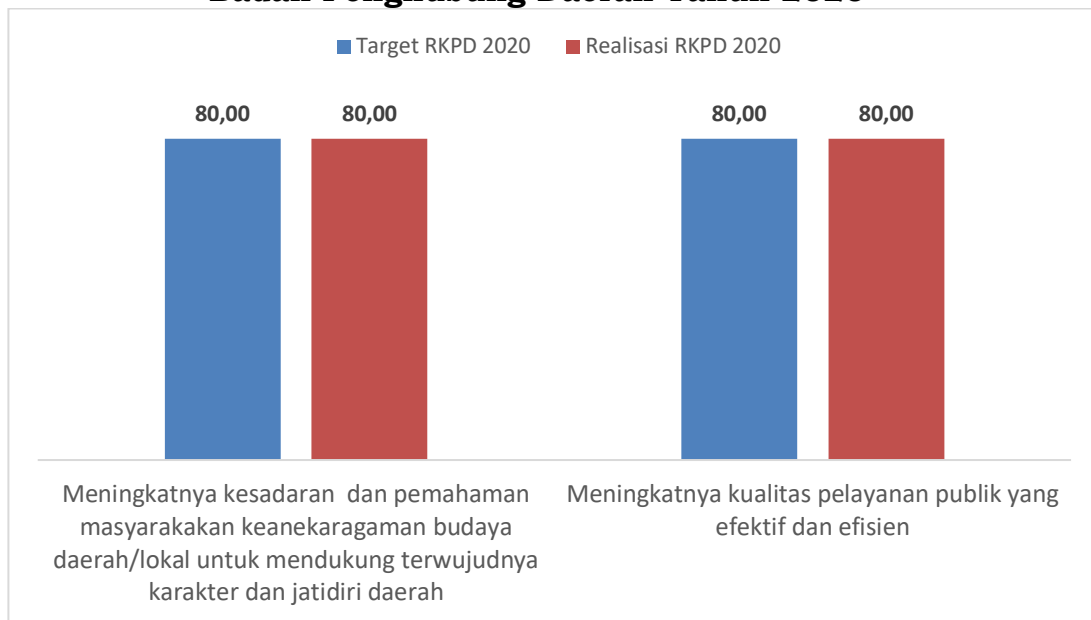
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Prov. Sulteng Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **144,80** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **98,24 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

d. Badan Penghubung

Capaian kinerja Badan Penghubung pada tahun 2020 secara umum telah mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) target indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100 persen yaitu; 1) indikator Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakatan keanekaragaman budaya daerah/lokal untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri daerah dari target 80,00 persen hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 80,00 persen, 2) indikator Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien dari target 80,00 persen realisasi hingga akhir tahun 2020 sebesar 80,00 persen, secara terinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2...
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penghubung Daerah Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

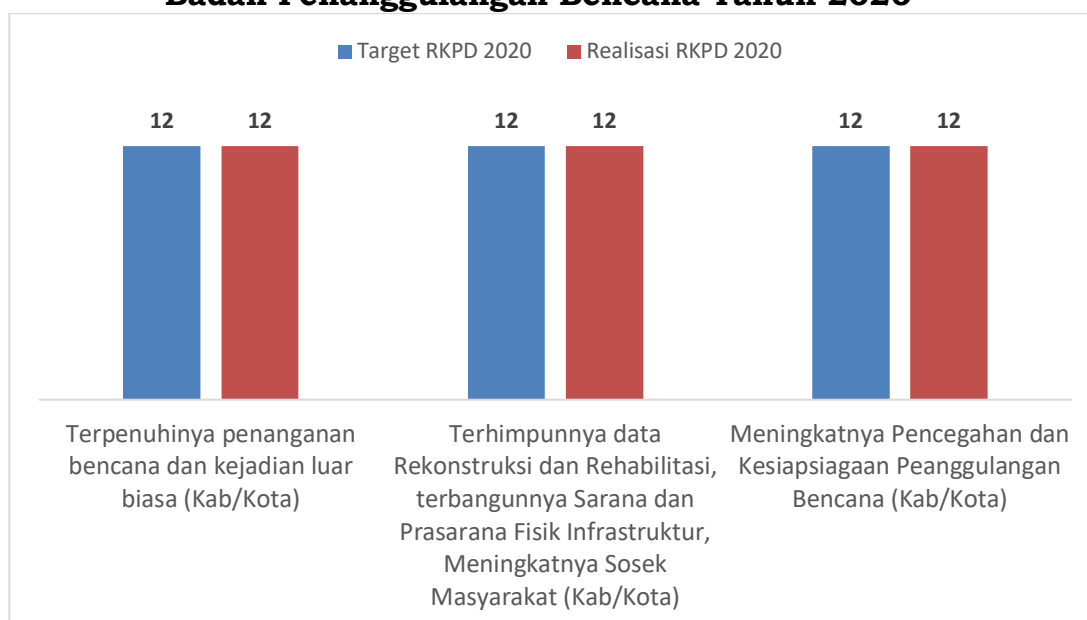
Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **127,74** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada diatas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'SangatTinggi'**,

e. Badan Penanggulangan Bencana

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana pada tahun 2020 secara umum telah mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) target indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100 persen yaitu; 1) indikator terpenuhinya penanganan bencana dan kejadian luar biasa daerah dari target 12 Kab/Kota hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebanyak 12 Kab/Kota, 2) indikator terhimpunnya data rekonstruksi dan rehabilitasi,

terbangunnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur, meningkatnya social ekonomi masyarakat dari target 8012 Kab/Kota realisasi hingga akhir tahun 2020 sebanyak 12 Kab/Kota, dan 3) indikator program pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan bencana dari target 12 Kab/Kota hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebanyak 12 Kab/Kota, secara terinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2...
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

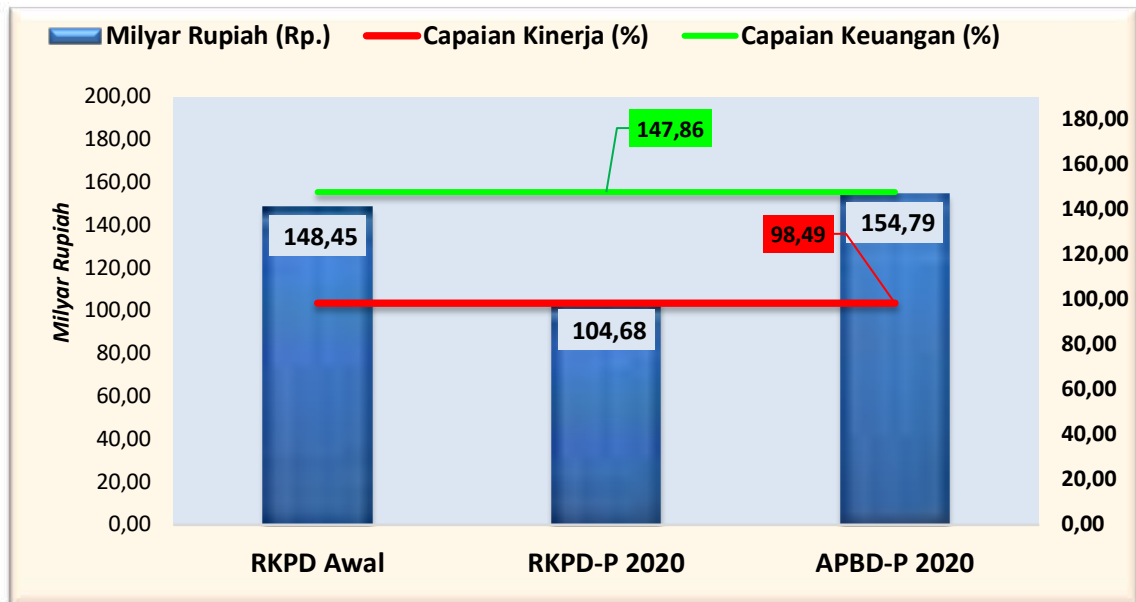
Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPDP Tahun 2020 pada Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **267,38** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada jauh diatas target RKPDP-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'SangatTinggi'**,

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Daerah, dan Perangkat Daerah Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.148.453.882.128, naik menjadi sebesar Rp.104.683.048.133 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 154.788.366.095 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.105.317.962 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 47,86 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, dan Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **147,86** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **98,53** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

D. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau. Untuk sektor perikanan, pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di bawah 8 persen dan persediaan air yang cukup. Adapun data potensi perairan darat yang ada, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi tambak seluas 42.095,15 Ha dengan kondisi pemanfaatan sebesar 11,3 persen dan potensi budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan pemanfaatan sebesar 5,8 persen yang terdiri dari danau seluas 48.458 Ha, rawa seluas 12.275 Ha dan sungai 10.195 Ha.

Untuk sektor perairan laut, Sulawesi Tengah terdapat berbagai jenis ikan dan biota laut. Potensi ini terbagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu: (1) Selat Makassar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), dan (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.

Kinerja urusan perikanan dan kelautan pada Tahun 2020 dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator, diantaranya yaitu indikator peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan dari target RKPD 2020 sebanyak 30 orang, telah terealisasi mencapai 37 orang, yang menunjukkan capaian telah melampaui target RKPD 2020. Capaian indikator lainnya yaitu produksi perikanan budidaya dari target **1.110.780** ton, telah terealisasi sebesar **588.746,5** ton dengan realisasi sebesar **53,00** persen yang menunjukkan belum memenuhi target RKPD 2020, dan untuk indikator produksi perikanan tangkap dari target **239.700,00** ton, yang terealisasi sebesar **201.102** ton atau **83,90** persen yang juga menunjukkan belum mencapai target yang direncanakan dalam RKPD 2020 seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

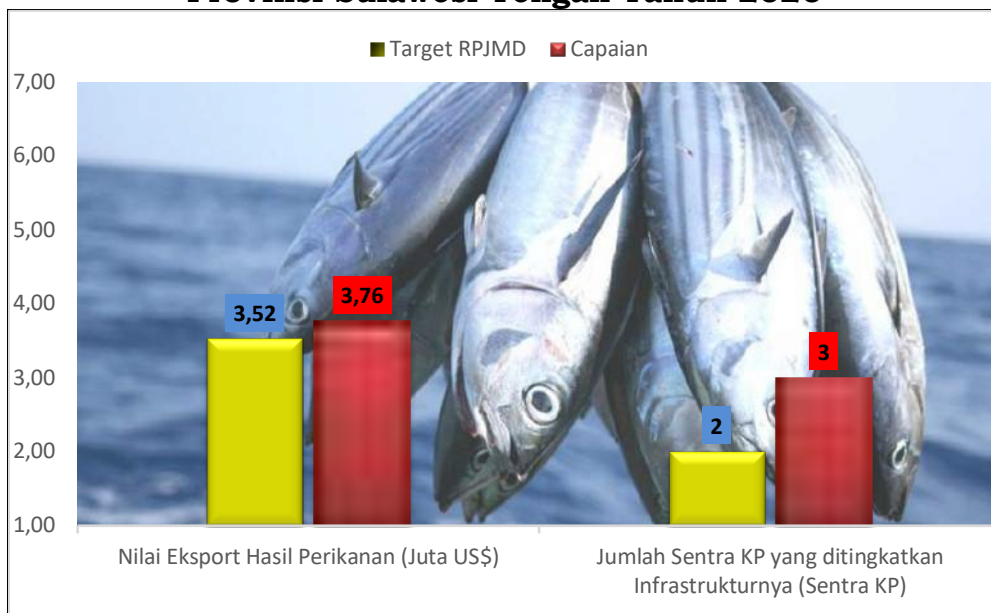
Gambar 2.65
Capaian Indikator Perikanan Budidaya dan
Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020



Sumber Bappeda Prov. Sulteng 2021 (data diolah kembali)

Selanjutnya untuk capaian indikator Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$ Juta) dalam kurun waktu 1 tahun terakhir menggambarkan adanya peningkatan dimana dari target RKPDP 2020 sebesar 3,52 Juta US\$ dengan realisasi mencapai 3,76 Juta US\$. Kemudian indikator Jumlah sentra kelautan perikanan yang ditingkatkan Infrastrukturnya dari target 2 sentra KP dapat terealisasi sebanyak 3 sentra KP, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.66
Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$ Juta)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

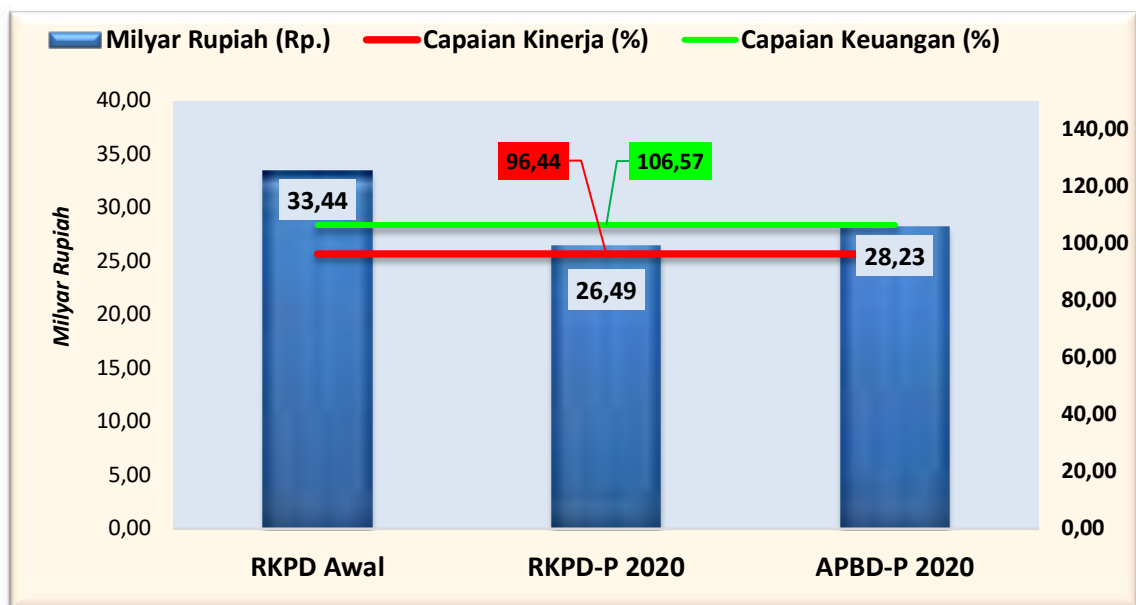


Sumber Bappeda Prov. Sulteng 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Perikanan dan Kelautana Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.33.439.920.480, naik menjadi sebesar Rp. 26.494.379.306 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 28.234.879.306 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.740.500.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 6,57 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Perikanan dan Kelautan Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **106,57** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **96,44** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Kelautan dan perikanan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

2. Pariwisata

Pembangunan dalam bidang kepariwisataan idealnya dapat berlangsung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia. Untuk itu Pemerintah daerah dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena sebagai salah satu industri terbesar di dunia, pariwisata memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi baik negatif maupun positif terhadap lingkungan, keadaan sosial dan ekonomi dunia, sehingga pariwisata dapat secara efektif memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah.

Capaian kinerja urusan Pariwisata Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui program pengembangan destinasi pariwisata menggambarkan capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan dengan realisasi sebesar 100 persen, dimana capaian indikator lama tinggal wisatawan (hari/orang) untuk wisatawan mancanegara 7-8 (hari/orang) dan wisatawan nusantara 4-6 (hari/orang).

Untuk capaian kinerja indikator pengeluaran wisatawan harian mancanegara dari target 270 US\$/hari telah terealisasi mencapai 270 US\$/hari atau sesuai target RKPD 2020, sedangkan untuk wisatawan nusantara dengan target sebesar Rp. 1.600.000/hari telah terealisasi mencapai Rp. 1.600.00/hari dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen yang juga menunjukkan telah mencapai target RKPD 2020.

Selanjutnya untuk program pengembangan pemasaran pariwisata indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari target 20.000 orang, telah mencapai target dengan realisasi sebanyak 20.000 orang dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara dari target 3.800.000

orang capaian kinerja telah mencapai target yakni sebanyak 3.800.000 orang dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen.

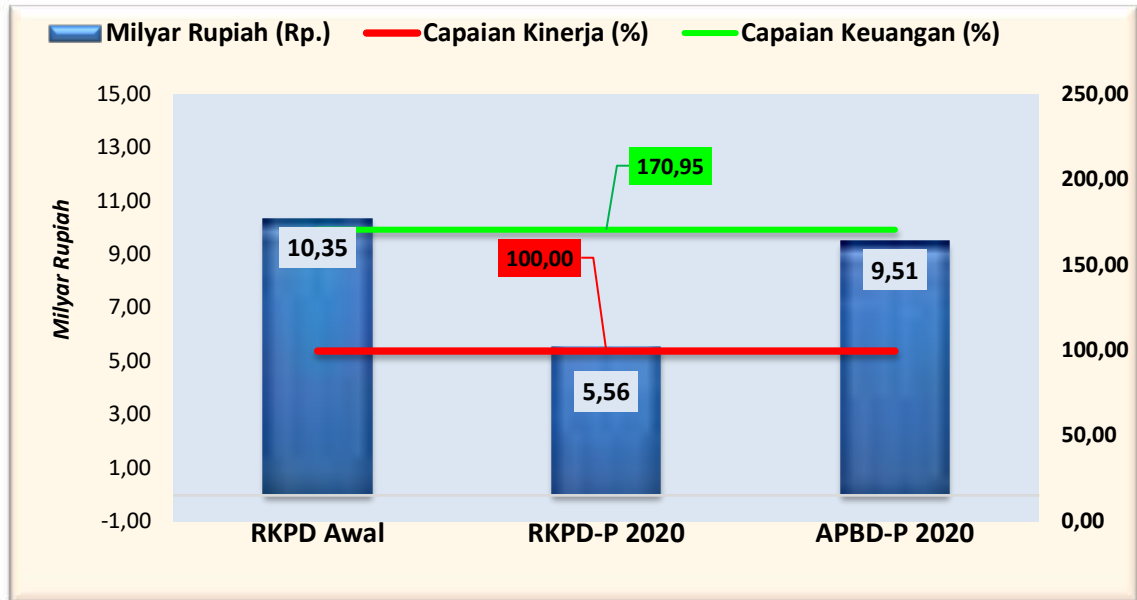
Capaian kinerja lainnya yaitu indikator Jumlah investasi dan mitra usaha yang tersertifikasi dari target 166 mitra usaha, telah mencapai target dengan realisasi sebanyak 166 mitra usaha dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen, dan indikator Jumlah SDM Kepariwisata yang berkualitas dari target 460 orang dengan capaian kinerja telah mencapai target yakni sebanyak 460 orang dengan persentase capaian sebesar 100,00 persen.

Untuk capaian indikator kinerja pada Urusan Bidang Pariwisata Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Pariwisata Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.10.349.496.780, naik menjadi sebesar Rp. 5.561.035.233 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9.506.433.234 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.945.398.001 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 70,95 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Pariwisata Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **107,95** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **100,00 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pariwisata Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

3. Urusan Pertanian

Pembangunan dalam bidang pertanian secara berkelanjutan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam dan orientasi pada perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Di sisi lain pembangunan pertanian diharapkan tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.

a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian kinerja RKPDP tahun 2020 dalam bidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah indikator jumlah produksi/hasil per hektar (*yield rate*) beberapa komoditas, yang dikaitkan dengan target RKPDP 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.60
Perbandingan Target RKPD 2019 terhadap Realisasi
Capaian jumlah Produksi/hasil per hektar (*yield rate*)
Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng 2020.

Adapun beberapa capaian indikator yang belum mencapai target RKPD 2020 diantaranya yaitu indikator jumlah produksi komoditas tanaman kedelai dari target 16,932 ton baru terealisasi sebesar 7,224 ton dengan persentase capaian hanya sebesar **42,66 persen** serta jumlah produksi komoditas tanaman kacang hijau dari target 844 ton baru terealisasi sebesar 378 ton dengan persentase capaian hanya sebesar **44,79 persen**, demikian juga pada komoditas bawang merah dan kentang yang belum memenuhi target, Untuk melihat capaian IKU Urusan Pertanian lainnya pada tahun 2020 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.74
Capaian Kinerja RKPD 2020

Organisasi Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RKPD Tahun 2020	Capaian RKPD Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Jumlah produksi komoditas (ku/ha)					
- Padi	(ku/ha)	1.167.400	1.152.315	98,71	Sangat Tinggi
- Jagung	(ku/ha)	389.445	552.246	141,80	Sangat Tinggi
- Kedelai	(ku/ha)	16.932	7.224	42,66	Sangat Rendah
- Kacang Tanah	(ku/ha)	2.878	2.157	74,95	Sedang
- Kacang Hijau	(ku/ha)	844	378	44,79	Sangat Rendah

Organisasi Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RKPD Tahun 2020	Capaian RKPD Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
- Ubi Kayu	(ku/ha)	55.864	46.336	82,94	Tinggi
- Ubi Jalar	(ku/ha)	15.931	19.779	124,15	Sangat Tinggi
Jumlah produktivitas komoditas utama (ku/ha)					
- Durian	(ku/ha)	13.901	19.413	139,65	Sangat Tinggi
- Jeruk	(ku/ha)	1437	2429	169,03	Sangat Tinggi
- Pisang	(ku/ha)	14.917	13.541	90,78	Tinggi
- Bawang Merah	(ku/ha)	8744	4614	52,77	Rendah
- Kentang	(ku/ha)	2021	1115	55,17	Rendah
- Cabe	(ku/ha)	29.867	24.077	80,61	Tinggi
Meningkatnya Layanan JITUT dan JIDES (Ha)	Ha	4741	4741	100,00	Sangat Tinggi
Membangun infrastruktur jalan ke kantong-kantong produksi di pedesaan	(Km)	4794	4488	93,62	Sangat Tinggi
Meningkatnya perluasan areal pertanaman hortikultura	(ha)	1300	1300	100,00	Sangat Tinggi
Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian	(%)	86,00	86,00	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah Petani Miskin yang terbina	Org	394	394	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah penggunaan benih/bibit unggul bermutu/bersertifikasi	Ton	3150	3150	100,00	Sangat Tinggi
Jumlah pengembangan perbenihan Tanaman Pangan	Ton	1550	1550	100,00	Sangat Tinggi
Menurunnya luas areal tanaman pangan yg terserang OPT dan DPI	(%)	8	8	100,00	Sangat Tinggi
Proporsi luas serangan OPT Utama	(%)	40	40	100,00	Sangat Tinggi

Sumber Bappeda Prov. Sulteng 2021

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan, diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik/ lingkungan yaitu ketinggian dibawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Berdasarkan data BPS 2015, luas area potensial perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 681.685ha, dengan rincian yaitu luas potensial komoditi tanaman kelapa seluas 213.881ha, luas potensial tanaman kakao 291.445ha, luas potensial tanaman cengkeh 56.554ha, luas potensial tanaman karet 6.201ha, luas potensial tanaman jambu mente 15.030ha, luas potensial tanaman pala 8.444ha dan luas potensial

tanaman kelapa sawit rakyat seluas 69.686ha, luas potensial tanaman kopi 8.373 ha, luas potensial tanaman kapuk 923 ha, luas potensial tanaman lada 1.228 ha, luas potensial tanaman sagu 5.365 ha, dan luas potensial tanaman kemiri 4.219 ha serta luas potensial tanaman tanaman nilam 336 ha.

Pada bidang peternakan secara umum daerah Sulawesi Tengah memiliki potensi areal padang rumput dan semak belukar yang sangat cocok sebagai areal peternakan, sehingga hal ini sangat mendukung bagi pengembangan potensi sektor peternakan yang juga merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan Potensial areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Jenis ternak yang diusahakan dan dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat di klasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

Selanjutnya untuk gambaran capaian kinerja RKPD 2020 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.75
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bidang Perkebunan dan Peternakan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Capaian RKPD 2020	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja (Permendagri 86/2017)
1	Jumlah Produktivitas 8 Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan					
	- Kelapa dalam	Kg/Ha	1.218	1.201	98,60	Sangat Tinggi
	- Cengkeh	Kg/Ha	371	371	100,00	Sangat Tinggi
	- Kopi	Kg/Ha	481	595	123,70	Sangat Tinggi
	- Kakao	Kg/Ha	690	688	99,71	Sangat Tinggi
	- Pala	Kg/Ha	194	194	100,00	Sangat Tinggi
	- Lada	Kg/Ha	185	185	100,00	Sangat Tinggi

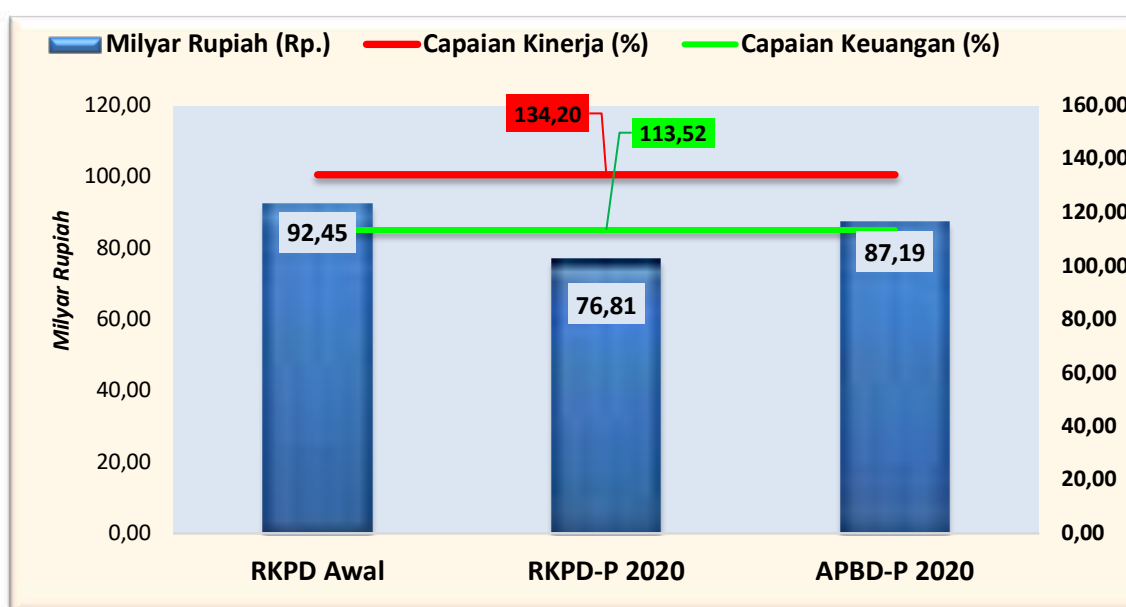
No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Target RKPD	Realisasi RKPD	Capaian RKPD	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	- Kelapa sawit	Kg/Ha	4.208	3.312	78,71	Tinggi
	- Karet	Kg/Ha	1.066	3.104	291,18	Sangat Tinggi
2	Jumlah Prasarana Dan Sarana Pengolahan Serta Pemasaran Hasil Perkebunan	Laporan	1	1	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase Status Kesehatan Hewan	Persen	85	85	100,00	Sangat Tinggi
4	Tersedianya Pangan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal					
5	Persentase Tersedianya Pangan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal	Persen	78	75	96,15	Sangat Tinggi
6	Jumlah Jaringan Pemasaran Produk Usaha Peternakan	Unit	7	2	28,57	Sangat Rendah
7	Jumlah Rekomendasi Teknologi Pengendalian Opt Secara Terpadu	Laporan	1	1	100,00	Sangat Tinggi
8	Jumlah Bibit/Benih Unggul Yang Disertifikasi (Pohon)	Pohon				
	- Kakao	Pohon	765.900	1.705.383	222,66	Sangat Tinggi
	- Kelapa Dalam	Pohon	695.120	184.200	26,50	Sangat Rendah
	- Kopi	Pohon	641.093	619.857	96,69	Sangat Tinggi
	- Cengkeh	Pohon	570.461	134.375	23,56	Sangat Rendah
	- Pala	Pohon	184.449	87.600	47,49	Sangat Rendah
	- Lada	Pohon	156.653	16.000	10,21	Sangat Rendah
	- Kelapa Sawit	Pohon	14.905	23.000	154,31	Sangat Tinggi
	- Karet	Pohon	44.240	-	0,00	Sangat Rendah
9	Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul Dan Bermutu	Pohon				
	- Kelapa Dalam		77.000	91.350	118,64	Sangat Tinggi
	- Kakao		107.520	405.210	376,87	Sangat Tinggi
	- Kopi		550.000	275.150	50,03	Sangat Rendah
	- Karet		858	50	5,83	Sangat Rendah
	- Cengkeh		72.600	82.700	113,91	Sangat Tinggi
	- Pala		66.000	14.500	21,97	Sangat Rendah
	- Lada		82.500	10.800	13,09	Sangat Rendah
10	Jumlah Bibit Ternak Yang Berkualitas	Ekor	8	8	100,00	Sangat Tinggi
11	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesmavet	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi

Sumber Bappeda Prov. Sulteng 2021

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Pertanian Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp. 92.445.334.052, naik menjadi sebesar Rp. 76.805.693.911 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 87.187.884.791 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.382.190.880 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 13,52 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Pertanian Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **113,52** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian **'Sangat Tinggi'**. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **134,20 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori **'Sangat Tinggi'**,

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Pertanian Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

4. Kehutanan

Capaian kinerja RKPD 2020 urusan kehutanan dapat dilihat dari secara umum telah terlaksana sesuai dengan target walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Selanjutnya untuk gambaran pencapaian seluruh indikator kinerja utama pada urusan kehutanan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. ...
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bidang Urusan kehutanan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD Tahun 2020		Realisasi RKPD Tahun 2020		Capaian Tahun 2020 (%)	Ket
1	DINAS KEHUTANAN						
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	15,5	%	775,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK)	192	Kasus	190	Kasus	98,96	Sangat Tinggi
	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun.	65	%	65	%	100,00	Sangat Tinggi
	Jumlah Dokumen Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	0	Dok	1	Dok		Sangat Tinggi
	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang dibina	1	Lokasi	1	Lokasi	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	1.975	Hektar	3.477,7	Hektar	176,09	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	20.000	Hektar	43.370,6 1	Hektar	216,85	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28	Kelom pok	28	Kelom pok	100,00	Sangat Tinggi
2	UPTD TAMAN HUTAN RAYA						Sangat Rendah
	Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun.	65	%	60	%	92,31	Sangat Tinggi
3	UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	185	Hektar	284	Hektar	153,51	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	2.000,00	Hektar	100,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3	Kelom pok	3	Kelom pok	100,00	Sangat Tinggi
4	UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD Tahun 2020		Realisasi RKPD Tahun 2020		Capaian Tahun 2020 (%)	Ket
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	200	Hektar	150	Hektar	75,00	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	1.000,00	Hektar	50,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	2	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
5	UPTD KPH TOILI BATURUBE						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	0	%	0,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	- Dokumen RPHJPd	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	200	Hektar	229	Hektar	114,50	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	2.343,62	Hektar	117,18	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	2	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
6	UPTD KPH BANAWA-LALUNDU						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	50	Hektar	182	Hektar	364,00	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD Tahun 2020		Realisasi RKPD Tahun 2020		Capaian Tahun 2020 (%)	Ket
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	250,00	Hektar	12,50	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	2	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
7	UPTD KPH KULAWI						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	140	Hektar	150	Hektar	107,14	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	1.000	Hektar	50,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	#REF!	Kelompok	2	Kelompok	#REF!	Sangat Tinggi
8	UPTD KPH SINTUWU MAROSO						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	0	%	0,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	175	Hektar	265	Hektar	151,43	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	1.900,00	Hektar	95,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	2	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
9	UPTD KPH SIVIA PATUJU						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD Tahun 2020		Realisasi RKPD Tahun 2020		Capaian Tahun 2020 (%)	Ket
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150	Hektar	280	Hektar	186,67	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	1.750	Hektar	1.750,00	Hektar	100,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	4	Kelompok	200,00	Sangat Tinggi
10	UPTD KPH BALANTAK						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	200	Hektar	192	Hektar	96,00	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	2.000	Hektar	100,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	2	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
11	UPTD KPH PULAU PELING						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	100	Hektar	170	Hektar	170,00	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	250	Hektar	2.000,00	Hektar	800,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	Kelompok	2	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
12	UPTD KPH TEPEASA MAROSO						Sangat Rendah

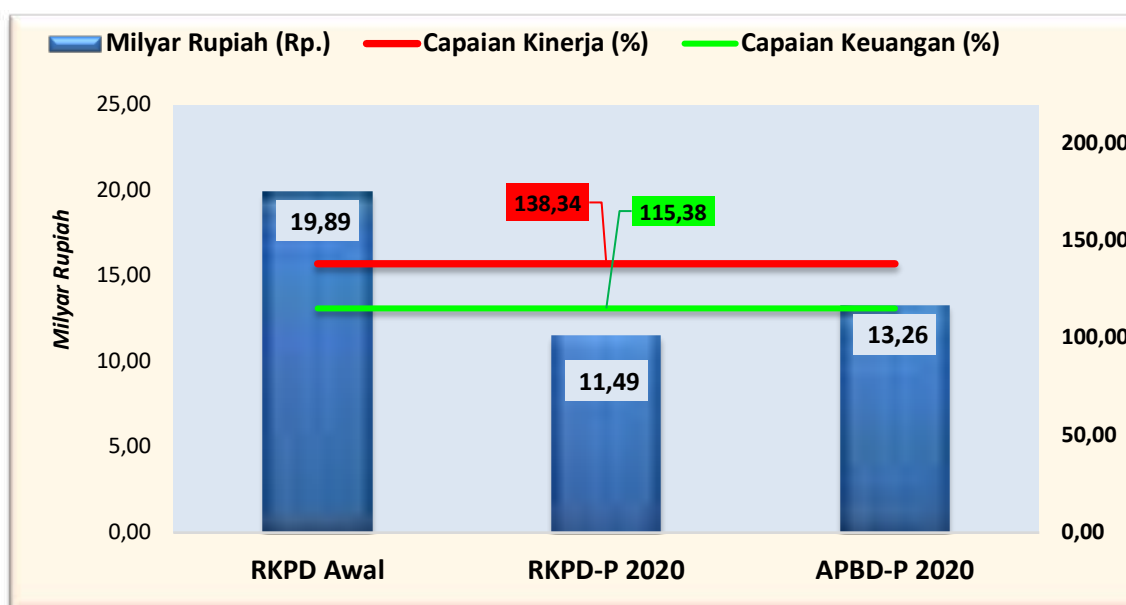
No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD Tahun 2020		Realisasi RKPD Tahun 2020		Capaian Tahun 2020 (%)	Ket
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	500	Hektar	500	Hektar	100,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3	Kelompok	3	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi
13	UPTD KPH TEPO ASA AROA						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150	Hektar	250	Hektar	166,67	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	500	Hektar	300,00	Hektar	60,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28	Kelompok	4	Kelompok	14,29	Sangat Tinggi
14	UPTD KPH GUNUNG DAKO						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150	Hektar	39	Hektar	26,00	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000	Hektar	1.000	Hektar	50,00	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD Tahun 2020		Realisasi RKPD Tahun 2020		Capaian Tahun 2020 (%)	Ket
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28	Kelompok	2	Kelompok	7,14	Sangat Tinggi
15	UPTD KPH POGOGUL						Sangat Rendah
	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap Tahun	3	%	3	%	100,00	Sangat Tinggi
	Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1	Dok	1	Dok	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada tahun 2021	2	%	2,0	%	100,00	Sangat Tinggi
	Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian (LK).	5	%	5	%	100,00	Sangat Tinggi
	Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	175	Hektar	105	Hektar	60,00	Sangat Tinggi
	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	1.000	Hektar	1.000	Hektar	100,00	Sangat Tinggi
	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28	Kelompok	28	Kelompok	100,00	Sangat Tinggi

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan kehutanan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp. 19.892.004.896, naik menjadi sebesar Rp. 11.494.670.739 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 13.261.999.496 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.767.328.757 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 15,38 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Kehutanan Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **109,08** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **126,87 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Kehutanan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Tahun 2020 secara umum telah terlaksana sesuai target RKPD 2020. Hal ini dapat dilihat dari seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan energi dan Sumberdaya Mineral dapat terealisasi 100,00 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.79
Capaian Indikator Kinerja RKPD 2019
Urusan ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian (%)	Ket
I	DINAS ESDM				
	Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan	91 IUP	91 IUP	100,00	
	Meningkatnya Presentase Rasio Elektrifikasi sektor Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri	96%	96%	100,00	
	Meningkatnya Presentase Pemanfaatan EBT	7%	30%	428,57	
	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah	35%	35%	100,00	
III	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I (KAB.				

NO.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RKPDP 2020	Realisasi RKPDP 2020	Tingkat Capaian (%)	Ket
	BUOL, KAB. TOLI-TOLI				
	Meningkatnya Presentase Rasio Elektrifikasi sektor Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri	96%	96%	100,00	
	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah	35%		0,00	
III.	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II (KAB. POSO, KAB. TOJO UNA-UNA)				
	Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan	91 IUP	91 IUP	100,00	
	Meningkatnya Presentase Rasio Elektrifikasi sektor Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri	96%	96%	100,00	
	Meningkatnya Presentase Pemanfaatan EBT	7%	0%	0,00	
	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah	35%	35%	100,00	
IV.	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III (KAB. MOROWALI, KAB. MOROWALI UTARA)				
	Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan	91 IUP	91 IUP	100,00	
	Meningkatnya Presentase Rasio Elektrifikasi sektor Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri	96%	96%	100,00	
	Meningkatnya Presentase Pemanfaatan EBT	7%	7%	100,00	
	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah	35%	35%	100,00	
V.	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV (KAB. BANGGAI, BANGKEP DAN BALUT)				
	Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan	91 IUP	91 IUP	100,00	
	Meningkatnya Presentase Rasio Elektrifikasi sektor Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri	96%	96%	100,00	
	Meningkatnya Presentase Pemanfaatan EBT	7%	7%	100,00	
	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah	35%	35%	100,00	
VI.	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V (KAB. SIGI, KOTA. PALU, KAB. DONGGALA DAN KAB. PARIGI MOUTONG)				
	Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan	91 IUP	91 IUP	100,00	
	Meningkatnya Presentase Rasio Elektrifikasi sektor Elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri	96%	96%	100,00	
	Meningkatnya Presentase Pemanfaatan EBT	7%	7%	100,00	

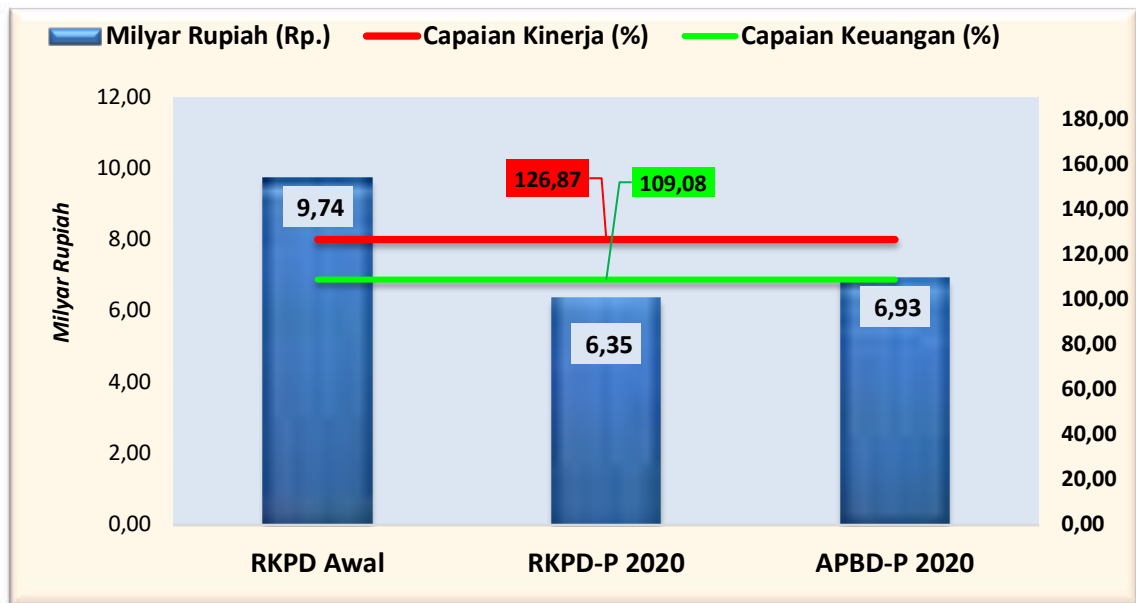
NO.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RKPD 2020	Realisasi RKPD 2020	Tingkat Capaian (%)	Ket
	Meningkatkan Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah	35%	35%	100,00	

Sumber: Bappeda Prov. Sulteng 2021 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp. 9.742.578.425, naik menjadi sebesar Rp. 6.350.024.344 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 87 6.926.864.344 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 576.840.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 9,08 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **109,08** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **126,87 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

6. Perindustrian dan Perdagangan

Pembangunan dalam bidang perindustrian dan perdagangan sangat penting dilakukan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perindustrian dan perdagangan saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Capaian kinerja RKPD tahun 2020 urusan perdagangan dapat dilihat pada masing-masing indikatornya yaitu; 1) indikator Jumlah Pertumbuhan Industri dengan target sebesar **2,43** persen dapat terealisasi hingga mencapai **3,35** persen, 2) indikator selanjutnya yaitu jumlah sumber daya industri yang terfasilitasi dari target 23 industri hanya dapat terealisasi sebanyak 11 industri, 3) Jumlah Presentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari target 19,5 persen

dapat terealisasi sebesar 7,07 persen, 4) indikator jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen melalui Badan Penanganan Sengketa Konsumen/BPSK Kab/Kota Sulawesi Tengah dari target 70 sengketa hanya dapat terealisasi sebanyak 47 kasus, 5) indikator Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan dari target 1.100 Juta USD dapat terealisasi sebesar 5.095 Jt USD, 6) indikator Jumlah Komoditi yang di Uji dari target 100 sampel realisasi telah melampaui target dengan capaian 126 sampel, 7) indikator Jumlah Alat yang di Kalibrasi dari target 95 alat dapat terealisasi sebanyak 303 alat, dan 8) indikator Jumlah IKM yang terlayani dari target sebanyak 170 IKM dapat terealisasi sebanyak 220 IKM, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2..
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPDP 2020	Realisasi RKPDP 2020	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Pertumbuhan Industri besar	-	-	-	Tdk ada data
2	Jumlah Pertumbuhan Industri %	2,43	3,35	137,90	
3	Jumlah Sumber Daya Industri yang Terasilitasi	23	11	47,80	
4	Jumlah Presentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,5	7,07	36,30	
5	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen melalui Badan Penanganan Sengketa Konsumen/BPSK Kab/Kota Sulawesi Tengah	70	47	67,1	
6	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan (jt USD)	1.100	5.095	21,587	
7	Jumlah Komoditi yang di Uji (sampel)	100	126	126,00	
8	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	95	303	318,90	
9	Jumlah IKM yang terlayani	170	220	129,40	

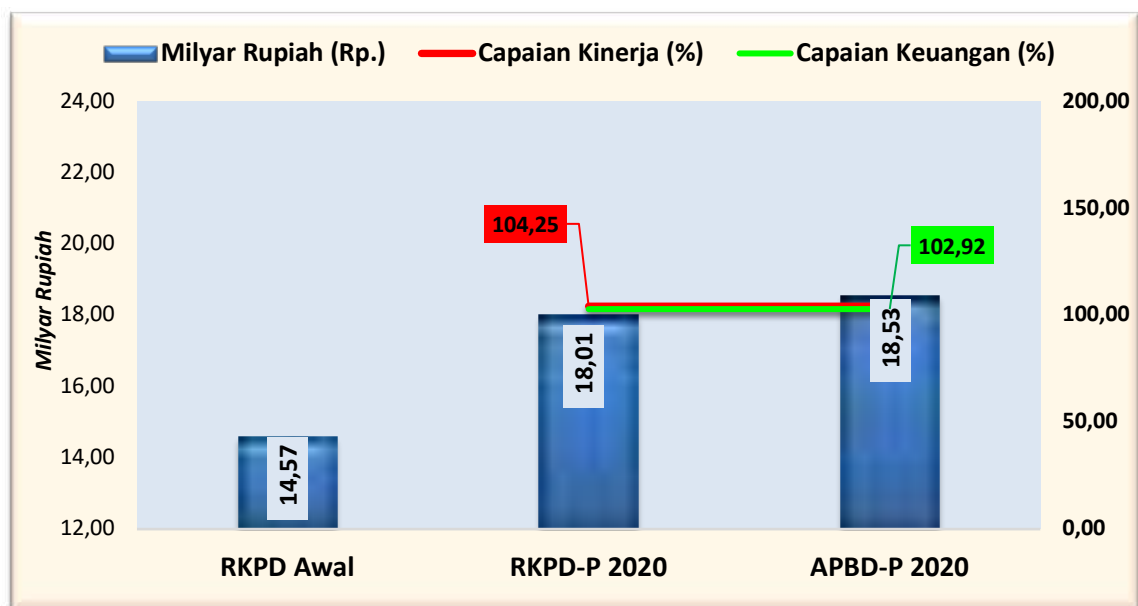
Sumber: Bappeda Prov. Sulteng 2020 (data diolah kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi penganggaran pada Urusan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPDP Awal Tahun 2020 sebesar Rp.14.569.413.560, mengalami peningkatan menjadi sebesar

Rp.18.005.210.211 pada RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 18.530.210.211 yang berarti terjadi deviasi sebesar 2,92 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 525.000.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan hasil matriks evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Perindustrian dan Perdagangan dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **102,92** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 melampaui target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **104,25** persen dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**',

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

7. Ketransmigrasian

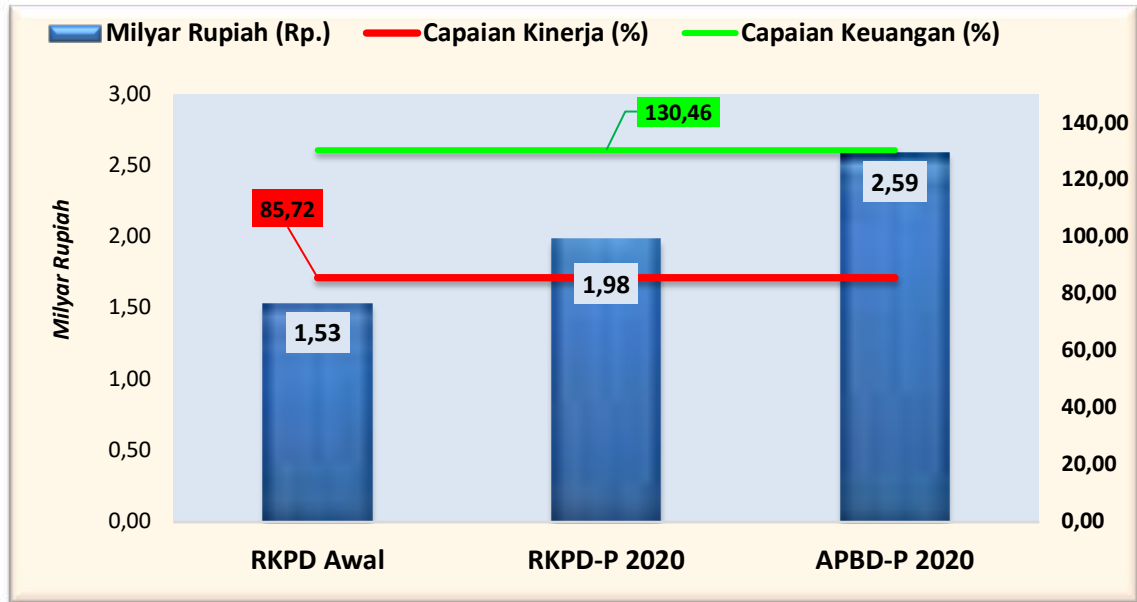
Capaian kinerja Urusan Ketransmigrasian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi menggambarkan kinerja yang baik, dimana capaian

indikator jumlah permukiman transmigrasi dari **4** UPT yang ditargetkan dalam RKPD 2020, yang terealisasi sebesar **4** UPT atau dengan persentase capaian sebesar **100,00** persen, dan indikator lainnya yaitu Jumlah KK Transmigran dari target **175** KK pada RKPD tahun 2020, yang terealisasi hanya sebesar **125** KK atau dengan persentase capaian sebesar **71,43** persen.

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Urusan Transmigrasi Tahun 2020, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran RKPD awal Tahun 2020 sebesar Rp.1.530.000.000, naik menjadi sebesar Rp. 1.983.408.325 pada pagu anggaran RKPD-P Tahun 2020. Sedangkan untuk pengalokasian APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.587.508.325 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.627.487.000 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2020 dengan tingkat deviasi sebesar 30,46 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2020 pada Urusan Transmigrasi Tahun 2020 dapat diketahui tingkat realisasi Capaian Keuangan secara umum mencapai **130,46** persen yang berarti bahwa pengalokasian APBD-P Tahun 2020 berada di atas target RKPD-P Tahun 2020 dengan kriteria penilaian '**Sangat Tinggi**'. Sedangkan tingkat realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2020 secara umum mencapai **85,72 persen** dengan kriteria penilaian masuk dalam kategori '**Sangat Tinggi**'.

Gambar. 2.7.
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja
Urusan Transmigrasi Tahun 2020



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2021 (data diolah kembali)

2.3. Permasalahan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2016–2021 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi.

Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan lima tahun kedua RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pada saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah maupun pencapaian regional atau nasional. Untuk memberikan penguatan pada penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada urusan pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 2.83.
Permasalahan dan Evaluasi capaian Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1.	Pertumbuhan PDRB	Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 7,14 berada diatas rata-rata nasional.	Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh faktor Industri Pengolahan dan sektor pertambangan tumbuh tinggi tidak diikuti penciptaan lapangan kerja , juga investasi tidak merata diseluruh Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan pertumbuhan belum berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan lapangan kerja yang merata diseluruh Kabupaten/Kota. • Peningkatan dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat • Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat • Upaya pengurangan penduduk miskin • Mendorong tumbuhnya UKM yang berkualitas • Penciptaan suasana aman dan kepastian hukum untuk berinvestasi
1.2	Laju Inflasi Provinsi	Pada tahun 2019 inflasi Sulteng 4,33 nasional 3,31, sehingga diupayakan menekan laju inflasi minimal sama dengan rata-rata nasional	Laju inflasi dipengaruhi oleh naiknya harga barang, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BBM, bencana alam, Infrastruktur yang belum memadai dll	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan memproduksi bahan pokok • Pengendalian harga dan distribusi barang yang merata ke Kabupaten/Kota • Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				tabungan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Operasi pasar dalam mengontrol harga bahan kebutuhan pokok
1.3	PDRB Per Kapita	Pendapatan perkapita meningkat Rp. 45,26 seiring terbukanya lapangan kerja dan diatas rata-rata nasional Rp.45.18 Jt/Org	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok – kelompok usaha belum berkembang dengan baik dan diperparah pandemic covid 19 • Sektor pertanian masih mendominasi penciptaan lapangan kerja, sementara produktivitasnya makin menurun akibat adanya pandemic covid 19 • UMKM dan Industri belum berkembang secara optimal akibat adanya pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha • Penciptaan lapangan kerja • Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Industri • Mendorong tumbuhnya sector pariwisata sebagai buffer sector • Beradaptasi dengan pola hidup new normal akibat pandemic covid 19 dalam melakukan aktivitas social ekonomi.
1.4	Indeks Gini	Pada tahun 2019 indeks gini 0,345	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi pembangunan belum merata • terjadi kesenjangan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong masuknya investasi • Penciptaan lapangan kerja yang merata di seluruh Kabupaten/kota • Mendorong tumbuhnya UMKM dalam suasana pandemic covid 19 melalui pola hidup new normal.
1.5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase jumlah penduduk miskin mencapai 423.270 orang atau 14.22% pada tahun 2019, ini diatas rata-rata nasional (11,22%)	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap layanan publik dan permodalan terbatas • Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru • Rendahnya akses masyarakat ke lapangan pekerjaan, • Rendahnya skill masyarakat • Terjadinya PHK akibat pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengentasan kemiskinan melalui Bedah Kampung • Pengembangan dan peningkatan naik kelas UMKM • Mengembangkan kewirausahaan berbasis unggulan lokal • Mendorong keterlibatan investor dalam pembinaan kewirausahaan • Efektivitas pertumbuhan industry dalam penciptaan lapangan kerja • Beradaptasi dengan pandemic covid 19 melalui pola new normal untuk membuka lapangan kerja

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1.6	Angka kriminalitas yang tertangani,	Untuk tahun 2019 jumlah kriminal yang ditangani 2244 kasus, upaya penurunan angka kriminalitas mendukung Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan sebagai salah satu prioritas daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kenakalan remaja yang berdampak pada perkelahian antar kampung/antar desa/Antar Kelurahan • Adanya peredaran minuman keras dan angka pengguna narkoba • Meningkatnya angka HIV/Aids • Adanya Begal akibat penyalahgunaan Narkoba • Akibat pandemic covid 19 pendapatan masyarakat menurun drastis menyebabkan meningkatnya kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu pihak kepolisian/aparat keamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat • Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan berbagai aktifitas keolahragaan • Peningkatan harmonisasi hubungan dalam penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD serta peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda). • Percepatan penanganan laporan masyarakat oleh aparat keamanan • Keterlibatan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba dan miras • Peningkatan peran pemerintah Bersama semua stakeholders dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimasa pandemic covid 19.
1.7	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Pada tahun 2016 IPM Sulteng sebesar 67,47 berada dibawah rata-rata nasional sebesar 70,18	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan masih tinggi diperparah adanya pandemic covid 19 • Pendapatan perkapita masih rendah diperparah adanya pandemic covid 19 • Usia harapan hidup masih rendah • Harapan lama sekolah juga masih rendah • Rata-rata lama sekolah masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas penurunan Angka Kemiskinan focus pada kantong kemiskinan tinggi • Penciptaan lapangan kerja • Program kesehatan yang berdampak pada Usia harapan hidup masih rendah • Perbaikan pengelolaan dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulteng.
II	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Pendidikan			
1.1	Angka melek huruf	Terjadi Peningkatan Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 sebesar 79,68 %, dengan target capaian 100 % untuk Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya keterjangkauan masyarakat adat terpencil dan terisolasi mengakses pendidikan formal dan non formal • Kegiatan – kegiatan 	Memfasilitasi Kab/Kota untuk mempermudah keterjangkauan daerah 3T. (Tertinggal, Terpencil, Terbelakang) (Bekerja sama dengan LSM, dan pemerintah daerah kab/Kota)

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Sisa 2.66 % utamanya terdapat pada daerah yang memiliki Suku Terasing dengan populasi besar (Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara)	pelestarian seperti Kelompok Belajar Masyarakat (KBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU) masih sangat rendah khususnya untuk daerah tertinggal dan terpencil • Terbatasnya tenaga pendidik untuk daerah tertinggal dan terpencil	Memfasilitasi Kab/Kota untuk mengoptimalkan Kelompok Belajar Masyarakat (KBM); kelompok Belajar Usaha (KBU) untuk peningkatan koordinasi dan sinergitas. Pemerataan Penyebaran Tenaga Pendidik
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah Sulteng (8,20) berada diatas standar Nasional (7.95) pada tahun 2019.	• Rendahnya perluasan akses pendidikan pada daerah terpencil dan tertinggal. • Rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada semua tingkat pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan. Meningkatkan akses pendidikan pada daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terbelakang)
1.3	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 adalah (114,96%) dibawah rata-rata Nasional (138,2%)	Distribusi dan penyebaran tenaga pendidik (guru) tidak merata	Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada distribusi dan penyebaran tenaga pendidik (guru).
1.4	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK	APK SMA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 adalah (71,66%), dibawah rata-rata Nasional (80,89%)	Masih Banyaknya Proporsi anak sekolah pada jenjang SMA/SMK dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut tidak melanjutkan	Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SMA
1.5	Angka pendidikan yang ditamatkan	Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SMP dan SMA	Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang SMA dan Perguruan Tinggi	Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMA maupun PT
1.6	Angka Partisipasi Murni			
1.6.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.	APM SD/MI/Paket A Provinsi Sulawesi Tengah (107,23%) diatas rata-rata Nasional Tahun 2019 (96,82%) belum Tuntas	Kondisi layanan pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota belum berimbang diperparah adanya pandemic covid 19	Difasilitasi Kab/Kota untuk disamakan angka disparitasnya terutama menyangkut pemerataan guru dan sarana prasarana khususnya layanan Pendidikan jarak jauh melalui program Daring dan Nuring.
1.6.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2019 (95,46%) diatas rata-rata Nasional (77,95%)	- Guru yang berpotensi masih terpusat pada Pusat (Kota Palu) dan Ibukota Kabupaten - Diperparah adanya pandemic covid 19	• Mendorong dan Memfasilitasi Penyebaran Guru yang berpotensi pada Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan. • Peningkatan Kualitas Guru • Penyediaan Sarana dan Prasarana Guru pada daerah terpencil salah satunya Perumahan Guru. • Beradaptasi dengan pola

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				hidup new normal di masa pandemi covid 19
1.5. 3	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	APM SMA/SMK/MA/Paket C Sulteng pada tahun 2019 (135,46%)	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi tenaga pendidikan dan sarana prasarana belum merata • Guru yang berpotensi masih terpusat pada Pusat (Kota Palu) dan Ibukota Kabupaten • Diperparah adanya pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Penyebaran Guru yang berpotensi pada Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan. • Penyediaan Sarana dan Prasarana Guru pada daerah terpencil salah satunya Perumahan guru. • Beradaptasi dengan pola hidup new normal di masa pandemi covid 19
2	Kesehatan			
2.1	Angka kematian bayi (AKB)		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai • Perilaku masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh bayi • akses ke sarana pelayanan kesehatan terbatas • Diperparah adanya pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio tenaga kesehatan dibandingkan penduduk belum memadai • Sikap dan perilaku tenaga kesehatan mengutamakan komitmen melayani masyarakat • Kerjasama dengan organisasi profesi, LSM, lintas sektor, lintas program, tokoh masyarakat dan tokoh agama • Distribusi tenaga kesehatan
2.2	Angka usia harapan hidup (UHH)	UHH Sulteng tahun 2016 sebesar 67,31 tahun (2016) dibawah rata-rata Nasional (70,90 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan yang relatif masih tinggi diperparah adanya pandemic covid 19 • Akses Pelayanan kesehatan masih terbatas • Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. • Dampak pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesehatan Gratis bagi penduduk miskin di optimalkan • Pelayanan kesehatan mulai dari bayi sampai lanjut usia berjalan maksimal • Perilaku hidup bersih dan sehat • Advokasi program perilaku hidup bersih sehat mengikuti protokoler kesehatan di masa pandemic covid 19
2.3	Persentase balita gizi buruk	Capaian ideal <1% per tahun sementara sulteng 6,2% pada tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan sehat masih rendah diperparah dengan wabah pendemi covid 19 • Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai • Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola gizi seimbang • Belum optimalnya pemanfaatan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat • Rasio tenaga kesehatan dibandingkan penduduk memadai • Sikap dan perilaku tenaga kesehatan mengutamakan komitmen melayani masyarakat • Media informasi sadar gizi disebarluaskan sampai ke tingkat desa • Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman gizi keluarga

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
			pangan lokal di masyarakat • Informasi sadar gizi belum memasyarakat	• Beradaptasi dengan pola hidup new normal di masa pandemic covid 19 dalam pemenuhan gizi balita
3	Pertanahan			
3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan bersertifikat	Umumnya penduduk yang bersertifikat berada di perkotaan dan pusat kecamatan	Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya lahan bersertifikat	Kegiatan sertifikasi tanah masyarakat
3.2	Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian konflik pertanahan kawasan perkotaan dan perdesaan	Pengakuan kepemilikan tanah didasarkan pada keturunan dan hak adat	• Sertifikasi hak-hak atas tanah • Konsultasikan dengan biro hukum (Perda Tanah Adat) • Jaminan Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah (Perda)
4	Ketenagakerjaan			
4.1	Rasio penduduk yang bekerja	Sulteng tahun 2019 sebesar 0,9619	<ul style="list-style-type: none"> • tenaga kerja yang dilatih tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. • Terbatasnya output Balai Latihan Kerja • Sistem informasi Kerja yang belum optimal • Kebutuhan tenaga kerja sector pertambangan tidak dapat dipasok dari Balai latihan yang ada. • Komitmen industri untuk menyerap tenaga kerja lokal rendah • Terjadinya PHK dan tidak adanya pembukaan lapangan kerja baru akibat adanya wabah pandemi covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> • Didirikannya Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan lowongan pekerjaan dan optimalisasi BLK yang ada • Pemanfaatan sistem informasi kerja dan informasi pasar kerja untuk pencari kerja lokal dan regional • memanfaatkan sistem kemitraan pemerintah dan swasta untuk penyerapan tenaga kerja • Komitmen swasta diperkuat dengan MoU dengan Pemda • Tenaga kerja yang di PHK direkrut kembali • Membuka lapangan kerja baru dengan sistem protokol kesehatan covid 19
III. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga				
1	Kebudayaan			
1.1	Jumlah grup kesenian	tahun 2019 jumlah grup kesenian (sanggar) 0.789 per 10.000 penduduk (ada 78 group seni setiap 10.000 penduduk)	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya . • Seniman belum terorganisir secara optimal • Kualitas garapan karya perlu ditingkatkan • Kurangnya dukungan pembiayaan untuk Pembinaan sanggar seni 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Ruang Kreatif bagi seniman berkesenian • Tersedianya SDM penata tari, musik teater yang memiliki latar belakang akademis • Potensi keanekaragaman budaya lokal yang tersebar perlu di lestarikan sebagai aset • Aktivasi Taman budaya

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				sebagai salah satu ruang kreatif <ul style="list-style-type: none"> Perhatian Pemerintah untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai kota musik.
1.2	Jumlah gedung	Terdapat 0,04 Gedung kesenian pada tahun 2019 per 10.000 pddkk (ada rata-rata 4 gedung kesenian setiap 10.000 pddk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana penunjang teknis untuk gelar seni budaya 2. Alokasi anggaran untuk sektor kebudayaan masih sangat terbatas sehingga pemeliharaan gedung belum optimal 3. Sarana Penunjang teknis pertunjukan masih terbatas 4. SDM pengelola masih terbatas 5. Kab/Kota perlu mengusulkan gedung seni pertunjukan 6. Kondisi sarana dan prasarana gedung teater/Seni tertutup (GOLNI Palu) Kurang Terpelihara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyediaan Gedung Pameran, Gedung teater tertutup dan ruang musik, tari, teater di wilayah Kabupaten/Kota 2. Komitmen Pemda Provinsi Sulawesi Tengah untuk memajukan budaya Lokal. 3. Peningkatan saran dan prasarana gedung teater/Seni daerah
2	Pemuda dan Olah Raga			
2.1	Jumlah gedung olahraga	Tahun 2019 (0,06 gedung olahraga per 10.000 pddk)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan. • Belum maksimalnya sinkronisasi program dengan kegiatan antar pemprov dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga • jumlah gedung olahraga diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi baik antara pusat maupun daerah • Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana gedung olahraga, Stadion yang memadai • Penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada tiap kabupaten/kota sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi lingkungan tiap kabupaten/kota
2.2	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya organisasi kepemudaan • Belum maksimalnya sinkronisasi program dengan kegiatan antar pemprov dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan • Kurangnya koordinasi organisasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Jumlah organisasi kepemudaan • Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan • Meningkatkan koordinasi Prov dan Kab/Kota

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
			Provinsi dan Kab/Kota • Kurangnya peran organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan	
2.3	Jumlah Gedung Pemuda	Tahun 2019 (1 gedung Kepemudaan/gedung KNPI) jumlah gedung pemuda diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan. • Belum maksimalnya sinkronisasi program dengan kegiatan antar pemprov dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengembangan potensi kepemudaan. • Gedung pemuda (KNPI) yang kondisinya tidak terawatt 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan • Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana gedung kepemudaan • Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan pada tiap kabupaten/kota sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi lingkungan tiap kabupaten/kota
2.4	Jumlah Pemuda Kewirausahaan	jumlah pemuda kewirausahaan diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya motivasi pemuda dalam berwirausaha diperparah adanya pandemic covid 19 • Minimnya kewirausahaan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan motivasi pemuda dalam kewirausahaan • Meningkatnya kewirausahaan pemuda di wilayah kabupaten/Kota • Penciptaan 1.000 wirausaha baru khususnya yang di inisiasi oleh Pemuda
2.5	Jumlah Pemuda dalam mengikuti program kepemudaan	jumlah pemuda diharapkan terus bertambah dalam mengikuti program kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pelaksanaan program kepemudaan di wilayah.pada 13 kabupaten/Kota • Pengembangan potensi kepemudaan masih minim 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keikutsertaan pemuda dalam melaksanakan program kepemudaan. • Meningkatnya kualitas potensi kepemudaan Sulteng agar berdaya saing
B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
I	Fokus Layanan Urusan Wajib			
1.	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar			
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada jenjang SD/MI mengalami Peningkatan tahun selama periode 2014-2019. Meningkat dari 98,00% menjadi 98,50% APS SD/MI (7-12 tahun).	Rendahnya pemahaman masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal (KAT) tentang pentingnya Pendidikan diperparah adanya pandemic covid 19	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
1.1.1.	Rasio	Pada tahun 2019	Belum meratanya sebaran	Perlunya pemerataan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
2	ketersediaan sekolah/ penduduk usia dini	rasio ketersediaan sekolah per usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 11,22% capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 sebelumnya yakni sebesar 10,30%, namun masih rendah	jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu diperparah adanya pandemic covid 19	pembangunan sekolah khususnya daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terbelakang
1.1.3	Rasio guru/murid	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio dari tahun 2014 sebesar 0,73 meningkat tahun 2019 menjadi 0,78. • Begitu pula untuk SMP/MTs terlihat menurun dari tahun 2014 sebesar 0,78 menjadi 0,66 tahun 2019. 	Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan tertinggal kurang diminati calon pendidik diperparah adanya pandemic covid 19	Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/Kota dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD sampai dengan tahun 2016 mencapai 11,77.	<ul style="list-style-type: none"> • Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan tertinggal kurang diminati calon pendidik. • Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan komponen pendidik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik • Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik
1.2	Pendidikan Menengah			
1.2.1	Angka Partisipasi sekolah (SMA)	Capaian APS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 69,91% meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 63,61. Namun capaian indikator belum mencapai kondisi ideal.	Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Kab/Kota untuk menganalisis data pendidik yang perlu ditempuh dalam suatu wilayah. • Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa miskin
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2014 sampai		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibukanya kelas jauh didaerah terpencil

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		dengan tahun 2019 cenderung meningkat (1,32-1,85).		
1.2.3	Rasio guru terhadap murid	Capaian rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah memenuhi rasio ideal 1:25, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 mencapai 1:12 atau mencapai 0,96.	Distribusi penempatan dan pemerataan guru belum optimal	Insentif koordinasi dan konsultasi pusat, provinsi dan daerah
1.2.4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata menggambarkan kondisi penunjang dalam kegiatan belajar mengajar yakni ketersediaan ruang kelas.	Kurangnya ruang kelas untuk memperbanyak siswa belajar	Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori
1.2.5	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Pada tahun 2019 angka melek huruf 97,67% capaian ini lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya sebesar 95,22%.	Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi	Program pendidikan gratis
1.3	Fasilitas Pendidikan			
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD mencapai 70,97% kondisi baik tahun 2016.	Kurangnya koordainasi antara daerah, provinsi dan pusat	Perlu penepatan/aturan lebih awal diterima kab/kota intensifkan penggunaan DAK lebih banyak ke perbaikan sarana kelas
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan sarana. Dari tahun 2019 kondisi baik 99,70%.	Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD Koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota perlu ditingkatkan
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 42,02 tetapi masih dibawah rata-rata Nasional 55,24%.	Partisipasi masyarakat terhadap PAUD masih minim	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang Pendidikan Anak Usia Dini di berbagai media. Mendorong Kab/Kota dan masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD Fasilitasi bantuan subsidi kepada lembaga PAUD
1.5	Angka Putus Sekolah			
1.5.	Angka Putus	Rasio angka putus	• Tidak optimalnya	• Pemantapan pendataan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1	Sekolah (APS) SD/MI	sekolah dari tahun 2014- 2019 tidak mengalami perubahan yakni mencapai 0,68%.	pendataan dan analisisnya terhadap penyebab putus sekolah • Bantuan subsidi belum memenuhi target • diperparah adanya pandemic covid 19	pendidikan terutama penyebab putus sekolah • Program revitalisasi perlu dikembangkan dan diupayakan kembali.
1.5. 2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka Putus Sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2019 adalah 6,00%. Angka tergolong cukup tinggi.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	Meningkatnya dukungan terhadap dukungan layanan pendidikan.
1.5. 3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Angka Putus Sekolah pada SMA/SMK/MA pada tahun 2019 adalah 2,00% dan mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 3,15%.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	Meningkatnya dukungan terhadap dukungan layanan pendidikan.
1.6	Angka Kelulusan			
1.6. 1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Angka kelulusan Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 109,79%	-	• Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. • Koordinasi antar tingkat pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas
1.6. 2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Angka Kelulusan tingkat SMP pada tahun 2014 sebesar 96,46% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 97,52%	• Penyebaran tenaga pendidik belum merata • Rendahnya kualitas Guru	• Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. • Koordinasi antar tingkat pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas
1.6. 3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Angka Kelulusan tingkat SMA/SMK pada tahun 2016 sebesar 99.45%.	• Penyebaran tenaga pendidik belum merata • Rendahnya kualitas Guru	• Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. • Koordinasi antar tingkat pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas
1.6. 4	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	Provinsi Sulawesi Tengah sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun dalam RPJMD 2016-2021.	Lokasi sekolah dasar jaraknya jauh dari lokasi sekolah lanjutan setingkat SMP	Dukungan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah SMP/MTs
1.6. 5	Angka Melanjutkan (AM)) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Provinsi Sulawesi Tengah sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun dalam RPJMD 2016-2021.	Lokasi sekolah SMP jaraknya jauh dari lokasi sekolah lanjutan setingkat SMA/SMK	Dukungan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah SMA/SMK/MA

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		Dimana angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 87,30%.		
1.6. 6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2014 adalah 65,72% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 82,20%.	Terbatasnya diklat untuk guru pada mata pelajaran tertentu seperti, matematika, IPA, bahasa inggris, seni budaya dan olahraga serta kearifan lokal	Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mata pelajaran
2.	Kesehatan			
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2016 sebesar 25,45 dan meningkat bila dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 11,79.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya dana operasional posyandu • Minimnya fasilitas posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat • Kapasitas kader ditingkatkan secara kontinyu
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 0.65 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 1.08		<ul style="list-style-type: none"> •
2.3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2014-2016 sebesar 0.01	Masih banyak masyarakat Sulawesi Tengah yang belum terakses pelayanan Rumah Sakit akibat kondisi geografis Sulawesi Tengah. Selain itu masih ada Kabupaten yang belum memiliki Rumah Sakit (banggai Laut & banggai Kepulauan)	<ul style="list-style-type: none"> •
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,157.	Keterbatasan dokter pada daerah terpencil, tertinggal walaupun insentif yang diberikan lebih tinggi. Masih banyak daerah terpencil yang tidak didukung dengan infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah dokter PTT • Infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi
2.5.	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 1,83 dan meningkat menjadi 1.98 pada tahun 2019.	Masih kurangnya minat Tenaga Medis pada daerah terpencil, tertinggal walaupun insentif yang diberikan lebih tinggi. Masih banyak daerah terpencil yang tidak didukung dengan infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah tenaga Medis • Infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Capaian pada tahun 2019 sebesar 63,37%.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai • Perilaku masyarakat yang masih mempercayai dukun 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kurikulum pendidikan kebidanan yang menitikberatkan pada peningkatan ketrampilan bidan • Perilaku bidan yang bersifat melayani • Pembinaan organisasi profesi • Sosialisasi budaya hidup sehat dan penanganan tenaga medis • Kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh agama
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 72,51%.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai • Perilaku masyarakat yang masih mempercayai dukun dalam persalinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi persalinan yang aman • Perilaku bidan yang bersifat melayani • Pembinaan organisasi profesi • Kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh agama
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2019 mencapai 72,60%.	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku masyarakat yang tidak mempercayai imunisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat • Pemberdayaan masyarakat • Tingkat kemandirian masyarakat (lebih mengutamakan upaya kesehatan preventif dan promotif daripada kuratif dan rehabilitative)
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan pada tahun 2019 sebesar 6,20%	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang berbasis bahan lokal masih rendah • Informasi sadar gizi belum memasyarakat • Masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Media informasi sadar gizi disebarluaskan sampai ke tingkat desa • Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman gizi keluarga • Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat
2.11	Cakupan pemenuhan dan penanganan penderita penyakit TB Per 100.000 pddk	Cakupan pemenuhan dan penanganan penderita penyakit TB pada tahun 2019 mencapai 162,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya stigma tentang TB di masyarakat • Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah • Masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat telah memasyarakat • Penyebarluasan informasi tentang TB sampai ke tingkat desa • Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat
2.12	Cakupan Balita Stunting mendapat perawatan	Pada tahun 2019 adalah 36,10%	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku hidup bersih dan sehat masih tetap ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> •
2.13	Cakupan Masyarakat Yang Memiliki Jaminan	Cakupan Masyarakat Yang memiliki Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua masyarakat miskin mempunyai jaminan kesehatan • Akses terhadap sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Premi pelayanan kesehatan memperhitungkan biaya transportasi ke sarana pelayanan kesehatan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
	Kesehatan	kesehatan pada tahun 2019 sebesar 50,00%	<p>elayanan kesehatan masih rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki sistem rujukan secara berjenjang sesuai dengan regionalisasi Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Pola pelayanan kesehatan bergerak (flying health care dan saling medical service)
2.14	Cakupan puskesmas	Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian pada Tahun 2019 sebesar 32,00% dan puskesmas yang memiliki standar sarana prasarana dan alat Tahun 2019 sebesar 55,83%	Meskipun cakupan Puskesmas sudah terlayani sebagian besar desa, tetapi masih banyak masyarakat yang belum terakses pelayanan kefarmasian karena lokasi Puskesmas yang sulit dijangkau dan kondisi geografis terutama pada Kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan dan pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Puskesmas disesuaikan dengan lokasi padat penduduk Fasilitas prasarana bagi tenaga Puskesmas tersedia Menyekolahkan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kesehatan
2.15	Cakupan Rumah Sakit	Rumah Sakit yang memenuhi standar sarana prasarana dan Alat pada Tahun 2019 sebesar 55,83%	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Alat di Rumah Sakit yang belum memenuhi standar sesuai SPM belum tersebar merata.	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Sakit disesuaikan dengan lokasi padat penduduk Penempatan tenaga PNS, honorer dan kontrak Fasilitas rumah dinas bagi tenaga kesehatan tersedia Menyekolahkan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kesehatan
2.16	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas kesehatan pada Tahun 2019 sebesar 73,55%, cakupan berat bayi lahir rendah (BBLR) sebesar 9,60% dan Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI Tahun 2019 sebanyak 51 pos UKK	Masih minimnya jumlah persalinan yang difasilitasi tenaga kesehatan diakibatkan oleh masih belum optimalnya pelayanan kesehatan hingga ke pelosok terpencil sehingga sangat mempengaruhi angka penurunan jumlah bayi lahir secara normal.	
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan pada tahun 2016 adalah 0,59.	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya aksesibilitas sistem jaringan jalan Masih panjangnya ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan provinsi Peningkatan status jalan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku
3.2.	Rasio jaringan irigasi	Rasio jaringan irigasi pada tahun 2019 baru mencapai 89%	<ul style="list-style-type: none"> Luasnya lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelolaisumber daya air. Degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air Peningkatan koordinasi

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				lintas sektor
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2015 adalah 2,38%	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberadaan rumah ibadah untuk kehidupan yang aman, nyaman dan produktif	Adanya para pemuka agama ditengah masyarakat
3.4.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Urusan persampahan merupakan tugas pemerintahan yang serahkan ke kabupaten/kota, dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah telah dibentuk OPD yang menangani persampahan	Tingginya pertambahan penduduk dan variasi aktifitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan baik TPS maupun TPA dan terbatasnya sarana pengolahan sampah.	Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan pemukiman secara berimbang sesuai jumlah penduduk baik TPS maupun TPA dan ketersediaan institusi pengelola sampah yang profesional Peningkatan peran serta masyarakat dengan cara membuang sampah yang di klasifikasi sesuai jenis sampah
3.5.	Rasio rumah layak huni	Pada Tahun 2016 rasio rumah layak huni adalah 0,83%.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar nya pemukiman penduduk pada pulau-pulau kecil • Terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas masyarakat akan rumah layak huni melalui fasilitas perbankan yang di koordinir pemerintah • Pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu di pulau-pulau kecil yang berpenghuni
3.6.	Rasio permukiman layak huni	Permukiman layak huni umumnya tersebar pada permukiman penduduk baru yang dibangun oleh pengembang terutama pada Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota.	Masih terdapat permukiman tidak layak huni pada desa-desa pesisir dan sebagian kawasan perkotaan pada Ibu Kota Provinsi/Kabupaten/Kota	Upaya Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dan pada desa-desa pesisir
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 102,44% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dari total penduduk 2.876.689 sebanyak 2.841.018 telah terlayani oleh air bersih yang bersumber dari PDAM atau sumber lainnya yang terlindungi.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh sistem penyedia air minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan pengguna air bersih pada masyarakat perdesaan yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum melalui berbagai program • Upaya perlindungan sumber air baku dan terhindar dari pencemaran lingkungan
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	Pada tahun 2016 rumah tangga	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan	Upaya pemerintah untuk pengembangan dan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		pengguna listrik mencapai 86,19%	masih rendah untuk pembangkit listrik skala menengah maupun skala kecil	pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dengan program pengembangan desa mandiri energi
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB	Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah HPL/HGB pada tahun 2019 adalah 562.33	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan belum di tata dengan baik Belum tersosialisasinya UU No. 26 Tahun 2007 sampai di tingkat masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 sampai di tingkat masyarakat Sosialisasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2019 ttg RTRW Provinsi Sulteng
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	13 Kabupaten/Kota telah memiliki dan mempedomani dokumen RPJPD, Perda RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 Nomor 06 Tahun 2009 dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019	Dokumen perencanaan sudah dipedomani, namun Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan; kewajiban mendukung Prioritas Pembangunan nasional dan Provinsi Sulteng oleh Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014
6.2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	12 Kab/Kota telah memiliki RPJMD, dan telah ditetapkan dengan Perda termasuk 6 Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada 2019.sementara 1 Kab yaitu Banggai dalam proses perampungan rpjmd 2016-2021. Perda RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dalam proses konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri.	Belum sinkronnya program antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan program sektoral Kementerian lembaga. RTRW belum dijadikan acuan implementasi program di daerah.	Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen RTRW.
6.3.	Tersedianya	Provinsi dan 13	Belum optimalnya capaian	Terciptanya koordinasi

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
	dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Kab/kota memiliki RKPd yang ditetapkan oleh Perkada yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	RKPd sesuai target yang ditetapkan dalam pencapaian Visi, Misi Pemerintah Daerah	perencanaan pembangunan dalam Musrenbang setiap tahun antara Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota.
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Konsistensi antara program dalam RKPd dan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya (RTRW, RPJPD dan RPJMD)	Belum optimalnya konsistensi perencanaan sesuai dokumen perencanaan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPd	Telah diperdakan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen RTRW di 13 Kabupaten/Kota.
7.	Perhubungan			
7.1	Jumlah uji kir angkutan umum	Tersedia data Uji Kir angkutan umum di 13 Kab/Kota dengan total jumlah Uji Kir Angkutan Umum pada tahun 2019 sebanyak 12.290.	Terbatasnya SDM dan peralatan uji KIR	Peningkatan penyediaan prasarana peralatan uji KIR dan peningkatan kualitas SDM
7.2	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	Pada tahun 2019 jumlah pelabuhan laut sebanyak 12 kab/kota, pelabuhan udara 7 kab/kota dan terminal bus 13 kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan (Study s.d pengusulan) dan proses pembangunan memakan waktu yang lama Anggaran yang diberikan melalui dana APBN setiap tahun anggaran tidak cukup untuk penyelesaian pembangunan pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkan ke pemerintah pusat agar proses perencanaan dan proses pembangunan dapat di persingkat Mengusulkan agar anggaran yang dikucurkan lewat APBN untuk pembangunan prasarana transportasi bisa mencukupi sehingga proses pembangunan hanya diperlukan waktu hanya 2 tahun anggaran.
8.	Lingkungan Hidup			
8.1.	Persentase Penanganan Sampah	13 kabupaten/kota dapat menyediakan TPA, armada angkutan sampah dan TPA serta kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai ketentuan	Terbatasnya lokasi TPS, TPA dan armada pengangkut sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya	Penanganan sampah merupakan tugas Kabupaten/Kota yang ditunjang oleh Pemerintah Provinsi dan bantuan sektoral .
8.2.	Persentase penduduk berakses air minum		Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				sumber air baku dari pencemaran lingkungan
8.3.	Persentase luas permukiman yang tertata	Luas permukiman yang tertata diutamakan pada kawasan perkotaan Ibu Kota Kabupaten dan kawasan pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya developer yang mengusahakan permukiman tertata baik sampai ke tingkat desa • masih tingginya pemahaman masyarakat terhadap pola permukiman lama yang didiami secara turun-temurun sebagai bagian yang dianggap tabu untuk dirubah 	Adanya peraturan Daerah tentang RTRW dan penyusunan Rencana Zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten/Kota
8.4.	Pencemaran status mutu air	Jumlah sungai yang dipantau dan ditetapkan status mutu air dan diinformasikan kepada publik sebanyak 4 sungai khusus untuk Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana sampling air tidak tersedia dan masih menggunakan laboratorium luar 	Diusulkan ke Pemerintah Pusat dan Daerah agar Bapedal mendapat peralatan laboratorium, Anggaran Pemantauan Kualitas Air Sungai mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah 95.47%	Meningkatnya ketaatan Aturan Perusahaan Wajib AMDAL/UKL/UPL dalam pelaksanaan RPL dan UKL	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang memadai dalam rangka pembinaan • Tersedianya SDM dan Kelembagaan yang memenuhi syarat terbentuknya Komisi
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Tempat pembuangan sampah diupayakan tersedia sesuai kebutuhan jumlah penduduk pada masing-masing kawasan	Meningkatkatnya peranserta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan di kabupaten/kota yang diidentifikasi, diverifikasi dan ditangani sebanyak 73%	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup • Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan kasus lingkungan 	Dibutuhkan anggaran yang memadai karena penegakan hukum lingkungan melibatkan aparat terkait
8.9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi Sulteng pada tahun 2019 sebesar 85 poin.		
9.	Pertanahan			
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat			
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak perkeluarga rata-rata 4 di tiap tahunnya hingga	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor • Peningkatan pemahaman

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		tahun 2019		masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak • Penyebarluasan KIE Genre (Generasi Berencana)
12.2	Rasio akseptor KB		Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya di daerah terpencil, pegunungan, dan pulau-pulau terisolir	Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas
12.3	Cakupan peserta KB aktif	Cakupan peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 100,00% jika dibandingkan dgn tahun 2016 yang hanya sebesar 78,24%	• Akses ber-KB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan wilayah kepulauan masih rendah	• Mendorong kepesertaan KB pria • Membangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat.
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I	Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I pada tahun 2019 sebesar 39,33%	• Tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I • Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja	• Penguatan ketahanan ekonomi keluarga • Peningkatan partisipasi ber-KB • Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negative pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga;
14.	Ketenagakerjaan			
14.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APK) 67,14% pada Agustus tahun 2019	Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah	Pembangunan balai latihan yang bertaraf internasional
14.1	Pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang ditempatkan pada Agustus tahun 2019 sebesar 96,19%.	Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia	Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja
14.3	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran pada Agustus tahun 2019 sebesar 3,81%.	• Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. • Informasi pasar kerja masih terbatas.	• Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru. • Pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem
14.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dari tahun 2014 - 2019	Terbatasnya jamsostek bagi tenaga kerja	Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menerima jamsostek.

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		belum terdata		
14.5	Perselisihan buru dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha	Meningkatkan peran lembaga penyelesaian perselisihan
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1	Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sebesar 20,00%.	Kurangnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya • Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi • Penguatan kapasitas dalam pembinaan koperasi
15.2	Persentase jumlah usaha kecil usaha mikro	Persentase jumlah usaha kecil usaha mikro tahun 2019 sebesar 100,00%.	•	•
16.	Penanaman Modal			
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Tahun 2019 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) sebanyak 75 proyek dan PMA sebanyak 43 proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur wilayah belum memadai (Transportasi dan energi) • Promosi potensi masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan trans Sulawesi Tengah dan Palu parigi By Pass • Peta potensi investasi dan blueprint investasi • Pelayanan perizinan terpadu Satu pintu (PTSP)
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Tahun 2019 PMDN sebesar Rp 1.929.657.000.000 dan PMA sebesar Rp.20.635.458.000.000.	Iklm Investasi sudah baik dan masih perlu ditingktan	Perda Tentang Penanaman modal, RUPM, insentif dan kemudahan Investasi yang Market Friendly
16.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pencari kerja	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
16.4	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliaran Rupiah)	PMDN sebesar 175% dan PMA sebesar 139%	Implementasi perijinan investasi belum optimal	Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
17.	Kebudayaan			
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			Telah teragendakan festival seni dan budaya di beberapa Kabupaten/Kota (Palu Nomoni, Festival pesona Teluk Tomini, Festival Pesona danau Poso, Festival Donggala Kota antik, Festival teluk Tomori, Festival Togian) Perlu inventarisasi even seni dan budaya di daerah yang belum teragendakan

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Tahun 2019 sebesar 98,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya fasilitas penunjang bagi gedung pertunjukan • Biaya sewa jasa/peralatan pendukung seni pertunjukan mahal • Penganggaran yang masih terbatas untuk pengembangan /pemeliharaan sarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana gedung pertunjukan seni di provinsi Sulawesi Tengah, gedung teater , gedung sanggar tari dan pameran serta gedung musik dan teater terbuka.
17.3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Tahun 2019 sebesar 97,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Pengetahuan Masyarakat terhadap UU cagar budaya • Situs sejarah dan purbakala banyak mengalami kerusakan dan perlu dilakukan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara benda situs dan kawasan cagar budaya • Terjaga dan terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya
18.	Kepemudaan dan Olah Raga			
18.1	Jumlah organisasi pemuda		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpolanya pemberdayaan pemuda • Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan • Belum terakreditasi organisasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan • Memfasilitasi akreditasi organisasi kepemudaan
18.2	Jumlah Klub Olahraga		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpolanya permasalahan dan pembibitan olahraga • Belum terakreditasi organisasi keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program pemberdayaan pemuda pada SKPD pemuda Olahraga dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan prestasi olahraga unggulan daerah • Memfasilitasi akreditasi organisasi keolahragaan
18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan		Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda	Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktifitas dan prestasi olahraga unggulan daerah
18.4	Jumlah Kegiatan olahraga		Terbatasnya kelengkapan peralatan olah raga dan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana keolahragaan.	Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana Olahraga yang memadai dan berkualitas
18.5	Jumlah Lapangan Olahraga		Belum dimanfaatkan sarana dan prasarana olahraga secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan • Perlibatan pihak swasta • perbanyak event kegiatan olahraga
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian			
20.1	Rasio Jumlah	20 Anggota Satpol	• Anggota Satpol PP	• Prioritas status anggota

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
	Polisi Pamong praja per 10.000 penduduk	PP/10.000 Penduduk	sebagain merupakan Tenaga Harian Lepas • Tidak ada Formasi Khusus untuk Penerimaan Pegawai Satpol PP	satpol PP menjadi PNS
20.2	Rasio Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	100 Anggota LINMAS/10.000 Penduduk	Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan linmas	Adanya program perlindungan masyarakat
20.4	Pertumbuhan Ekonomi	Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 7,14 masih berada diatas rata-rata nasional.	- Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota - Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid 19	• Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur menjadi lebih baik • Menjaga dan menciptakan Keamanan yang kondusif • menciptakan Iklim investasi yang semakin baik • memnbuka lapangan kerja baru
20.5	Kemiskinan	Angak kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 14,22% (423.27 ribu), ini diatas rata-rata nasional (10,70%)	- Sebaran penduduk miskin pada pulau-pulau terisolasi dan wilayah Kabupaten/Kota yang belum terjangkau akses transportasi terpencil - Meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat pandemi covid 19	• pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat • perbaikan perumahan masyarakat • penguatan kapasitas masyarakat untuk penguatan ekonomi • membuka/intervensi akses lapangan kerja bagi masyarakat miskin
20.8	Biro Organisasi			
	Persentase Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Penataan dan evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah telah mencapai 100 %	Sebagian organisasi perangkat daerah baru menyesuaikan dengan OTK berdasarkan PP 18 tahun 2016	Mendorong penataan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota harus dibentuk sesuai fungsi dan ukuran yang tepat berdsarkan PP 18 tahun 2016
	Persentase penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru mencapai 100%	Belum adanya penyeragaman pemahaman dalam penyusunan SOP	• Peningkatan pengetahuan tentang SOP • Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan
	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan di 2 Kab/Kota telah mencapai 100%	Belum adanya penyeragaman pemahaman dalam penyusunan rencana capaian SPM dan IKU SKPD	• Peningkatan pengetahuan tentang target kinerja daerah • Penyusunan Rencana Capaian SPM sesuai dengan ketentuan dan target nasional
	Persentase Penyusunan Analisis, Evaluasi Jabatan dan Pola Karir	Penerapan penataan jabatan berdasarkan hasil Analisis, evaluasi Jabatan dan pola karir mencapai 99%	Pelaksanaan penataan jabatan berdasarkan hasil Anjab belum optimal	• Menyiapkan peraturan perundang-undangan di Bidang Anjab • Memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di Bidang Anjab

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
21.	Ketahanan Pangan			
21.1	Regulasi Ketahanan Pangan	1 dokumen regulasi ketahanan pangan pada tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi Ketahanan Pangan masih kurang Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Keamanan Pangan belum Optimal 	Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi Ketahanan Pangan secara Optimal
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
22.1	Pembinaan Kelembagaan PKK	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Kesekretariatan PKK sebesar 20 kegiatan di tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Data kelompok-kelompok binaan Tim Penggerak PKK di Desa masih terbatas. Keterjangkauan wilayah yang sangat sulit menyebabkan biaya pembinaan dari kabupaten-kota membutuhkan biaya yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu difasilitasi kab/kota dalam penyiapan dan pengelolaan data dan informasi PKK di desa dan kelurahan Kab/kota perlu memfasilitasi Tim penggerak PKK dalam melakukan pembinaan Kelompok-kelompok binaan PKK di Desa dan kelurahan
22.2	PKK Aktif	Tim Penggerak PKK yang aktif di Provinsi Sulawesi Tengah aktif di 13 kab/kota dan provinsi sulawesi tengah,	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya fasilitasi pemerintah Kab/kota terhadap pembinaan PKK di Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD Kab/Kota dalam membiayai kegiatan pembinaan PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi Kabupaten Kota dalam melakukan pembinaan Tim Penggerak PKK di Tingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan.
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian			
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produktivitas padi pada Tahun 2019 mencapai 48,92 Kw/Ha mengalami peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya irigasi dan ketersediaan sarana produksi Kekurangan Tenaga kerja Status lahan petani Pengaruh musim tanam 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisasi pertanian Penguatan modal usaha dan pembiayaan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi Pengendalian OPT
1.2	Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan/ peternakan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> Sektor pertanian pada Tahun 2019 mencapai 28,92 %. Perkebunan Tahun 2019 mencapai 14.269.296. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pertumbuhan sektor lain diantara 8 sektor yang menjadi sasaran pengukuran PDRB Laju peningkatan Produksi dan produktivitas Komoditas Perkebunan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan sarana produksi di lokasi Peningkatan transportasi dari sentra produksi Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani Penyediaan sarana pengolahan yang memadai disektor Perkebunan Peningkatan mutu produk sesuai standar yang

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				digunakan
1.3	Cakupan Bina Kelompok petani	Pembinaan kelompok petani dilakukan tersebar merata pada pusat-pusat produksi pertanian yang memiliki kelompok petani	Belum teridentifikasi secara keseluruhan kelompok-kelompok petani di 13 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Badan Koordinasi Penyuluhan yang memberikan penyuluh pada kelompok-kelompok petani. Adanya program pembinaan pertanian kepada kelompok tani
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis	2.948.098,48 Ha (kemampuan RHL/tahun)pada tahun 2019 sebesar 1.385 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi kegiatan tersebar sehingga memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan RHL di Kabupaten/Kota Keterbatasan SDM (Tenaga teknis)di Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pengalokasian dana secara proporsional terkait pengawasan dan pengendalian sesuai lokasi yang tersebar serta penyesuaian Kegiatan sesuai kondisi cuaca/iklim Peningkatan kapasitas SDM Kab/Kota yang dilakukan melalui pembinaan teknis, berupa pendidikan dan pelatihan Aparatur
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1	Kegiatan Usaha Pertambangan	Meningkatnya jumlah Usaha Pertambangan Yang Baik dan Benar Serta Ramah Lingkungan sebanyak 170 IUP	<ul style="list-style-type: none"> Masih panjangnya birokrasi untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan(IUP) 	• .
3.2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, tahun 2019 kontribusi sebesar 12,83%.	Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang, data lokasi tambang rakyat belum teridentifikasi dengan baik.	Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum. Program identifikasi potensi tambang untuk investasi
4.	Pariwisata			
4.1	Kunjungan wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari berbagai negara tercatat pada tahun 2019 sudah 18.500 wisman kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sarana dan prasarana daerah Tujuan Wisata (DTW) Masih banyak DTW baru yang belum terjangkau. Rendahnya promosi pariwisata Sulawesi Tengah. Tempat wisata tertutup dan kunjungan wisatawan tidak berkunjung akibat pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur. sosialisasi DTW di Sulawesi Tengah. Membuka kembali tempat wisata dengan menggunakan pola new normal
4.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Sektor pariwisata telah berkembang, kontribusinya terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sarana dan prasarana daerah Tujuan Wisata (DTW) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW Optimalisasi promosi DTW

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		masuk dalam kelompok jasa-jasa.	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak DTW baru yang belum dikembangkan promosi pariwisata Sulawesi Tengah belum optimal kunjungan wisatawan tidak ada akibat pandemic covid 19 	baru dan perbaikan infrastruktur. <ul style="list-style-type: none"> sosialisasi RIPARPROV di Kabupaten/Kota Membuka kembali tempat wisata dengan menggunakan pola new normal
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1	Produksi Perikanan	Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2019 sebesar 207.062,73 Ton, untuk produksi perikanan budidaya mencapai 1.387.121.67	Keterbatasan Pengetahuan dan Keahlian Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Pasca Panen terutama untuk skala kecil dalam meningkatkan produksi perikanan	Perlu adanya Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah pasca panen
5.2	Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan pada tahun 2019 mencapai 47,27%	Kurang adanya sosialisasi maupun kegiatan tentang pentingnya konsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan Makan Ikan Pameran Produk Hasil Perikanan Penyediaan Produk Olahan Hasil Perikanan
5.3	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2019 mencapai 106.62 poin.		
5.4	Nilai Ekspor (US\$)	Nilai ekspor pada tahun 2019 mencapai US\$.3.227.835.51		
6.	Perdagangan			
6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Ekspor pada tahun 2019 mencapai 21,92%.	<ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan suplai bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dari luar Provinsi Minimnya bangunan pasar sebagai sarana perdagangan Menurunnya kontribusi akibat pandemic covid 19 	<ul style="list-style-type: none"> Arus distribusi bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah lancar Ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat terjamin Kondisi keamanan daerah yang aman dan kondusif Iklm investasi yang mendukung Revitalisasi pasar
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan sebesar 1,743,23 (Juta US\$) pada Tahun 2019		
6.3	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Yang Terlayani di Provinsi Sulawesi Tengah pada usaha informal tersebar pada 13 kabupaten/kota mencapai 120 IKM pada tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> rendahnya kapasitas SDM dalam rangka usaha informal Produk unggulan daerah masih terbatas produksinya 	<ul style="list-style-type: none"> penguatan kapasitas SDM untuk usaha informal Adanya sarana publikasi dan promosi tingkat nasional

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
7.	Perindustrian			
7.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 10,82%.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketrampilan aparatur dan pelaku usaha • Sistem kelembagaan belum optimal • Menurunnya kontribusi akibat pandemic covid 19 	Banyak instansi/lembaga yang menyalurkan bantuan
7.2	Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri pada tahun 2019 sebesar 10,82%.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya sarana produksi • Sarana dan infrastruktur belum memadai • Menurunnya kontribusi akibat pandemic covid 19 	Potensi bahan baku cukup memadai
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH				
I.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita belum teridentifikasi secara administrasi	Upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita	pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita belum teridentifikasi secara administrasi	Upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat
1.3	Produktivitas total daerah	Produktivitas total daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.77.729.892.		
2.	Pertanian			
2.1	Nilai Tukar Petani	Nilai tukar petani pada tahun 2019 adalah 96,01 untuk sub-sektor tanaman pangan.		
2.	Penataan ruang			
2.3	Luas wilayah industri	Luas wilayah industri Tersebar pada kawasan perkotaan dimasing-masing ibu Kota Kabupaten dan Kota	Belum teridentifikasi kawasan industri di Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten/Kota telah menetapkan perda RTRW dan sementara menyusun RDTR untuk beberapa kawasan yang dialokasikan sebagai kawasan industri
2.4	Luas wilayah banjir	Luas wilayah banjir tersebar di beberapa Kabupaten yang memiliki sungai besar	Belum teridentifikasi luar wilayah banjir di 13 Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota telah menetapkan perda RTRW dan sementara menyusun RDTR, pemerintah daerah telah menyusun peta mitigasi bencana
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
3.1	Jenis dan		•	

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
	jumlah bank dan cabang			
3.2	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Jenis dan kelas restoran bervariasi dan umumnya berada di Ibukota Kabupaten dan pintu-pintu keluar pada setiap gugus pulau. Hingga tahun 2016 jumlah restoran di Sulawesi Tengah Mencapai 892.	Terbatasnya SDM, pemahaman dan informasi bisnis restoran	penguatan kapasitas masyarakat untuk usaha, dan bisnis restoran
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel pada tahun 2015 sebanyak 499 unit.	Penginapan dan hotel umumnya berada di Ibukota Kabupaten	Dorongan pemerintah untuk pengembangan pariwisata dan pentingnya kebutuhan hotel untuk aktivitas wisata
4.	Lingkungan hidup			
4.1	Persentase penanganan sampah	Urusan penanganan sampah merupakan tugas SKPD pada 13 kabupaten/kota	Terbatasnya SDM SKPD penanganan sampah di 13 Kabupaten/Kota	Penanganan sampah sudah didistribusikan ke Kabupaten Kota.
4.2	Persentase penduduk berakses air minum		Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
4.3	Pencemaran status mutu air	Jumlah sungai yang dipantau dan ditetapkan status mutu air dan diinformasikan kepada publik sebanyak 4 sungai di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Sarana sampling air tidak tersedia dan masih menggunakan laboratorium luar Kegiatan pemantauan kualitas air bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) 	Diusulkan ke Pemerintah Pusat dan Daerah agar Bapedal mendapat peralatan laboratorium, Anggaran Pemantauan Kualitas Air Sungai mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM
4.4	Pencemaran status mutu udara ambient	Jumlah Kota yang dipantau dan ditetapkan status mutu udara ambient dan diinformasikan kepada publik sebanyak 13 Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan pemantauan Kualitas Udara Ambient sehingga di perlukan Diklat Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambient bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) 	Anggaran Pemantauan Kualitas Udara Ambient mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM
4.5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Jumlah Komisi AMDAL yang dibina dan diawasi dalam pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Belum terbentuk Komisi AMDAL secara keseluruhan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran yang memadai dalam rangka pembinaan Tersedianya SDM dan Kelembagaan yang memenuhi syarat

No	URUSAN /IKK	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
		terdapat 3 yang di awasi		terbentuknya Komisi
4.6	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan di kabupaten/kota yang diidentifikasi, diverifikasi dan ditangani sebanyak 11 kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup • Kurangnya tenaga PPNS bidang lingkungan hidup • Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan kasus lingkungan 	Dibutuhkan anggaran yang memadai karena penegakan hukum lingkungan melibatkan aparat terkait
III.	Fokus Sumber Daya Manusia			
1.	Ketenagakerjaan			
1.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar pada berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah sebesar 0,97.	Belum terdatanya jumlah lulusan S1/S2/S3 pada berbagai universitas di Provinsi Sulawesi Tengah maupun diluar Provinsi Sulawesi Tengah	Penyusunan data base ketenagakerjaan sesuai kelulusan
1.2	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki Integritas dan Kompetensi yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil organisasi • Pengalokasian pegawai pada SKPD tidak merata • Penempatan PNS dalam jabatan struktural belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan • Belum tersedianya dokumen sistem pola karier PNS • Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian secara terintegrasi antar SKPD dan Pemerintah Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan calon PNS harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap organisasi dan menggunakan sistem yang diberlakukan oleh Instansi Pusat • Pendistribusian PNS harus memperhatikan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) • Penyediaan data base guna penyusunan dokumen sistem pola karier secara terintegrasi • Penyediaan data kebutuhan pendidikan formasl pada setiap SKPD
1.3	Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan pengembangan e-government dalam peayanan publik bidang kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SOP dalam pelayanan administrasi kepegawaian • Belum dilakukan survey kepuasan pelayanan publik (Bidang Kepegawaian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian secara online dengan menggunakan IT

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya

yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut.

4.1.1 4.1.1 Urusan Pendidikan

1. Kondisi Geografis Daerah Sulawesi Tengah yang terdiri dari daerah kepulauan dan pedalaman mengakibatkan masih rendahnya akses anak usia sekolah terutama di daerah-daerah terpencil;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas;
3. Kualitas dan Kuantitas guru masih rendah dan distribusinya belum merata;
4. Mutu sekolah yang tidak merata, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah;
5. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masih kurang optimal;
6. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas;
7. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
8. Kemampuan penyediaan layanan Pendidikan Menengah dan khusus relatif masih rendah;
9. Terbatasnya daya tampung dan jangkauan layanan pendidikan;
10. Penguasaan dan pengembangan IPTEK masih rendah;
11. Masih minimnya tingkat partisipasi sekolah anak perempuan di wilayah pedesaan.
12. Berhentinya proses belajar mengajar secara langsung akibat pandemi covid 19
13. Minimnya sarana dan prasarana proses belajar online bagi murid kurang mampu akibat pandemi covid 19

4.1.2 Urusan Kesehatan

1. Sarana dan prasarana kesehatan RSUD Daerah pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima;
2. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal;
3. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih belum mendukung;
4. Penyebaran tenaga medis dan paramedis di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah belum merata;
5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang;
6. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi;
7. Masih tingginya penyebaran penyakit menular seperti malaria, DBD dan ISPA;
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait PHBS, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
9. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Rendah;
10. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah;
11. Status gizi masyarakat masih rendah;
12. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
13. Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas;
14. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
15. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
16. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
17. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;
18. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat mengenai hak reproduksi perempuan;

19. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.
20. Merebaknya pandemic covid 19 berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan

4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan yang kurang mantap masih tinggi terutama jalan kewenangan provinsi;
2. Irigasi pengairan sebagian besar kondisinya menurun;
3. Bangunan sarana prasarana pengendali banjir sungai dan pengamanan abrasi pantai saat ini sangat terbatas jumlahnya;
4. Layanan air baku belum optimal dan merata;
5. Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal;
6. Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat;
7. Rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur;
8. Masih kurangnya sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni;
2. Masih rendah efisiensi dalam pembangunan perumahan;
3. Menurun kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum;
4. Masih terbatas penyedia air minum baik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional);
5. Masih rendah kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak;
6. Penanganan sampah belum optimal;
7. Minim pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional;
8. Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
9. Pembangunan sarana dan fasilitas masih belum spesifik untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki lansia, orang cacat, perempuan menyusui dan anak berkebutuhan khusus, terutama di wilayah publik seperti pasar, rumah sakit, gedung, MCK, puskesmas, dan lainnya.

4.1.5 Urusan Katenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

1. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi;
2. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu;
3. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.1.6 Urusan Sosial

1. Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, KAT);
2. Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat);
3. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada masalah kerawanan sosial;
4. Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan korban pasca konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan;
5. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.
6. Terjadinya disinteraksi akibat dampak pandemi covid 19

4.1.7 Urusan Tenaga Kerja

1. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai;
2. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja;

3. Lapangan kerja yang tersedia sebahagian besar pada pertanian yang kurang diminati oleh para pencari kerja sehingga menimbulkan urbanisasi dari desa ke kota yang membuat masalah baru di perkotaan;
4. Sarana dan prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK belum memadai serta output dari BLK belum sepenuhnya mampu untuk mandiri;
5. Kurangnya jejaringan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi;
6. Minimnya informasi bagi hak ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan tenaga kerja wanita di luar negeri, termasuk perlindungan dan hak perempuan;
7. Minimnya kontrol, monitoring dan evaluasi terhadap sistem kerja pengiriman tenaga kerja keluar daerah maupun luar negeri.
8. Terjadinya PHK dan penutupan lapangan kerja akibat pandemi covid 19

4.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi dan kemampuan penanganannya yang belum optimal;
2. Tingginya jumlah tenaga kerja yang masih dibawah umur;
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal;
4. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang belum optimal;
5. Masih tingginya kasus Perdagangan perempuan dan anak (*Trafficcking*);
6. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender;
7. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi (diatas 2);

4.1.9 Urusan Pangan

1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk ;
2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain;

3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial;
4. Keandalan sistem irigasi semakin menurun;
5. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi;
6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan *upstream* (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;
7. Fenomena gizi buruk di masyarakat masih mengancam.
8. Sulit memenuhi keputusan pangan akibat pandemic covid 19

4.1.10 Urusan Pertanahan

1. Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal
2. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi belum optimal.
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal.
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi belum optimal.
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal.
6. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal.
7. Penyelesaian inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. asalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal.
8. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal.

4.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

1. Belum terintegrasinya program pembangunan sehingga mengabaikan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan melahirkan berbagai konflik kepentingan antara pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara, tanah; berkurangnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan merosotnya keanekaragaman hayati, peningkatan abrasi pantai, banjir, tanah longsor dan berbagai bencana alam, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun kondisi alam;
3. Belum terintegrasinya keterlibatan masyarakat adat dan perempuan adat dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal mengurangi emisi, degradasi dan pencapaian karbon.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah

4.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penyusunan *profile* kependudukan Provinsi belum optimal.

4.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
3. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri;
4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa;

7. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;
9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan tekbologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
10. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;
11. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.

4.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB;
2. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.

4.1.15 Urusan Perhubungan

1. Manajemen moda transportasi (Angkutan Kota Antar Provinsi, Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan kota, Angkutan Desa, dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) belum optimal memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan angkutan yang mudah, murah, aman, nyaman dan selamat;
2. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas jalan, pagar pengaman maupun marka jalan nasional mamupun provinsi;

3. Masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya dibidang transportasi;
4. Belum terbangunnya database perhubungan terutama data sekunder dari kabupaten/kota;
5. Pembinaan perusahaan jasa angkutan laut belum maksimal;
6. Tata ruang perhubungan belum responsive terhadap pengguna jalan termasuk orang cacat.

4.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum optimal;
2. Kesenjangan persepsi antara kalangan birokrasi dengan pihak pers dalam membangun nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan *check and balances*.

4.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

1. Alat kelembagaan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik;
2. Manajemen dalam koperasi masih lemah;
3. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah;
4. Kemampuan usaha koperasi belum mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan swasta;
5. Modal masih terbatas;
6. Pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah masih belum optimal.
7. Terdapat beberapa UKM yang tutup operasi akibat dampak pandemi covid 19

4.1.18 Urusan Penanaman Modal

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah;
2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah;

3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik;
4. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia;
5. Posisi ruang Sulawesi Tengah yang cenderung tidak seunggul posisi ruang Provinsi lainnya di regional Sulawesi khususnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
6. Tertutupnya peluang usaha akibat pandemi covid 19.

4.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih sumberdaya untuk pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan, hal ini berpengaruh pada semua aspek yang terkait dengan pembangunan keolahragaan dan pemuda baik yang bersifat fisik/ sarana dan prasarana maupun aspek sistem pembinaan yang lebih maju dengan berbagai kebutuhannya;
2. Masih rendahnya rasa memiliki dan tanggungjawab pemuda bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang beriman dan berahlak mulia dalam suasana kehidupan yang *pluralistic* serta masih rendahnya jiwa dan semangat sebagai penerus kelangsungan pembangunan daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Derasnya penetrasi tata nilai budaya melalui berbagai macam media yang secara langsung mempengaruhi tata nilai budaya yang selama ini dijunjung dan memberi identitas keramahtamahan, solidaritas, indikasi dampak negatif yang menimbulkan masalah antara lain penggunaan psikotropika dan napza serta berbagai perilaku yang menyimpang berwujud kekerasan, tawuran dan lainnya yang menyimpang dari tata nilai budaya.

4.1.20 Urusan Statistik

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi belum optimal.

4.1.21 Urusan Persandian

1. Kurangnya sarana dan prasarana persandian yang memadai;

2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang persandian masih relatif kurang;
3. Persandian belum menjadi minat dan pilihan karir yang menarik.

4.1.22 Urusan Kebudayaan

8. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;
9. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai- nilai kebudayaan daerah;
10. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah;
11. Lemahnya pendokumentasian sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Sulawesi Tengah.

4.1.23 Urusan Perpustakaan

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu di perpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka;
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan;
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas;
4. Belum optimalnya kebijakan menyangkut perwujudan gerakan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

4.1.24 Urusan Kearsipan

1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas;
2. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal;
3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan;
4. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.

4.1.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;
2. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan;
3. Tata letak (*lay out*) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;
4. Pola tanam tidak teratur dan sepenuhnya mengandalkan alam;
5. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;
6. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;
7. Tekhnologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;
8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal;
9. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;
10. Terbatasnya sarana produksi sepeerti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;
11. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;
12. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di berbagai kawasan di Sulawesi Tengah;
13. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
14. Menurunnya pendapatan nelayan akibat pandemi covid 19

4.1.26 Urusan Pariwisata

1. Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah;
2. Sadar wisata masyarakat masih relatif kurang;
3. Belum ada rencana studi kawasan wisata secara detail;
4. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas;
5. Masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi namun inovatif di lingkungan parawisata;
6. Desain Kampanye wisata masih belum optimal.
7. Tertutupnya Daerah Tujuan Wisata (DTW) akibat pandemi covid 19

4.1.27 Urusan Pertanian

1. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok sejalan dengan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi, selain itu meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun, untuk itu perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna;
2. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani, untuk itu diharapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi;
3. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal;
4. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik;
5. Menurunnya produktivitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim;
6. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani;

7. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;
8. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;
9. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;
10. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi;
11. Tata niaga ternak masih belum optimal;
12. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin.
13. Menurunnya pendapatan petani akibat dampak pandemi covid 19.

4.1.28 Urusan Kehutanan

1. Maraknya pencurian kayu di hutan Negara, khususnya pada areal HPH;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata, carbon trade) di hutan produksi dan hutan lindung masih rendah;
3. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan belum optimal.

4.1.29 Urusan Energi dan sumberdaya Mineral

1. Adanya beberapa Kuasa Pertambangan (KP) yang tumpang tindih antara kuasa pertambangan (KP) dengan kontrak karya (KK) maupun kuasa pertambangan dengan Kawasan Hutan;
2. Maraknya Pertambangan tanpa izin (PETI) di daerah dalam wilayah kontrak karya sehingga di khawatirkan dapat mengganggu lingkungan sekitarnya;
3. Masih terbatasnya data yang akurat mengenai sumber daya mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Air dan Tanah, karena masih kurangnya kegiatan eksplotasi dan studi kelayakan.

4.1.30 Urusan Perdagangan

1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;
2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;
3. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;
4. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/ pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;
5. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu;
6. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memberikan jaminan keamanan dan responsive bagi kebutuhan perempuan, anak dan lansia.
7. Menurunnya pendapatan pedagang akibat dampak pandemi covid 19

4.1.31 Urusan Perindustrian

1. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;
2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;
4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;
5. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;

6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Menurunnya pemasaran hasil industri akibat dampak pandemi covid 19
8. Terjadinya PHK dan tidak adanya rekrutmen tenaga kerja akibat dampak pandemi covid 19

4.1.32 Urusan Transmigrasi

1. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai;
2. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal;
3. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk lokal masih rendah;
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi:
5. Adanya tumpang tindih lahan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah otonom memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi daerah yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan jalannya perekonomian daerah berbasis pada kemampuan fiskal daerah, sumberdaya manusia berkualitas dan mumpuni serta kemampuan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia dalam upaya mendukung terwujudnya kebijakan ekonomi secara nasional. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang merupakan rumusan dari visi dan misi Kepala Daerah, program unggulan dan terpadu daerah serta program lintas bidang dan lintas wilayah yang berasal dari sintesa isu-isu permasalahan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan nasional pada Tahun 2022 di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong tumbuhnya UMKM produktif paska Pandemi Covid-19, mendorong investasi dengan mengundang investor seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBN dilakukan dengan cara memanfaatkan APBN yang berfokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-maritim-forestry dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber

pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2022 lebih ditekankan pada tindakan lanjutan penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kemampuan fiskal daerah khususnya untuk kabupaten yang masih tertinggal, serta tetap memperhatikan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 yang telah memasuki 3 (tiga) tahun (2019-2021), terutama untuk Kota Palu sebagai ibu kota provinsi dan 3 (tiga) kabupaten penyanggah yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa transisi di dalam Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah periode 2016-2021.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang memasuki awal tahun 2021 ini belum dinyatakan berakhir. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2021 masih bersifat ketidakpastian. Walaupun proses distribusi vaksin tahap awal memberikan dampak positif, tetapi masih banyak penolakan yang berpotensi penundaan sehingga dapat menyebabkan pandemi berlarut dan menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi. Menurut analisa Dana Moneter Internasional (IMF) (2021) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen tahun 2021 dan 6 persen di 2022, tetapi dengan konsekuensi harus di dukung oleh kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang membaik.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 atau memasuki periodisasi terakhir tahapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang berfokus pada prioritas pembangunan Sulawesi Tengah yaitu percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Menghadapi tantangan dan permasalahan rekonstruksi paska bencana dan penanggulangan wabah Covid-19, pemerintah Sulawesi Tengah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2021-2026 yang disesuaikan dengan upaya penanggulangan covid-19 serta keberlanjutan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana (Lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan,

- material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;
2. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai.
 3. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
 4. Peningkatan nilai tambah (*add value*) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
 5. Mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya, khususnya UMKM dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah.
 6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita yang mengikuti target nasional tahun 2045 sebesar Rp. 27.000.000,- per kapita per bulan atau Rp. 320.000.000,- per kapita per tahun. Upaya meningkatkan investasi daerah dilakukan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;

7. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.
8. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
9. Membangkitkan kemampuan perekonomian masyarakat dalam masa-masa “new normal” Pandemi Covid-19 dan paska bencana gempa, tsunami dan liquifaksi dengan upaya memulihkan dan menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk belanja operasi ke masyarakat serta belanja lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan;
10. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penanggulangan dan pemulihan kembali kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

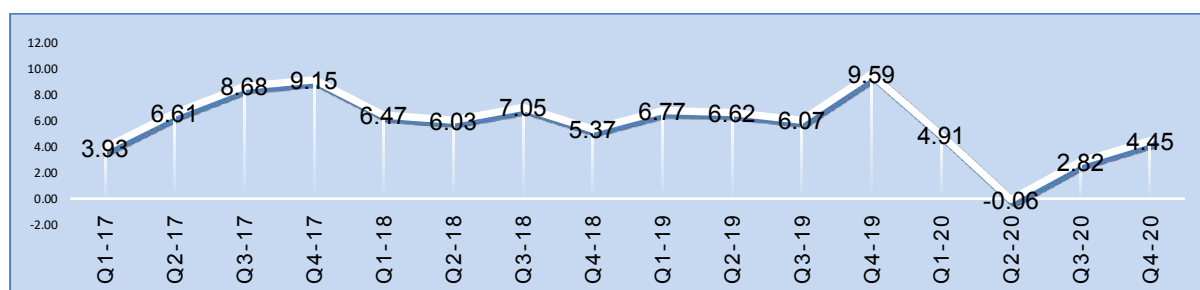
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

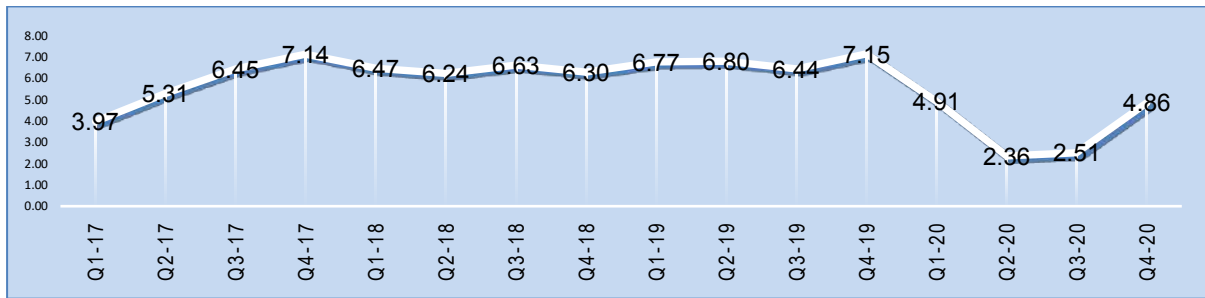
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I dan triwulan II mengalami kontraksi akibat ikut terimbas dampak wabah covid-19 yang melanda dunia. Ekonomi Sulawesi Tengah memiliki masa yang berat akibat terjadinya dua serangan (*double attack*) secara berurutan yaitu dampak yang ditimbulkan Bencana Gempa, Tsunami dan Liquefaksi 28 September 2018 lalu dan selanjutnya wabah covid-19 yang keduanya memiliki dampak besar terhadap kestabilan ekonomi di Sulawesi Tengah terutama pada sub sektor transportasi laut, udara dan darat, pariwisata dan perhotelan, distribusi pangan dan UMKM. Walaupun kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang menurun di awal tahun 2020 tidak membuat kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah juga ikut menurun tetapi sebaliknya terus berupaya untuk menstabilkan kembali kondisi ekonomi yang ada dengan perbaikan kinerja dan disiplin yang tinggi. Indikasinya terlihat dari terlaksananya pembangunan ekonomi di daerah yang sesuai dengan yang direncanakan serta angka pertumbuhan ekonomi yang kembali positif pada triwulan III dan triwulan IV (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2020 S.D. TW 3 2020 Sulawesi Tengah*

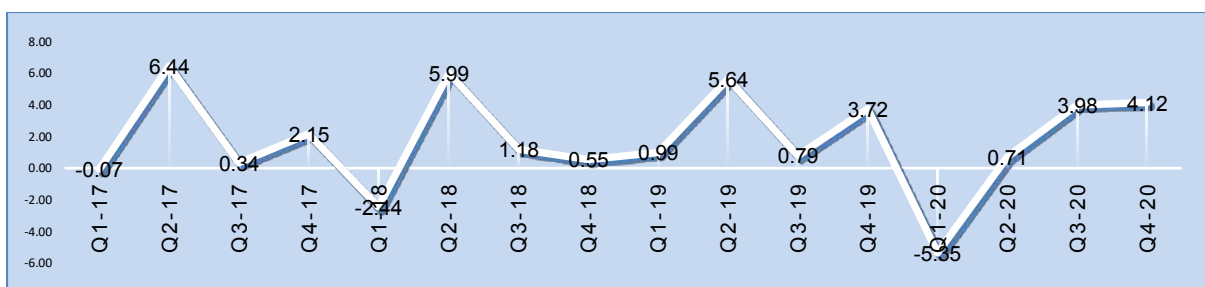
a. Laju Pertumbuhan (y to y)



b. Laju Pertumbuhan (c to c)



c. Laju Pertumbuhan (q to q)



*Sumber : BRS Sulteng, 2021 (Data telah diolah)

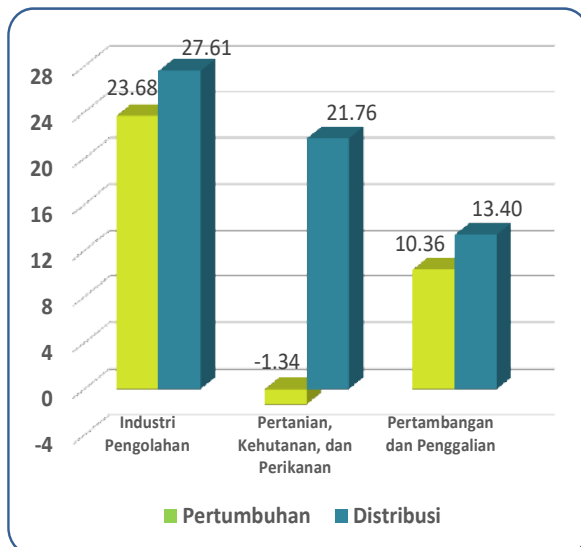
Menurut analisis Bank Dunia pemulihan ekonomi akan terjadi secara berangsur-angsur dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara riil diproyeksikan akan mencapai 4,8% pada tahun 2021. Hal ini diprediksi seiring dengan peningkatan angka konsumsi swasta yang mulai pulih, dan pertumbuhan signifikan akan terjadi pada 6% di tahun 2022. Selain itu, strategi yang digunakan adalah memperluas cakupan program perlindungan sosial, mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat, mempercepat pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat serta perluasan program bantuan sosial secara signifikan dan alokasi belanja lebih diprioritaskan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (*c-to-c*) tumbuh 4,86 persen. Pertumbuhan terjadi pada 9 dari 17 lapangan usaha. Lima lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 10,36

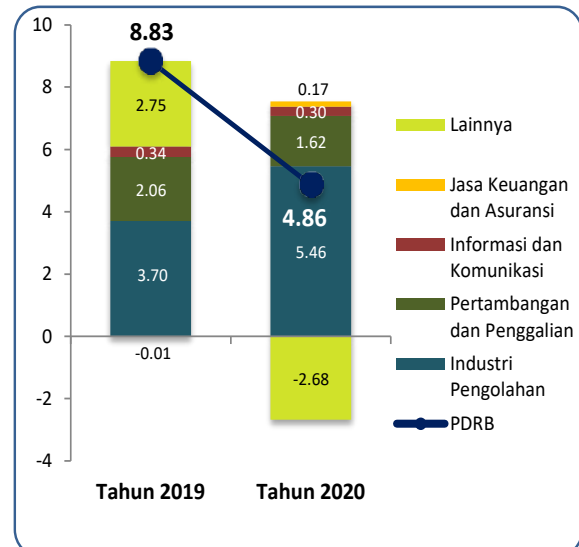
persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11 persen. Sedangkan 8 lapangan usaha mengalami kontraksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,12 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,05 persen; serta Konstruksi sebesar 8,47 persen. (BRS Sulteng, 2020) (Gambar 3.2).

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,86 persen (*c-to-c*) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,46 persen, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,17 persen (Gambar 3.3).

Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 (*c-to-c*)



Gambar 3.3 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (*c-to-c*)



*Sumber : BRS Sulteng, 2021

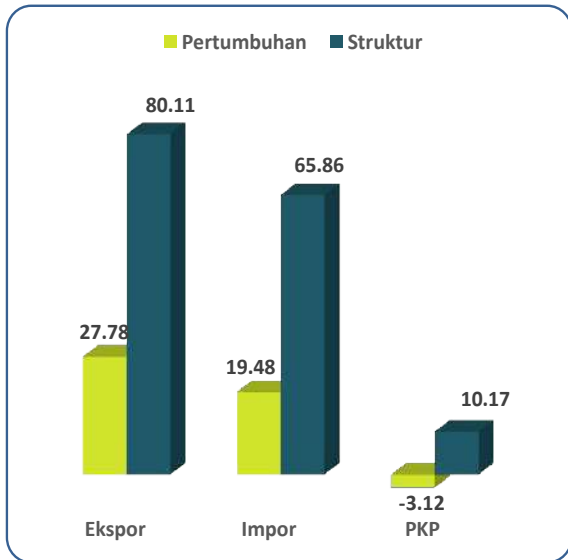
Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat

lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (27,61 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,76 persen); Pertambangan dan Penggalian (13,40 persen); serta Konstruksi (10,14 persen).

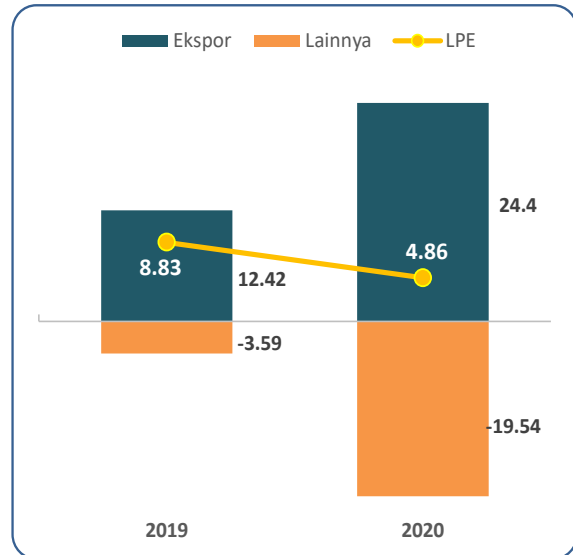
Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya (*cto-c*) mencapai 4,86 persen. Di tengah pandemi Covid-19, kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 27,78 persen mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tetap bergerak positif. Pertumbuhan juga terjadi pada komponen Impor Barang dan Jasa, namun komponen ini merupakan faktor pengurang. Sedangkan komponen yang lain mengalami kontraksi (Gambar 3.4).

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 80,11 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 24,40 persen, sedangkan komponen lain seperti PK-RT, PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi (Gambar 3.5).

Gambar 3.4 Pertumbuhan dan Struktur Beberapa Komponen Tahun 2020 (persen)



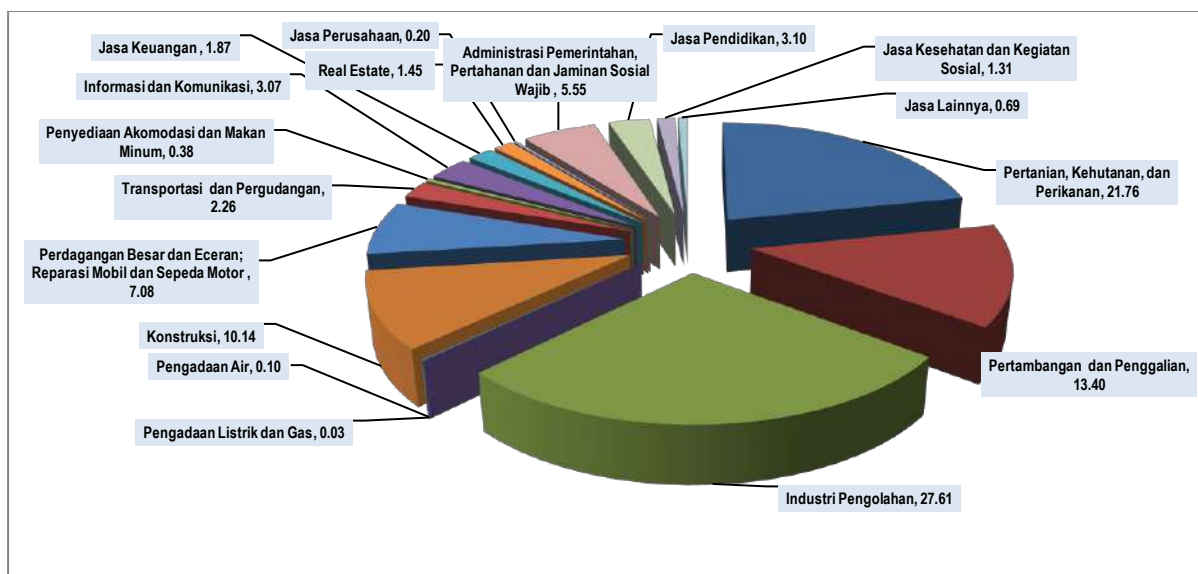
Gambar 3.5 Sumber Pertumbuhan Komponen Tahun 2019-2020 (persen)



*Sumber : BRS Sulteng, 2021

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh 4 lapangan usaha yaitu sub sektor Industri Pengolahan sebesar 27,61 persen; sub sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,76 persen; sub sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,40 persen; dan sub sektor Konstruksi sebesar 10,14 persen (Gambar 3.6).

Gambar 3.6 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen) Triwulan I-IV 2020



*Sumber : BRS Sulteng, 2021

Pada Bulan Desember 2020, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen dari 106,72 pada November 2020 menjadi 107,21 pada Desember 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,15 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (0,90 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,50 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,03 persen), kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,01 persen), serta kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara penurunan indeks harga satu-satunya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Pada saat yang sama, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil (Tabel 3.1).

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah

sebesar 1,62 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,20 persen, sedangkan penurunan indeks tertinggi terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,65 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2020 sebesar 0,09 persen disumbangkan oleh andil kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,27 persen, diikuti oleh kelompok pakaian dan alas kaki (0,03 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,01 persen), serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dengan andil masing-masing di bawah 0,01 persen. Kelompok transportasi memberikan andil negatif sebesar 0,22 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil negatif di bawah 0,01 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran yang relatif stabil. (Tabel 3.1).

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain tarif angkutan udara (0,12 persen), ikan selar (0,12 persen), ikan cakalang (0,10 persen), daging ayam ras (0,05 persen), telur ayam ras (0,03 persen), popok bayi/diapers (0,02 persen), kol putih (0,02 persen), ikan teri (0,02 persen), terong (0,01 persen), dan cumi-cumi (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain emas perhiasan (0,03 persen), kangkung (0,02 persen), blus wanita (0,02 persen), cabai merah (0,02 persen), bayam (0,02 persen), beras (0,02 persen), jeruk nipis (0,01 persen), ikan bandeng (0,01 persen), ikan layang (0,01 persen), dan ikan mujair (0,01 persen) (Tabel 3.2).

Tabel 3.1 HK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Desember 2020****

Kelompok Pengeluaran (1)	Indeks Harga Konsumen				Inflasi Des 2020* (%) (6)	Inflasi Tahun Kalender 2020** (%) (7)	Inflasi Tahun ke Tahun *** (%) (8)	Andil Inflasi (%) (9)
	Des 2019 (2)	Des 2019 (3)	Nov 2020 (4)	Des 2020 (5)				
Umum	105,50	105,50	106,72	107,21	0,46	1,62	1,62	0,46
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	107,25	107,25	110,37	111,64	1,15	4,09	4,09	0,32
2. Pakaian dan Alas Kaki	103,33	103,33	107,14	107,03	-0,10	3,58	3,58	-0,01
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,48	102,48	102,49	102,50	0,01	0,02	0,02	0,00
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,19	102,19	102,70	102,73	0,03	0,53	0,53	0,00
5. Kesehatan	106,56	106,56	108,18	108,19	0,01	1,53	1,53	0,00
6. Transportasi	105,69	105,69	103,07	104,00	0,90	-1,60	-1,60	0,12
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,43	102,43	99,72	99,72	0,00	-2,65	-2,65	0,00
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	100,69	100,69	102,44	102,95	0,50	2,24	2,24	0,01
9. Pendidikan	110,77	110,77	111,48	111,48	0,00	0,64	0,64	0,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	111,74	111,74	114,65	114,65	0,00	2,60	2,60	0,00
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,73	105,73	110,88	111,23	0,32	5,20	5,20	0,02

*) Perubahan IHK bulan Desember 2020 terhadap IHK bulan sebelumnya

**) Perubahan IHK bulan Desember 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019

***) Perubahan IHK bulan Desember 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019

Tabel 3.2 Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Desember 2020*

Komoditas (1)	Andil (%) (2)	Komoditas (3)	Andil (%) (4)
1. Tarif Angkutan Udara	0,12	1. Emas Perhiasan	-0,03
2. Ikan Selar	0,12	2. Kangkung	-0,02
3. Ikan Cakalang	0,10	3. Blus Wanita	-0,02
4. Daging Ayam Ras	0,05	4. Cabai Merah	-0,02
5. Telur Ayam Ras	0,03	5. Bayam	-0,02
6. Popok Bayi/Diapers	0,02	6. Beras	-0,02
7. Kol Putih	0,02	7. Jeruk Nipis	-0,01
8. Ikan Teri	0,02	8. Ikan Bandeng	-0,01
9. Terong	0,01	9. Ikan Layang	-0,01
10. Cumi-Cumi	0,01	10. Ikan Mujair	-0,01

*Sumber: BRS Sulteng, 2021

Perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor. Kompilasi data statistik diperoleh dari data sekunder berupa dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Komoditas andalan ekspor yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik yang dimiliki wilayah Sulawesi Tengah. Adapun negara tujuan ekspor meliputi benua Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Transaksi ekspor dan impor dilakukan melalui beberapa pelabuhan utama yakni Pantoloan, Kolonodale, Luwuk, Poso, dan Banggai.

Nilai ekspor Sulawesi Tengah selama Desember 2020 senilai US\$ 816,82 juta atau naik US\$ 109,34 juta (15,45 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai sebesar ini merupakan ekspor langsung melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 811,40 juta dan provinsi lain senilai US\$ 5,42 juta. Selama Januari-Desember 2020, total nilai ekspor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 7.480,65 juta atau meningkat US\$ 1.587,18 juta (26,93 persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US\$ 5.893,47 juta. Jika dirinci, ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 7.428,46 juta dan provinsi lain senilai US\$ 52,19 juta.

Selama Desember 2020, ekspor Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) didominasi oleh dua kelompok komoditas utama, yaitu kelompok komoditas besi dan baja senilai US\$ 734,88 atau 89,97 persen dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai US\$ 66,60 juta (8,15 persen). Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya relatif kecil masing-masing di bawah 2,00 persen. Adapun Januari-Desember 2020, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$ 6.408,39 juta atau 85,67 persen dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai US\$ 846,90 juta (11,32 persen). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 2,00 persen. (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Perkembangan Ekspor Sulawesi Tengah Menurut Komoditas, Januari – Desember 2020*

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peranan (%)
	November 2020	Desember 2020	Jan-Des 2019	Jan-Des 2020	Nov-Des 2020	Jan-Des 2019-2020	Jan-Des 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Total Ekspor Melalui Sulawesi Tengah	701,48	811,40	5.811,78	7.428,46	15,67	27,82	99,30
1. Kakao	0,00	0,00	16,92	18,71	0,00	10,58	0,25
2. Bijih, kerak dan abu logam	0,00	0,00	113,39	0,00	0,00	-100,00	0,00
3. Bahan bakar mineral	73,66	66,60	1.121,87	846,90	-9,58	-24,51	11,32
4. Bahan kimia anorganik	22,75	9,92	185,51	147,50	-56,40	-20,49	1,97
5. Besi dan baja	605,07	734,88	4.365,54	6.407,92	21,45	46,78	85,66
Total 5 Golongan Barang	701,48	811,40	5.803,23	7.421,03	15,67	27,88	99,20
Golongan Barang Lainnya	0,00	0,00	8,55	7,43	0,00	-13,10	0,10
B. Total Ekspor Melalui Provinsi Lain	6,00	5,42	81,69	52,19	-9,67	-36,11	0,70
1. Ikan dan udang	0,15	0,29	8,67	2,73	93,33	-68,51	0,04
2. Lak, getah, dan damar	0,25	0,14	4,38	1,99	-44,00	-54,57	0,03
3. Berbagai produk kimia	0,16	0,65	12,11	8,88	306,25	-26,67	0,12
4. Kayu dan barang dari kayu	0,49	0,67	91,70	7,24	36,73	-92,10	0,10
5. Besi dan Baja	0,00	0,00	36,52	0,47	0,00	-98,71	0,01
Total 5 Golongan Barang	1,05	1,75	153,38	21,31	66,67	-86,11	0,28
Golongan Barang Lainnya	4,95	3,67	-71,69	30,88	-25,86	-143,07	0,41
Total Ekspor (A+B)	707,48	816,82	5.893,47	7.480,65	15,45	26,93	100,00

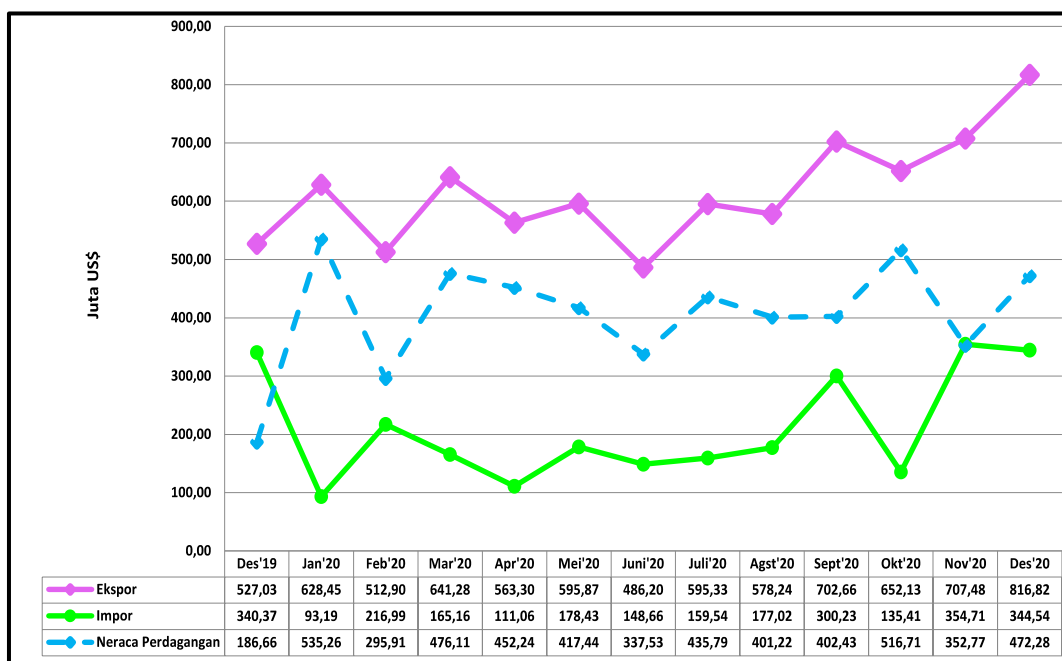
*Sumber: BRS Sulteng, 2021

Selama Januari-Desember 2020, ekspor terbesar Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) ditujukan ke Tiongkok senilai US\$ 4.042,52 juta, diikuti ke Taiwan senilai US\$ 1.350,00 juta, Korea Selatan senilai US\$ 864,76 juta, Malaysia senilai US\$ 315,12 juta, dan Vietnam senilai US\$ 294,527 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut meliputi Tiongkok 54,04 persen, Taiwan 18,05 persen, Korea Selatan 11,56 persen, Malaysia 4,21 persen, dan Vietnam 3,94 persen.

Selama Desember 2020, keseluruhan transaksi ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 811,40 juta, difasilitasi oleh Pelabuhan Kolonodale senilai US\$ 736,13 juta, dan Luwuk senilai US\$ 75,27 juta. Sedangkan ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US\$ 5,42 juta masing-masing melalui Tanjung Perak (Jawa Timur) senilai US\$ 2,45 juta, Tanjung Priok (DKI Jakarta) senilai US\$ 2,52 juta, dan Tanjung Emas (Jawa Tengah)

senilai US\$ 0,40 juta, sisanya senilai US\$ 0.05 juta melalui Makasar. Hal ini berarti pelabuhan muat ekspor di Sulawesi Tengah berperan sebesar 99,34 persen.

Total impor Sulawesi Tengah selama Desember 2020 senilai US\$ 344,54 juta, turun sebesar US\$ 10,17 juta atau 2,86 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Selama Januari-Desember 2020, terjadi penurunan US\$ 749,98 juta atau sebesar 23,92 persen menjadi US\$ 2.384,94 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari neraca perdagangan dengan seluruh negara mitra dagang, Sulawesi Tengah mengalami surplus senilai US\$ 472,28 juta selama Desember 2020 dan surplus senilai US\$ 5.095,71 juta selama Januari-Desember 2020 (Gambar 3.7).



Gambar 3.7 Perkembangan Ekspor dan Impor, Desember 2019 – Desember 2020 (BRS Sulteng, 2021)

Selama Desember 2020, impor Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok komoditas mesin-mesin pesawat mekanik senilai US\$ 90,56 juta (26,28 persen) dan bahan bakar mineral senilai US\$ 69,68 juta (20,22 persen). Selama Januari-Desember 2020, komoditas yang mendominasi impor Sulawesi Tengah yaitu mesin dan pesawat mekanik senilai US\$ 596,10 juta

atau 24,99 persen serta besi dan baja senilai US\$ 556,78 juta atau 23,35 persen dari total impor Sulawesi Tengah.

Adapun pelabuhan bongkar impor di Sulawesi Tengah selama Desember 2020 didominasi Kolonodale senilai US\$ 334,72 juta. Selama Januari-Desember 2020, kontribusi Kolonodale mencapai US\$ 2.348,09 juta (98,45 persen), diikuti oleh Poso senilai US\$ 32,77 juta (1,37 persen), Pantoloan senilai US\$ 2,93 juta (0,12 persen), dan Luwuk senilain US\$ 1,15 juta (0,05 persen).

b. Perkiraan Tahun 2021

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,0 persen setelah masa pandemik covid-19 berakhir, pekerjaan rehab-rekon paska bencana selesai yang diikuti dengan kestabilan ekonomi secara nasional. Proyeksi optimisme memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dapat di tingkatkan pada kisaran lebih dari 7,0 persen dengan asumsi-asumsi, sebagai berikut :

1. Kinerja sektor jasa transportasi, wisata dan perhotelan akan menunjukkan trend positif pada pertengahan dan akhir tahun 2021. Hal ini disebabkan akan terkendalinya wabah Pandemik Covid-19 yang diindikasikan oleh keberhasilan pemerintah provinsi dan daerah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksin covid-19, pengadaan APD, test *PCR*, *Swab* dan *Rapid Test Antigen*, peningkatan pelayanan kesehatan serta bangkitnya kembali transportasi penumpang dan barang lewat udara, laut dan darat terutama di beberapa daerah padat penduduk seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut, selama ini merupakan daerah yang menyokong Sulawesi Tengah pada peluang sektor jasa transportasi darat, laut dan udara; sektor Pariwisata dan Tingkat Hunian Hotel sehingga diharapkan akan ikut menggerakkan roda

ekonomi di Sulawesi Tengah. Ada harapan pada sektor Jasa Makanan dan Restoran yang tetap stabil pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pelayanan jasanya menggunakan jaringan *on-line*. Di akhir tahun 2021 dalam masa era “new normal”, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi berupa edukasi wisata bencana, wisata alam, wisata budaya dan destinasi wisata lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

2. Pada masa “**new normal**” **pandemik covid-19** diupayakan untuk sektor ekonomi seperti subsektor pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Upaya Khusus (UPSUS) terdiri atas UPSUS PAJALA (Padi, Jagung dan Kedelai) dan UPSUS BABE (Bawang Merah dan Cabe) yang dilakukan sebagai penyanggah masa pandemik dan sekaligus mendukung Program Swasembada Pangan Indonesia dan Sulawesi Tengah sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional serta UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) dan Program Unggulan Sulteng Sejuta Sapi (S3) yang dilakukan sebagai dukungan Sulawesi Tengah merealisasikan komitmen pemerintah mengejar swasembada sapi pada tahun 2026 serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida dan lahan pengembalaan.
3. Subsektor perikanan dan kelautan pada masa “new normal” diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif yang ditandai dengan kegiatan ekspor perdana Ikan Tuna Sirip Kuning (*Yellow*

Fin Tuna) asal Sulawesi Tengah pada pertengahan Juni 2020 dengan jumlah 300 Kg via air cargo (kargo udara). Ekspor perikanan didukung oleh mekanisme pemeriksaan yang mengikuti ketentuan protokol covid-19 guna memenuhi permintaan dunia terhadap komoditas perikanan yang tinggi. Selain itu, Sulawesi Tengah telah menerapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai upaya menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyanggah pangan ikani. Sistem Logistik Ikan Nasional yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Ogotua, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala dan PPI Pagimana diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP-RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.

4. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Paska Bencana yang ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Paska Bencana kota/kabupaten yang menjadi acuan rehabilitasi dan pembangunan kembali kerusakan fasilitas umum dan dipertegas masa rehabilitasi dan rekonstruksi termaktub di dalam RPJMN tahun 2019-2024 sebagai salah satu Major Project, diantaranya seperti jembatan Palu V, jalan arteri dan rehabilitasi Prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Tanggul Laut disepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak tsunami.

Disamping itu, untuk wilayah tidak terdampak akan dilakukan pembangunan lanjutan yang bersifat tahunan (multiyears), seperti pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli dan beroperasinya kembali Bandara Tanjung Api di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat tutup pada awal wabah Covid-19 sehingga akan menghidupkan kembali jalur wisata lewat udara ke destinasi Kepulauan Togean selain travel jalur darat dari Kota Palu dan Kota Luwuk menuju Kabupaten Tojouna-una. Pada akhir tahun 2021, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut diharapkan pada tahapan *on-progress* dan dapat segera memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.

5. Investasi diperkirakan meningkat meskipun mengalami perlambatan terutama dalam sektor pertambangan, minyak dan gas bumi yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG yang selain memproduksi gas alam **cair** (liquefied natural gas/LNG) juga memproduksi amonia cair yaitu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam dan produk petrokimia lainnya di Kabupaten Banggai serta industri pengolahan berbasis agro di Palu seperti pengolahan buah kakao, getah damar, arang tempurung kelapa serta membangkitkan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 dilakukan pembenahan kembali paska bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menunjukkan tren positif tetapi masih dalam kondisi beresiko akibat dengan kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan penanggulangan wabah **Pandemi Covid-19**. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan efektif akan sangat menentukan bagaimana pergerakan pertumbuhan ekonomi bergerak naik. Kebijakan-kebijakan itu terutama yang berkenaan dengan **karantina wilayah** yang diikuti dengan pembatasan lalu lintas manusia, **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**, *stay at home (working from home)* dan *social distancing*, **Pemberian Vaksin Covid-19**, **orientasi anggaran penanganan covid dan membangun tingkat kepercayaan masyarakat**. Tetapi kondisi ini, untuk Sulawesi Tengah diperkirakan akan membaik yang ditunjukkan oleh kinerja sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan dan kelautan yang membaik sehingga volume ekspor Sulawesi Tengah juga akan terus meningkat. Selain itu investasi baik dalam sektor pertambangan, industri pengolahan maupun pertanian, perikanan dan kelautan juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan ditopang oleh ekspor, investasi dan konsumsi rumah tangga.
2. Perkembangan jalan mantap nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 96%, terutama akses jalan “kebun kopi” yang dilalui oleh transportasi darat seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi yang semakin membaik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas baik antar wilayah di Sulawesi Tengah maupun akses masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dari

luar wilayah yang selanjutnya akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh positif terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, industri kerajinan tangan dan jasa transportasi.

3. Produksi hasil-hasil pertanian akan terus mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya upaya perbaikan varietas benih melalui sarana perbenihan mandiri yang tidak tergantung dari benih luar, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi dengan ketat hingga sampai pada tingkat petani. Selain itu, peningkatan sub sektor perkebunan melalui upaya pengusulan produksi, produktivitas dan mutu kakao di tahun 2022 melalui pengembangan kawasan kakao (extensifikasi) maupun upaya intensifikasi dengan *re-planting* dan peremajaan. Selain itu, untuk sub sektor peternakan dilaksanakannya UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) serta Program Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan sebagai upaya peningkatan hasil daging ternak dan swasembada pangan asal hewan.
4. Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah di perkirakan akan membaik seiring dengan stabilnya perekonomian nasional dan dunia karena keberhasilan penanggulangan wabah **covid-19**. Pertumbuhan ekonomi akan bangkit dan diharapkan dapat segera dipulihkan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga memberikan efek positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan individu yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks gini. Menurunnya indeks gini diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik sosial dalam masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu, dampak corona virus diharapkan tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor menunjukkan adanya

perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Sehingga bila kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.

5. Kesepakatan kerjasama regional dan pasar bebas, seperti penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjutan kesepakatan AFTA 2015 dan perdagangan bebas dunia (WTO) 2020 yang akan menimbulkan konsekuensi terjadinya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas. Kondisi ini memberikan peluang masuknya investasi asing yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Tantangan yang kemudian muncul adalah kondisi tersebut akan beresiko menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang melimpah sehingga kemudian juga mengancam kelestarian ekosistem. Kondisi tersebut akan diperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai akibat aktivitas investasi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi kerjasama regional dan dunia akan menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga kesempatan kerja yang ada terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri, sebaliknya pencari kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pencari kerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan daya saing tenaga kerja yang kita miliki dari sisi pendidikan dan produktivitasnya masih kalah dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Pengoptimalan sekolah-sekolah kejuruan serta Balai Latihan Kerja (BLK) masih harus dilakukan. Selain itu penguasaan bahasa asing oleh para pencari kerja menjadi syarat yang juga harus dipenuhi.

6. Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalam dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Tantangan-tantangan tersebut diupayakan dapat diselesaikan melalui kerjasama antar wilayah dan kawasan seperti: kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area*) untuk membantu pembangunan sosial-ekonomi dari daerah-daerah yang belum berkembang dan termarginalisasikan serta terpencil.
7. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang telah dipersiapkan semenjak terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2014 telah dinyatakan memenuhi kriteria kesiapan beroperasi dan siap untuk menerima dan melayani investor paska bencana dan masa **“new normal”**. KEK Palu telah diresmikan oleh Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 27 September 2017 dan diperkirakan dapat menarik investasi senilai Rp. 92,4 Trilyun dengan memperkerjakan 97.500 tenaga kerja serta total investasi pembangunan sebesar Rp. 1,7 Trilyun. Oleh karena itu, pada tahun 2020 akan dipacu pembangunan beberapa infastruktur pendukung seperti pembangunan *fly-over* Palu-Pantoloan, jalan Palu *Outer Ring Road*, perluasan Jembatan Tawaeli dan Pembangunan DAM sumber air baku Sungai Wombo. Selama tahapan pembangunan akan merangsang tumbuhnya sektor industri dari investasi asing. KEK Palu diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti

kakao, rumput lau dan rotan. Implikasinya adalah meningkatnya pertumbuhan industri dan jasa pendukung seperti *packaging* (pengemasan), *printing* (percetakan) dan *forwarding* (ekspedisi), serta jasa boga, transportasi, pemondokan, hiburan, perumahan, dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Berkembangnya industri dan jasa pendukung tersebut akan menciptakan lapangan kerja signifikan bagi masyarakat di sekitar KEK. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja akan menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

8. Pembangunan smelter di Kawasan Industri Morowali Utara dan Morowali dengan kapasitas 300.000 ton dan PLTU kapasitas 300 Mega Watt dan pembangunan industri *stainless steel* dengan kapasitas 2 juta ton diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah ekspor sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa konstruksi dan transportasi di tahun 2022.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Terbitnya Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kewenangan yang diterima Pemerintah Daerah semakin luas sehingga potensi keuangan harus dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan efektif berlandaskan anggaran berbasis kinerja. Sementara itu, tantangan dan prospek perekonomian tahun 2021-2022 yang masih dalam masa pandemi Covid-19 mengharuskan adanya kebijakan yang tepat pada keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Hal ini berarti keuangan daerah harus dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik dengan perubahan kebijakan anggaran tidak berdasarkan *money follow function* tapi *money follow program* dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat

ini proses penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 berada pada tahap penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sehingga untuk kapasitas fiskal daerah akan mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan sehingga daerah diharap mampu membiayai keuangannya secara mandiri, kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi merupakan indikator penentu penurunan ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat sehingga daerah memiliki dana yang signifikan dalam rangka belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk besaran Dana Alokasi Umum

(DAU) harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal maupun situasi perekonomian nasional, sehingga perhitungan DAU diasumsikan sama dengan target tahun 2020, demikian halnya dengan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka pendapatan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.4.804.423.294.890,00 naik sebesar 8,5% dibandingkan target tahun 2021. Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2020, target tahun 2021 serta proyeksi Tahun 2022, disajikan pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Tahun Anggaran 2022
1.	Pendapatan Daerah	4.193.577.257.416,07	4.401.390.000.000	4.804.423.294.890,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.122.918.598.875,07	1.344.470.000.000	1.560.202.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	914.780.331.698,60	1.105.930.000.000	1.147.500.000.000,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.690.106.655,58	16.490.000.000	19.030.000.000,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.914.954.430,00	24.150.000.000	195.172.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	171.533.206.090,89	197.900.000.000	198.500.000.000,00
1.1.4.1	Pendapatan BLUD		166.000.000.000	192.900.000.000,00
1.1.4.2	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		31.900.000.000	5.600.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	3.030.626.794.224,00	3.011.885.000.000	3.194.221.294.890,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.030.626.794.224,00	3.011.885.000.000	3.194.221.294.890,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	89.136.505.394,00	213.160.000.000	220.690.000.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.488.847.818.000,00	1.545.210.000.000	1.726.091.294.890,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	1.265.857.865.620,00	1.253.515.000.000	1.247.440.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.031.864.317,00	45.035.000.000	50.000.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.422.159.791,00	-	-
1.3.2	Pendapatan Lainnya/DID	24.928.624.000,00	45.035.000.000	50.000.000.000,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemda	681.080.526,00	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah, 2021

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana. Belanja daerah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.4.297.164.739.359,00 atau 16,73% lebih besar dibandingkan realisasi belanja tahun 2020. Sedangkan target belanja pada tahun 2022 diproyeksikan menjadi Rp.4.819.423.294.890,00, atau naik sebesar 11,6% dibandingkan target tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2020-2022 disajikan pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Tahun Anggaran 2022
2	BELANJA	3.681.393.573.030,05	4.297.164.739.359,00	4.819.423.294.890,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.584.046.553.521,10	3.277.818.253.049,00	3.608.659.873.004,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.319.263.419.047,00	1.473.828.621.999,00	1.567.565.752.669,50
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	870.986.391.444,10	1.256.900.803.312,00	1.440.436.072.733,90
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah	349.346.000.000,00	543.408.827.738,00	597.369.047.600,60
2.1.6	Belanja Sosial	1.191.500.000,00	3.680.000.000,00	3.289.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	43.259.243.030,00		
2.2	BELANJA MODAL	667.462.860.512,95	526.504.611.829,00	699.263.421.886,00
2.2.1	Belanja Tanah	835.750.000,00	170.000.000,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	230.251.544.927,00	119.555.714.828,00	109.405.000.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	244.446.890.196,95	180.919.804.833,00	44.000.000.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.007.593.399,00	203.936.503.168,00	540.358.421.886,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	44.921.081.990,00	21.922.589.000,00	5.500.000.000,00
	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.501.930.692,00	53.350.000.000,00	50.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.501.930.692,00	53.350.000.000,00	50.000.000.000,00
3	TRANSFER	427.382.228.304,00	439.491.874.481,00	461.500.000.000,00
3.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	427.382.228.304,00	439.491.874.481,00	460.500.000.000,00
3.1.1	Bagi Hasil Pajak ke	427.382.228.304,00	431.187.100.000,00	460.000.000.000,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Tahun Anggaran 2022
	Kabupaten/Kota			
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		8.304.774.481,00	1.500.000.000,00

Sumber: BPKAD Prov. Sulawesi Tengah, 2021

3.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Distribusi pembiayaan daerah berdasarkan data realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Tahun Anggaran 2022
4	PEMBIAYAAN DAERAH			
4.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	439.594.405.001,99	215.194.536.268,00	50.000.000.000,00
4.1.1	Penggunaan SILPA	439.594.405.001,99	215.194.536.268,00	50.000.000.000,00
4.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.038.000.000,00	-	35.000.000.000,00
4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	39.038.000.000,00	-	35.000.000.000,00

Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp439.594.405.001,99 yang merupakan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran 2019, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp39.038.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal daerah sehingga total pembiayaan Netto sebesar Rp400.556.405.001,99.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp215.194.536.268,00 dan tidak ada pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2021. Sedangkan Penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2022 diproyeksikan menurun yakni hanya sebesar Rp50.000.000.000,00, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal daerah diproyeksikan sebesar Rp35.000.000.000,00.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu ” **Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**”, dengan serangkaian misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Visi pembangunan ini masih dapat merujuk pada Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu ”**Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan**”. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sendiri mengusung Tema pembangunan nasional yaitu ” **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Dengan fokus pada empat hal yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Sedangkan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, adalah **Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi**.

Sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2022, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	1.1. Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi	1.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 1.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 1.1.3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
	1.2. Meningkatnya kualitas Manusia melalui pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	1.2.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 1.2.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan 1.2.3. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
	1.3. Meningkatnya peran pemuda dan Daya saing Keolahragaan	1.3.1. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM	2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1.1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2.1.2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi DPRD 2.1.3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi

MISI	TUJUAN	SASARAN
		keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD
	2.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif	2.2.1. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien 2.2.2. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah
	2.3 Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	2.3.1. Meningkatnya peran BUMD dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya ekonomi 2.3.2. Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD 2.3.3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
	2.4 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.4.1. Terwujudnya Keluarga yang berkualitas melalui Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk 2.4.2. Terwujudnya Pemberdayaan ekonomi keluarga 2.4.3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penyediaan informasi kependudukan
	2.5 Meningkatnya kualitas Pelayanan	2.5.1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan, Perlindungan,

MISI	TUJUAN	SASARAN
	dan pengelolaan Kearsipan	Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi
	2.6 Meningkatnya pelayanan Penghubung dalam mendukung Tugas Pemerintahan	2.6.1. Meningkatkan Kualitas pelayanan penghubung kepada Aparatur dan Masyarakat
	2.7 Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	2.7.1. Terwujudnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah 2.7.2. Terwujudnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian 2.7.3. Terwujudnya penyusunan dan penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas
	2.8 Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	2.8.1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 2.8.2. Meningkatnya pembinaan keagamaan di tengah masyarakat
	2.9 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Demokrasi	2.9.1. Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.9.2. Meningkatkan Peran Partai Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik 2.9.3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	3.1 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<p>3.1.1. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja</p> <p>3.1.2. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa</p> <p>3.1.3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah perikanan dan kelautan</p> <p>3.1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha Perikanan</p> <p>3.1.5. Meningkatnya kepedulian terhadap masalah social Masyarakat</p> <p>3.1.6. Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana</p>
	3.2 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas keluarga	<p>3.2.1. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan</p> <p>3.2.2. Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga</p>
	3.3 Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM melalui	3.3.1. Meningkatnya nilai tambah UMKM dan Koperasi

MISI	TUJUAN	SASARAN
	penguatan kelembagaan	
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	4.1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah	<p>4.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Jalan</p> <p>4.1.2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut</p> <p>4.1.3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir</p> <p>4.1.4. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum</p> <p>4.1.5. Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas</p>
	4.2 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	4.2.1. Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan Permukiman
	4.3 Meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan Pemukiman	4.3.1. Terwujudnya Penyediaan Rumah dan relokasi bagi Korban Bencana
	4.4 Meningkatkan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan	4.4.1. Meningkatnya akses terhadap ketenagalistrikan
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan	5.1 Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang merata dan	5.1.1. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi guna pemerataan pembangunan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Berkeadilan	berkeadilan	5.1.2. Meningkatkan Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan	6.1 Terpeliharanya harmonisasi manusia dengan manusia	6.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 6.1.2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana 6.1.3. Meningkatkan Pelayanan Izin Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 6.1.4. Terlaksananya penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Garapan dan Bangunan pemerintah 6.1.5. Mewujudkan Penetapan Tanah Ulayat dan Penatagunaan Tanah Kosong
	6.2. Terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan	6.2.1. Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	6.3. Terwujudnya Pengelolaan hutan dan Sungai untuk menjamin terciptanya keseimbangan	6.3.1. Meningkatkan Pengelolaan, Pemanfaatan, Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung

MISI	TUJUAN	SASARAN
	n ekosistem	6.3.2. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem lahan Basah 6.3.3. Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)
	6.4 Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	6.4.1. Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	6.5 Terwujudnya Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan yang Berbudaya	6.5.1. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai Budaya Lokal 6.5.2. Terwujudnya Pengembangan Kesenian Daerah 6.5.3 Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya
7. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	7.1 Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan	7.1.1. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	7.2 Terwujudnya Peningkatan produksi industri pengolahan dan IKM.	7.2.1. Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan IKM
	7.3 Terwujudnya pengelolaan kawasan strategis	7.3.1. Meningkatnya nilai tambah sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan

MISI	TUJUAN	SASARAN
	pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	ekonomi baru
	7.4 Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah	7.4.1. Meningkatnya Fasilitas/insentif Kemudahan Penanaman Modal dan Peluang Usaha
	7.5 Meningkatnya Distribusi dan Penyediaan Barang Pokok dan Barang penting lainnya	7.5.1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan pengendalian ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya 7.5.2. Meningkatkan promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 7.5.3. Meningkatkan pengembangan Ekspor, Perlindungan Konsumen dan standarisasi mutu
	7.6 Meningkatnya Penanganan Kerawanan dan Kemandirian Pangan Daerah	7.6.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 7.6.2. Meningkatkan Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan
8. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	8.1 Terwujudnya Pembinaan dan Perlindungan Bahasa	8.1.1. Meningkatnya apresiasi terhadap Bahasa dan Sastra Daerah
	8.2 Terwujudnya pemenuhan standar	8.2.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetaraan dan

MISI	TUJUAN	SASARAN
	<p>pelayanan minimal bidang Pendidikan</p>	<p>penyandang disabilitas</p>
	<p>8.3 Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dan perizinan Farmasi</p>	<p>8.3.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan</p> <p>8.3.2. Meningkatnya pelayanan perizinan Farmasi dan Obat Tradisional</p>
	<p>8.4 Meningkatnya peran Perpustakaan guna menunjang peningkatan kualitas SDM</p>	<p>8.4.1. Terwujudnya standar nasional pembinaan Perpustakaan dan Pelestaria Naskah Kuno</p>
<p>9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah</p>	<p>9.1 Terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB)</p>	<p>9.1.1. Terwujudnya percepatan desentralisasi pelayanan publik</p>
	<p>9.2 Terwujudnya Penegasan dan pengamanan Batas Wilayah</p>	<p>9.2.1. Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan dalam rangka Penegasan dan Pengamanan Batas Wilayah</p>
	<p>9.3 Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas</p>	<p>9.3.1. Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan</p>
	<p>9.4 Meningkatnya Koordinasi perencanaan pembangunan</p>	<p>9.4.1. Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p>

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2022 diarahkan pada **“Peningkatan pelayanan dan pemerataan pelayanan Dasar berbasis digital dan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada**

masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah” dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan;
2. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
3. Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;
4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.
5. Percepatan penanganan COVID-19

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada Korban Bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi; Jumlah korban bencana/Pengungsi mencapai 82.775 jiwa, Total Kerusakan/Kerugian mencapai Rp 24,157 triliun, Rumah Rusak mencapai 67.310 unit, Sekolah Rusak mencapai 2.736 unit, Kebutuhan Rehabilitasi mencapai Rp 36,427 triliun, Kebutuhan Hunian Tetap mencapai 8.788 unit. Selama dua tahun pasca 28S2018, para penyintas ada yang mengalami *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD) berbagai tingkatan kejiwaan. Permasalahan penyintas belum rampung hingga saat ini. Meluncurkan Program Padat Karya Penyintas, Beasiswa SLTA dan Perguruan Tinggi anak korban penyintas, Program Ketrampilan TTG penyintas, Pemenuhan Hak-Hak keperdataan
2. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
Diharapkan akan terbangun kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi Sulteng, serta beberapa kabupaten dalam upaya untuk mewujudkan: SMK dan Politeknik Perikanan di Kabupaten Tolitoli, SMK dan Politeknik Perikanan di Tambu yang terpadu dengan pelabuhan Ferry yang melayani arus barang menuju IKN melalui Tol Tambu-Kasimbar, SMK Perikanan dan Politeknik Perikanan di Kabupaten Parigi Moutong, Politeknik Agroindustri di Kabupaten Sigi

yang melayani pasar IKN melalui Palu-Bangga-Banggaiba Pasangkayu ke IKN, Politehnik Pertambangan LNG di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, SMK dan Politehnik Perikanan di Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, serta Politehnik Perikanan di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;

3. Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;
4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.;
5. Percepatan penanganan COVID-19

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2022 serta perwujudan 7 Agenda Pembangunan Nasional, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar					
1.1. Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi	1.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1.1.1.1. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum dan kejuruan	a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal sesuai kewenangan provinsi b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi c. Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengembangan kurikulum 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	1.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1.1.2.1. Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	a. Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah b. Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/bidang studi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidik dan tenaga kependidikan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	1.1.3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	1.1.3.1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
1.2. Meningkatnya kualitas Manusia melalui pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	1.2.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1.2.1.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<p>pendidikan menengah</p> <p>a. Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan UKBM dan Peran serta Masyarakat</p> <p>d. Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga Miskin dan penyandang masalah Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.2.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	1.2.2.1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	<p>a. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas</p> <p>b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.2.3. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	1.2.3.1. Meningkatkan status gizi masyarakat dan Jaminan kesehatan Ibu Hamil dan Balita	<p>a. Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita</p> <p>b. Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak</p> <p>c. Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil dan Balita bagi masyarakat miskin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.3. Meningkatnya peran pemuda dan Daya saing Keolahragaan	1.3.1. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga	1.3.1.1. Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga	a. Pemberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan b. Meningkatkan Partisipasi dan pemenuhan hak Pemuda c. Meningkatkan pembinaan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.3.1.2. Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan	a. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kepramukaan b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM					
2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1.1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	2.1.1.1. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA) b. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	SUB BIDANG PERENCANAAN SKPD
	2.1.2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	2.1.2.1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	a. Menyediakan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	SUB BIDANG KEUANGAN SKPD

	SKPD (penyediaan dan pelaporan)		
2.1.2.2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Pengadaan Aset pada SKPD	<p>a. Menyusun perencanaan kebutuhan Barang dalam menunjang Tusi SKPD</p> <p>b. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>c. Melaksanakan pengadaan kendaraan, Peralatan dan sarana prasarana pendukung lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	SUB BIDANG ASSET SKPD
2.1.2.3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	<p>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna menunjang Disiplin pegawai</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawian</p> <p>c. Melaksanakan monev dan penilaian kinerja Pegawai</p> <p>d. Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat guna mendukung pelaksanaan Tusi Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 	SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SKPD
2.1.2.4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	<p>a. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>b. Meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi 	SUB BIDANG UMUM SKPD

	<p>penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetakan/penggandaan serta bahan lainnya</p> <p>c. Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD</p> <p>d. Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD</p>	Umum Perangkat Daerah	
2.1.2.5. Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa penunjang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	<p>a. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan pelayanan umum kantor lainnya</p> <p>b. Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan, Mesin dan aset Tetap lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	SUB BIDANG UMUM SKPD
2.1.2.6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah	<p>a. Melaksanakan Perencanaan dan penetapan wajib retribusi daerah</p> <p>b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah</p> <p>c. Melaksanakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah 	SKPD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

		Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah		
	2.1.2.7. Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD	a. Mengoptimalkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 	SEKRETARIAT DAERAH
2.1.3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD	2.1.3.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional pimpinan daerah	<p>a. Melaksanakan administrasi keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah</p> <p>b. Memfasilitasi penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 	SEKRETARIAT DAERAH
	2.1.3.2. Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah	<p>a. Melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah</p> <p>b. Memfasilitasi Komunikasi dan pengelolaan Dokumen Pimpinan</p> <p>c. Memfasilitasi pengelolaan keprotokolan Kepala/wakil kepala Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah ✓ Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ✓ Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 	SEKRETARIAT DAERAH
	2.1.3.3. Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	<p>a. Meningkatkan layanan administrasi keuangan DPRD</p> <p>b. Meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Layanan 	SEKRETARIAT DPRD

			penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD c. Memfasilitasi Fraksi dan rapat-rapat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ✓ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	
2.2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif	2.2.2. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	2.2.2.1. Peningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif	• Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		2.2.2.2. Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana	a. Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi	• Program Penataan Organisasi	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		2.1.1.3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah	a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN b. Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN c. Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		2.1.1.4. Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan	a. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah b. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan	• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

			pembangunan		
	2.1.2. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah	2.1.2.1. Mengoptimalkan peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasn oleh masyarakat	a. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) b. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	• Program Penyelenggaraan Pengawasan	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		2.1.2.2. Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi	a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan b. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi	• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		2.1.2.3. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Mengoptimalkan pengawasan dan kapasitas DPRD b. Mengefektifkan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi daerah	• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD
		2.1.2.4. Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa	a. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa b. Meningkatkan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik	• Program Kebijakan dan Pelayanan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
2.3. Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan	2.3.1. Meningkatnya peran BUMD dan kerjasama dengan berbagai	2.2.1.1. Meningkatkan Pengelolaan, kebijakan dan koordinasi Perekonomian, SDA,	a. Meningkatkan Fasilitasi pengelolaan kebijakan bidang perekonomian b. Meningkatkan	• Program Perekonomian dan Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT

keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	pihak dalam pengelolaan sumber daya ekonomi	BUMD dan BLU	Koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang SDA c. Meningkatkan koordinasi dan monev pengelolaan BUMD dan BLUD		DAERAH
	2.3.2. Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	2.3.2.3. Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah	a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
	2.3.3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	2.3.3.3. Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	a. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah b. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah	• Program Pengelolaan Keaunagan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
		2.3.3.4. Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolan barang milik daerah	a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah b. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah	• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
2.4. Meningkatnya Pelayanan Keluarga	2.4.1. Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	2.4.1.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dan	a. Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi	• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN

Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	melalui Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk	pembinaan kesehatan reproduksi	b. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.4.2. Terwujudnya Pemberdayaan ekonomi keluarga	2.4.2.3. Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	a. Meningkatkan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
	2.4.3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penyediaan informasi kependudukan	2.4.3.3. Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pendaftaran penduduk b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran penduduk c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk	• Program Pendaftaran Penduduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.4.3.4. Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan informasi dan penyediaan data Kependudukan	a. Melaksanakan penataan informasi administrasi kependudukan b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi Informasi dan Data Kependudukan c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Melaksanakan	• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

			Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan		
		2.4.3.5. Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pencatatan sipil b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pencatatan sipil c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pencatatan sipil	• Program Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.5. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	2.5.1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	2.5.1.3. Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	a. Melaksanakan Pengelolaan arsip dinamis dan statis b. Menyediakan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	• Program Pengelolaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
		2.5.1.4. Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Memulihkan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana b. Melaksanakan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	• Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip • Program Perizinan Penggunaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.6. Meningkatnya pelayanan Penghubung dalam mendukung Tugas	2.6.1. Meningkatkan Kualitas pelayanan penghubung kepada Aparatur dan Masyarakat	2.6.1.3. Meningkatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Seni Budaya serta pelayanan	a. Melaksanakan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran produk unggulan	• Program Pelayanan Penghubung	PENGELOLAAN PENGHUBUNG

Pemerintahan		penghubung lainnya	dan Seni Budaya c. Koordinasi pelaksanaan pelayanan Penghubung		
--------------	--	--------------------	---	--	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
2.7. Meningkatnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	2.7.1. Terwujudnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	2.7.1.3. Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	a. Perumuskan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik b. Melaksanakan pelayanan publik melalui sistem terintegrasi	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.7.1.4. Mengoptimalkan pengelolaan Anggaran pemerintah berbasis elektronik dan tatalaksana e-government	a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah d. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.7.2. Terwujudnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan	2.7.2.3. Mengoptimalkan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	a. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi b. Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah Berbasis	• Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

	persandian		Elektronik dan non elektronik c. Menyelenggarakan Jaringan Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
--	------------	--	---	--	--

	2.7.3. Terwujudnya penyusunan dan penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas	2.7.3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi	a. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sektoral b. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral c. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
--	---	---	--	--	--------------------------------------

2.8. Terwujudnya a. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	2.8.1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	2.8.1.3. Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	a. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah b. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM	• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
---	--	---	--	---	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
	2.8.2. Meningkatkan pembinaan keagamaan di tengah	2.8.2.3. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan kerukunan dalam kehidupan	a. Mengintensifkan pembinaan lembaga keagamaan b. Memfasilitasi forum	• Program Kesejahteraan Rakyat	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

	masyarakat	masyarakat	dialog antar umat beragama		
2.9. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan pembangunan Demokrasi	2.9.1. Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.9.1.3. Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	a. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara b. Koordinasi dan Monev bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.9.2. Meningkatkan Peran Partai Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	2.9.2.3. Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	a. Menyusun Kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di daerah b. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan politik, Partai Politik dan Pemilu	• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.9.3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.9.3.3. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Menyusun kebijakan dan pemberdayaan Ormas b. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas	• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			2.9.3.4. Merumuskan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosbud	a. Memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama b. Melaksanakan koordinasi ketahanan Ekonomi dan Sosbud	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan					
3.1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3.1.1. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja	3.1.1.1. Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja	a. Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS d. Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja e. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Pengawasan Ketenagakerjaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		3.1.1.2. Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi	a. Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	3.1.2. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	3.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan	a. Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	3.1.3. Meningkatnya	3.1.3.1. Meningkatkan nilai	a. Memberikan Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan 	URUSAN PILIHAN

produksi dan nilai tambah perikanan dan kelautan	produksi perikanan tangkap	kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap c. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Perikanan Tangkap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.1.3.2. Meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya	a. Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Budidaya d. Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi	• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.1.4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha Perikanan	3.1.4.1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan perikanan dan kelautan b. Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran c. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota d. Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi dan Monev terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

		3.1.4.2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan	a. Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan b. Melakukan pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	• Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		3.1.4.3. Memberdayakan masyarakat dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagan masyarakat pesisir b. Memberikan pendampingan, akses teknologi informasi dan pelatihan	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.1.4.4. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	a. Menetapkan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil b. Melaksanakan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil c. Memfasilitasi penerbitan dan pemberian Izin Pengelolaan Ruang Laut d. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pendampingan, akses teknologi dan informasi	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.1.5. Meningkatnya	3.1.5.1. Mewujudkan	a. Pemberdayaan potensi	• Program Pemberdayaan	URUSAN PEMERINTAHAN

	keperdulian terhadap masalah sosial masyarakat	pemberdayaan sosial dan penanganan tindak kekerasan	kesejahteraan sosial dan penanganan migran korban tindak kekerasan	Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	BIDANG SOSIAL
		3.1.5.2. Melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat penyandang masalah sosial dasar dan PMKS	a. Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar b. Melaksanakan rehabilitasi Lansia, Gelandangan dan PMKS lainnya	• Program Rehabilitasi Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		3.1.5.3. Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin	a. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga b. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	3.1.6. Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	3.1.6.1. Mewujudkan Penanganan korban bencana alam dan sosial secara terpadu	a. Penyediaan Sandang dan Penampungan pengungsi b. Penanganan kelompok rentan dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak	• Program Penanganan Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
3.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas keluarga	3.2.1. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	3.2.1.1. Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan

	3.2.2. Terwujudnya perlindungan perempuan/anak dan peningkatan kualitas keluarga	3.2.2.1. Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		3.2.2.2. Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	a. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan c. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas keluarga	3.3.1. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	3.3.1.1. Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	d. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan e. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan f. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		3.3.2. Terwujudnya perlindungan perempuan/anak dan peningkatan kualitas keluarga	3.3.2.1. Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan	c. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan d. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak

		anak			
		3.3.2.2. Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	d. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan f. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.4. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan	3.4.1. Meningkatnya nilai tambah UMKM dan Koperasi	3.4.1.1. Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha koperasi c. Meningkatkan SDM pengelola koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		3.4.1.2. Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan	a. Memfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Anggota/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		3.4.1.3. Meningkatkan peran UMKM melalui pemberdayaan dan	a. Mengoptimalkan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

		pengembangan usaha	b. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	• Program Pengembangan UMKM	USAHA KECIL DAN MENENGAH
--	--	--------------------	---	-----------------------------	--------------------------

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah					
4.1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah	4.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	4.1.1.1. Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas	a. Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan dan pembangunan/pemeliharaan jembatan b. Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan c. Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	• Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Konstruksi	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	4.1.2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut	4.1.2.1. Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat	a. Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan perlengkapan jalan b. Meningkatkan pelayanan dan pengamanan Lalulintas	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		4.1.2.2. Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut, sungai dan danau Kewenangan Provinsi b. Pembangunan Pelabuhan Penumpang Regional	• Program Pengelolaan Pelayaran	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	4.1.3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan	4.1.3.1. Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan	a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai b. Pembangunan,	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN

	sungai guna mencegah terjadinya banjir	air baku	rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya c. Pengelolaan penyediaan air baku d. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder e. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
--	--	----------	---	--	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
	4.1.4. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	4.1.4.1. Meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota	a. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM b. Mmemfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM d. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	4.1.5. Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	4.1.5.1. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah	a. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional b. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		4.1.5.2. Meningkatkan penyediaan drainase	a. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan	• Program Pengelolaan dan Pengembangan	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG

		dan sarana pendukungnya	b. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase	Sistem Drainase	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	4.2.1. Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	4.2.1.1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis	a. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah b. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Permukiman • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		4.2.1.2. Meningkatkan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata ruang provinsi	a. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang b. Peningkatan Peran Masyarakat dan Sistem Informasi Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.3. Meningkatnya penyediaan perumahan dan penataan kawasan Permukiman	4.3.1. Terwujudnya Penyediaan Rumah dan relokasi bagi Korban Bencana	4.3.1.1. Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah akibat bencana	a. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana b. Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Perumahan 	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		4.3.1.2. Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum	a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di kawasan permukiman b. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang Perumahan c. Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) • Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, 	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

			bencana	Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
--	--	--	---------	---	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		4.3.1.3. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	a. Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan b. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA c. Penyediaan sarana dan prasarana dan Fasilitas kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota	• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah dan konektivitas wilayah	4.4.1. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur ketenagalistrikan	4.4.1.1. Meningkatkan koordinasi penyediaan energi ketenagalistrikan	a. Pengendalian penyediaan ketenagalistrikan khususnya daerah terpencil dan perdesaan b. Penetapan penerima manfaat untuk masyarakat tidak mampu	• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
---	---	--	---	---	--

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan					
5.1. Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang merata dan	5.1.1. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi guna	5.1.1.1. Mewujudkan Penyediaan Lokasi, identifikasi potensi kawasan dan	a. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi b. Penyediaan dan penatausahaan	• Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

berkeadilan	pemerataan pembangunan	Penempatan transmigran	pendaftaran Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		TRANSMIGRASI
		5.1.1.2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	a. Penyiapan hunian Fisik, sosial dan ekonomi penduduk dan Transmigran b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	5.1.2. Meningkatkan Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	5.1.2.1. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa b. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		5.1.2.2. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan b. Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
6.1. Terpeliharanya harmonisasi	6.1.1. Meningkatnya keamanan,	6.1.1.1. Mewujudkan pemeliharaan	a. Pemeliharaan Kamtibmas dan pemberantasan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketenteraman dan 	URUSAN PEMERINTAHAN

manusia dengan manusia	ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	kamtibmas dan perlindungan masyarakat	penyakit masyarakat b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan kriminal c. Deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas	Ketertiban Umum	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	6.1.2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana	6.1.2.1. Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana • Penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Bencana 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
		6.1.2.2. Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pencegahan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
	6.1.3. Meningkatkan Pelayanan Izin Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	6.1.3.1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	<p>a. Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha</p> <p>b. Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Izin Lokasi • Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	6.1.4. Terlaksananya penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Garapan dan	6.1.4.1. Melaksanakan Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	<p>a. Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan</p> <p>b. Menyelesaikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

	Bangunan pemerintah		sengketa dan konflik Pertanahan		
		6.1.4.2. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	a. Melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Bangunan Pemerintah b. Melaksanakan Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan • Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	6.1.5. Mewujudkan Penetapan Tanah Ulayat dan Penatagunaan Tanah Kosong	6.1.5.1. Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	a. Penetapan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota b. Koordinasi Penyelesaian Tanah kosong c. Melaksanakan Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penetapan Tanah Ulayat • Program Pengelolaan Tanah Kosong 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
		6.1.5.2. Melaksanakan Penatagunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota	a. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Konsolidasi Tanah b. Memfasilitasi bantuan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penatagunaan Tanah 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
6.2. Terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk	6.2.1. Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	6.2.1.1. Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup	a. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH b. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Lingkungan Hidup 	DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan

pembangunan berkelanjutan	6.2.1.2. Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup	a. Pengawasan izin PPLH b. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 	URUSAN NON PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	6.2.1.3. Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	c. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup d. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	6.2.1.4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	a. Pencegahan pencemaran lingkungan b. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan c. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

			prasarana pengelolaan Persampahan Regional	Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengelolaan Persampahan	
		6.2.1.5. Meningkatkan pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
6.3. Terwujudnya Pengelolaan hutan dan Sungai untuk menjamin terciptanya keseimbangan ekosistem	6.3.1. Meningkatkan Pengelolaan, Pemanfaatan, Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6.3.1.1. Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata hutan wilayah KPH b. Koordinasi Pengendalian Izin Usaha Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	• Program Pengelolaan Hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
		6.3.1.2. Mengoptimalkan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	a. Mengembangkan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan c. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	• Program Pengelolaan Hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	6.3.2. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Lahan	6.3.2.1. Meningkatkan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kawasan Pelestarian Alam	a. Pengamanan Kawasan TAHURA b. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

	Basah	6.3.2.2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	• Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	6.3.3. Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	6.3.3.1. Meningkatkan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	• Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
6.4. Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	6.4.1. Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6.4.1.1. Mewujudkan Koordinasi dan Penetapan RTRW Provinsi serta Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Penetapkan RTRW dan Reencana Detail Tata Ruang Provinsi b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan daerah c. Meningkatkan koordinasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.5. Terwujudnya Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan yang Berbudaya	6.5.1. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai Budaya Lokal	6.5.1.1. Melestarikan kearifan lokal melalui partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	a. Memfasilitasi pengembangan dan pemajuan budaya daerah b. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prsarana pengembangan budaya daerah	• Program Pengembangan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	6.5.2. Terwujudnya Pengembangan	6.5.2.1. Mewujudkan Pengembangan Lembaga	a. Melestarikan kesenian tradisional dan pembinaan	• Program Pengembangan Kesenian Tradisional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

	Kesenian Daerah	adat dan Kesenian tradisional	lembaga/pranata adat b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional c. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Kesenian tradisional		KEBUDAYAAN
--	-----------------	-------------------------------	---	--	------------

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
	6.5.3. Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	6.5.3.1. Peningkatan pengelolaan cagar budaya, sejarah Lokal dan Permuseuman	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal b. Perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya c. Penyediaan sarana dan prasarana Museum	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga					
7.1. Terwujudnya Peningkatan produksi dan ketahanan pangan	7.1.1. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	7.1.1.1. Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan diversifikasi pangan b. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan penyakit ternak	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		7.1.1.2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil	a. Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

		pertanian	<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek c. Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyuluhan Pertanian 	BIDANG PERTANIAN
7.2. Terwujudnya Peningkatan produksi industri pengolahan dan IKM	7.2.1. Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan IKM	7.2.1.1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi b. Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
		7.2.1.2. Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri b. Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Izin Usaha Industri 	
		7.2.1.3. Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
7.3. Terwujudnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan pengembangan	7.3.1. Meningkatnya nilai tambah sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru	7.3.1.1. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata b. Meningkatkan promosi pariwisata dan pemasaran berbasis digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

ekonomi kreatif			c. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		7.3.1.2. Meningkatkan pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata b. Meningkatkan SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
7.4. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah	7.4.1. Meningkatnya Fasilitas/insentif Kemudahan Penanaman Modal dan Peluang Usaha	7.4.1.1. Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	a. Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		7.4.1.2. Meningkatkan Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	a. Mengintensifkan penyusunan strategi dan kegiatan promosi penanaman modal b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		7.4.1.3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	a. Melaksanakan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Penyediaan data dan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

			informasi Perizinan Penanaman Modal		
7.5. Meningkatnya distribusi dan penyediaan barang pokok dan barang penting lainnya	7.5.1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan pengendalian ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	7.5.1.1. Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	a. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik b. Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi c. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		7.5.1.2. Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	a. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	7.5.2. Meningkatnya promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	7.5.2.1. Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	a. Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri b. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
	7.5.3. Meningkatnya pengembangan	7.5.3.1. Meningkatkan promosi dagang	a. Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Ekspor 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

	Ekspor, Perlindungan Konsumen dan standarisasi mutu	produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	pelaku usaha ekspor b. Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk	• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	PERDAGANGAN
7.6. Meningkatkan penanganan Kerawanan dan Kemandirian pangan daerah	7.6.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	7.6.1.1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	a. Penyediaan Lumbun Pangan dan Lantai Jemur b. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Pendukung Kamndirian Pangan lainnya	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
		7.6.1.2. Meningkatkan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitasi Harga Pangan	a. Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	7.6.2. Meningkatkan Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan	7.6.2.1. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	a. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan b. Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan c. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	• Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik *bidang pendidikan dan kesehatan* berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital

8.1. Terwujudnya	8.1.1. Meningkatnya	8.1.1.1. Meningkatkan	a. Meningkatkan apresiasi	• Program Pengembangan	URUSAN
------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	--------

Pembinaan dan Perlindungan Bahasa	apresiasi terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Perlindungan bahasa yang penuturannya lintas kabupaten/kota	terhadap bahasa dan sastra daerah b. Melaksanakan penyusunan Kamus Bahasa Daerah c. Menyediakan buku cerita Rakyat daerah penunjang literasi	Bahasa dan Sastra	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
8.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	8.2.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetaraan dan penyandang disabilitas	8.2.1.1. Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan	a. Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan b. Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan c. Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas d. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	• Program Pengelolaan Pendidikan (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
8.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dan	8.3.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan	8.3.1.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB)	a. Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana b. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKP)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

perizinan Obat			penyandang disabilitas	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi)	
	8.3.2. Meningkatnya pelayanan perizinan Farmasi dan Obat Tradisional	8.3.2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan Izin UKOT dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	a. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Berbasis Elektronik b. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF	• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
8.4. Meningkatnya peran Perpustakaan guna menunjang peningkatan kualitas SDM	8.4.1. Terwujudnya standar nasional pembinaan Perpustakaan dan Pelestaria Naskah Kuno	8.4.1.1. Meningkatkan pembinaan perpustakaan pada semua satuan pendidikan menengah dan khusus	a. Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca b. Mengebangkan literasi berbasis inklusi sosial	• Program Pembinaan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
		8.4.1.2. Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	a. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, dan Pelestarian Naskah Kuno	• Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah					
9.1. Terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB)	9.1.1. Terwujudnya percepatan desentralisasi pelayanan publik	9.1.1.1. Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerjasama daerah	a. Melaksanakan Fasilitasi penataan wilayah b. Melaksanakan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan daerah	• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

			c. Melaksanakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha		
9.2. Terwujudnya Penegasan dan pengamanan Batas Wilayah	9.2.1. Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan dalam rangka Penegasan dan Pengamanan Batas Wilayah	9.2.1.1. Mewujudkan Fasilitasi Kerjasama dan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	<p>a. Melaksanakan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan</p> <p>b. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</p> <p>c. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara</p> <p>d. Inventarisasi potensi Sumber Daya guna penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosbud dan Lingkungan Hidup</p>	• Program Pengelolaan Perbatasan	PENGELOLAAN PERBATASAN
9.3. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	9.3.1. Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan	9.3.1.1. Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah	<p>a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</p> <p>b. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial</p>	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

			<p>dan Kependudukan</p> <p>c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <p>d. Memfasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p>		
9.4. Meningkatnya Koordinasi perencanaan pembangunan	9.4.1. Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.4.1.1. Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah	<p>a. Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah</p> <p>b. Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar daerah</p> <p>c. Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 	<p>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN</p>

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022 yaitu:

1. PDRB ADHK 2010 sebesar Rp. 144.735.441,-;
2. PDRB ADHB, sebesar Rp. 209.922.625,-;
3. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 sebesar 5,88 persen;
4. Laju Inflasi Kota Palu, pada angka 1,52 persen;
5. PDRB per kapita ADHB sebesar 67,126 ribu rupiah;
6. PDRB per kapita ADHK 2010 sebesar Rp. 39.658.000,-;
7. Indeks Gini sebesar 0,24 poin;
8. Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 359.964 Jiwa;
9. Persentase Penduduk Miskin menurun sebesar 9,9 persen;
10. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,7 poin;
11. Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) 10,35 Tahun
12. Angka Harapan Lama Sekolah 13,98 Tahun
13. Angka Usia Harapan Hidup, 72,01 Tahun
14. Pengeluaran perkapita disesuaikan, 9.852 ribu rupiah
15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 72,28 Persen
16. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,07 Persen

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diarahkan pada sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui Reformasi sistem pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan Pendidikan secara merata .
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer, peningkatan sarana produksi, peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, koperasi dan UMKM, peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber permodalan usaha, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat pengangguran.
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur daerah untuk membuka keterisolasian wilayah dan konektivitas ekonomi, peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung distribusi, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder.
4. Penguatan kelembagaan pemerintahan pada semua tingkatan untuk mendukung pelayanan publik melalui peningkatan koordinasi dan

sinkronisasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, digitalisasi pelayanan publik.

5.2. Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dalam RKPD Tahun 2022, ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Target pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, baik masyarakat maupun dunia usaha. Kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah selain diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), juga diukur dengan pencapaian Indikator Kinerja Makro. Target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang terdiri atas IPM, persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Guna mewujudkan sinergitas perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka ditetapkan arahan target indikator kinerja makro Tahun 2022 setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tabel 5.1 menyajikan proyeksi target indikator makro kabupaten/kota yang mendukung pencapaian target Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022.

Tabel 5.1
Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2022				
		PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 (%)	KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANG- GURAN TERBUKA (%)	INDEKS GINI (POIN)	IPM (POIN)
1	Banggai Kepulauan	2,73	11,39	2,33	0,34	66,73
2	Banggai	3,96	6,00	2,30	0,31	71,93
3	Morowali	39,17	10,90	4,86	0,30	73,65
4	Poso	3,55	12,54	2,26	0,30	72,70
5	Donggala	1,76	14,11	2,43	0,33	66,87
6	Tolitoli	2,89	10,43	3,47	0,36	67,00
7	Buol	1,53	11,30	3,99	0,34	69,18
8	Parigi Moutong	1,22	12,86	2,56	0,30	66,75
9	Tojo Una-Una	2,44	12,30	2,66	0,30	65,88
10	Sigi	2,86	10,10	3,11	0,30	69,48
11	Banggai Laut	2,48	11,84	2,89	0,30	66,74
12	Morowali Utara	6,80	11,44	4,84	0,30	69,73
13	Kota Palu	2,85	5,51	7,28	0,32	83,10

Kebijakan pembangunan kabupaten/kota merupakan arahan atau fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2022.

Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi, serta capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan antar daerah yang bersumber dari berbagai aspek, antara lain yaitu: (a) faktor perbedaan kepemilikan sumber daya pembangunan, (b) kapasitas fiskal daerah, (c) sumber daya manusia dan daya saing, serta (d) capaian kinerja pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan provinsi Tahun 2022, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar daerah, baik pada aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi dan aspek ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, arah

kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut.

a. Prioritas 1: Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing melalui pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah; (b) Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah; (c) Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi mata pelajaran/bidang studi; (d) Beasiswa bagi siswa yang berprestasi tetapi kurang mampu dan melanjutkan pendidikan bagi anak putus sekolah, dan (e) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha, juga untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian indeks pendidikan/pengetahuannya masih di bawah rata-rata indeks pendidikan/ pengetahuan Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Prioritas 2: Desentralisasi Layanan Kesehatan secara merata

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing, terutama bagi masyarakat kurang mampu; (b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (c) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan sampai pada pelayanan tingkat pertama (Puskesmas); (d) Meningkatkan status gizi masyarakat guna menurunkan angka stunting dan menekan angka kematian ibu dan bayi, (e) Mendorong kemandirian masyarakat yang mampu dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan prioritas ini dimaksudkan disamping untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, juga untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian indeks kesehatannya masih rendah. Keberpihakan program diarahkan kepada kabupaten/kota yang memiliki AHH di bawah rata-rata AHH provinsi.

c. Prioritas 3: Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin dan terdampak bencana; (b) Meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat miskin; (c) Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; (d) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin; (e) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar; dan (f) Mengembangkan inkubator bisnis melalui kemitraan. Langkah konkrit yang harus dilakukan, yaitu melalui pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

d. Prioritas 4: Digitalisasi pelayanan publik dan Tata kelola Pemerintahan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk kabupaten/ kota difokuskan pada upaya: (a) Memperkuat kelembagaan, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan informasi (digitalisasi pelayanan publik) dan peningkatan kompetensi aparatur; (b) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi antar tingkat pemerintahan; (c) Mendukung pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB guna optimalisasi pelayanan publik. Secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

e. Prioritas 5: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis Sektor Unggulan

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia; (b) Memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan dan UMKM dalam pengelolaan sektor unggulan daerah, (c) Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; (d) Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial; dan (e). Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota yang memiliki capaian indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan relatif masih rendah. Selain itu, arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kinerja perekonomian

kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Upaya konkrit dalam mewujudkan peningkatan daya beli dan ekonomi adalah kabupaten/kota setempat memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal untuk pengembangan pusat perekonomian baru, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, serta menjamin ketahanan pangan melalui kontinuitas distribusi dan ketersediaannya.

f. Prioritas 6: Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif; dan (b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sektor Pariwisata, (c) Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital, dan (d) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Pariwisata.

g. Prioritas 7: Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok; (b) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial; (c) Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau antar moda; (d) Mengembangkan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan Angkutan Penyeberangan (ferry) yang memperhatikan aspek keselamatan dan menghubungkan wilayah strategis; (e) Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara; (f) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang; (g) Meningkatkan upaya pengelolaan limbah domestik, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan (i) Meningkatkan pola hidup sehat dalam menciptakan kelastarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Tahun 2022, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Sebagai bentuk upaya dalam mengoptimalkan pengembangan wilayah di 13 kabupaten/kota, maka ditetapkan beberapa arah pengembangan wilayah untuk masing-masing kabupaten/kota tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kabupaten Banggai

- 1) Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi serta sektor perdagangan

- 2) Mengoptimalkan Pengembangan potensi pariwisata daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
- 3) Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- 4) Meningkatkan Ketahanan Pangan daerah melalui Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Implementasi Kartu Petani dan Kartu Nelayan Sejahtera secara optimal;
- 5) Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran akibat dampak Covid 19;
- 6) Pemerataan Akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- 7) Pemulihan dampak Pandemi Covid 19, melalui penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net* serta persiapan daerah menghadapi era New Normal;
- 8) Meningkatkan Aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui;
- 9) Meningkatkan Akses dan kualitas layanan perumahan, air minum dan sanitasi layak;
- 10) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 11) Penataan Ruang, Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

2. Kabupaten Banggai Laut

- Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan kawasan perikanan
- Meningkatkan penyediaan saran dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
- Meningkatkan kapasitas SDM pelaku perikanan tangkap
- Meningkatkan kerusakan ekosistem dan ekologi akibat *illegal fishing*
- Meningkatkan penyediaan data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang kepariwisataan
- Mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwisata
- Meningkatkan pembangunan Sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai
- Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengembangan jejaring usaha pertanian

- Meningkatkan peran kelembagaan petani serta kelembagaan usaha
- Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan
- Mengoptimalkan tata niaga pertanian
- Meningkatkan Mutu hasil perkebunan melalui perbaikan penanganan pasca panen
- Meningkatkan peran koperasi melalui pendampingan, penguatan kelembagaan koperasi dan akses permodalan
- Meningkatkan ketersediaan Sarana dan prasarana perdagangan
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana insentif investasi
- Peningkatan Akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SMA/SMK
- Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah SMA/SMK
- Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
- Menurunkan kasus gizi buruk dan gizi kurang
- Menurunkan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
- Menurunkan Angka/kasus stunting
- Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku pola hidup sehat dan menjaga
- Masih rentannya konflik sosial dan kerelawanan sosial dimasyarakat
- Mengoptimalkan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, serta perlingungan jaminan sosial
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kemandirian perempuan
- Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- Masih terbatasnya lapangan kerja yang tercipta
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki
- Belum optimalnya revitalisasi dan pengembangan budaya dan situs bersejarah
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan
- Meningkatkan kuantitas moda transportasi yang menghubungkan antar pulau

- Mengoptimalkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana
- Meningkatkan pemerataan akses dalam bidang komunikasi dan informatika
- Mengoptimalkan suplai energi dari jaringan listrik PLN pada desa/dusun di daerah pedesaan, terpencil dan terluar
- Meningkatkan kualitas permukiman untuk mengatasi tumbuhnya daerah kumuh di perkotaan
- Menyediakan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Banggai Laut

3. Kabupaten Banggai Kepulauan

- Optimalisasi penataan kelompok usaha disektor perikanan, pertanian untuk penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumberdaya baik sebagai sumber mata pencaharian
- Mengembangkan UMKM dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan.
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Menurunkan angka kemiskinan terutama masyarakat kelompok petani dan nelayan
- Meningkatkan pemerataan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
- Reformasi Birokrasi dan penerimaan kopentensi guru yang disesuaikan kebutuhan dan kualitas guru
- Meningkatkan Penyediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat dan tenaga kesehatan yang memadai guna kebutuhan masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan
- Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata di daerah secara maksimal
- Belum meratanya disrtribusi pemerataan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
- Akselerasi Reformasi birokrasi yang tercermin pada pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan pencatatan sipil.

- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan; sinkronisasi antara kebutuhan dan kualitas guru dalam penguasaan teknologi digital
- Meningkatkan kualitas Sarana, prasarana dan pemeratan aksesibilitas pelayanan kesehatan
- Mengoptimalkan pengelolaan serta penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
- Menurunkan angka stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan
- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan akses masyarakat pedesaan terhadap air bersih yang layak
- Mengoptimalkan Pelabuhan Salakan
- Meningkatkan kualitas dan kemandirian jalan provinsi di Kabupaten Banggai Kepulauan
- Mengoptimalkan pencapaian target fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat
- Mengoptimalkan Penanganan Mitigasi Bencana

4. Kabupaten Morowali Utara

- Rendahnya daya saing daerah dan kualitas SDM
- Masih adanya wilayah kerawanan pangan
- Meningkatkan nilai dan realisasi investasi
- Pengentasan kemiskinan daerah
- Masih Tingginya angka Kemiskinan (15,08%) di atas angka rata-rata provinsi dan nasional
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal
- Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Mengoptimalkan pencegahan dan penanganan Pandemi covid 19
- Meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur
- Meningkatkan pembangunan antarwilayah dan penataan ruang untuk pemerataan
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan
- Meningkatkan pengelolaan daerah Rawan Bencana
- Meningkatkan akses komunikasi dan informasi

5. Kabupaten Morowali

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector industry tambang);
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi;
- Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi dan banjir.

6. Kabupaten Tojo Una-Una

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pariwisata dan perikanan kelautan);
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (, Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Bandara, Pelabuhan);
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Pengembangan kegiatan ekonomi sector pertanian dan perikanan kelautan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi dan banjir.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

7. Kabupaten Toli Toli

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;

- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;

8. Kabupaten Buol

- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

9. Parigi Moutong

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

10. Kabupaten Poso

- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana.

11. Kabupaten Sigi

- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi dan banjir.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

12. Kabupaten Donggala

- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;

- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi.

13. Kota Palu

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui sector unggulan (sector perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan social);
- Pengembangan kegiatan ekonomi sector potensial;
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat distribusi (terminal, pelabuhan, bandara);
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zna rawan bencana gempa bumi dan banjir;
- Peningkatan kerjasama antar daerah (KAD) dalam pengembangan Kawasan yang mampu mendorong sector unggulan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Pemenuhan akses terhadap penanganan persampahan wilayah perkotaan.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyusunan dan pelaksanaan RKPD sebagai dokumen perencanaan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah yakni RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2022 juga akan menjadi arahan dan pedoman dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan tahunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk merealisasikan setiap program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu, RKPD Tahun 2022 dijadikan landasan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Mekanisme penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up* yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjangkau kebutuhan dan permasalahan daerah dari pemangku kepentingan dan masukan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan prioritas per sektor/bidang. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terurai dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai amanat regulasi tersebut, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui <http://sipd.kemendagri.go.id>.

Selanjutnya, Nilai dan Persentase pagu prioritas Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Pagu Prioritas Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PRIORITAS BELANAJA DAERAH TAHUN 2022 (RP)	PERSENTAS E TERHADAP TOTAL PAGU (%)
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.559.026.049.234	32,28
2	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	243.539.667.065	5,04
3	RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	127.161.684.476	2,63
4	RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah	101.297.046.500	2,10
5	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	413.752.616.585	8,57
6	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	246.364.859.086	5,10
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	89.201.916.007	1,85
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	18.402.287.860	0,38
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	18.633.862.187	0,39
10	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	40.187.296.506	0,83
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	45.454.560.621	0,94
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	35.279.273.999	0,73
13	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	51.256.622.729	1,06
14	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	14.058.497.658	0,29
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	10.578.227.921	0,22
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	19.625.640.938	0,41
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	10.566.209.641	0,22
18	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	27.702.972.918	0,57
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	28.499.028.782	0,59
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	22.119.832.258	0,46

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PRIORITAS BELANAJA DAERAH TAHUN 2022 (RP)	PERSENTAS E TERHADAP TOTAL PAGU (%)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	13.268.289.437	0,27
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	25.443.920.552	0,53
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	17.679.562.188	0,37
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	90.201.852.279	1,87
25	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	21.608.136.365	0,45
26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	163.309.799.987	3,38
27	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	122.890.123.652	2,54
28	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	99.471.059.482	2,06
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	27.178.481.775	0,56
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	23.434.454.107	0,49
IV	UNSUR PENDUKUNG		
31	Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	163.598.313.364	3,39
32	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	95.366.710.905	1,97
V	UNSUR PENUNJANG		
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	33.038.296.328	0,68
34	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	77.646.823.716	1,61
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	632.184.645.064	13,09
36	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	17.771.541.698	0,37
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	25.009.919.367	0,52
38	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	15.134.032.002	0,31
39	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	12.597.799.716	0,26
VI	UNSUR PENGAWAS		
40	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	18.509.074.855	0,38

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PRIORITAS BELANAJA DAERAH TAHUN 2022 (RP)	PERSENTAS E TERHADAP TOTAL PAGU (%)
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	11.364.805.079	0,24
	JUMLAH	4.829.415.794.890	100,00

Sumber: Aplikasi SIPD (<http://sipd.kemendagri.go.id>)

Mengenai rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.1 dapat dilihat pada Buku II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Gambaran tentang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022 terutama yang menyangkut urusan wajib pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan pada Tabel 7.1. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek pelayanan umum; dan (3) aspek daya saing daerah.

Tabel 7.1 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
I.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB (HK 2010)	4,86	5,88	
1.1.1.2	Laju Inflasi	1,81	1,52	
1.1.1.3	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	63,78	67,13	
	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	43,32	66,09	
1.1.1.4	Total PDRB (HB Rp juta)	197.440.782,71	144.735.440,82	
	Total PDRB (HK Rp juta)	134.152.000,00	209.922.625,20	
	Total penduduk (jiwa)	3.096.976	3.176.143	
1.1.1.5	Indeks Gini	0,33	0,24	
1.1.1.6	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia	20,95	20,95	
1.1.1.7	Indeks Ketimpangan Williamson	0,54	0,54	
1.1.1.8	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	86,96	90,08	
	Persentase penduduk kemiskinan	13,04	9,92	
	Jumlah penduduk miskin (jiwa, september)	403.740,00	359.963,60	
1.1.1.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,58	2,32	
1.1.1.10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari			
1.1.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,55	69,74	
1.2.	Kesejahteraan Sosial			
1.2.1	Pendidikan			
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	98,24	98,70	
1.2.1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,09	10,35	
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103,95	104,90	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MT	91,98	92,30	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	88,42	86,43	
1.2.1.4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	29,01	29,05	
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	15,31	15,51	
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA	20,94	21,04	
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI	92,75	92,59	
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	72,25	71,76	
	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	63,80	63,70	
1.2.2	Kesehatan			
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	91,5	92,6	
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	68,7	72,0	
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk	0,6	0,4	
1.2.2.4	Prevalensi balita gizi kurang	11,3	9,3	
1.2.2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	99,2	99,3	
1.2.3	Sumberdaya			
1.2.3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	67,32	69,32	
1.2.3.2	Angka partisipasi angkatan kerja	69,75	69,36	
1.2.3.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,44	72,28	
1.2.3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,77	3,07	
1.2.3.5	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,23	96,93	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
1.2.3.6	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jum Tenaga kerja, ADHB)	9.372,6	10.055,3	
1.2.3.7	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	67,79	67,58	
1.2.3.8	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	28,44	29,46	
1.2.3.9	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	48,99	42,99	
1.2.3.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,00	97,50	
1.2.3.11	Persentase PAD terhadap pendapatan	26,78	33,27	
1.2.3.12	Opini BPK	WTP	WTP	
1.2.3.13	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,4	90,82	
1.2.3.14	Penguatan cadangan pangan	225,57	226,57	
1.2.3.15	Penanganan daerah rawan pangan (%)	68,03	57,404	
1.2.3.16	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,33	1,19	
1.2.3.17	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	16,43	17,79	
1.2.3.18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,35	0,34	
1.2.3.19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6,48	6,11	
1.2.3.20	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,18	27,90	
1.2.3.21	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	8,37	6,83	
1.2.3.22	Pertumbuhan Industri	0,04	0,03	
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
1.3.1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0,565	0,567	
1.3.2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,050	0,054	
1.3.3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	0,042	0,057	
1.3.4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,149	0,148	
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
2.1.	Layanan Urusan Pemerintah Wajib			
2.1.1.	Wajib Layanan Dasar			
2.1.1.1	Pendidikan			
2.1.1.1a	PAUD			
2.1.1.1b	Angka Partisipasi Sekolah (APAS)			
	APS SD/MI/Paket A	98,20	98,39	
	APS SMP/MTs/Paket B	92,74	93,34	
	APS SMA/SMK/MA/Paket C	74,96	75,65	
2.1.1.1c	Angka Putus Sekolah (APUS)			
	APUS SD/MI/Paket A	16,45	8,06	
	APUS SMP/MTs/Paket B	6,53	5,02	
	APUS SMA/SMK/MA/Paket C	24,29	15,95	
2.1.1.1d	Angka Kelulusan			
	AK SD/MI/Paket A	98,73	99,15	
	AK SMP/MTs/Paket B	98,05	98,69	
	AK SMA/SMK/MA/Paket C	98,90	99,26	
2.1.1.1e	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah			
	Rasio Ketersediaan SD/MI/Penduduk Usia SD/MI	5,45	5,51	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
	Rasio Ketersediaan SMP/MTs/Penduduk Usia SMP/MTs	4,44	4,46	
	Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK/Penduduk Usia SMA/MA/SMK	2,15	2,35	
2.1.1.1f	Rasio Guru/Murid			
	Rasio Guru/Murid SD/MI/Paket A	87,04	87,46	
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs/Paket B	77,71	78,35	
	Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C	77,22	77,58	
2.1.1.1g	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki	99,8	99,85	
2.1.1.1h	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	98,24	98,54	
2.1.1.2	Kesehatan			
2.1.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	8,55	7,39	
2.1.1.2.2	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6	6	
2.1.1.2.3	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	145	134,17	
2.1.1.2.4	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	10,34	10,97	
2.1.1.2.5	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,06	0,07	
2.1.1.2.6	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk	1,09	1,29	
2.1.1.2.7	Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk	0,24	0,23	
2.1.1.2.8	Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,02	
2.1.1.2.9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,20	0,25	
2.1.1.2.10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	2,08	2,45	
2.1.1.2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	0,82	83,00	
2.1.1.2.12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0,67	76,00	
2.1.1.2.13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	
2.1.1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	
2.1.1.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	0,53	0,43	
2.1.1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak	87,64	90,30	
2.1.1.2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,01	0,008	
2.1.1.2.18	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	88,31	92	
2.1.1.2.19	Tingkat kematian karena TB	2,70	2,35	
2.1.1.2.20	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	73,46	82,00	
2.1.1.2.21	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	
2.1.1.2.22	Penderita Diare Yang Ditangani	15,97	68	
2.1.1.2.23	Cakupan kunjungan bayi	82,99	84,00	
2.1.1.2.24	Cakupan Puskesmas	118,86	126,25	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
2.1.1.2.25	Cakupan Pustu	35,50	39,09	
2.1.1.2.26	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	80,82	82,97	
2.1.1.2.27	Cakupan pelayanan nifas	78,65	81,50	
2.1.1.2.28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	38,78	42,61	
2.1.1.2.29	Cakupan Pelayanan Anak Balita	63,52	69,15	
2.1.1.2.30	Cakupan penjangkauan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	55,05	92,55	
2.1.1.2.31	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100,00	100,00	
2.1.1.2.32	Pelayanan Gawat Darurat Level I	100,00	100,00	
2.1.1.2.33	Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	
2.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.1.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,30	0,31	
	Rasio Kemantapan Jalan	0,62	0,63	
2.1.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	0,005	0,005	
2.1.1.3.4	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	22,48	23,70	
2.1.1.3.7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	74,61	74,62	
2.1.1.3.12	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	70,61	74,18	
2.1.1.3.13	Rasio Jaringan Irigasi	0,71	0,76	
2.1.1.3.14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	84,60	86,97	
2.1.1.3.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0,09	0,10	
2.1.1.3.16	Persentase Areal Kawasan kumuh	5,29	4,39	
2.1.1.3.19	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,46	2,53	
2.1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
2.1.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	0,15	0,17	
2.1.1.4.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	68,65	66,20	
2.1.1.4.3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	11,22	9,09	
2.1.1.4.4	Persentase Luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan	89,96	91,77	
2.1.1.4.5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	2,53	2,73	
2.1.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat			
2.1.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1164,77	1517,62	
2.1.1.5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Sulteng	100,00	100,00	
2.1.1.5.3	Jumlah pelanggaran PERDA	100,00	100,00	
2.1.1.6	Sosial			
2.1.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,42	0,86	
2.1.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	0,46	0,90	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
2.1.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1,69	5,28	
2.1.1.6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1,81	3,51	
2.1.1.6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	63,25	76,02	
2.1.1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,00	7,14	
2.1.1.6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00	100,00	
2.1.1.6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	100,00	
2.1.1.7	Kesatuan Bangsa Politik			
2.1.1.7.1	Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	76,67	80,67	
2.1.2.	Urusan Wajib Non Layanan Dasar			
2.1.2.1	Tenaga Kerja			
2.1.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	288	170	
2.1.2.1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	64,93	62	
2.1.2.1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13,87	18,20	
2.1.2.1.4	Keselamatan dan perlindungan	85,54	79,00	
2.1.2.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	75,00	79,00	
2.1.2.1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	89,00	81,00	
2.1.2.1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	72,00	59,88	
2.1.2.1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	75,00	81,00	
2.1.2.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00	100,00	
2.1.2.1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100,00	100,00	
2.1.2.1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100,00	100,00	
2.1.2.1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	86,12	89,75	
2.1.2.1.13	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek	72,00	78,00	
2.1.2.1.14	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja	89,00	91,00	
2.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	56,06	56,37	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
2.1.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	26,67	31,11	
2.1.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	84,87	91,52	
2.1.2.2.4	Rasio KDRT(KDRT/jumlah Rumahtangga)	0,03	0,02	
2.1.2.2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	32,33	28,33	
2.1.2.2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	96,47	97,12	
2.1.2.2.7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	87,34	87,48	
2.1.2.2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,48	94,96	
2.1.2.2.9	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	103,67	97,56	
2.1.2.2.10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	108,17	114,45	
2.1.2.3	Pangan			
2.1.2.3.1	Ketersediaan pangan utama (padi) (%)	14,81	15,11	
2.1.2.3.2	Ketersediaan pangan utama (jagung) (%)	0,12	0,16	
2.1.2.3.3	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):	6278,33	6150,11	
2.1.2.3.4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	103,44	100,37	
2.1.2.3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,80	0,84	
2.1.2.4	Pertanahan			
2.1.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	8,45	10,22	
2.1.2.5	Lingkungan Hidup			
2.1.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada/Perda RPPLH	Ada	
2.1.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada	Ada	
2.1.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi	Ada	Ada	
2.1.2.5.4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	2	5	
2.1.2.5.5	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	2	5	
2.1.2.5.6	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	2	5	
2.1.2.5.7	Penetapan hak MHA	2	5	
2.1.2.5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	
2.1.2.6	Penduduk dan Cakil			
2.1.2.6.1	Rasio bayi berakte kelahiran	0,8002	0,8402	
2.1.2.6.2	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	
2.1.2.6.3	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	
2.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2.1.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	98,61	99,11	
2.1.2.7.2	Persentase PKK aktif	94,16	96,04	
2.1.2.7.3	Posyandu aktif	100,00	100,00	
2.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.1.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,22	1,26	
2.1.2.8.2	Rasio akseptor KB	0,78	0,78	
2.1.2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,11	78,09	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
2.1.2.9	Perhubungan			
2.1.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut)	79.013	89.013	
2.1.2.9.2	Rasio Ijin Trayek	0,000005	0,000008	
2.1.2.9.3	Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis	35,00	35,00	
2.1.2.9.4	Persentase layanan angkutan darat	9,83	8,66	
2.1.2.9.5	Rasio panjang jalan per jumlah kendarann	0,01	0,01	
2.1.2.9.6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	87.309	94.207	
2.1.2.10	Komunikasi dan Informatika			
2.1.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0,57	1,14	
2.1.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jml Tower)	0,94	0,96	
2.1.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	60,23	65,23	
2.1.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase)	0,25	0,47	
2.1.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,35	0,55	
2.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
2.1.2.11.1	Persentase Koperasi aktif	69,87	69,83	
2.1.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	50	54	
2.1.2.11.3	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM)	60	64	
2.1.2.12	Penanaman Modal			
2.1.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	6	
2.1.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (ribu)	30,88	32,28	
2.1.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dn PMDN)	10000	13000	
2.1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga			
2.1.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)	50	54	
2.1.2.13.2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	5	15	
2.1.2.13.3	Jumlah atlet berprestasi	10	20	
2.1.2.13.4	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	16	20	
2.1.2.14	Statistik			
2.1.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	
2.1.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	
2.1.2.14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	
2.1.2.15	Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi			
2.1.2.16	Kebudayaan			
2.15.1	Penyelenggara festival seni dan budaya	16	18	
2.15.2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50	67,5	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
2.15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	4	
2.1.2.17 Perpustakaan				
2.1.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5965	10377	
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34771	52492,8	
2.1.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,15	0,18	
2.1.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	497	865	
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2346	2654	
2.1.2.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat	28	29	
2.1.2.18 Kearsipan				
2.1.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku)	1	1	
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	8	8	
2.2. Urusan Pemerintahan Pilihan				
2.2.1 Pariwisata				
2.2.1.1	Capaian Kunjungan Wisata	47,77	80,88	
2.2.1.2	Rata-rata Lama kunjungan Wisata	1,5	3,5	
	Lama kunjungan Wisata (Wisman)	1	1	
	Lama kunjungan Wisata (Wisnus)	2	6	
2.2.1.3	Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata	1	3	
2.2.1.4	Jumlah kegiatan promosi pariwisata	2	4	
2.2.1.5	Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	9	
2.2.1.6	Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata	2	4	
2.2.1.7	Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan	5	9	
2.2.1.8	Jumlah potensi baru pariwisata	0	2	
2.2.3 Pertanian				
2.2.3.1	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB)	32,02	22,39	
	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK)	22,06	20,84	
2.2.3.2	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)	3,03	2,74	
2.2.3.3	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku)	2,03	4,13	
2.2.3.4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ ha)			
	Padi	4,49	4,51	
	Jagung	4,23	4,31	
	Kedelai	1,50	1,05	
	Kacang Tanah	0,71	0,93	
	Kacang Hijau	0,66	0,49	
	Ubi Kayu	26,51	29,28	
	Ubi Jalar	15,74	18,75	
	Tomat	16,86	14,15	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
	Cabe rawit	6,12	6,24	
	Bawang merah	5,32	5,05	
	Durian	1,74	1,95	
2.2.4.	Perkebunan, Peternakan dan Keswan			
2.2.4.1	Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)	8,75	7,69	
2.2.4.2	Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)	1,67	1,60	
2.2.4.3	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (to/Ha)			
	Kelapa Dalam	1,23	1,24	
	Cengkeh	0,37	0,38	
	Kopi	0,59	0,59	
	Kakao	0,69	0,69	
	Pala	0,20	0,20	
	Lada	0,19	0,19	
	Kelapa Sawit	4,36	4,44	
	Nilam	0,07	0,07	
2.2.4.4	Populasi Ternak Sapi (Ekor)	391.418	427.714	
	Populasi ternak kambing (ekor)	558.500	671.398	
	Populasi Ternak Ayam Buras (ekor)	267.447	6.639.866	
	Populasi Ternak Ayam Ras Petelur (Ekor)	4.952.371	1.208.782	
	Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging (Ekor)	863.614	10.667.957	
	Populasi Ternak Itik (Ekor)	9.762.692	1.778.817	
2.2.4.5	Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan	47,89	8,23	
2.2.4.6	Cakupan Bina Kelompok Peternak	32,97	7,44	
2.2.5.	Kehutanan			
2.2.5.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,081	0,184	
2.2.5.2	Kerusakan Kawasan Hutan	0,058	0,007	
2.2.5.3	Rasio kawasn lindung	0,297	0,298	
2.2.6.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
2.2.6.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	0,85	0,88	
2.2.6.2	Rasio ketersediaan daya listrik	0,15	0,15	
2.2.7.	Perdagangan			
30.1.	Ekspor Bersih Perdagangan (milyar)	4623,43	6190,132	
2.2.8.	Perindustrian			
2.2.8.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	24,91	30,69	
2.2.9.	Transmigrasi			
2.2.9.1	Persentase transmigrasi swakarsa	0,00	8,63	
2.2.9.2	Persentase trasmigran dalam binaan yang berhasil	35,00	25,89	
2.2.9.3	Jumlah KK transmigran yang di bina	1000	1738	
2.2.10.	Perikanan			
2.2.10.1	Produksi Perikanan (ton)	792.971,67	1.491.003,02	
	Persentase produksi		85,00	
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	588.746,45	1.238.813,65	
	- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	201.101,80	252.189,37	
	- Produksi Perikanan yang diolah (Ton)	3.123,42	3.185,89	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
2.2.10.1	Konsumsi Ikan (Kg / Kap /Thn)	57,54	55,39	
2.2.10.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku)	4,55	4,68	
2.2.10.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	48,78	59,89	
2.2.10.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	0,31	0,26	
2.2.10.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	9,8	< 50%	
2.2.10.6	Nilai Tukar Nelayan	98,11	108,98	
	Nilai Tukar Pembudidaya	100,01	100,00	
2.2.10.7	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku	85,71	70	
2.2.10.8	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,18	0,19	
2.3. Urusan Penunjang				
2.3.1. Perencanaan Pembangunan				
2.3.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			
2.3.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			
2.3.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			
2.3.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA			
2.3.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			
2.3.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			
2.3.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			
2.3.2. Keuangan				
2.3.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	
2.3.2.2	Nilai SILPA (Rp milyar)	536,90	598,67	
2.3.2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	11,63	12,19	
2.3.3. Kepegawaian dan Diklat				
2.3.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			
2.3.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			
2.3.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			
2.3.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah			
2.3.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah			
2.3.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	na	na	
2.3.4. Penelitian dan pengembangan				
	Persentase implementasi rencana kelitbangan.			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.			
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.			
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.			
2.3.4.	Pengawasan			
	Persentase tindak lanjut temuan			
	Persentase pelanggaran pegawai			
	Jumlah temuan BPK			
2.3.6.	Sekwan			
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi			
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			
	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			
2.4. ASPEK DAYA SAING				
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
2.4.1.1.	Total pengeluaran rumah tangga	1.552.616	1.121.395	
2.4.1.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	100,32	48,02	
	Total Pengeluaran RT Non Pangan	1.035.777	538.452	
2.4.1.3.	Produktivitas Total Daerah			
2.4.1.4.	Nilai Tukar Petani (NTP)	97,58	101,58	
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
2.4.2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,01	0,01	
2.4.2.2	Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)	79.013	89.013	
2.4.2.3	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	87.309	94.207	
2.4.2.9	Jenis dan jumlah bank dan cabang	815	900	
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi				
2.4.3.1	Angka kriminalitas	7.208	5.863	
2.4.3.3	Lama proses perijinan		1 - 30 hari	
2.4.3.7	Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indikator keterbukan ekonomi)	0,99	1,04	
2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia				
2.4.4.1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	86,12	89,75	
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan	51,02	50,54	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menjadi pedoman didalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2022 sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
3. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2022.
4. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dalam bentuk program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk lebih maju dan disiplin dari semua pihak.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA



BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Dr Moh Yamin no. 7
Telp 0451 - 421884, Fax 0451 - 451560
Kota Palu, Sulawesi Tengah